

**DISERTASI**

**ADAPTASI PETANI KECIL DAN PEREMPUAN TERHADAP  
KETERPINGGIRAN KARENA MODERNISASI PERTANIAN**

**(Studi Perubahan Sosial pada Komunitas Petani Padi Sawah Desa  
Sereang dan Desa Passeno di Kabupaten Sidrap Sulawesi  
Selatan)**

***FARMERS AND WOMEN ADAPTATION TO MARGINALISATION,  
DUE TO AGRICULTURE MODERNISATION***

***(A Study on Social Change at Rice Field Farmer Community in  
Sereang and Passeno Village Sidrap Regency, South Sulawesi)***



**RATNAWATI TAHIR**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**ADAPTASI PETANI KECIL DAN PEREMPUAN TERHADAP KETERPINGGIRAN  
KARENA MODERNISASI PERTANIAN**

**(Studi Perubahan Sosial pada Komunitas Petani Padi Sawah Desa Sereang  
dan Desa Passeno di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan)**

***FARMERS AND WOMEN ADAPTATION TO MARGINALISATION  
DUE TO AGRICULTURE MODERNISATION***

***(A Study on Social Change at Rice Field Farmer Community in Sereang and  
Passeno Village Sidrap Regency, South Sulawesi)***

Desertasi

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi  
Ilmu Pertanian**

Disusun dan diajukan oleh :

**RATNAWATI TAHIR**

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS/DESSERTASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratnawati Tahir  
Nomor Mahasiswa : P0100303015  
Program Studi : Ilmu Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis/desertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/desertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Agustus 2008  
Yang menyatakan

**Ratnawati Tahir**

## ABSTRAK

RATNAWATI TAHIR. Adaptasi Petani Kecil dan Perempuan Terhadap Keterpinggiran Karena Modernisasi Pertanian: Studi Perubahan Sosial pada Komunitas Petani Padi Sawah Desa Sereang dan Desa Passeno di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Arifin Sallatang, Darmawan Salman dan Didi Rukmana ).

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi, dan perubahan struktur sosial yang berlangsung selama revolusi hijau dalam meminggirkan petani kecil dan perempuan; menginterpretasi pemaknaan petani kecil dan perempuan terhadap proses revolusi hijau dan efek peminggirannya; dan menjelaskan bentuk dan proses adaptasi yang dilakukan petani kecil dan perempuan dalam menghadapi peminggiran oleh revolusi hijau.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei, wawancara, dan kuesioner. Data dianalisis dengan analisis *time series*, eksploratif, dan model tipe ideal Weber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan teknis yang berlangsung selama revolusi hijau telah meminggirkan petani kecil dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh pemakaian Input pertanian modern dan penggunaan mesin *Dross* pada perontokan padi sehingga mengurangi tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Proses perubahan sistem ekonomi meminggirkan petani kecil dan perempuan karena orientasi produksi dari subsisten menjadi komersil. Pendapatan pertanian padi sawah makin kecil dan pekerjaan luar pertanian membutuhkan pendidikan dan skill. Proses perubahan struktur sosial meminggirkan petani kecil dan perempuan karena mudahnya homogenitas petani, terjadinya penajaman stratifikasi sosial dan polarisasi sosial. Revolusi hijau dimaknai oleh petani dan perempuan sebagai hal yang tidak menguntungkan karena revolusi hijau telah menggeser petani kecil dan perempuan dari perannya pada pertanian padi sawah (aspek ekonomi). Selain itu, revolusi hijau telah memudahkan dan menghilangkan nilai-nilai sosial ikatan solidaritas dan kegotongroyongan (aspek sosial). Bentuk proses adaptasi yang ditempuh petani kecil dalam menghadapi keterpinggiran adalah strategi survival melalui bekerja sebagai pa' dross, pedagang, tukang (kayu/batu), tukang ojek, TKI, dan penambang emas. Adapun strategi adaptasi yang ditempuh perempuan adalah strategi survival melalui bekerja sebagai pa' dross, membuka warung didepan rumahnya, dan kembali pada domestik rumahtangga.

## ABSTRACT

**RATNAWATI TAHIR.** Farmers and Women Adaptation to Marginalisation due to Agriculture Modernisation ( Supervised by **Arifin Sallatang, Darmawan Salman** and **Didi Rukmana**)

The study aims to analyse the process of technical change, economic system and social structure change that occur during 'green revolution' which marginalises women and farmers; the women's and farmers' perception on the green revolution process and its marginalising effects, and the form and process of adaptation performed by the farmers and women to face the marginalisation.

The study is a qualitative and quantitative research, involving survey and case study, supported with secondary data. It focuses on the household cases in the village. The data were taken through interviews and questionnaire distributions and examined with time series, explorative, and Weber ideal type model analyses.

The study reveals that the technical changes that progresses during the green revolution has marginalises both farmers and women. This is due to the use of modern agriculture input and the utilisation of harvesting machine whice replaces the male and female manual workers. The process of economic system changes marginalises the farmers and women due to productions orientation from subsistence to commercialisation. The farmers' income from rice becomes smaller skills and training. The process of the social structure changes marginalises the farmers and women because the and process eliminates the farmers' homogeneity and increases social stratification and polarisation. The farmers and women perceive the green revolution as a disadvantage because it has moved the farmers and women away form their role in the rice field (economic aspect). Furthermore, it has diminished the social value of solidarity and mutual collaborative ties (social aspect). The type and process of adaptation taken by the farmers in facing the marginalisation process is through a survival strategy that is to work as a pa'dross (a worker who helps harvesting using machine), free small trader, masonry or carpentry workers, motorcycle taxi, Indonesian migrant workers, and gold mine works. Meanwhile, the women works as pa'dross, run a small corner shop, and return to domestic work.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rakhmat dan Hidayahnya disertasi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada Prof.Dr.H.M.Arifin Sallatang, ketua tim promotor, yang telah mengarahkan penulis dalam wawasan teoritik dan metodologi untuk penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih yang sama penulis haturkan kepada Prof.Dr.Ir.Darmawan Salman,MS, anggota tim promotor, yang ditengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pemahaman teoritik, metodologi dan prinsip penulisan disertasi, serta analisis kualitatif. Kepada Dr.Ir.Didi Rukmana,MS, anggota tim promotor, ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan atas bimbingan dan arahan dalam pemahaman logika, metodologi dan analisis kuantitatif, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang sama penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu tim penguji atas saran perbaikan untuk penyempurnaan disertasi ini.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yakni: (1) Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan belajar dan fasilitas yang diberikan. (2) Direktur, jajaran pimpinan dan pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan, begitu pula atas layanan administratif yang disediakan; (3) Koordinator Kopertis Wilayah IX dan jajarannya atas ijin belajar dan dorongan belajar yang diberikan; (4) Rektor, Dekan Fakultas Pertanian dan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas 45 Makassar, atas izin belajar, bantuan dan dorongan yang diberikan; (5) Tim Manajemen Program Doktor Departemen Pendidikan Nasional atas beasiswa yang diberikan; (6). Bupati Kabupaten Sidrap dan jajarannya atas bantuan dan izin penelitian yang diberikan. (7) Rekan-rekan

angkatan 2003 yang solid dan memberi motivasi kepada penulis; (8) Rekan-rekan pada Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar yang telah memberi motivasi kepada penulis; (9)Rekan-rekan pada Yayasan Pelita Desa, AILO dan LEPPSEM yang telah membantu penulis dalam persiapan seminar hasil hingga ujian promosi; (10) Orang tua penulis, Ayah H.M.Tahir dan Ibu H.Damrah, yang tak henti-hentinya memotivasi dan mendo'akan penulis. (11) Saudara-saudara penulis atas bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. (12) Kepada Suami (Drs.H.Abd.Rahman) dan ananda (Agil, Fadel, Dini dan Nabil) yang dengan penuh pengertian memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan Rakhmat dan HidayahNya oleh Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2008.

Ratnawati Tahir

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengesahan.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan .....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK</b>	
A. Perubahan Teknis, Perubahan Sistem Ekonomi dan Perubahan Struktur Sosial .....	17
B. Revolusi Hijau dan Petani Kecil .....	48
C. Revolusi Hijau dan Perempuan .....	56
D. Adaptasi .....	66
E. Kerangka Pemikiran .....	75
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	86
B. Lokasi Penelitian .....	87
C. Sumber Data .....	88
D. Teknik Pengumpulan Data .....	89
E. Teknik Analisa Data .....	91
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pembentukan Wilayah .....	96
B. Asal Usul Komunitas Petani .....	103
C. Kondisi Geografis dan Administratif .....	109
D. Kondisi Demografis .....	112
E. Kondisi Sosial Ekonomi .....	115
<b>BAB. V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perubahan-Perubahan Selama Revolusi Hijau.....	126
1. Perubahan Teknis .....	132

a. Pemakaian Bibit .....	132
b. Pemupukan .....	136
c. Perbaikan Bercocok Tanam .....	142
d. Pengaturan Air Irigasi .....	145
e. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.....	152
f. Panen dan Pasca Panen.....	155
2. Perubahan Sistem Ekonomi .....	166
a. Pergeseran Orientasi Produksi Petani .....	166
b. Pekerjaan Luar Pertanian .....	176
c. Migrasi .....	182
d. Pendapatan dan Distribusi Pendapatan .....	189
3. Perubahan Struktur Sosial .....	193
a. Pergeseran Sistem Status .....	193
b. Dari Homogenitas ke Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial .....	198
c. Eksistensi Petani Kecil dan Perempuan .....	202
4. Rangkuman .....	203
B. Proses dan Makna Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.....	226
1. Proses dan Makna Keterpinggiran Petani Kecil.....	226
a. Status Kepemilikan Lahan.....	229
b. Status Pekerjaan.....	237
2. Proses dan Makna Keterpinggiran Perempuan.....	251
3. Rangkuman .....	275
C. Adaptasi Petani Kecil dan Perempuan .....	278
1. Adaptasi Petani Kecil.....	278
2. Adaptasi Perempuan .....	295
3. Rangkuman .....	306
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI</b>	
A. Kesimpulan .....	314
B. Implikasi .....	315
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>317</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Rata-rata Penggunaan Pupuk Petani Padi Sawah di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	140
2. Rata-rata Penggunaan Pupuk Petani Padi Sawah Di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	141
3. Perkembangan Irigasi Padi Sawah di Desa Sereang dan Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	151
4. Luas Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	153
5. Luas Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	154
6. Jumlah Penggilingan Padi di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	163
7. Jumlah Penggilingan Padi di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	164
8. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	181
9. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	182
10. Perkembangan Migrasi Penduduk Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	187
11. Perkembangan Migrasi Penduduk Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	189
12. Rata-rata Jumlah Pendapatan di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	190
13. Rata-rata Jumlah Pendapatan Petani di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	191
14. Rata-rata Alokasi Pendapatan Petani di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.....	192
15. Rata-rata Alokasi Pendapatan Petani di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.....	193
16. Perubahan Teknis Usahatani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau, serta Dampak Revolusi Hijau.....	210
17. Perubahan Teknis Usahatani Padi Sawah di Desa Sereang dan Desa Passeno.....	212
18. Perubahan Sistem Ekonomi di Desa Sereang dan Desa Passeno.....	216
19. Perubahan Struktur Sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno.....	219

20. Perubahan Teknis dan Keterpinggiran Petani Kecil Dan Perempuan.....	221
21. Perubahan Sistem Ekonomi dan Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.....	225
22. Perubahan Struktur Sosial dan Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.....	226
23. Perubahan Kepemilikan Lahan Petani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau di Desa Sereang.....	232
24. Perubahan Kepemilikan Lahan Petani Padi Sawah, Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau di Desa Passeno.....	233
25. Perubahan Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau di Desa Sereang.....	240
26. Perubahan Status Pekerjaan Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau di Desa Passeno.....	241
27. Bentuk, Proses, Lama dan Hasil/Dampak Adaptasi Petani Kecil.....	241
28. Bentuk, Proses, Lama dan Hasil/Dampak Adaptasi Perempuan..	240

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Kerangka Konseptualisasi Penelitian.....	84
2. Kerangka Pemikiran Teoritik .....	85

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Responden .....	324
2. Pedoman wawancara Mendalam (in-depht).....	328
3. Foto-foto Kegiatan Petani pada Usahatani padi sawah .....	330

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dua dasawarsa yang lalu, sejumlah studi telah dilakukan untuk menajaki perubahan politik ekonomi di Indonesia, khususnya mengenai pengaruh “revolusi hijau” terhadap pertanian padi sawah atau lahan basah (Hart, 1986). Revolusi hijau karena biaya administrasinya mahal, sering hanya menguntungkan para petani menengah dan besar. Sebaliknya, justru menambah kesenjangan dan bukan menguranginya. Menurut Stoler (dalam Pudjiwati 1985), demikian juga usaha untuk memaksimumkan keuntungan dari kegiatan usahatani mendorong para petani untuk memperkenalkan bentuk serikat pekerja yang lebih restriktif, yang merugikan para buruh yang tidak memiliki tanah, khususnya kaum perempuan.

Menurut White (dalam Sztompka, 2004), dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, jenis padi unggul baru dan bahan kimia sebagai hasil industri diperkenalkan secara luas, memungkinkan peningkatan hasil panen yang luar biasa. Program ini mengandalkan penyebarluasan masukan-masukan teknik yang nilai sosialnya tidak netral. Pada gilirannya, semua memudahkan penyebarluasan barang-barang konsumsi, gerakan investor memasuki bidang pertanian di pedesaan, dan

menyebarnya gaya hidup baru. Akhirnya dan barangkali yang paling mendasar, keberhasilan gagasan “revolusi hijau” karena intervensi negara.

Sebelum tahun 1965 di bawah rezim Soekarno, kebijakan pembangunan pertanian diarahkan pada perubahan-perubahan secara radikal melalui *landreform*. Setelah tahun 1965, rezim Soeharto sama sekali meniadakan perubahan-perubahan yang radikal dan kebijakan ekonomi pedesaan semata-mata ditujukan pada perubahan-perubahan teknologis dan organisatoris. Pemerintah Soeharto juga mengambil tindakan untuk sedikit demi sedikit mengurangi impor beras dengan jalan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal itu terutama dijalankan oleh pemerintah Orde Baru mengingat pentingnya politik stabilisasi pemerintah untuk tidak terlalu banyak menggunakan devisa. Selain itu, peningkatan cepat produksi beras amat membantu tindakan-tindakan melawan inflasi yang berlarut-larut yang diwariskan oleh pemerintah Orde Lama dan masih merupakan beban yang berat bagi pemerintahan Soeharto. Pada hakekatnya, tidak terdapat perbedaan yang besar antara pendekatan yang dilakukan oleh rezim Orde Lama dan Orde Baru dengan strategi-strategi yang terdahulu untuk memecahkan masalah pangan, yaitu mempropagandakan pemakaian teknologi baru.

Beberapa studi yang telah dilakukan, terutama dalam setting petani dan perubahan sosial yang terjadi diantaranya studi dari Thompson (dalam Fahmid, 2004), menjelaskan bahwa revolusi pertanian pertama kali terjadi di

Eropa dengan menjadikan pertimbangan kemanusiaan sebagai alat spekulatif untuk mengakhiri kelaparan dunia dengan jalan meningkatkan produksi pertanian.

Studi lain dari Lappe dan Collins (dalam Fahmid, 2004), mengemukakan bahwa terminologi “*bibit dan varietas unggul*” dengan hasil produksi tinggi yang menjadi simbol utama revolusi hijau, sesungguhnya misiome.

Dua studi ini telah menghasilkan teori perubahan sosial yang mampu menjelaskan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat petani pasca revolusi hijau. Namun, masih perlu dipertanyakan apakah teori-teori tersebut bisa menjelaskan tentang perubahan sosial di Indonesia, dalam konteks pedesaan pada negara-negara berkembang, dimana arus globalisasi telah masuk pada daerah pedesaan (Goddman dan Watts, 1997).

Beberapa isu penting yang menjadi temuan studi-studi tentang revolusi hijau di Indonesia menjelaskan bahwa program revolusi hijau di Indonesia secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang gemilang secara spektakuler, akan tetapi program revolusi hijau telah banyak menyengsarakan petani kecil dan membuat ketergantungan pada negara-negara maju, dan lebih parah lagi dapat merubah tatanan sosial yang sudah mapan di pedesaan. Menurut Hayami dan Ruttan (dalam Pudjiwati, 1985), konsekuensi lebih jauh, petani di pedesaan kemudian terbagi menjadi dua kutub yakni petani komersial dan buruh tani.

Penelitian perubahan sosial belum banyak dibentuk dari tanggapan masyarakat bawah (arus bawah). Sejauh ini memang ada upaya dikalangan peneliti pertanian untuk pembangunan sektor pertanian yang didominasi oleh kekuatan negara yang menggunakan teori-teori modernisasi. Jenis kajian yang bersifat mikro dengan tampilan kasus masyarakat bawah, sejauh ini belum menjadi arus berpikir utama (*main stream*).

Studi tentang komunitas petani di Sulawesi Selatan, khususnya komunitas petani padi sawah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian mengenai modernisasi pertanian pada lahan sawah, telah dilakukan oleh Landoho (2000) tentang dampak modernisasi pertanian terhadap gaya hidup petani sawah, menyimpulkan bahwa terjadi perubahan gaya hidup yang meluas di kalangan masyarakat petani yang mengarah kepada pengembangan perilaku ekonomi dalam mengkonsumsi kebutuhan sekunder; Cakunu (2002), meneliti tentang modernisasi pertanian, menyimpulkan bahwa proses modernisasi membawa dampak kemajuan dan disintegrasi norma-norma; Rauf (1998), meneliti tentang peranan elit dalam proses modernisasi, menyimpulkan bahwa peranan elit kekuasaan yang semakin menonjol dan peranan elit adat yang semakin melemah; Subaedah (2003) meneliti tentang penerapan teknologi pertanian baru, dan menemukan bahwa penerapan paket teknologi baru telah berhasil meningkatkan produksi padi sawah sebesar 6 – 7 ton per hektar dan konsekuensi dari penerapan teknologi baru menimbulkan pengangguran tak kentara. Penelitian mengenai

perubahan sosial ekonomi masyarakat petani, telah dilakukan oleh; Syamsuddin (1994), meneliti tentang pola penguasaan tanah, hubungan kerja pertanian sawah dan pengaruhnya terhadap keadaan sosial ekonomi pertanian, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian dengan tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan penggarap tanah yang lebih sempit; Mappangaja (1997), meneliti tentang pemanfaatan lahan sawah pada sentra produksi padi, dan menemukan bahwa dengan perencanaan alokasi optimal atas pemanfaatan lahan sawah, akan dicapai keragaman atas produksi komoditas pangan secara optimal; Rahman (2002), meneliti perubahan sosial ekonomi petani pedesaan, menyimpulkan bahwa kondisi kehidupan sosial ekonomi petani di pedesaan telah mengalami perubahan, yang dilihat dari indikator pendapatan dan pendidikan. Tahir (1996), meneliti tentang pengaruh penggunaan teknologi panen padi terhadap kehidupan sosial ekonomi para buruh panen, menyimpulkan bahwa akibat penggunaan teknologi panen padi menyebabkan terjadinya perubahan kelembagaan dalam sistem panen padi sawah (sistem bagi hasil, perekrutan tenaga kerja dan pembagian kerja).

Dari berbagai studi tersebut terlihat bahwa penelitian yang spesifik dan menempatkan masyarakat petani Sulawesi Selatan sebagai masyarakat sedang bertransformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern belum dilakukan. Selain itu, studi yang ada umumnya terfokus pada satu jenis penelitian, misalnya mengenai modernisasi pertanian dan

dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi petani. Studi yang mengkomparasikan modernisasi pertanian (program revolusi hijau) dan efek peminggiran petani kecil dan perempuan pasca revolusi hijau yang berujung pada terjadinya mobilitas secara vertikal dan horizontal, terutama dalam tinjauan *perspektif sosiologi* belum pernah dikaji khususnya di Sulawesi Selatan.

Studi yang bersifat *micro – sociology*, muncul juga dalam mengamati kehidupan masyarakat kecil di kota besar, seperti kota metropolitan Jakarta (Jelliniek, 1988). Studi ini dilakukan pada masyarakat kecil pada sebuah kampung di Jakarta, yang menggambarkan bagaimana sebagian kecil keluarga di kampung kumuh mampu menjangkau program pemerintah (penyediaan pemukiman baru bagi rakyat kecil, yang berujung pada terjadinya penggusuran) dan sebagian besar lainnya tidak mampu dan memilih lokasi rumah tinggal di kampung baru di pinggiran Jakarta atau kembali ke desa asal. Dalam penjelasannya, terdapat dua pola perilaku yakni: *Pertama*, “kebudayaan kemiskinan”; dan *Kedua*, menunjuk kepada “struktur sosial” dimana orang kecil mendapat ruang gerak yang serba terbatas.

Dalam kaitan ini, sebetulnya yang dibutuhkan dalam kajian mikro adalah suatu studi yang cukup komprehensif yang mengupas dampak perubahan sosial yang terjadi. Penelitian perubahan sosial membutuhkan pemikiran intensif dengan kedalaman yang relatif cukup lengkap dan penting

untuk dapat menggambarkan pola perubahan sosial dikalangan masyarakat kecil. Suatu bentuk penelitian yang mengajukan contoh konkrit tentang tanggapan masyarakat kecil, serta memberikan gambaran nyata apa yang sedang berlangsung di depan mereka, tetapi jenis studi yang demikian masih sangat jarang dilakukan.

Sekalipun telah banyak studi dilakukan terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia sebagai efek program revolusi hijau, tetapi belum bisa menjelaskan mengapa hanya petani kecil dan miskin yang tidak memiliki akses modal dengan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan telah mengalami penurunan produksi bahkan menjadi tuna tanah. Kondisi ini telah mendorong mereka keluar dari kehidupan pertanian di pedesaan dan memilih menjadi buruh industri di perkotaan. Selain petani kecil, perempuan di pedesaan pun telah terpinggirkan oleh arus modernisasi yang menjadikan perempuan semakin tidak mempunyai peran untuk bekerja di bidang pertanian dan pekerjaan di perkotaan, dan bahkan melintasi negaranya untuk mencari pekerjaan di sektor riil (seperti menjadi Tenaga Kerja Indonesia). Menurut Shiva (1997) kondisi ini terjadi, ketika pertanian telah dirubah oleh paradigma revolusi hijau dari Barat, dan pertanian yang menjadi kegiatan utamanya adalah produksi komoditas pertanian untuk laba. Perubahan dalam sifat kegiatan ini diiringi dengan perubahan pelakunya; alam, perempuan dan petani kecil tidak lagi dilihat sebagai produsen utama pangan.

Beberapa hasil studi terhadap pengalaman revolusi hijau di Eropa dan di Indonesia khususnya telah memberi gambaran tentang efek dari program revolusi hijau. Begitupun di Sulawesi Selatan, fenomena keterpinggiran petani kecil dan perempuan sebagai efek revolusi hijau yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan telah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan jumlah penduduknya yang berstatus sebagai petani, 492 orang (59,11 %) di Desa Sereang dan 497 orang (43,79 %) di Desa Passeno. 42,59 % dan 59,09 % diantaranya telah menjual dan menggadaikan sawah miliknya kepada petani kaya yang ada di wilayah tersebut, dengan rata-rata kepemilikan dibawah 0,5 hektar. Petani kecil kemudian ke luar wilayahnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Penduduk yang berstatus buruh tani dengan jumlah 81 orang (9,07 %) dan 63 orang (6,77 %), buruh laki-laki dan perempuan dengan masuknya mesin-mesin pertanian mengakibatkan mereka mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti menjadi buruh bangunan, pertukangan, buruh industri di perkotaan dan menjadi pedagang kecil-kecilan.

Menurut Hart (1986), penetrasi ekonomi kapitalis yang berasal dari kota dan program-program pembangunan di pedesaan telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat di pedesaan. Dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau masyarakat desa pada umumnya dan khususnya petani harus merespon dan menerima

tekanan-tekanan yang bergelombang yang datangnya dari luar desa agar tetap survive, dan karena itu mereka harus menyesuaikan diri.

Suharso (2002) mengemukakan bahwa modernisasi pertanian ternyata telah mempersempit ruang dan gerak usaha pertanian berskala kecil. Modernisasi pertanian akan selalu menuntut pemakaian input modern, maka kelompok petani kecil dapat diduga tidak akan kuat atau mampu meneruskan usahataniannya, karena biaya produksinya mahal sehingga tidak terjangkau oleh mereka.

Rigg (2001), mengungkapkan beberapa isu penting sebagai temuan studi-studi tentang perubahan sosial yang telah dilakukan pada masyarakat petani di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yaitu; (1). Peminggiran petani kecil dan perempuan, (2). De-agrarianisasi dan (3). De-ruralisasi (penuaan desa).

Menurut Kurasawa (dalam Sosialismanto, 2001), dari berbagai isu yang telah dikemukakan, maka fenomena tersebut hanya bisa dipahami melalui pendekatan teori-teori perubahan sosial. Upaya untuk membangun suatu pemahaman tentang kehidupan masyarakat kecil dan perempuan di pedesaan, belum banyak dilakukan. Kebanyakan studi yang selama ini dilakukan terlalu menekankan pada analisa politik, dengan fokus pada kalangan masyarakat atas. Pendapat ini juga dibenarkan oleh banyak peneliti Barat, tentang perkembangan peneliti perubahan sosial pada umumnya dalam peradaban manusia. Malthus (dalam Suratijah, 1991) mengemukakan

bahwa, sejarah manusia yang kita miliki hanyalah merupakan sejarah kelas yang lebih tinggi. Seringkali upaya untuk membuat pemahaman kehidupan masyarakat kecil di pedesaan adalah dengan cara merekonstruksi pengetahuan kita yang sepotong-sepotong dari berbagai bidang kajian. Perubahan sosial dalam sorotan yang lebih mendalam tentang lapisan masyarakat jelata, sampai saat ini masih sangat dibutuhkan.

Salah satu daerah yang potensial untuk dijadikan setting penelitian masyarakat petani dalam mengkaji arah perubahan sosial pasca revolusi hijau adalah Sulawesi Selatan. Pembangunan di sektor pertanian Sulawesi Selatan telah menunjukkan suatu prestasi yang gemilang. Kondisi ini ditunjukkan dengan keberhasilan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan dan penghasil beras terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Produksi padi sawah di Sulawesi Selatan mencapai 3.552.835 ton. Sebanyak 11,80 % produksi padi sawah dihasilkan oleh Kabupaten Bone dengan total produksi 419.229 ton gabah (GKG), kemudian Kabupaten Pinrang dan Wajo dengan jumlah produksi masing-masing adalah 375.684 ton (10,57 %) dan 271.957 ton (7,65 %). Produksi terendah terdapat di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Selayar dengan total produksi 3.654 ton (0,10 %) dan 5.908 ton (0,17 %). Komoditas pangan pokok beras mencapai surplus sebesar 1.057.370 ton per tahunnya (Dinas Tanaman Pangan, 2007).

Luas lahan sawah di Sulawesi Selatan adalah 642.459 hektar yang terdiri dari lahan yang diusahakan dua kali setahun seluas 338.892 hektar,

diusahakan satu kali setahun seluas 290.037 hektar dan sementara tidak diusahakan 18.530 hektar. Jumlah lahan sawah beririgasi adalah 478.673 hektar, sawah tadah hujan 260.501 hektar, lahan pasang surut 1.361 hektar (Dinas Tanaman Pangan, 2007). Luas penggunaan lahan untuk sawah beririgasi menunjukkan bahwa petani sawah rata-rata dapat menanam padi dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk sawah tadah hujan menunjukkan bahwa petani sawah rata-rata menanam padi hanya satu kali dalam setahun. Dengan demikian berarti faktor demografis mempunyai peranan penting dalam hubungan dengan pengelolaan usahatani dan berdampak terhadap kehidupan komunitas.

Keterbatasan pengelolaan usahatani dalam setahun di Sulawesi Selatan, telah memberi gambaran tentang peningkatan ketergantungan petani yang berlahan sempit atau petani yang tidak mempunyai lahan pada kelas pemilik tanah. Bagi pemilik sawah, tentu saja potensi lahan sawah yang dimiliki menjadikan posisinya bertambah baik karena mempunyai kekuasaan atas tanah dan sumber-sumber ekonomi lain untuk mengelola lahannya sehingga dapat berproduksi secara maksimal dan dapat mengakses teknologi baru. Bagi pemilik lahan yang sempit atau tidak mempunyai lahan sama sekali, justru terjadi sebaliknya, sumberdaya yang dimiliki hanya mampu memberikan jaminan rasa aman sebatas kebutuhan subsistensi dan tidak dapat mengakses teknologi baru.

Surplus produksi padi sawah yang didukung oleh potensi lahan sawah di Sulawesi Selatan yang cukup potensial, ternyata tidak diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat petani, khususnya petani kecil (buruh tani). Masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi, seperti kemiskinan dan kerawanan pangan. Selain itu, fenomena kesenjangan antara petani pemilik dan petani kecil (buruh tani) masih terlihat, terutama pada perbedaan tingkat pendapatan dan kekayaan yang mereka miliki karena adanya perbedaan status dan kedudukan. Penelitian Tahir (1996) di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara petani pemilik dan petani kecil (buruh tani) mencapai perbandingan 9 : 1 sebelum revolusi hijau dan setelah revolusi hijau, perbandingan pendapatan berubah menjadi 7 : 1. Kelihatannya, perbandingan pendapatan ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun sebetulnya secara real (ekonomis) tidak lebih menguntungkan dari sebelum revolusi hijau, karena ada kecenderungan hilangnya nilai-nilai sosial yang telah terpelihara pada masyarakat pedesaan (seperti memperoleh tambahan pendapatan dalam bentuk lain dari pemilik sawah). Padahal, keadaan seperti ini yang membuat masyarakat petani merasa aman hidup pada level subsistensi.

Pada awal tahun 1980-an, sektor pertanian di Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan yang cukup berarti, dan telah mengklaim dirinya telah mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Prestasi ini dicapai melalui adopsi program revolusi hijau, melalui penggunaan teknologi pertanian

modern (bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida). Akibatnya, terjadi pergeseran perilaku tradisional di pedesaan menuju perilaku yang lebih modern. Kelembagaan masyarakat desa (lokal) banyak berubah, karena mereka kemudian dikendalikan oleh sistem birokrasi perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistik.

Dengan demikian, meskipun telah banyak hasil-hasil penelitian yang telah memperjelas temuan mereka mengenai bagaimana perubahan sosial terjadi di pedesaan, namun hampir semua sepakat bahwa sumber perubahan itu berasal dari persebaran teknologi. Namun bagaimana persebaran teknologi itu mempengaruhi perubahan sosial, ternyata dipahami secara berbeda-beda.

Oleh karena itu masih diperlukan studi dalam setting masyarakat petani yang dapat menjelaskan mengapa perubahan sosial bisa terjadi dikalangan masyarakat petani, khususnya masyarakat kecil. Karena setting studi ini mengarah kepada masyarakat petani, khususnya dalam melihat arah perubahan sosial pasca revolusi hijau, maka program revolusi hijau muncul sebagai variabel utama yang menjadi fokus kajian dalam studi ini, kemudian disusul oleh arah transformasi masyarakatnya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Namun, studi tersebut belum cukup banyak dilakukan, padahal Indonesia cukup representatif untuk dijadikan wilayah kajian arus globalisasi kapitalis yang telah merasuk kedalam urat nadi kehidupan komunitas petani.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Program revolusi hijau yang telah diterapkan selama pemerintahan Orde Baru, mempunyai konsekuensi terhadap perubahan sosial masyarakat petani di Sulawesi Selatan. Konsekuensi yang ditimbulkan dari program revolusi hijau adalah peminggiran petani kecil dan perempuan. Pasca revolusi hijau terlihat bagaimana proses perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial berlangsung dan mendorong terjadinya peminggiran petani kecil dan perempuan, serta memperlihatkan strategi adaptasi yang dilakukan bagi mereka yang terpinggirkan itu.

Program revolusi hijau disatu sisi telah memperlihatkan kemajuan dari sisi ekonomi, yakni tercapainya surplus pangan di Sulawesi Selatan, namun di sisi lain telah menimbulkan masalah sosial bagi struktur masyarakat petani. Pertimbangan ini telah mengantarkan studi ini pada suatu pernyataan masalah (*problem statement*) , yakni “*terjadinya peminggiran petani kecil dan perempuan yang mendorong dan menuntut dilaksanakannya pola adaptasi dalam merespon peminggiran tersebut sebagai konsekuensi revolusi hijau*”. Secara spesifik masalah penelitian ini diturunkan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Mengapa perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial yang berlangsung selama revolusi hijau meminggirkan petani kecil dan perempuan?

2. Apa makna revolusi hijau bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan?
3. Bagaimana bentuk dan proses adaptasi yang dilakukan petani kecil dan perempuan dalam menghadapi peminggiran oleh revolusi hijau ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Secara akademis, studi ini bermaksud mencari pemahaman mengenai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat petani pasca revolusi hijau dan mekanisme transformasi dari petani tradisional menuju petani modern. Pemahaman yang dihasilkan akan menjadi fakta empirik untuk membangun suatu teori substantif tentang perubahan sosial dan situasi-situasi yang mengikutinya.

Penelitian ini ditujukan untuk memahami, melakukan interpretasi dan melakukan analisis terhadap :

1. Proses perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial yang berlangsung selama revolusi hijau dalam meminggirkan petani kecil dan perempuan.
2. Pemaknaan petani kecil dan perempuan terhadap proses revolusi hijau dan efek peminggirannya.
3. Bentuk dan proses adaptasi yang dilakukan petani kecil dan perempuan dalam menghadapi peminggiran oleh revolusi hijau.

Dengan pemahaman, interpretasi dan analisis tersebut, penelitian ini akan memberi deskripsi dan eksplanasi tentang proses, pemaknaan, bentuk dan proses adaptasi sosial dibalik peminggiran petani kecil dan perempuan oleh revolusi hijau.

Kegunaan penelitian dimaksudkan untuk pengembangan teori sosiologi okupasi pertanian dan memberi kontribusi pada kebijakan pembangunan pertanian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIK**

#### **A. Perubahan Teknis, Perubahan Sistem Ekonomi dan Perubahan Struktur Sosial**

Pemahaman kondisi sekarang pada daerah pedesaan merupakan produk dan refleksi dimasa lalu. Sejarah, terkait dengan perubahan di masa sekarang baik secara substansial maupun secara konseptual. Secara substansial, perluasan dimana keadaan sekarang merupakan produk dari keberhasilan proses sejarah dan secara konseptual adalah bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan konteks dalam sejarah perubahan ekonomi. Pandangan ini memberikan pemahaman terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dan memfokuskan pada transisi agraris yang secara kritis bergantung pada konfigurasi unik dimana sejarah memainkan peran sentral.

Konsepsi dasar dari struktur masyarakat pedesaan dikemukakan oleh Rigg ( 2001). Menurutnya, masyarakat pedesaan yang berbeda telah mengalami perubahan sebagai daerah pedesaan yang telah diinfiltrasi oleh kelas baru dengan keinginan dan agenda baru. Pandangan tentang pedesaan yang berbeda ini telah menimbulkan permasalahan yang problematik dalam beberapa hal. Perbedaan masyarakat pedesaan ditentukan oleh lingkungan pergaulan moral dan budaya yang membentuk masyarakat pedesaan. Akar perbedaan masyarakat pedesaan bukan terletak

pada sosial – ekonomi, tetapi terletak pada sosial budaya. Budaya telah dilibatkan dalam suatu histori yang berkesinambungan dari formasi dan reformasi dan merangkul pandangan masa lalu yang menekankan pada kompleksitas dan multiplisitas yang dapat menentukan arah sebagai perubahan.

Raynold (dalam Tania Li, 2002), telah memfokuskan pada pentingnya sistem agro pertanian global dan memfokuskan pada pola dimana daerah pedesaan dan pertanian telah secara vertikal dan horizontal diintegrasikan ke dalam struktur, global, dan lebih luas dalam menghapus perbedaan dan mengurangi otonomi mereka. Hart (1997) dan Goodman dan Watts (1994), telah memperdebatkan perkecualian yang terus menerus dari pertanian bahkan dalam konteks perubahan ekonomi global dan menekankan pentingnya lokalitas. Marsden (dalam Sztompka, 2004), telah memberikan perhatian untuk perubahan sosial dan analisis kelas ekonomi pedesaan baru. Hal ini sebagai arah untuk memfokuskan restrukturisasi pentingnya konsumsi pedesaan pada ruang-ruang desa baru.

Kelly (dalam Rigg, 2001) telah menemukan bahwa di pedesaan sekarang banyak keluarga petani ingin menginvestasikan uangnya pada sebuah gelar, yang semuanya atas nama pendidikan. Beberapa pertimbangan dari hasil temuannya: (1). pertanian dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki masa depan yang kecil; (2). pertanian dipahami memiliki masa depan yang suram dan mempunyai status yang rendah; (3).

pendidikan dipahami memberikan akses pada pertumbuhan sejumlah pekerjaan bukan pertanian yang tidak hanya menawarkan status, tetapi juga stabilitas yang lebih besar bagi pendapatan dan keamanan pekerjaan; (4). orang tua selalu dipengaruhi dengan nilai dan kegunaan dari pendidikan. Penduduk tanpa pendidikan sering dipandang sebagai orang yang "bodoh".

Byceson (dalam Rigg, 2001), menggambarkan rangkaian perubahan yang paralel pada daerah-daerah pedesaan. Deagrarianisasi terfokus pada empat faktor : (1). penyesuaian ulang pekerjaan; (2). reorientasi perolehan pendapatan; (3). reidentifikasi sosial dan (4). relokasi ruang. Kemudian Bryceson menambahkan lima faktor lagi, yakni : (1). ekonomi, perubahan keseimbangan perputaran pada buruh diantara aktivitas pertanian dan bukan pertanian dan perluasan ketersediaan kesempatan non pertanian pada kehidupan masyarakat dan daerah pedesaan; (2). sosial dan budaya. Pembagian pada aspirasi, khususnya diantara golongan yang mudah yang terpisah dari tekanan pertanian dan non pertanian; (3). politik. budaya neo liberal yang berlaku dan munculnya kondisi struktural baik global, nasional dan lebih khusus, industrialisasi pedesaan; (4). infrastruktur ditandai dengan peningkatan jaringan komunikasi dan peningkatan yang terkait pada mobilitas yang telah mendorong pada revolusi transportasi pada daerah-daerah pedesaan. (5). lingkungan. Penurunan potensi pertanian yang terkait dengan munculnya permasalahan lingkungan.

Rigg (2001) mengemukakan bahwa ada bukti tensi (ketegangan) dalam bidang produksi yang dapat merefleksikan dan memperbesar tensi pada masyarakat pedesaan terhadap perubahan masyarakat agraris yang tidak linear dan secara lokal adalah unik dan berkeyakinan bahwa pada saat yang sama arah perubahan dapat diidentifikasi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena terkait dengan kesenangan, kelas sosial (tuan tanah dan borjuis), teknologi (mesin, tanaman baru dan varietas tanaman, input kimia dan negara (reformasi lahan dan intervensi negara). Lenin (dalam Rigg, 2001), telah menggambarkan perbedaan diantara kapitalis dari atas (*reaksioner*) dan kapitalis dari bawah (*populer*).

Husken dan White (dalam Pudjiwati, 1985), menjelaskan bahwa pada masyarakat pedesaan telah terbentuk tiga kelas penguasaan lahan. *Pertama*, kelompok besar petani tunakisma yang seringkali menumpang pada keluarga petani pemilik lahan. *Kedua*, kelompok petani yang menguasai lahan, terutama sikep dan elit. *Ketiga*, kelas pamong desa yang menguasai lahan pribadi atau sikep dan menguasai sejumlah besar lahan desa sebagai upah mengatur pemerintahan.

Lebih lanjut Husken dan White (dalam Pudjiwati, 1985) berpendapat bahwa masyarakat Jawa secara historis memang terbagi ke dalam kelas-kelas agraris yang terutama di dasarkan atas perbedaan penguasaan lahan, dan ditandai oleh rantai sejarah komersialisasi yang panjang dan tidak merata, sehingga pada gilirannya perubahan-perubahan yang dihubungkan

dengan "*revolusi hijau*" adalah lebih tepat dilihat sebagai kelanjutan, pengendapan atau bangkitnya kembali kecenderungan-kecenderungan yang telah lama sekali dimulai.

Pemikiran lebih kritis dalam melihat perubahan struktur masyarakat pedesaan datang dari Hayami dan Kikuchi (1981). Inti pendekatannya, berusaha memperjelas kedudukan modernisasi pertanian yang membawa ekonomi pasar dan pertumbuhan penduduk diatas sumberdaya tanah terbatas, dan sampai pula membawa teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik kepada petani padi sawah. Proses ini disertai perubahan dalam kelembagaan di desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani, dan lain pelaku di desa dan kota. Pengamatan yang dilakukan juga sampai pada apakah proses stratifikasi yang berlangsung pada masyarakat akan mengarah kepada polarisasi dimana golongan petani tuan tanah berhadapan dengan buruh tani yang tidak memiliki apa-apa lagi.

Selain Hayami dan Kikuchi (1987), Tjondronegoro (1990), juga telah mengkaji perubahan sosial dari sisi organisasi sosial yang dibentuk untuk membangun masyarakat desa. Temuannya adalah modernisasi kelembagaan modern di pedesaan telah berhasil menyusun pelapisan diantara golongan pemimpin yang mempunyai orientasi yang berbeda dengan kesatuan kecil masyarakat. Selanjutnya, sejumlah lembaga adat di pedesaan yang pada saat ini ada, yang dahulu memungkinkan "*demokrasi*

*sederhana*” dewasa ini sudah pudar dan tidak efektif. Artinya, hegemoni solidaritas masyarakat yang selama ini dibangun telah pudar, karena kurangnya partisipasi dari segolongan pemimpin yang seharusnya menjadi tokoh dan orang yang berpengaruh dalam masyarakat.

Dalam kerangka analisis perubahan sosial yang berlangsung pada masyarakat petani, maka analisis Geertz lebih mendekati untuk menjadi acuan dalam studi ini. Menurut Geertz dalam Salim (2002), involusi pada awalnya dinyatakan sebagai kemandekan atau kemacetan pola pertanian yang ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang berarti. Selanjutnya, Salim (2002) mengemukakan bahwa konsekuensi dari adanya involusi pertanian adalah : (1). Terjadinya kemiskinan bersama (*shared poverty*), yaitu kondisi kemiskinan yang diderita oleh suatu lingkungan masyarakat luas, sebagai akibat menurunnya sumberdaya alam, berlipatnya jumlah penduduk di suatu tempat. (2). Pengertian involusi dapat diperluas pada satuan usaha lain (bukan pertanian saja), bahkan seluruh sektor kehidupan, misalnya perdagangan, industri rumah tangga karena keuntungan masing-masing produksi menjadi semakin kecil. (3). Akibat dari involusi, maka menjalar pada pelapisan sosial masyarakat desa, hubungan keluarga, bahkan pada pola kepercayaan. (4). Petani yang menghadapi krisis subsistensi, kemudian mencoba untuk keluar dari batas "*zona berbahaya*" lebih tepat ketinggian tertentu yang merupakan batas dari bawah dimana kemerosotan dalam hal

subsistensi, keamanan status, dan kohesi keluarga, terasa sangat berat serta menyakitkan.

Menurut Soemardjan (dalam Pudjiwati, 1985), pada dasarnya masalah kemiskinan petani dapat dilihat dari dua gugus pendekatan. *Pertama*, pendekatan kultural yang melihat masalah dari aktornya. Kemiskinan terjadi karena mental manusianya. Bisa karena malas, terbelakang, kurang pendidikan, tidak rajin menabung dan sejenisnya yang menunjukkan bahwa mentalitetnya yang tidak sesuai dengan pembangunan nilai-nilai yang terkandung dibalik pembangunan adalah semangat perubahan, yang biasa diistilahkan sebagai "budaya kemiskinan" (*Culture of poverty*). *Kedua*, pendekatan struktural yang melihat persoalan kemiskinan terkait langsung dengan struktur kekuasaan. Dalam konteks ini kemiskinan dilihat sebagai akibat dari struktur kekuasaan yang timpang. Kekuasaan hanya menguntungkan segolongan orang kaya dan merugikan mereka yang miskin.

Dalam kaitan rasionalisasi tindakan, maka pendekatan ekonomi moral Scoot (1981) menjadi signifikan untuk dianalisis. Menurutnya, dalam komunitas-komunitas pedesaan tradisional para petani berusaha menyediakan beberapa jaminan penghidupan melalui aturan-aturan yang meminimalisasikan resiko, berdasarkan prinsip "*utamakan keselamatan*". Etika subsistensi berdasarkan praktik-praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial, menjamin setiap anggota komunitas pedesaan mengenai hak moral atas penghidupan subsisten. Para petani mengevaluasi tuntutan-

tuntutan atas surplus produksi mereka oleh para tuan tanah, lintah darat, dan negara yang bertentangan dengan standar moral atas apa yang dianggap sebagai tingkat subsistensi minimum yang adil. Pelanggaran atas standar moral penghidupan ini memancing kemarahan dan perlawanan petani. Gagasan ekonomi moral kemudian berpusat pada aturan-aturan budaya yang secara ekonomis akan menguntungkan bagi para partisipan dalam komunitas desa. Secara eksplisit, Scott (1981) menyatakan bahwa analisisnya bukanlah dimaksud untuk berurusan dengan penyebab-penyebab revolusi, melainkan dengan prasyarat-prasyarat pemberontakan.

Popkin (1979) bertolak dari pendekatan ekonomi politik, telah mengkritik atas penggambaran citra romantis yang tidak benar dari desa prakapitalis tradisional. Menurutnya, perilaku petani dituntun oleh perhitungan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan, daripada oleh konsep moral yang bertujuan mengabaikan resiko. Dalam desa, para petani, tuan tanah, dan pelaku lainnya bertindak secara rasional, yaitu demi kepentingan sendiri dan keluarga-keluarga mereka. Mereka cenderung mendasarkan pada keputusan-keputusan pada perhitungan rasional mengenai hasil-hasil yang mungkin akan terjadi. Hal ini benar untuk masyarakat-masyarakat tradisional, dimana relasi-relasi agraria lebih bersifat eksploitatif daripada harmonis, desa hampir tidak menawarkan perlindungan apa pun bagi para petani miskin. Pengenalan akan pasar menyediakan kesempatan-kesempatan baru baik bagi para petani, tuan tanah, maupun pengusaha; mereka juga berinvestasi

dalam teknologi baru atau kesempatan pasar jika mereka merasa bahwa hal itu akan meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan keuntungan.

Pandangan Scott menekankan legitimasi tuntutan para petani akan kehidupan subsisten berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomis merugikan yang dihasilkan oleh pasar kapitalis, yang menghancurkan ikatan protektik tradisional. Perlawanan mereka, meskipun berdasarkan pada konsep moral, sama sekali rasional. Popkin sebaliknya, menggarisbawahi kesempatan-kesempatan yang disediakan pasar bagi para petani. Kesempatan-kesempatan ini mungkin membebaskan mereka dari ikatan-ikatan eksploitatif tradisional. Para petani secara rasional memperhitungkan dengan cara apa mereka dapat memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, mereka hanya akan berpartisipasi dalam suatu pergerakan jika hal itu menawarkan keuntungan-keuntungan nyata kepada mereka.

Popkin (dalam Salman, 2002) menyatakan, terdapat dua pandangan tentang rasionalitas dalam hal ini. *Pertama*, pandangan Weber bahwa rasionalitas merupakan tipe ideal masyarakat Barat yang tercapai karena pengaruh determinisme biologis, rasionalitas inilah yang mendorong kemajuan masyarakat Barat melalui perkembangan kapitalisme, yang dimaksud disini adalah rasionalitas instrumental. *Kedua*, pandangan non Weber bahwa rasionalitas terbentuk pada berbagai masyarakat, karena setiap masyarakat memperhitungkan pencapaian tujuan dan pilihan untuk

mencapainya berdasarkan preferensi dan nilai-nilainya, yang dimaksud disini adalah gabungan rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai.

Berkaitan dengan aspek kultural, Weber (dalam Salman, 2002), mengemukakan bahwa perubahan sosial akan dipengaruhi oleh bentuk rasionalisme. Bentuk rasional "*mean*" (alat ) yang menjadi sasaran utama dan "*ends*" yang meliputi aspek kultural, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya orang hidup dengan pola pikiran rasional yang ada pada perangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung kehidupannya. Orang rasional akan memilih mana yang paling benar untuk mencapai tujuannya (suatu perilaku yang diperhitungkan "matang" untuk mencapai tujuan). Terdapat pengelompokan dalam masyarakat berdasarkan kepentingan tertentu, yaitu dalam bentuk klas (pengelompokan berdasarkan ekonomi), status (pengelompokan berdasarkan kondisi dan kepentingan sosial) dan party (pengelompokan berdasarkan kepentingan politik).

Weber (dalam Salman, 2002) berpandangan tentang proses rasionalisasi tindakan yang fokusnya adalah pengosongan dunia dari hal-hal magik-non rasional dan digantikan dengan hal-hal rasional-kalkulatif, juga kemudian banyak dikritik. Eder (dalam Salman, 2002), menolak asumsi linear dalam proses rasionalisasi, bahwa modernisasi tidak selalu identik dengan rasionalisasi, ditengah prosesnya juga berlangsung derasionalisasi, yaitu munculnya keterpesonaan kembali kepada hal-hal yang tidak rasional,

karena itu baik rasionalisasi maupun derasionalisasi harus dilihat secara dialektis dalam modernisasi.

Tiryakian (2002) berpandangan serupa dengan Eder, bahwa dalam modernisasi, rasionalisasi mengalami proses balik dalam bentuk *reenchantment*. Dijelaskan bahwa pemutusan dari keterpesonaan kepada magik berlangsung ketika sekularisasi menggeser religiusitas dalam memandang dunia. Dalam perkembangannya, masyarakat modern ternyata tetap memunculkan variasi cara pandang dalam melihat dunia, termasuk cara pandang yang kembali berbasis pada magik. Hal ini yang disebut proses keterpesonaan kembali kepada magik (*reenchantment*), serupa dengan yang disebut Eder sebagai derasionalisasi.

Homans (dalam Poloma, 2003), menggambarkan orang rasional berorientasi tujuan dan ditentukan oleh kekuatan yang berada di luar dirinya. Menurutnya, teori rasional menyadari pentingnya persepsi dan menerima bahwa seseorang bertindak rasional sesuai dengan persepsinya, walaupun di mata orang yang lebih terdidik persepsi itu mungkin tidak tepat, dia hanya mengambil persepsi itu sebagai “yang telah ada” (*given*) dan tidak dikaitkan dengan pengalaman yang lalu.

Selanjutnya Homans dalam melihat tindakan rasional menggunakan konsep “manusia ekonomi” baru, yang menggunakan sumber-sumber sosialnya untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan manusia ekonomi lama, yang bersifat “*anti sosial serta materialistis*”, hanya tertarik kepada

uang serta barang-barang materi dan untuk memperolehnya bersedia mengorbankan segala-galanya”, manusia ekonomi baru dapat memiliki setiap nilai yang diinginkannya dari nilai altruisme ke hedonisme. Sejauh dia tidak memboroskan sumber-sumber sosial untuk mencapai apa yang diberinya nilai, perilaku itu ekonomis. Manusia ekonomi baru itu sesungguhnya adalah manusia sederhana.

Proses perubahan ekonomi politik yang menjadi tema sentral dalam perubahan sosial merupakan fenomena sosial yang mempunyai akar historis yang dalam, baik desa-desa di Indonesia pada umumnya, terutama sekali di pedesaan Jawa. Diantara berbagai perubahan yang terjadi, dua proses pertumbuhan kapitalisme dan revolusi industri memperoleh perhatian utama di negara Dunia Ketiga terutama untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi. Proses ini terjadi baik sebagai akibat dari bekerjanya faktor-faktor endogen seperti makin mengecilnya man-land ratio, timbulnya kerja upah, ledakan penduduk, dan sebagainya, maupun karena desakan kekuatan-kekuatan eksogen seperti komersialisasi dan monetisasi pertanian (ekspansi kapitalis), difusi teknologi, peningkatan aksesibilitas, dan jaringan transportasi-komunikasi.

Dalam kajian perubahan sosial di masyarakat petani di Indonesia, maka perlu ditelaah beberapa perspektif teoritik sebagai konsep utama yang dapat mendukung dan menerangkan fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat petani. *Pertama*, adalah berkaitan dengan konsep perubahan

sosial dan pembangunan dalam kaitannya dengan program revolusi hijau. Ketika kita berbicara perubahan sosial, maka yang terbayang dalam benak kita adalah pembangunan. Padahal dua kata itu sesungguhnya berbeda. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan interaksi antara orang, organisasi atau komunitas (Pudjiwati, 1985). Dalam teori Talcot (dalam Pudjiwati, 1985) dalam pemikirannya bahwa perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem sosial. Menurutnya, konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan : (1). perbedaan, (2). pada waktu berbeda, (3). diantara keadaan sistem sosial yang sama. Jadi perubahan sosial merupakan setiap perubahan yang tak terulang lagi dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. *Kedua*, konsep perubahan sosial yang lebih kompleks untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahannya, dapat dikaitkan dengan konsep proses sosial. Konsep proses sosial menunjukkan : (1). berbagai perubahan, (2) mengacu pada sistem sosial yang sama (terjadi didalamnya atau mengubahnya sebagai satu kesatuan), (3). saling berhubungan sebab-akibat dan tak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau yang mendahului faktor lain. (4). perubahan itu saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan waktu.

Konteks perubahan sosial yang akan membantu dalam menelaah studi ini mengacu pada teori perubahan sosial yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli ilmu sosial dalam memandang fenomena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Marx (dalam T.So, 1994) yang

dikenal dengan teori "*historical Materialism*" mengemukakan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya bukan pada idea, karena idea juga merupakan bagian dari materi. Struktur ekonomi sebagai penggerak perubahan akan memimpin perubahan termasuk proses perubahan sosial. Perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik kepentingan material (benda) atau hal yang bersifat material (dibendakan). Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara karena perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material dan konflik kepentingan material akan melahirkan perubahan sosial.

Konsep penting lainnya dalam menelaah perubahan sosial adalah konsep pembangunan. Proses pembangunan yang sedang berlangsung, khususnya di negara-negara yang masih terbelakang berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi. Masalah-masalah pembangunan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan perubahan sosial dimasa lalu. Secara umum ada lima indikator perubahan yang penting, yakni : (1). proses demografi, (2). proses urbanisasi, (3). perubahan stratifikasi, (4). social movement dan (5). proses industrialisasi atau perubahan teknologi (Ponsioen, 1969).

Ponsioen (1969) mengemukakan bahwa, perubahan demografi dapat berperan sebagai *prime mover* dalam perubahan sosial. Menurutnya, struktur yang pertama kali berubah adalah struktur penduduk. Durkheim (dalam Ponsioen, 1969), perubahan ini akan menyeret perubahan lain. *Prime mover*

diartikan sebagai fenomena-fenomena perubahan yang berperan sebagai faktor pendorong yang terpenting dalam perubahan sosial.

Merton (dalam Marzali, 1993), menganggap bahwa peningkatan jumlah penduduk akan menimbulkan disfungsi pada struktur sosial, sehingga diperlukan untuk mencari keseimbangan baru atau adaptasi baru. Analisisnya adalah bila penduduk jarang, lahan luas, sumberdaya alam melimpah, sehingga mereka hidup dengan mudah. Akibatnya, karena kurangnya tantangan hidup, mereka tidak menginginkan inovasi baru, sehingga cenderung statis. Sebaliknya, dalam kondisi padat, lahan terbatas, sebagian besar menjadi miskin sehingga statis karena tidak mampu menanggung resiko kompleks dari suatu inovasi. Pernyataan yang lebih tepat adalah : penduduk tidak miskin karena mereka statis, kemiskinan itulah yang membuat budaya mereka statis.

Berkaitan dengan struktur penduduk, maka teori Geertz dalam buku involusi pertanian sangat mendukung dalam melihat arah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat petani di Jawa, khususnya pada lahan padi sawah. Involusi pertanian (padi sawah) diartikan sebagai intensifikasi yang dilakukan bukan dengan cara menciptakan atau mengimport organisasi ekonomi baru dan teknologi baru, tetapi dengan cara memadati sebidang sawah dengan makin banyak tenaga kerja, sehingga melampaui titik utilitas (Marzali, 1993).

Sedangkan aplikasi pemikiran Ponsioen dalam involusi pertanian telah berkesimpulan dengan melihat perubahan demografi, dalam hal ini tekanan penduduk yang cepat di pedesaan Jawa menimbulkan desa-desa dengan tingkat kepadatan yang tinggi yang diikuti oleh sempitnya rata-rata luas pemilikan lahan sawah per rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa tekanan penduduk tersebut belum bisa dikatakan sebagai prime mover dalam perubahan sosial karena beberapa alasan : (1). Tekanan penduduk pada usahatani padi sawah yang telah melebihi tingkat utilitas, mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas orang per tenaga kerja, walaupun produktivitas padi sawah cenderung meningkat. Artinya tekanan penduduk tidak banyak memberikan perubahan yang berarti terhadap tingkat produktivitas orang per tenaga kerja di lahan pertanian sawah. Hal ini analog dengan orang yang " lari di tempat saja". (2). Dari sisi mata pencaharian hidup, mereka masih bertumpu pada inti budaya (lahan sawah) sebagaimana dilakukan sebelum terjadi involusi. Menurut Geertz, ekologi sawah mampu menyerap banyak tenaga kerja tanpa menurunkan produktivitas padi sawah. (3). Aspek kultural berupa tolong menolong, kebersamaan dan tidak membiarkan tetangganya kelaparan masih tetap utuh dalam kondisi tekanan penduduk padat. Buktinya, pemilik lahan tetap menampung masuknya tenaga kerja yang semakin besar dalam sistem bawon. (4). Ciri ekonomi pedesaan Jawa dengan perilaku pola konsumsi yang mampu menekan keperluan hidup pada taraf subsisten. Produksi usahatani lebih berorientasi sosial dan

subsisten daripada berorientasi komersial. (5). Masyarakat pedesaan Jawa tidak terbagi atas tuan tanah dan kaum proletar (tanpa kelas) tetapi atas kelompok yang kekurangan dan kecukupan. (6). Ciri ekologi usahatani padi sawah yang tidak dibedakan dengan kondisi untuk tanaman tebu yang disebut Geertz sebagai kondisi yang mutualistis, tetapi tetap bertumpu pada lahan sawah sebagai inti budaya.

Bhaskar (dalam Y. So, 1994) mengatakan, studi modern tentang perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa fenomena sosial yang terjadi memperhatikan rentetan waktu dan memusatkan perhatian pada perubahan sosial yang terjadi. Studi ini rupanya secara tidak langsung mewarisi pemikiran Comte. Menurut pandangan Comte (dalam Y. So, 1994), teori perubahan sosial dikelompokkan atas dua, yakni : (1). *social static* (bangunan struktural), (2). *social dynamics* (dinamika struktural). Dalam analisisnya, memandang bahwa *social static* (bangunan struktural) adalah perubahan sosial yang terjadi dengan lambat, sedang atau keras tergantung situasi (fisik, buatan atau sosial) yang mempengaruhinya. Sedangkan *social dynamic* (dinamika struktural) adalah perubahan sosial yang meliputi bagaimana kecepatannya, arahnya, bentuk, agen, perantara serta hambatan-hambatannya. Perubahan sosial biasanya terjadi secara wajar, gradual, bertahap serta tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner. Proses perubahan sosial meliputi proses reproduksi dan proses transformasi.

Menurut Marx (dalam T.So, 1994), ada tiga thema yang menarik ketika kita hendak mempelajari perubahan sosial di masyarakat. Dalam konsepsi Marx, perubahan sosial ada pada kondisi historis yang melekat pada perilaku manusia secara luas. Tepatnya sejarah kehidupan material manusia. Johnson (dalam Sztompka, 2004) menjelaskan bahwa, pada hakekatnya perubahan sosial dapat diterangkan dari sejumlah hubungan sosial yang berasal dari pemilikan modal atau material.

*Pertama*, perubahan sosial menekankan pada kondisi materialistis berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi: material sebagai sumber perubahan sosial budaya. Hal ini mencakup perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru atau perkembangan lain dalam bidang kegiatan produksi. Kontradiksi dapat muncul karena cara-cara produksi dan hubungan-hubungan produksi, yang muncul dari hubungan buruh dengan majikan. Dalam analisisnya, Marx mengemukakan bahwa teknologi tinggi tidak akan dapat mendatangkan kesejahteraan kepada umat manusia, andaikata tidak dimiliki oleh kelompok pekerja pada umumnya. Teknologi malah akan mendatangkan malapetaka, karena ia selalu berada pada pemilik modal yang digunakan untuk mengeksploitasi tata kerja buruh.

*Kedua*, perubahan sosial utama adalah kondisi-kondisi material dan cara-cara produksi disatu pihak dan hubungan-hubungan sosial serta norma-norma pemilikan dipihak lain, mulai dari komunitas bangsa primitif sampai

bentuk kapitalis modern. Pada tahap kehidupan komunal masyarakat hidup dibawah ideologi individualistis dan berkurangnya hubungan manusiawi, menjadi hubungan pemilikan. Dalam hubungan kapitalis, hubungan buruh dan majikan ditentukan semata-mata oleh relasi buruh dalam kerangka "*menjual*" tenaga kepada majikan dalam sistem pasar yang "*impersonal*".

*Ketiga*, dapat dinyatakan bahwa manusia menciptakan sejarah materialnya sendiri, selama ini mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses pembentukannya. Kemampuan manusia untuk membentuk sejarahnya sendiri itu, dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang telah ada. Manusia akan dibatasi oleh kepemilikan alat-alat produksi, hubungan antara konflik kelas yang telah menjadi turunan hubungan sosial yang diciptakannya sendiri.

Dari analisis ini, Marx mengambil kesimpulan bahwa perubahan sosial hanya mungkin terjadi karena konflik kepentingan material (benda) atau hal yang bersifat material (dibendakan). Konflik sosial dan perubahan sosial menjadi satu pengertian yang setara, karena perubahan sosial berasal dari adanya konflik kepentingan material dan konflik kepentingan material akan melahirkan perubahan sosial. Dalam perspektif historis, perubahan sosial adalah suatu fenomena yang sama, tetapi beberapa ahli ilmu sosial menjelaskan dengan menggunakan perspektif dan teori yang berbeda.

Perubahan sosial juga bisa terjadi sangat cepat bahkan radikal, mereka memberikan penjelasan dengan pemikiran mereka sendiri.

Bagi Marx, perubahan sosial dipacu dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat terjadi sangat cepat. Sebagai akibatnya "*means of production*" masyarakat mengalami perubahan sangat cepat dan mendasar. Menurut pandangan Weber (dalam Salman, 2002) sebelum terjadinya perubahan teknologi terlebih dahulu telah terjadi perubahan gagasan baru dalam pola pemikiran masyarakat. Terdapat suatu sistem nilai yang hidup dan bertumbuh secara khusus pada masyarakat, yang membedakan masyarakat satu dengan lainnya. Nilai yang merupakan gagasan tersebut akhirnya menjadi kekuatan yang dominan dari suatu kelompok masyarakat, yang membedakan keberadaannya dengan masyarakat yang lain.

Dalam pemikiran Marx, cara memproduksi masyarakat cukup berbeda karena pemilik dari "*means of production*" adalah "*local goverment*". Dengan kondisi ini maka perubahan sosial yang terjadi selalu datang dari para elite penguasa, dan tumbuh kuat budaya "*patron-klien*". Situasi ini terbina sejak zaman feodalisme kerajaan, pemerintahan-pemerintahan yang baru setelah penjajahan dan belum juga berubah ketika kapitalisme menjelma dalam sistem pasar mereka.

Teori perubahan sosial modernisasi dan pembangunan pada dasarnya dibangun di atas landasan kapitalisme. Menurut Smith (dalam Salman, 2002)

dalam teori *division of labor* mengemukakan tentang pentingnya "*akumulasi kapital*" dalam pengembangan ekonomi. Marx menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Smith itu malah sebagai proses eksploitasi yakni proses apropriasi nilai lebih yang seharusnya menjadi hak buruh.

Konsepsi lain dalam mengembangkan teori modernisasi dan pembangunan datang dari Comte (dalam Y. So, 1994), yang dikenal dengan teori evolusi. Menurut teori evolusi, masyarakat akan berkembang dari masyarakat sederhana (*primitive*) menuju ke masyarakat modern (kompleks) yang memerlukan proses jangka panjang fase demi fase. Bagi Comte, intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut. Pandangan inilah yang menjadi pijakan bahwa proses modernisasi bisa di rekayasa yang disebut sebagai rekayasa sosial (*social-engineering*), yang oleh Herbert Spencer menyebutnya sebagai "*social darwinisme*". Aplikasi dari teori mempengaruhi pemikiran modern tentang pembangunan dan globalisasi dan menganggap tradisi (budaya) sebagai masalah.

Selain kedua teori yang telah dikemukakan di atas, konsepsi lain yang juga penting adalah teori fungsionalisme. Merton dan Parson (dalam Y. So, 1994) mengatakan bahwa, teori ini berkaitan erat dengan "*human capital theory*". Mereka menganggap bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan. Masyarakat berubah, tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju pada

keseimbangan baru. Perubahan terjadi, tetapi tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat disebabkan karena tidak berfungsinya integrasi sosial dan equilibrium dan oleh karenanya harus dihindari. Pandangan ini menafikan realitas sosial lain bahwa didalam masyarakat ada yang diuntungkan dan dirugikan oleh mekanisme dan proses dalam sistem masyarakat. Pandangan ini juga mengabaikan dan melanggengkan nasib mereka yang ditindas, dieksploitasi maupun didiskriminasi dalam masyarakat.

Selanjutnya Parson (dalam Ufford, 2004) dalam melihat ke depan sebagai dasar visi masyarakat modern, dengan membandingkannya dengan masyarakat tradisional. Baginya, masyarakat modern cenderung memiliki hubungan kenetralan, tidak mempribadi dan berjarak, tidak emosional dan kecintaan seperti masyarakat tradisional. Masyarakat modern juga dianggap memiliki hubungan norma universal dan berorientasi diri sendiri atau individualistik. Tidak seperti masyarakat tradisional yang berwatak kolektif dan komunal, masyarakat modern juga tumbuh dalam persaingan ketat dan lebih berorientasi pada prestasi (*achievement*) serta merumuskan secara jelas tugas masing-masing kelembagaan (*functionally specific*) dalam masyarakat. Atas dasar visi masyarakat modern seperti ini, pada dasarnya teori perubahan sosial dan pembangunan diarahkan.

Menurut Lenski (dalam Schoorl, 1982), tingkat kemajuan teknologi akan menentukan distribusi barang dan jasa dalam masyarakat, yang pada

gilirannya kemudian mempengaruhi struktur sosialnya. Dalam masyarakat sederhana yang masih menggunakan teknologi primitif, seluruh atau sebagian besar barang dan jasa yang tersedia akan didistribusikan atas dasar kebutuhan. Namun, dalam masyarakat yang mengalami kemajuan teknologi, peningkatan proporsi barang dan jasa yang tersedia akan didistribusikan atas dasar kekuasaan.

Lebih jauh Lenski (dalam Schoorl, 1982) menjelaskan bahwa, perubahan struktural dalam masyarakat dapat dijelaskan lewat perubahan struktur sistem distribusi. Pada dasarnya struktur sistem distribusi dalam masyarakat terdiri atas tiga unit yaitu, unit individual, kelas-kelas, dan sistem kelas. Unit individual adalah tingkat dasar yang tercakup dalam unit kelas-kelas. Kelas-kelas yang dimaksud adalah pengelompokan orang dalam masyarakat yang berada di dalam posisi yang sama dalam hal beberapa bentuk kekuasaan, privilese atau prestise. Kedua unit itu kemudian tercakup dalam sistem kelas, yaitu hierarkhi kelas-kelas yang tersusun dalam jenjang beberapa kriteria tunggal seperti, sistem kelas pemilikan, sistem kelas okupasi, sistem kelas politik dan sebagainya. Perubahan struktural dalam masyarakat hanya dapat dipahami lewat hubungan struktural diantara sistem-sistem kelas itu.

Beteille (dalam Pudjiwati, 1985) menyatakan bahwa, menelaah struktur sosial saja (*abstract form of ideas*) adalah tidak cukup; perlu melengkapinya dengan analisa mengenai pembagian masyarakat atas group,

strata dan kelas, dan analisa mengenai pola tindakan orang-orang dalam berbagai situasi kondisi. Durkeim (dalam Pudjiwati, 1985), konsepsi pola tindakan orang-orang menunjuk pada konsepsi pola kebudayaan masyarakat (*culture*) atau disebut sebagai suatu “*set of collective representation*” yang meliputi; unsur-unsur ide, kepercayaan dan nilai-nilai sosial.

Stratifikasi sosial merupakan gambaran mengenai adanya ketidaksamaan (*inequity*) dalam kehidupan manusia (masyarakat). Sorokin (dalam Pudjiwati, 1985) mengemukakan bahwa, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk (masyarakat) ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hierarkies*). Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat itu adalah karena tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta dalam pembagian nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara para anggota masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Syamsuddin (1994) yang menyatakan bahwa penetapan penguasaan tanah pertanian merupakan penyebab utama ketidaksamaan. Status dan kesempatan individu tergantung pada luasnya posisi mereka dalam jaringan yang kompleks, terutama pada asset produksi atau sumber yang mereka kuasai.

Menurut Beteille (dalam Pudjiwati, 1985), sumber ketidaksamaan dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sumber: *Pertama*, status. Penilaian terhadap status dihubungkan dengan suatu penghargaan tinggi (*esteem*) dan

respek terhadap posisi-posisi tertentu yang disetujui oleh masyarakat secara bebas dan tidak dipaksa. *Kedua*, organisasi (pengorganisasian). Organisasi ini memberi posisi kekuasaan/wewenang (*power/authority*) kepada sebagian pesertanya. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya saling interaksi diantara komunitas masyarakat, yang nampak dari struktur dan organisasinya. Organisasi masyarakat meliputi aspek-aspek kekuatan kekuasaan yang mendominasi. Struktur kekuasaan ada karena kekayaan, kepemilikan dan kelas.

Kekuasaan dan wewenang merupakan aspek penting dalam stratifikasi sosial. Kekuasaan merupakan suatu gejala yang memperlihatkan adanya hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai; atau antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu secara rela atau karena dipaksa. Jika kekuasaan itu dijumpai pada diri seseorang, maka orang itu dapat disebut sebagai "*pemimpin*" dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah "*pengikutnya*". Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan Soekanto (1982), kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang dan mendapat dukungan dan pengakuan dari masyarakat, maka kekuasaan itu menjadi "wewenang". Pengertian wewenang timbul pada saat masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat merupakan gejala yang

wajar; walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi, yang sekaligus mempertahankan integritas masyarakat itu.

Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat nampak beraneka ragam dengan masing-masing polanya. Biasanya terdapat satu pola umum dalam setiap masyarakat. Walaupun perubahan-perubahan terjadi dalam masyarakat itu yang menyebabkan lahirnya pola baru, namun pola tersebut selalu akan muncul atas dasar pola lama yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk dan sistem kekuasaan selalu menyesuaikan dirinya pada masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perilakunya. Dalam keadaan kritis mungkin batas-batasnya mengalami perubahan sedikit, akan tetapi pada umumnya garis yang tegas antara yang berkuasa dengan yang dikuasai selalu ada.

Mac Iver (dalam Pudjiwati, 1985) menyatakan bahwa, gejala tersebut menimbulkan lapisan-lapisan kekuasaan, yang didasarkan pada rasa kekhawatiran dari masyarakat akan terjadinya disintegrasi masyarakat, apabila tidak ada kekuasaan yang menguasainya. Integrasi masyarakat dipertahankan oleh tata tertib sosial yang dijalankan oleh penguasa, maka masyarakat mengakui adanya lapisan-lapisan kekuasaan, walaupun

kenyataan itu merupakan beban yang berat baginya. Adanya faktor pengikat antara warga-warga masyarakat nampak dari gejala, bahwa ada yang memerintah dan ada yang diperintah dalam masyarakat yang bersangkutan.

Lapisan-lapisan dalam masyarakat akan selalu ada, dan setiap perubahan dalam masyarakat akan berpengaruh terhadapnya. Mungkin sistem lapisan yang lama akan hancur sama sekali, akan tetapi pasti akan timbul sistem pelapisan kekuasaan yang baru, karena masyarakat memang memerlukannya. Setiap tahap perkembangan dari suatu masyarakat tertentu mempunyai ciri-ciri sistem pelapisan yang khusus. Kekuasaan bukanlah semata-mata berarti bahwa banyak orang tunduk dibawah seorang penguasa; kekuasaan selalu berarti suatu sistem berlapis-lapisan yang bertingkat (*hierarkies*).

Hingga kini masyarakat di pedesaan cenderung digolongkan dalam stratifikasi pendapatan, status dan kekuasaan yang ditentukan oleh kekuatan pemilikan, dan jangkauan kepada asset produksi, serta dimanifestasikan dalam distribusi jabatan dan pekerjaan. Strata ini merupakan struktur solidaritas yang "*informal*". Hal ini didasarkan atas kekerabatan atau hubungan bertetangga yang saling bantu membantu dan memberikan perlindungan. Dengan demikian, mereka bersama-sama mempertahankan kehidupan sekurang-kurangnya pada level subsistensi. *Cross-cutting* kelas strata horizontal ini adalah semacam jaringan solidaritas vertikal berdasarkan kekeluargaan atau kekerabatan, kasta, etnis, suku dan hubungan patron-klien.

Menurut Wosolowski (dalam Syamsuddin, 1994), struktur kelas masyarakat sosialis terdiri atas dua kelompok. Keduanya masing-masing dibedakan dari hubungan dengan alat-alat produksi dan yang lainnya adalah orang yang menyelenggarakannya. Hubungan ini menentukan wujud, yaitu yang pertama sebagai kelas eksploitasi dan kelas kedua sebagai kelas yang mengeksploitasi.

Totalitas dari kelas-kelas, lapisan-lapisan dan kelompok sosial serta sistem yang mengatur hubungan antar mereka ini kemudian membentuk struktur sosial masyarakat. Dalam menganalisis struktur sosial, Marxisme membuat pembagian antara kelas fundamental dan kelas non fundamental. Kelas-kelas fundamental adalah kelas-kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, terwujud dalam pola hubungan dan pola perjuangan antar kelas. Seluruh corak produksi ditunjukkan dengan keberadaan dua kelas yang secara fundamental saling bertentangan.

Lenski (dalam Poloma, 2003), membatasi kelas sebagai pengelompokan orang di dalam masyarakat yang berada dalam posisi yang sama dalam hal kekuatan atau beberapa menentukan distribusi privilese dan prestise dalam masyarakat berdasarkan surplus barang-barang yang berarti.

Alvin Y. So (1994) yang bertolak dari teori evolusi menjelaskan bahwa, perubahan sosial pada dasarnya merupakan gerakan searah, linear, progresif dan perlahan-lahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju, dan membuat berbagai masyarakat

memiliki bentuk dan struktur serupa. Premis ini memberikan gambaran secara implisit membangun kerangka teoritis dari perspektif modernisasi dengan ciri-ciri: (1). modernisasi merupakan proses bertahap, (2). modernisasi dapat dikatakan sebagai homogenisasi, (3). modernisasi dilihat sebagai proses yang tidak mundur, (4). modernisasi memerlukan waktu panjang, (5). modernisasi merupakan proses sistematis, dan (6). modernisasi diartikan sebagai proses transformasi.

Spencer (dalam Alvin Y. So, 1994), evolusi didefinisikan sebagai perubahan dari homogenitas tak beraturan ke heterogenitas yang logis, yang diikuti oleh kehilangan gerak dan integrasi. Evolusi berlangsung melalui diferensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut: (1) dari yang sederhana menuju ke yang kompleks, (2) dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke terkaitan bagian-bagian, (3) dari keseragaman homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas, dan (4) dari ketidakstabilan ke kestabilan. Proses seperti ini adalah universal. Dari kesederhanaan ke bentuk yang kompleks, melalui diferensiasi.

Mekanisme evolusi sosial berdasarkan tiga aturan: (1). mengandung ketidakstabilan keseragaman, ketidakstabilan populasi yang homogen; (2). ada kecenderungan makin kuatnya ketimpangan (*inequality*); spesialisasi peran, disparitas kekuasaan, dan perbedaan kekayaan makin mendalam; (3). masyarakat terbagi menjadi kelas dan kelompok yang berbeda.

Durkheim (dalam Y.So, 1994) menjelaskan bahwa arah utama evolusi terlihat dalam perkembangan pembagian kerja, diferensiasi fungsi, kewajiban dan peran pekerjaan ketika masyarakat bergerak maju dalam ukuran waktu. Selanjutnya Durkheim mengajukan tipe dikhotomi masyarakat berdasarkan perbedaan kualitas ikatan sosial; solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik berakar dalam kesamaan fungsi dan tugas yang tidak dibeda-bedakan. Solidaritas organik berakar dalam peran dan pekerjaan yang sangat beragam, kerjasama, saling melengkapi, dan saling memerlukan.

Evolusi melalui empat tahap yang dapat dilihat; (1) primitif, (2) primitif maju, (3). menengah dan (4) modern. Masyarakat primitif sangat seragam dan homogen, tidak terdiferensiasi dalam sub sistem (unit) spesialisasi. Tahap primitif maju dicapai ketika muncul diferensiasi sehingga terbentuk sub sistem; fungsi politik (pencapaian tujuan), dan membebaskan diri dari pengaruh agama (pemeliharaan pola). Masyarakat tahap menengah ditandai oleh perkembangan tulisan yang memungkinkan akumulasi informasi, komunikasi jarak jauh, dan penyaluran tradisi. Tipe masyarakat modern muncul dengan ciri; (1). diferensiasi menyeluruh dari empat sub sistem sosial; daya adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola, (2). dominasi peran ekonomi, ditandai oleh produksi massa, organisasi birokrasi, perluasan pasar dan uang sebagai arena dan alat pertukaran, (3). perkembangan sistem hukum sebagai mekanisme utama koordinasi dan kontrol sosial, (4). stratifikasi berdasarkan kriteria prestasi universal, (5).

perkembangan jaringan hubungan sosial yang bersifat impersonal, menengah dan kompleks.

Menurut Schrorl (1982), modernisasi juga nampak dalam bertambah luas dan banyaknya tugas-tugas birokrasi negara dan dalam rasionalisasi organisasinya. Ini merupakan bagian dari suatu proses diferensiasi umum, yang menyebabkan lahirnya lembaga-lembaga politik yang semakin khusus dengan fungsi-fungsi yang semakin khusus pula. Dengan demikian, maka pengertian diferensiasi itu mencakup gejala, bahwa sebuah organisasi yang ada pecah menjadi sejumlah organisasi baru untuk melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi tertentu secara lebih memadai sesuai dengan situasi historik yang ada. Diferensiasi sosial itu berhubungan dengan proses semakin bertambahnya pembagian pekerjaan dan spesialisasi, yang khususnya nampak jelas di dalam organisasi.

Berkaitan dengan itu, Smelser (dalam T. So, 1994) menggunakan konsep diferensiasi struktural, karena modernisasi akan selalu melibatkan diferensiasi struktural. Ini terjadi, karena dengan proses modernisasi ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Bangunan baru ini sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai substruktur yang terkait menjalankan keseluruhan fungsi yang dilakukan oleh bangunan struktur lama. Perbedaannya, setelah adanya

diferensiasi struktural, pelaksanaan fungsi akan dapat dijalankan secara lebih efisien.

Tiryakian (2002) berpendapat bahwa dalam modernisasi terjadi proses balik terhadap diferensiasi dalam bentuk dediferensiasi. Proses diferensiasi menempatkan individu pada satu fungsi dan lembaga tertentu, proses dediferensiasi menempatkan individu pada beberapa fungsi dan lembaga. Sintesis keduanya memungkinkan perbaikan adaptasi lingkungan serta peningkatan efisiensi dari sistem sosial yang makin kompleks.

## **B. Revolusi Hijau dan Petani Kecil**

Shields (dalam Tania Li, 2002) mengemukakan bahwa, konsep keterpinggiran merupakan titik awal untuk mengungkap sejumlah dimensi yang penting dalam transformasi. Keterpinggiran adalah konsep hubungan (*relasional*), yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekedar konstruksi alami. Lebih lanjut Shields mengemukakan bahwa, keterpinggiran sebagai konstruksi sosial ini melibatkan suatu proses, dimana melalui suatu ruang tertentu mendapat deskripsi yang disederhanakan, dijadikan stereotip dan dikontraskan atau dibandingkan dan kemudian diberi peringkat menurut kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Collier (1974), kebijaksanaan pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah orde baru melalui apa yang terkenal dengan nama

'*revolusi hijau*' pada tahun 1970-an menyebabkan terjadinya proses "*evolution*" sistem kelembagaan tradisional yang membatasi masuknya petani miskin dan buruh tani ke dalam sistem produksi pertanian. Proses itu menyebabkan pendapatan petani kecil dan buruh tani menjadi semakin kecil, sedangkan pendapatan petani kaya semakin besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di daerah pedesaan. Menurutnya, kesenjangan itu timbul akibat dari adanya kesempatan lebih terbuka bagi petani bertanah luas untuk menerima teknologi baru sehingga telah menjadikan mereka sebagai kelas petani yang komersial, yang mengabaikan kewajiban dan loyalitasnya terhadap sesama petani miskin.

Collier (1974) menjelaskan bahwa, bagi golongan petani yang berlahan luas, oleh karena secara sosial ekonomi lebih memiliki akses dibanding petani kecil, menjadi lebih intensif dalam menggunakan teknologi pertanian. Sebaliknya Hayami dan Kikuchi (1987) yang sejalan dengan pandangan Collier mengemukakan bahwa persebaran teknologi pertanian ke daerah pedesaan cenderung bersifat netral skala atau tepat guna baik bagi petani bertanah luas maupun petani bertanah sempit. Fenomena ini sejalan dengan temuan Nasikun (1987) yang menunjukkan bahwa golongan petani bertanah sempit menggunakan pupuk lebih tinggi dibanding golongan petani bertanah luas. Hal ini terjadi oleh karena karakter perilaku ekonomi petani kecil sebagian besar berlandaskan pada etika subsistensi. Sebagai petani subsisten, petani kecil akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan,

termasuk dalam hal penggunaan teknologi, sepanjang hal itu dipandang dapat menyelamatkan kelestarian ekonomi mereka. Disamping itu, dalam beberapa hal petani kecil lebih patuh dibanding petani besar dalam mengikuti anjuran pemerintah untuk mengadakan perubahan teknik pertanian.

Menurut Mubyarto (dalam Sosialismanto, 2001), kebijakan pembangunan pertanian dengan jalan modernisasi melalui introduksi besar-besaran pupuk, pestisida, bibit unggul serta pengolahan tanah yang maksimal ternyata tidak memberikan tambahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan luas lahan yang sempit. Akses mereka terhadap teknologi lebih besar daripada petani dengan luasan lahan lebih luas. Namun secara ekonomi mereka tetap tidak mengalami perubahan meski tingkat akses mereka terhadap teknologi cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan ternyata perilaku petani dalam memandang teknologi tersebut bukan sebagai alat untuk meningkatkan produksi mereka malahan menjadi simbol status. Kondisi ini tentu semakin memperparah mental petani ditambah sumberdaya alam yang hilang maupun rusak akibat kesalahan pengelolaan.

Larson (dalam Sosialismanto, 2001) menyatakan bahwa, respon petani terhadap ekspansi kapitalisme komersial di pedesaan Jawa menimbulkan serangkaian krisis ekologis dan menggusur wewenang tradisional yang akhirnya bermuara pada pemberontakan petani, karena memang penetrasi kapitalisme ini meruntuhkan keseimbangan tradisional

antara hak dan kewajiban yang sebelumnya ada antara tuan tanah dan petani. Selama transisi dari petani kepada proletariat desa tidak sempurna rasa ketidakadilan kaum tani akan merangsang untuk melakukan pemberontakan.

Argumen Collier (1974) yang menganggap bahwa persebaran teknologi cenderung mengembangkan kesenjangan sosial, ternyata mendapat tanggapan dari Hayami dan Kikuchi (1987) yang telah melakukan studi di daerah pedesaan Jawa. Menurutnya, persebaran teknologi itu, yang terjadi oleh karena kemajuan ekonomi yang ditimbulkannya dapat dinikmati secara merata, justru telah menjadikan masyarakat desa tidak terpolarisasi melainkan lebih terstratifikasi dalam spektrum kontinum. Menurut Amaluddin (dalam Triyono, 1992), struktur lembaga sosial masyarakat desa memang cukup kuat untuk membendung terjadinya polarisasi. Polarisasi akan berkembang jika kesempatan-kesempatan untuk menambah pendapatan atau kesempatan hidup di luar pertanian semakin kecil atau semakin sempit bagi kelompok miskin di desa. Tidak selamanya distribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang menyolok begitu mudah menimbulkan perjuangan kelas kaum miskin selama masih ada kesempatan-kesempatan bagi mereka bergeser ke luar pertanian untuk menutup kekurangan ekonomi mereka (Triyono, 1992).

Revolusi hijau bukan alternatif terbaik untuk meningkatkan produksi pangan, jika dilihat dari sudut pandang alam, perempuan dan petani kecil.

Benih-benih revolusi hijau berguna bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mencari pasar baru bagi benih dengan menggusur para petani kecil dan perempuan yang selama ini memelihara kesuburan tanah. Mereka juga memaksa petani untuk membeli benih baru itu dengan mengaitkan penggunaan "*varietas unggul*" dengan perolehan kredit pertanian serta masukan lain (Shiva, 1997).

Bukti keterpinggiran petani kecil oleh revolusi hijau dapat dilihat dari; pertama, petani kecil tidak layak mengambil kredit, membeli peralatan pertanian dan paket tanaman ekonomi menjadi tergusur. Dengan demikian mereka kehilangan hak atas makanan yang dahulu diproduksi sendiri. Pemiskinan kelompok masyarakat pedesaan melalui strategi revolusi hijau dan berkurangnya perolehan mereka pada sumber makanan merupakan salah satu faktor timbulnya surplus pada tingkat makro (Tania Li, 2002).

Para petani kecil ini menjadi semakin dimiskinkan seiring dengan dijadikannya produksi pertanian sebagai barang dagangan, sementara mereka tidak dapat mengumpulkan modal, karena itu mereka berusaha memaksimalkan sarana "*cuma-cuma*" yang diberikan oleh ekonomi moral yang bertumpu pada kekerabatan. Artwood (dalam Ufford, 2004) mengatakan bahwa, ekonomi moral biasanya dianggap "*terancam*" jika hasil pertanian menjadi barang dagangan. Namun, jika pasar dan ekonomi moral muncul bersamaan dalam proses peminggiran yang melaluinya terbentuk komunitas "*petani kecil*" secara spesifik, maka strategi "*ekonomi moral*" dapat

dianggap berperan dalam meredakan ketegangan antar kelas, cara untuk mendapatkan jaminan subsistensi tersebut membatasi sikap berontak.

Menurut Geertz (1986), pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (*shared property*) yang tanpa disadari. Hadirnya mekanisasi pertanian telah menyingkirkan buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Huller, misalnya telah menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani di desa. Akibatnya, di pedesaan akan terjadi luapan tenaga kerja yang menganggur.

Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan syarat tentang revolusi hijau yang lebih menonjolkan ketegangan kelas "*ekonomi moral*". Di sisi lain, pemerintah telah menekankan kelangsungan tradisi untuk menghindari kerusuhan yang mungkin muncul seandainya masyarakat menyadari benar-benar bagaimana proses-proses pembangunan yang menurut pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka ternyata justru memiskinkan mereka. Mereka juga memaksa petani untuk membeli benih baru itu dengan mengaitkan penggunaan "*varietas unggul*" dengan perolehan kredit pertanian serta masukan lain, termasuk irigasi (Shiva, 1997).

Tania Li (2002) menyimpulkan bahwa revolusi hijau secara radikal meningkatkan hasil panen melalui penggandaan musim tanam tetapi sebagian besar keuntungan yang diperoleh justru dirasakan oleh kelas pedagang setempat. Revolusi hijau membuat para petani kecil ini makin bergantung sarana yang memerlukan modal besar seperti traktor, pupuk,

perontok padi mekanis, dan penggilingan padi yang hanya dapat diperoleh dengan harga tinggi melalui para pedagang ini. Bagi mereka yang benar-benar petani kecil tampaknya sistem kontrak ini hanya dapat memberikan sebagian dari penghasilan rumahtangga, dan kegiatan usahatani mereka harus ditunjang oleh kegiatan tambahan yang dilakukan oleh setidaknya salah satu anggota keluarga, biasanya laki-laki dewasa.

Hayami dan Kikuchi (1987) mengemukakan bahwa pemakaian varietas modern dianggap akan menimbulkan kesukaran bagi petani-petani kecil yang berusaha untuk nafkahnya sendiri, yang kemampuan keuangannya kecil untuk membeli masukan-masukan ini. Bila teknologi ini dimonopoli oleh pengusaha tani besar, keuntungan besar yang diperoleh dari penerapan ini akan merangsang para pemakainya untuk memperluas usaha operasionalnya dengan menggabungkan persawahan para petani kecil yang tidak memakai varietas modern melalui pembelian tanah atau pengusiran penyakap. Akibatnya, polarisasi komunitas pedesaan menjadi pengusaha tanaman perdagangan yang besar dan proletariat yang tidak memiliki tanah akan meningkat.

Menurut Hanani (dalam Fakhri, 2001), pembaruan agraria merupakan jawaban terhadap masalah yang muncul dalam struktur agraria di setiap masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi dan melengkapi peralihan agraria, apakah itu bagi arah ke perkembangan sistem kapitalisme atau sistem sosialisme. Kedua sistem tersebut pada dasarnya memerlukan land

reform. Land reform merupakan sebuah kebijakan untuk mencapai keadilan dalam penguasaan lahan dan faktor pendukungnya. Dalam kegiatan itu dapat dilakukan pengambilalihan tanah secara paksa, atau dengan cara lain yang biasanya dilakukan oleh negara kepada tuan tanah. Lahan hasil dari kegiatan tersebut mempunyai manfaat yang besar bagi hubungan antara manusia dengan tanahnya dibandingkan dengan sebelum adanya pengambilalihan. Land reform dapat pula diarahkan untuk melakukan perubahan pada pembaruan penyakapan, pemindahan dan pembukaan tanah baru, bantuan khusus bagi petani kecil.

Konsep pembaruan agraria dengan adanya program modernisasi pertanian telah mengalami perubahan pada konsep mendasar dari pembaruan agraria. Pembangunanisme dan revolusi hijau menjadikan reformasi agraria hanya sekedar jargon kepentingan politik dan terbiaskan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai kebijakan dasar pembangunan. Banyak kegagalan telah terlihat dari program ini, kegagalan tersebut terlihat dari meluasnya kesenjangan pendapatan dan tingkat hidup antara kaum kaya dan kaum miskin terlihat terutama di desa. Tetesan kebawah "*trickle-down effect*" sebagai model pemerataan pembangunan yang diharapkan modernisasi tidak pernah dapat dinikmati petani. Sempitnya lahan pertanian yang dikuasai petani saat ini yang rata-rata 0,3 ha sangat ironis pada negara yang begitu besar sumberdaya yang dimilikinya.

Kemiskinan semakin meluas dan petani semakin dijauhkan dari akses produktif mereka pada program pembangunan dengan mendorong modernisasi pertanian ternyata tidak memberikan hasil maksimal bagi kesejahteraan petani.

### **C. Revolusi Hijau dan Perempuan**

Modernisasi pertanian dan pengenalan teknologi baru (revolusi hijau) di pedesaan telah memberikan efek yang berbeda pada masyarakat petani, baik pada strata sosial maupun gender, yang akhirnya dapat merubah struktur masyarakat di pedesaan. Menurut Fahmid (2004), dampak revolusi hijau bagi rakyat pedesaan adalah ketergantungan pada upah yang mereka dapatkan. Ada kecenderungan umum, yaitu orang kaya memiliki keuntungan lebih besar dari adanya perubahan teknologi pertanian dan laki-laki lebih diuntungkan daripada perempuan.

Jiggins (dalam Fahmid, 2004), memberikan penjelasan tentang beberapa studi mengenai dampak revolusi hijau, bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan, dalam hal intensitas dan pengalaman sosial, perempuan menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki. Dalam sistem pertanian tradisional, perbedaan antara produktivitas kerja pertanian perempuan dan laki-laki berhubungan dengan kekuatan fisik mereka. Semakin kurang tergantungnya pertanian

pada tenaga manusia, perbedaan dalam produktivitas kerja antara kedua jenis kelamin dapat dianggap menyusut. Kaum laki-laki yang lebih berpeluang menggunakan teknologi baru dan peralatan modern, sedangkan perempuan hanya melakukan pekerjaan fisik yang sederhana dalam pertanian (Boserup, 1984). Akibatnya, terjadi kesenjangan produktivitas kerja laki-laki dengan perempuan. Sehingga produktivitas kerja laki-laki cenderung meningkat dan perempuan produktivitas kerjanya cenderung statis.

Bagi kaum perempuan yang hidup di negara-negara berkembang, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki perempuan yang patriarkal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Shiva, 2005). Beberapa isu gender telah menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi perempuan mengemuka di beberapa negara berkembang, terutama dianalisis dari fenomena sosial tentang banyaknya perempuan yang tereksplorasi dan termarginalkan dari masyarakat pedesaan, karena tidak diberi ruang untuk beraktivitas. Walaupun diberi kesempatan untuk beraktivitas, hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan pendapatan yang memadai dalam mendukung ekonomi rumahtangganya. Hal ini relevan dengan pernyataan Mies (2005) bahwa resistensi kaum perempuan terhadap teknologi dilihat sebagai rintangan bagi kebebasan mereka, karena teknologi telah dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki

dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan.

Menurut Shiva (1997), keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan oleh karena "*partisipas*" kaum perempuan dalam "*pembangunan*" tidak memadai dan tidak cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi mereka yang dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan: merekalah yang memikul segala biaya pembangunan, tetapi manfaat pembangunan sedikitpun tidak ada yang mereka peroleh.

Shiva (2005) mengemukakan bahwa berbagai usaha telah dilakukan untuk melibatkan perempuan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang semula merupakan wilayah eksklusif laki-laki. Seperti pada industri teknologi tingkat tinggi baru. Resistensi kaum perempuan terhadap teknologi sebagai rintangan bagi kebebasan mereka, karena teknologi dianggap sebagai area kekuasaan laki-laki dan oleh karenanya perempuan harus menaklukkannya jika mereka ingin disetarakan. Ini dikaitkan dengan strategi perempuan untuk mengejar ketertinggalan dengan laki-laki.

Pembangunan menghancurkan produktivitas perempuan karena pembangunan merebut dari tangan kaum perempuan pengelolaan dan pengendalian lahan, air dan hutan, dan merusak ekologi sistem lahan, air dan tumbuh-tumbuhan, sehingga menurunkan produktivitas dan daya alam untuk memulihkan diri. Meski penindasan gender dan patriarki merupakan bentuk-

bentuk penindasan yang tertua, tetapi keduanya muncul dalam bentuk-bentuk yang baru dan lebih kejam, melalui proyek pembangunan.

Boserup (dalam Shiva, 2005), telah mendokumentasikan bagaimana pemiskinan terhadap perempuan semakin meningkat karena perempuan ditempatkan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja. Proses-proses ekonomi dan politik terhadap keterbelakangan masyarakat, merupakan manifestasi yang jelas dari patriarki modern, dan ketika sebagian besar laki-laki dan perempuan juga dimiskinkan oleh proses-proses ekonomi dan politik tersebut, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Privatisasi tanah untuk revenue generasi berdampak lebih parah lagi bagi perempuan, mencabut hak-hak tradisional perempuan untuk mengolah tanah. Perluasan pertanian yang langsung dijual mengurangi produksi pangan, dan ketika laki-laki dipaksa untuk bermigrasi atau menjadi tenaga buruh, seringkali perempuan ditinggalkan dengan nafkah yang terbatas untuk menghidupi dan merawat keluarganya. Kaum perempuan yang paling terpukul oleh krisis kemiskinan, pertama karena mereka yang paling miskin diantara yang termiskin, dan kedua karena, bersama alam, mereka berperan selaku penopang utama masyarakat (Shiva, 1997).

Menurut Mill (dalam Shiva, 2005), terdapat konflik diantara perempuan modern dan anak gadis yang memiliki kewajiban dalam keluarganya. Perempuan muda sering digambarkan ke dalam pekerjaan modern terkait

dengan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan dalam mendukung pendidikan, selain keinginan menjadi modern. Tacoli (dalam Rigg, 2001) menyatakan bahwa, migran perempuan mengirimkan jumlah uang yang besar kepada keluarganya daripada migran laki-laki dan pada basis yang teratur. Puteri tertua khususnya mempunyai kewajiban dalam keluarga untuk menyiapkan dukungan keuangan dalam mendukung pendidikan keluarganya yang lebih muda, sementara itu juga dapat memenuhi kebutuhan tabungan pribadi.

Pembangunan yang timpang tidak lain dari alam pikiran dan tindakan yang timpang. Dalam praktek, perspektif dualis, reduksionis dan terpecah-pecah ini merusak integritas dan keselarasan manusia dalam alam, serta keselarasan antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan yang timpang, merusak kesatuan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, serta menempatkan laki-laki tanpa prinsip feminin, diatas alam dan perempuan dan terpisah dari keduanya. Kekerasan pada alam, seperti terlihat dalam krisis ekologi, dan kekerasan pada perempuan, seperti terlihat dalam kedudukan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan dan ditindas, timbul karena prinsip feminin diabaikan. Menurut Shiva (1997), apa yang dinamakan pembangunan sekarang ini pada dasarnya pembangunan yang timpang, yang didasarkan pada penerapan atau peningkatan dominasi laki-laki atas alam dan perempuan. Olehnya itu, sebagian besar gerakan perempuan telah menyepakati bahwa strategi menyejajarkan diri dengan laki-laki sebagai

persoalan pokok dalam emansipasi. Konsekuensinya bahwa perempuan harus mengatasi diri terhadap apa yang disebut “*alamiah*”, karena dalam wacana ini perempuan didudukan sejajar dengan alam, sementara laki-laki dilihat sebagai refresentatif dari budaya (Mies, 2005).

Menurut Shiva (1997), kaum perempuanlah pertama-tama yang mengalami kemunduran, karena dua alasan. *Pertama*, pekerjaan mereka bekerjasama dengan proses-proses alam. *Kedua*, pekerjaan yang memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin kelangsungan hidup secara umum dinggap rendah. Meningkatnya pembangunan yang timpang justru berarti menurunnya kelangsungan hidup dan sistem-sistem penopang kehidupan; karena itu penting sekali untuk memulihkan prinsip feminin, sebagai dasar untuk pembangunan yang melestarikan alam dan menjaga ekologi. Feminisme sebagai ekologi, dan ekologi sebagai sumber segala kehidupan, menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak terpusat untuk transformasi politik dan ekonomi. Fenomena ini menjadi berdasar yang dikemukakan Mies (2005) bahwa gerakan ekologi menjadi bagian terbesar dari gerakan perempuan. Kesadaran tentang munculnya persoalan-persoalan sosial (patriarkal, ketidakseimbangan, alienasi, kemiskinan), harus dipecahkan bersama-sama dengan problem ekologi. Keterkaitan dari seluruh kehidupan di muka bumi, problem dan solusinya merupakan unsur utama ekofeminisme.

Hanani (dalam Fakih, 2001) mengemukakan bahwa, isu-isu penting yang dewasa ini berkembang adalah pemikiran yang bersifat ekologis (*isu*

*lingkungan*), feminis (*kesetaraan gender*) dan kerakyatan dengan otonomi sebagai program utamanya. Ekologis dalam arti memelihara dan tidak merusak lingkungan. Juga tidak membutuhkan industrialisasi yang merusak dan pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif. Cukup mengembangkan kegiatan dan usaha ekonomi berdasarkan kebutuhan bersama, sehingga sumberdaya alam dapat dikelola untuk kepentingan dan kelangsungan bersama. Feminis artinya bahwa sumberdaya alam dikelola secara setara dimana laki-laki dan perempuan mengembangkan potensinya tanpa bias gender dan stereotype. Gerakan feminis berarti juga cinta damai, anti kekerasan, tidak eksploitatif, memelihara alam, menjaga keberlangsungan hidup. Sistem tata kehidupan lama menindas, kekerasan dan eksploitatif hendaknya dihindari melalui gerakan ini. Otonomi dan kerakyatan mengandung pengertian bahwa tanah merupakan kebutuhan bersama dan bukan dari keserakahan perorangan. Individualisme namun common property yang harus dijaga bersama guna mencapai kemakmuran. Sekaranglah saatnya untuk mengakhiri peperangan terhadap alam, sekarang waktunya alam tidak hanya dipandang dan diperlakukan sebagai musuh, tapi sebagai sebuah entitas hidup dimana kita berada di dalamnya (Mies, 2005).

Fakih (2001) mengemukakan bahwa feminisme sebagai kumpulan pemikiran, pendirian dan aksi berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang

berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Munculnya bentuk ini dimungkinkan karena implikasi kebijakan pembangunan, yang telah menyengsarakan kaum perempuan.

Meskipun feminisme sebagai gerakan pemikiran yang sesungguhnya telah lama muncul, namun dalam kaitan antara feminisme dengan teori perubahan sosial dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminis merespons dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan. Kesadaran ini muncul, setelah melihat beberapa literatur yang dikembangkan oleh beberapa pemikir praktis yang memfokuskan pada isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi kaum perempuan dalam program pembangunan. Sebagian merupakan orientasi kebijakan, menganalisis bagaimana program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan kaum perempuan. Fenomena ini telah mengantar analisis pada perspektif feminis yang dapat dikategorikan sebagai feminis penganut teori modernisasi. Bukan perspektif feminis yang bersumber dari pemahaman kaum liberal yang menganggap perempuan lebih dinggap sebagai masalah (*anomaly*) bagi ekonomi modern dari pada laki-laki. Hanya sedikit sekali perempuan diakui peran tradisionalnya, seperti peran “*efektivitas*” perempuan keluarga dianggap cocok bagi zaman modern. Hanya sedikit sekali teori yang menunjukkan bahwa perubahan status kaum perempuan adalah signifikan. Padahal, perempuan dapat dilihat sebagai variabel penting dalam proses pembangunan. Bagi kaum perempuan yang

hidup dalam negara-negara industri maju, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang patriarkal akan dihapuskan dan diganti dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan (Mies, 2005).

Barrett dan Phillips (dalam Brooks, 1997) mengemukakan bahwa, feminisme 1970-an menganggap seseorang dapat menentukan penyebab penindasan perempuan. Para feminis dibedakan secara substansial menurut apa yang mungkin menjadi penyebab kontrol pria atas kesuburan perempuan, sistem patriarki dalam warisan, kebutuhan kapitalisme akan tenaga kerja yang patuh tetapi nyata-nyata bukan pertanyaan tentang penyebab itu sendiri. Bukan pula adanya kesulitan dengan gagasan penindasan yang tampaknya telah memiliki aplikasi pembuktian diri. Juga menjadi penting adalah asumsi yang dianut oleh sebagian besar feminis bahwa penyebab yang dicari berada pada tingkatan struktural.

Halberg (dalam Brooks, 1997) menyatakan sudut pandang epistemologi feminis adalah versi feminis mengenai "*objektivisme*". Artinya, perempuan memiliki posisi privilese secara kognitif di dalam masyarakat, sehingga pengetahuan mereka melebihi pengetahuan laki-laki dan posisi privilese tersebut dianggap berakar di dalam pengalaman perempuan. Terdapat cabang yang berbeda dari pemikiran feminis di dalam model epistemologis yang luas ini, termasuk feminis radikal, feminis kebudayaan, dan feminis dekonstruktivis.

Feminis radikal menyatakan bahwa pengetahuan sebenarnya bersifat intuitif dan perempuan, dan bahwa "*rasio*" atau rasionalitas secara sederhana merupakan senjata ideologis yang digunakan pria untuk melawan perempuan. Feminis kebudayaan telah mengambil argumen lebih jauh dalam menjejerkan maskulinitas dan budaya, ke feminin dan sifat dasar. Grant (dalam Mies, 2005), dalam menyimpulkan elemen kunci pada posisi ini, menyatakan bahwa di dalam posisi "logika laki-laki" ini dilihat sebagai salah satu aspek dari hegemoni maskulinitas yang sangat luas.

Barrett (dalam Shiva, 2005) berpendapat bahwa istilah "*patriarki*" telah kehilangan semua kekuatan analitik dan penjelasannya, dan sekarang digunakan sinonim dengan "*dominasi pria*". Sawieki (dalam Shiva, 2005) menyatakan bahwa pengakuan feminisme atas potensi dirinya sendiri untuk mendominasi dan kecenderungan untuk menindas penting bagi feminisme untuk berbagai alasan. Perempuan sendiri dilibatkan dalam banyak bentuk dominasi dan penindasan dan garis kelas, pekerjaan dan etnik. Selanjutnya, pemikiran dan praktik feminis tidak bebas kesalahan dari kecenderungan pemecah belahan, peniadaan dan penindasan mengakibatkan marjinalisasi kelompok-kelompok perempuan.

## D. Adaptasi

Menurut Cohen (dalam Manule, 2008), adaptasi adalah suatu proses sosial dan tindakan manusia, yang difokuskan pada pengamatan dalam peran kognitif (pengetahuan antisipatif) manusia selaku aktor yang sadar akan kehadirannya sebagai makhluk sosial dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan.

Rambo (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, ketika manusia di perhadapkan pada situasi ekstrim, yang mengancam eksistensinya, manusia akan melakukan adaptasi. Artinya, terjadi hubungan interaksionis antara lingkungan dan manusia. Lingkungan dapat mempengaruhi manusia, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan. Menurut Sumarwoto (1991), individu dalam batas tertentu mempunyai daya lentur, daya lentur ini memungkinkan individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami masalah kerentanan hidup dan kemiskinan petani dalam pembangunan pertanian dan pedesaan secara menyeluruh dan terpadu adalah dengan menggunakan kerangka kerja "*sustainable livelihoods*".

Kerangka kerja yang dikemukakan Ellis menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) sebagai penggerak berbagai asset dan

kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman.

Lebih lanjut Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, segala aspek kehidupan dan pola aktivitas penghidupan masyarakat pedesaan difokuskan pada pengetahuan lokal (*local knowledge*), kemampuan (*capabilities*), modal (*asset*) dan aktivitas (*activities*). Sebagai livelihoods asset, masyarakat lokal bisa menjelaskan mengapa masyarakat pedesaan masih bisa bertahan hidup (*survival*) dan mengatasi kesulitan hidupnya secara mandiri.

Pendekatan sustainable livelihoods dimulai dengan analisis kekuatan dan kapasitas lokal, bukannya kebutuhan yang disuplai dari luar. Konsep dasar "*livelihoods*" dan "*diversification*" merupakan topik utama dalam menemukan, merumuskan dan mengakomodasi situasi perkembangan pembangunan pertanian dan pedesaan.

Dari konsep dasar "*livelihoods*", dapat digeneralisasikan dengan seperangkat asset, access, activities yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia melakukan tindakan sebagai pilihan strategis dalam mengatasi kehidupannya (*livelihoods strategies*).

Kerangka konsep "*sustainable livelihoods*" menggambarkan manusia (individu maupun entitas) sejajar dengan asset lainnya (*pentagon asset*), meskipun manusia sama derajatnya dengan asset lainnya, tetapi manusia

bertindak pula sebagai penggerak berbagai asset (*modal*) dan penentu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*livelihoods strategies*).

Generalisasi konsep "*livelihoods*" pada level individu, keluarga atau masyarakat yang lebih luas bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis. Kedinamisan ditentukan oleh daya ketangguhan, kelenturan dan kemampuan individu atau unit sosial yang lebih besar dalam menghadapi kerentanan. Penyebab kerentanan adalah *shock* yakni perubahan mendadak dan tidak terduga (karena alami, ekonomi, konflik dan lainnya). *Trend* adalah perubahan yang masih dapat diamati seperti pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan politik.

Alasan manusia (individu) dan unit sosial yang lebih besar memiliki kemampuan khas yakni "*daya lenting*" dan "*daya coping*", maka manusia secara sadar melakukan upaya penyesuaian diri (adaptasi) dalam merespon perubahan tersebut. Respon bersifat jangka pendek disebut "*coping mechanism*" dan jangka panjang disebut "*adaptive mechanism*". Dalam artikulasi yang sama segala upaya dan bentuk penyesuaian diri manusia dipahami sebagai "*coping strategies*" atau respon tindakan adaptif (*coping mechanism*) untuk mengatasi kelangsungan hidup (penghidupan) dalam jangka pendek, sedangkan "*livelihoods strategies*" dipahami sebagai *adaptive mechanism* untuk mengatasi kelangsungan hidup (penghidupan) dalam jangka panjang.

Strategi penghidupan (*livelihoods strategies*) dipahami sebagai suatu pola kegiatan mata pencaharian (penghidupan) yang dipilih petani dengan cara yang paling sesuai untuk membuat hidup lebih baik dan tidak menyebabkan kondisi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Strategi penghidupan dapat berupa; bertahan hidup (*survive*), menambah penghasilan (*income*), meningkatkan jaminan hidup (*security*), mencari masa depan lebih baik (*assuring future generations*). Bagi petani, strategi penghidupan yang dilakukan bisa berupa intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian, diversifikasi mata pencaharian (pola nafkah ganda), dan migrasi.

Dalam konteks rumah tangga dan komunitas, strategi penghidupan yang dilakukan adalah strategi bertahan hidup (*survival strategies*), mempertahankan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang sangat adaptif, strategi konsolidasi (*consolidation strategies*), memantapkan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang responsif, dan strategi akumulasi (*accumulation strategies*), melipatgandakan surplus kondisi penghidupan yang dimiliki dengan derajat hidup yang ekspansif.

Menurut Rigg (2001), perubahan sosial, ekonomi dan ekologi akibat kapitalisasi pembanguna dewasa ini tanpa disadari telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap tatanan dan dinamika kehidupan masyarakat di pedesaan. Penetrasi kapitalisme di pedesaan kemudian berfungsi memproses produk dan jasa pertanian untuk komersialisasi perdagangan dan

ekonomi pasar dalam mendorong percepatan modernisasi pertanian (revolusi hijau) di pedesaan. Demikian pula masuknya program-program pemerintah melalui pembangunan pertanian yang mengakomodasi kepentingan kesejahteraan masyarakat desa, justru secara cepat mengubah “*naturalitas*” penghidupan dan kehidupan desa. Dalam kondisi demikian, mau tidak mau masyarakat di pedesaan, khususnya petani harus merespon dan menerima tekanan-tekanan yang bergelombang yang datangnya dari luar desa agar tetap survive, dan karena itu mereka harus dapat menyesuaikan diri (*adaptasi*) terhadap perubahan yang terjadi.

Mekanisme penyesuaian dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek terutama bertujuan untuk mengakes penghidupan (*coping strategies*), sedangkan jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya (*livelihoods assets*). Ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam jangka pendek akan membawa ke kondisi “kerentanan” (*vulnerability*) hidup terhadap perubahan. Penyesuaian diri atas kerentanan hidup yang tidak memperhitungkan aspek penguatan sumber-sumber kehidupan (asset; sumberdaya) dalam jangka panjang justru tidak akan menjamin keberlanjutan “ketangguhan hidup” (*resilience*) individu maupun unit sosial yang lebih tinggi.

Menurut Parsons (dalam Poloma, 2003), terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah: (1). yang berhubungan dengan kebutuhan

sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (*sumbu internal – eksternal*), dan (2). yang berhubungan dengan pencapaian sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu (*sumbu instrumental – consummatory*).

Berdasarkan premis itu secara deduktif, Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional. Keempat fungsi premis itu, yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup, adalah *latent pattern – maintenance* (L), *Integration* (I), *Goal attainment* (G) dan *Adaptation* (A). *Pattern – maintenance* menunjuk pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. *Integration* yaitu koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. Masalah pemenuhan tujuan sistem dan penetapan prioritas diantara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat *goal attainment*. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem.

Menurut Parson (dalam Poloma, 2003), sistem sosial adalah sumber integrasi; sistem kepribadian memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan atau *goal attainment*; sistem kultural mempertahankan pola-pola yang ada dalam sistem; sistem organisma behavioral memenuhi kebutuhan yang bersifat penyesuaian (*adaptive*). Bertitik tolak dari teori Parson, Jackson Toby (dalam Poloma, 2003) menjelaskan bahwa perilaku cenderung memiliki empat

tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis: (1). pencarian pemuasan psikis, (2). kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis, (3). kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis, dan (4). usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Dalam perkembangannya, Parson telah melakukan modifikasi terhadap beberapa teorinya, terutama dalam kaitan perpindahan dari pengembangan keseimbangan yang dinamis, dan melahirkan sebuah "*model sibernetika*". Selanjutnya, menurut Parson; (1). sibernetika lebih menjelaskan masalah kontrol dalam masyarakat, (2). melalui argumen "apa yang menentukan apa" dengan mengakui bahwa kombinasi dari berbagai faktor sama-sama terjadi melalui suatu proses umpan balik, dan (3). menolong membuka kemungkinan-kemungkinan baru sehubungan dengan masalah-masalah yang mengganggu stabilitas dan perubahan sistem. Parson menerima Sibernetika dari evolusi sebagai sarana aktif untuk masuknya perubahan ke dalam model strukturnya.

Dalam model *sibernetika*, Parson memajukan teori evolusioner, yang menjelaskan gerakan masyarakat yang primitif ke modern melalui empat proses perubahan struktural, yaitu: diferensiasi, pembaharuan bersifat penyesuaian (*adaptive upgrading*), pemasukan (*inklusivitas*) dan generalisasi nilai. Diferensiasi dibatasi sebagai "proses dimana satu unit atau sub sistem yang memiliki tempat tertentu dalam masyarakat terbagi ke dalam unit-unit

yang berbeda dalam struktur dan fungsi dalam sistem yang lebih luas". Pembaharuan bersifat penyesuaian dibatasi sebagai "proses dimana sejumlah besar sumber-sumber disediakan untuk unit-unit sosial sehingga fungsi mereka bebas dari beberapa batasan-batasan askriptif yang dibebankan pada unit-unit yang kurang berkembang".

Baik diferensiasi, maupun pembaharuan yang bersifat penyesuaian itu menciptakan masalah integrasi bagian-bagian yang ada dalam sistem pembaharuan tersebut, memberikan lebih besar kebebasan dari semua yang mencakup pembatasan-pembatasan pada anggota-anggota sistem (orang memiliki beberapa pilihan atas pekerjaan yang diambilnya) dan membutuhkan jenis lebih banyak komitmen yang digeneralisir dari seorang pekerja ketimbang yang dilakukan oleh keluarga petani. Keluarga petani membutuhkan komitmen yang lebih besar pada keluarga, yang juga berfungsi sebagai dasar bagi kegiatan ekonomi.

Masalah pengintegrasian sistem keluarga yang telah terdiferensiasi itu diselesaikan melalui pemasukan, yaitu proses ketiga dari perubahan struktural, dan generalisasi nilai, sebagai proses keempat, yang memberi legitimasi dari perkembangan-perkembangan baru. Generalisasi nilai atau penetapan suatu pola nilai di tingkat generalitas yang lebih tinggi dibanding dengan yang terdapat dalam situasi yang kurang berkembang, sehingga ia relevan dalam keadaan darurat yang lebih luas.

Parson (dalam Poloma, 2003), dalam masyarakat modern salah satu generalisasi nilai ialah lahirnya filsafat-filsafat individualisasi yang berhenti dengan hak-hak individual (dibedakan dengan hak-hak kolektif). Jadi ada kebebasan individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan baginya. Arah ini disebut sebagai peningkatan kemampuan sistem untuk mengendalikan lingkungannya.

Blumer (dalam Ufford, 2004) menyatakan bahwa pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain. Gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses *self-indication*. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

Etzioni (dalam Ufford, 2004), menganalisis pentingnya kesadaran dalam pengambilan keputusan tentang tindakan sosial. Beberapa proposisi telah dikembangkan mengenai ini: (1). peningkatan kesadaran yang diharapkan akan melahirkan gerakan hanya terjadi kalau elemen-elemen lain

dari orientasi aktif juga meningkat, atau elemen-elemen lain yang lebih tinggi dibanding dengan kesadaran masyarakatnya, (2). bilamana tingkat kesadaran tinggi tetapi tingkat komitmen rendah, kita akan melihat suatu masyarakat yang “acuh tak acuh” (*masyarakat dekaden*), (3). bilamana tingkat kesadaran tinggi tetapi tingkat pengetahuan rendah, efek utamanya adalah mempertinggi rasa ketidakberdayaan pelaku mengatasi masalah-masalah sendiri.

White (dalam Poloma, 2003) melukiskan kultur sebagai alat penyesuaian diri dengan alam terutama dengan memanfaatkan energi bebas, dan digunakan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua bagian dari kultur saling berhubungan, namun peran utama dimainkan oleh sistem teknologi. Kultur berkembang melalui peningkatan jenis energi, melalui jumlah energi yang dikonsumsi per kapita per tahun dan efisiensi pemakaiannya. Faktor inilah yang menentukan perkembangan penguasaan manusia atas alam.

Steward (dalam Sztompka, 2002), mengemukakan bahwa kultur dilihat sebagai kesatuan yang mempunyai ciri-ciri berlainan yang ditemukan diberbagai lingkungan ekologis. Kultur mendapat bentuk yang berbeda karena beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Perhatian lalu bergeser ke perbedaan antar kultur yang ditemukan dari riset komparatif diberbagai kawasan geografis maupun perbedaan internal antara komponen

atau dimensi kultur dalam masyarakat tertentu. Ada perbedaan kultur dan ada perbedaan antar aspek atau dimensi di dalam kultur yang sama.

Setiap kultur atau setiap aspek kultur tertentu berkembang secara berbeda dan mengikuti mekanisme sendiri. Evolusi harus dianggap bersifat multilinear menurut dua arti. Pertama, dari sudut antar masyarakat; evolusi diberbagai masyarakat mengikuti jalan yang berbeda karena menghadapi kondisi yang berbeda. Kedua, dari sudut masyarakat tertentu; evolusi diberbagai bidang kehidupan sosial (kultur, ekonomi, politik, dan sebagainya) mengikuti jalan dan mekanisme yang berbeda.

Beberapa faktor mendasar yang menjadi penyebab perubahan evolusioner. *Pertama*, tekno ekonomi dan *kedua*, organisasi sosial politik. Dominasi faktor tekno ekonomi atas faktor lain hanya diperlakukan sebagai distribusi peluang saja. Inti masyarakat secara kausal menentukan perubahannya. Inti masyarakat ini terdiri dari lembaga teknologi dan lembaga ekonomi.

Kritik tentang teori Steward datang dari Smith (dalam Ufford, 2004). Menurutnya: (1). Keragaman kultur antar masyarakat sebenarnya lebih besar ketimbang keragaman kondisi lingkungan alamnya (lingkungan ekologi). Ini berarti bahwa kelebihan keragamannya itu tak dapat dijelaskan dengan mengacu pada mekanisme adaptasi dan harus mengacu pada mekanisme perkembangan otonom di dalam kultur yang bersangkutan, (2). kekuatan yang ditentukan faktor ekologi atau tekno – ekonomi tergantung pada fase

evolusi; di fase awal ia sangat kuat, sedangkan di fase berikutnya faktor politik atau ideologi jauh lebih menentukan.

Sahlins dan Service (dalam Poloma, 2003), telah mengkaji evolusi umum ditingkat abstraksi tertinggi dengan memperhatikan arah perubahan kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan cara demikian akan terlihat tipe kultur baru yang terus menerus muncul. Pertumbuhan kultur baru ini seiring dengan derajat kemampuan adaptasi, kekompleksan sistem, dan organisasi yang makin tinggi. Sebaliknya, evolusi khusus merupakan cara-cara konkrit adaptasi kultur baru dengan lingkungan khusus. Evolusi umum dan khusus dapat menimbulkan konflik. Evolusi khusus berarti adaptasi sempurna terhadap lingkungan konkrit, sedangkan evolusi umum berarti peningkatan otonomi dan penguasaan lingkungan sebagai prasyarat untuk adaptasi di masa mendatang. Smith (dalam Ufford, 2004), masyarakat atau kultur dapat meningkat spesialisasinya, mungkin lagi mempunyai daya adaptasi, tak lagi mampu mencipta untuk melompat ke tingkat teknologi dan organisasi sosial yang lebih tinggi. Akibatnya, stagnasilah yang akan terjadi, bukan perubahan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Program revolusi hijau adalah program yang dalam fase perkembangannya ditandai dengan dimulainya penggunaan input-input teknologi seperti bibit, pupuk, pestisida, insektisida dan lain-lain. Program revolusi hijau menggunakan metode tertentu yang bertujuan meningkatkan

hasil produksi sebanyak mungkin produk-produk pertanian, khususnya pangan dengan input-input kimiawi untuk men-suport atau menyediakan pangan murah bagi rakyat. Dibalik niat luhur dari kehadiran program revolusi hijau ternyata memunculkan implikasi negatif. Menurut Shiva (1997), penggagas revolusi hijau telah secara sengaja tidak memperhitungkan implikasi negatif dari kehadiran program revolusi hijau. Penemu revolusi hijau hanya mempropagandakan peran revolusi hijau sebagai mesin besar untuk memproduksi secara massal hasil-hasil pertanian, dengan menjadikan kemiskinan dan kelaparan dunia sebagai komoditi. Hayami dan Ruttan (dalam Pudjiwati, 1985) menyatakan bahwa, implikasi yang sangat esensial dari program revolusi hijau adalah membagi struktur sosial petani di pedesaan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sebagian kecil masyarakat desa menjadi petani komersial, dan kelompok kedua mayoritas menjadi buruh tani, kehidupan mereka sangat bergantung pada pendapatan gaji harian.

Husken dan White (dalam Pudjiwati, 1985) menyatakan bahwa, komersialisasi ekonomi ditandai dengan proses pertumbuhan kapitalisme revolusi industri. Proses ini terjadi baik sebagai akibat dari bekerjanya faktor-faktor endogen, seperti makin mengecilnya *mand land ratio*, timbulnya kerja upah, ledakan penduduk dan sebagainya, maupun karena desakan kekuatan-kekuatan eksogen; seperti komersialisasi dan monetisasi pertanian (*ekspansi kapitalis*), difusi teknologi, peningkatan aksesibilitas, dan jaringan

transformasi komunikasi. Hal ini relevan dengan Sosialismanto (2001) yang mengemukakan bahwa, dalam tinjauan teknologi diperoleh gambaran bagaimana introduksi teknologi (revolusi hijau) telah menjelaskan terjadinya proses komersialisasi, moneterisasi, pasarisasi, kapitalisme dan diferensiasi sosial.

Rigg (2001) menggambarkan bahwa terdapat perbedaan diantara kapitalisme dari atas (*reaksioner*) dan kapitalisme dari bawah (*populer*) dalam perkembangan pedesaan. Berkaitan dengan ini, berarti pada masyarakat petani di pedesaan telah terjadi perubahan yang mengarah kepada perubahan struktur pelapisan yang didasarkan pada kepemilikan dan penguasaannya terhadap alat-alat produksi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena terkait dengan kesenjangan kelas (tuan tanah dan borjuis), teknologi (musim, tanaman baru dan varietas tanaman, input kimia) dan negara (reformasi lahan dan intervensi negara). Menurut Collier (1974), revolusi hijau telah menyebabkan terjadinya proses "*evolution*" sistem kelembagaan tradisional yang membatasi masuknya petani miskin dan buruh tani ke dalam sistem produksi pertanian. Proses itu menyebabkan pendapatan petani kecil dan buruh tani menjadi semakin kecil, sedangkan pendapatan petani kaya semakin besar sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di daerah pedesaan. Menurutnya, kesenjangan itu timbul akibat dari adanya kesempatan lebih terbuka bagi petani bertanah luas untuk menerima teknologi baru sehingga telah menjadikan mereka sebagai kelas petani yang

komersial, yang mengabaikan kewajiban dan loyalitasnya terhadap sesama petani miskin.

Parson (dalam Y. So, 1994) menyatakan bahwa, masyarakat modern cenderung memiliki hubungan kenetralan, tidak mempribadi dan berjarak, tidak emosional dan kecintaan seperti masyarakat tradisional. Masyarakat modern juga dianggap memiliki hubungan norma universal dan berorientasi diri sendiri atau individualistik. Tidak seperti masyarakat tradisional yang berwatak kolektif dan komunal, masyarakat modern juga tumbuh dalam persaingan ketat dan lebih berorientasi pada prestasi (*achievement*) serta merumuskan secara tegas tugas masing-masing kelembagaan (*functionally specific*) dalam masyarakat. Sosialismanto (2001) mengemukakan bahwa, respon-respon petani terhadap kapitalisme komersial di pedesaan menimbulkan serangkaian krisis ekologi dan menggusur wewenang tradisional yang akhirnya bermuara pada pemberontakan petani, karena memang penetrasi kapitalisme ini meruntuhkan keseimbangan tradisional antara hak dan kewajiban yang sebelumnya ada antara tuan tanah dan petani. Selama transisi dari petani kepada proletariat desa tidak sempurna rasa ketidakadilan kaum tani akan merangsang untuk melakukan pemberontakan pula.

Munurut Keane (dalam Tania Li, 2002), sepanjang penduduk memahami diri mereka sendiri sebagai "*terpinggir*" (atau orang yang tersingkir), atau sekedar "*orang lokal*" atau "*orang daerah*", mereka setidaknya

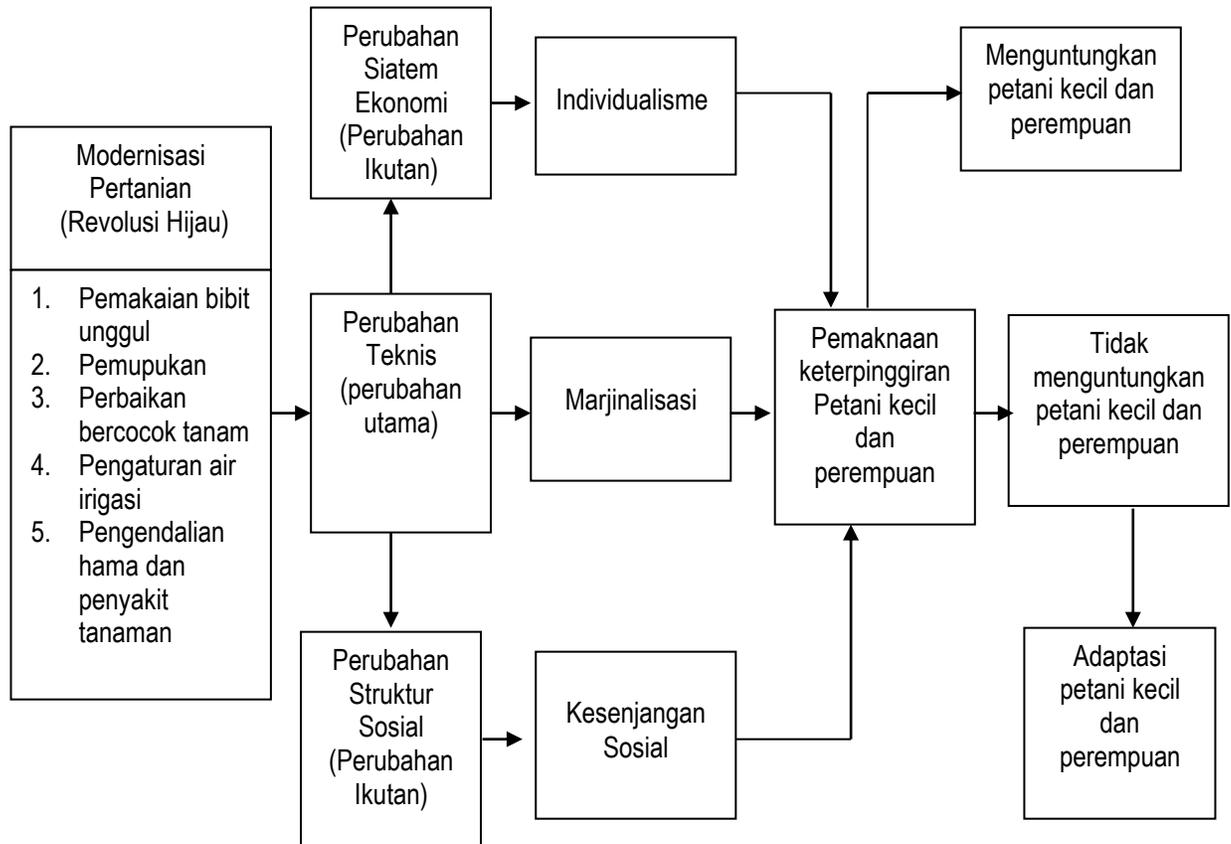
tidaknya menerima otoritas yang membuat tempat lain sebagai titik acuan yang benar, tepat dan bahkan mendasar. Ciri keterpinggiran sebagai suatu konstruksi sosial berlangsung melalui proses penghilangan perbedaan kebudayaan menurut waktu, dan kompleks budaya/sejarah yang dikonseptualisasikan sebagai sesuatu yang mengalami evolusi. Persoalan keterpinggiran selalu merupakan persoalan empiris, yang terkait dengan klaim hegemoni dan penekanan pelaksanaannya di suatu tempat. Geertz (1986) sebagai temuan klasik di Mojokuto Kediri menjelaskan bahwa, pembangunan pertanian yang telah dilakukan tidak sedikitpun memberikan nilai tambah bagi petani. Pertanian telah mengalami involusi dan pembagian kemiskinan (*shared property*) yang tidak disadari. Kondisi tersebut dengan adanya mekanisasi pertanian (program revolusi hijau) semakin menyingkirkan para buruh tani dari akses pembagian keuntungan. Jatah mereka dari memanen padi hilang (yang kebanyakan dikerjakan tenaga kerja perempuan) karena jenis padi yang ditanam tidak memerlukan ani-ani (alat potong padi manual) namun dikerjakan dengan mesin perontok yang hanya perlu sedikit tenaga. Hadirnya huller di pedesaan juga menghilangkan pekerjaan satu-satunya petani desa. Kebiasaan me-nutu (menumbuk padi) menjadi hilang dan digantikan mesin yang tidak mungkin memakai tenaga mereka. Sedikit demi sedikit telah terjadi di pedesaan dan semakin menambah jumlah tenaga kerja yang menganggur.

Blumer (dalam Ufford, 2004) menyatakan bahwa, pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain. Gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatakan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses "*self-indication*". *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

Ketika program revolusi hijau melanda pedesaan, pada level ini (petani kecil dan perempuan) tidak diuntungkan oleh keadaan karena tidak memiliki modal untuk mengadopsi inovasi teknologi. Berbeda dengan petani yang berada pada level atas yang diuntungkan oleh program revolusi hijau, karena ia mampu merespon teknologi dengan modal yang dimilikinya. Begitupun dengan perempuan, akibat masuknya mesin-mesin pertanian yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang tadinya dikuasai oleh tenaga kerja perempuan, akhirnya tergeser.

Tidak ada jalan lain, petani kecil dan perempuan akan mencari strategi adaptasi sosial baru, yang mengarah pada stagnasi ataukah perubahan sosial. Triyono (1992) menemukan bahwa, bersamaan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pertanian, di daerah pedesaan telah tumbuh pula aktivitas kerja di luar pertanian. Pertumbuhan aktivitas kerja ke luar pertanian ini ditandai oleh kejadian tipikal adanya pergeseran okupasi para petani ke luar pertanian. Umumnya pergeseran itu dilakukan dengan cara memperluas atau memperbanyak aktivitas ekonomi mereka ke luar usaha tani (*off - farm*).

**Gambar 1. Kerangka Konseptualisasi Penelitian**



## Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritik

Tinjauan Pustaka :

- (1) Perubahan teknis system ekonomi dan struktur sosial
- (2) Revolusi hijau dan Petani kecil
- (3) Revolusi hijau dan perempuan
- (4) Adaptasi (strategi adaptasi)

(5) Kerangka Pemikiran teoritik



Masalah :

Keterpinggiran petani kecil dan perempuan karena RH dan Strategi adaptasi PK & P

Terjadinya Perubahan System pertanian padi Sawah (proses produksi biologis UT padi sawah)

Hipotesa/pertanyaan penelitian :

- (1) Proses perubahan produksi biologi UT padi sawah mendorong peminggiran PK dan Perempuan.
- (2) Terdapat perbedaan pemaknaan RH bagi PK dan Perempuan.
- (3) Terdapat bentuk dan proses adaptasi yang spesifik dilakukan PK dan Perempuan

### A. Keterpinggiran :

1. Petani kecil tidak dapat berpartisipasi (terpinggirkan) dari modernisasi pertanian karena RH
2. Perempuan tidak dapat berpartisipasi (terpinggirkan) dari modernisasi pertanian karena pembagian kerja menurut adat dilapangan pertanian (padi sawah), tidak lagi mengikat dan tenaga kerja wanita kalah dalam persaingan.

### B. Strategi Adaptasi :

1. Petani kecil yang terpinggirkan cenderung mengembangkan pekerjaan sampingan diluar usaha tani ( off farm) jika ada, tetapi jika tidak ada, ia cenderung menjadi buruh.
2. Perempuan yang terpinggirkan, cenderung menjadi buruh dan kembali ke domestik RMT.

## **F. Hipotesis Pengarah**

1. Proses perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial merupakan rangkaian proses yang berefek peminggiran petani kecil dan perempuan dalam revolusi hijau.
2. Terdapat perbedaan pemaknaan terhadap revolusi hijau antara petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan dengan golongan/lapisan masyarakat tani yang diuntungkan.
3. Terdapat bentuk dan proses adaptasi yang spesifik dilakukan petani kecil dan perempuan dalam menghadapi peminggiran karena revolusi hijau.

## **G. Definisi Operasional**

1. Keterpinggiran petani kecil dan perempuan : adalah proses dimana petani kecil dan perempuan semakin berkurang perannya dalam kegiatan pertanian.
2. Petani kecil : adalah petani laki-laki yang kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektar yang terlibat dan pernah terlibat dalam pekerjaan pertanian dan sekarang terpinggirkan karena revolusi hijau.
3. Perempuan : adalah janda dan isteri petani yang terlibat dan pernah terlibat dalam pekerjaan pertanian dan sekarang terpinggirkan dari sektor pertanian karena revolusi hijau.

4. Revolusi hijau : adalah sebuah program pemerintah yang mempunyai arti perubahan serentak produksi tanaman (hijau) pangan melalui penggunaan teknologi pertanian modern (bibit unggul, pupuk sintetis dan pestisida)
5. Struktur sosial : adalah pola yang terbentuk pada masyarakat yang didasarkan pada status dan peran yang dimiliki petani kecil dan perempuan karena penguasaannya terhadap faktor-faktor produksi.
6. Faktor Teknis : adalah faktor teknis yang berpengaruh dalam peminggiran petani kecil dan perempuan yang meliputi; bibit unggul, pupuk sintetis dan pestisida.
7. Sistem Ekonomi: adalah perkembangan sistem perekonomian masyarakat setelah revolusi hijau melanda pedesaan, dilihat dari berkembangnya sistem pasar, berkembangnya organisasi dan semakin komersilnya masyarakat petani.
8. Adaptasi: adalah proses penyesuaian bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan dari sektor pertanian, dilihat dari strategi yang ditempuh petani kecil dan perempuan dalam mempertahankan ekonomi rumah tangganya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini idealnya dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian yang dominan digunakan adalah kualitatif disesuaikan dengan obyek studi. Pendekatan kualitatif dengan tujuan menguraikan dan memberikan penjelasan (eksplanasi), memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan mendalam (*in-depth*) tentang fenomena-fenomena sosial yang menjadi objek studi. Pendekatan kualitatif akan diperoleh bentuk pemaknaan revolusi hijau bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan yang berbeda pemaknaannya dengan golongan/lapisan yang diuntungkan oleh revolusi hijau. Pendekatan kuantitatif bertujuan melengkapi pendekatan kualitatif terutama dalam melihat fakta peminggiran petani kecil dan perempuan berdasarkan data time series (perubahan kepemilikan lahan dan perubahan pekerjaan responden).

Strategi penelitian ini adalah studi kasus dan survei. Unit kasus adalah Desa dan unit survei adalah Rumah tangga. Strategi penelitian studi kasus digunakan untuk mencapai tujuan: (1). Pemaknaan petani kecil dan perempuan terhadap proses revolusi hijau dan efek peminggirannya, dan (2). bentuk dan proses adaptasi sosial yang dilakukan petani kecil dan

perempuan dalam menghadapi peminggiran oleh revolusi hijau. Strategi penelitian survei digunakan untuk mencapai tujuan dalam penggambaran mengenai fakta peminggiran petani kecil dan perempuan oleh revolusi hijau.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae dan Desa Passeno, Kecamatan Baranti di Kabupaten Sidrap. Dasar pertimbangan pemilihan kedua desa tersebut didasarkan pada letak administratif dekat dan jauhnya dari kota Pangkajene, untuk memperoleh gambaran tentang adanya perbedaan dan efek revolusi hijau, serta strategi adaptasi yang dilakukan petani kecil dan perempuan ketika mereka menghadapi peminggiran dari sektor pertanian padi sawah. Dasar pertimbangan wilayah Kabupaten Sidrap dijadikan lokasi penelitian karena penerapan revolusi hijau yang dimulai sejak tahun 1970 dan telah menunjukkan keberhasilan dari program revolusi hijau dengan dikenalnya Kabupaten Sidrap sebagai penghasil beras di Sulawesi Selatan, dengan produksi rata-rata 322,273 ton/ha per tahun, dengan luas panen 69,77 ha per tahun, dan surplus sebesar 154,379 ton/ha per tahun. Selain itu, wilayah Sidrap mempunyai jumlah penduduk 239,795 jiwa, yang sebahagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Melihat jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan

buruh tani, maka dapat dikatakan bahwa hampir seluruh penduduk bekerja pada bidang yang berhubungan dengan pertanian, sehingga wilayah Sidrap dapat disebut sebagai komunitas yang "tipikal pertanian" dan berbasis padi sawah.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh berasal dari informan dan Responden. Data yang bersumber dari informan meliputi data mengenai; (1). pemaknaan revolusi hijau bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan yang berbeda pemaknaannya dengan golongan/lapisan yang diuntungkan oleh revolusi hijau, (2). bentuk dan proses adaptasi yang dilakukan petani kecil dan perempuan dalam menghadapi peminggiran oleh revolusi hijau. Informan adalah petani padi sawah (petani kecil dan petani besar) dan perempuan yang dipilih secara "purposive" dengan pertimbangan petani kecil, petani besar dan perempuan mengalami dan mengetahui proses terjadinya perubahan sistem pertanian padi sawah di wilayahnya.

Jumlah informan petani padi sawah di Desa Sereang 7 orang (3 orang petani kecil dan 4 orang petani besar) dan di Desa Passeno 4 orang (2 orang petani kecil dan 2 orang petani besar). Jumlah informan perempuan di Desa Sereang 3 orang dan 2 orang di Desa Passeno. Dari keseluruhan informan yang berjumlah 11 orang, baik di Desa Sereang maupun di Desa Passeno, dipilih satu orang informan BSR yang berfungsi sebagai responden karena ia

dapat memberikan informasi tentang dua orang petani yang mengalami perubahan drastis, terutama dari aspek kepemilikan lahan, yang tadinya sebelum revolusi hijau lahannya luas dan sesudah revolusi hijau lahannya menjadi sempit. Sebaliknya, terdapat seorang petani yang diketahuinya, sebelum revolusi hijau lahannya sempit dan sesudah revolusi hijau lahannya bertambah luas.

Data yang bersumber dari responden diperoleh melalui acak stratifikasi (stratified random sampling), dengan cara membagi populasi petani padi sawah ke dalam lapisan-lapisan beragam dan kemudian dari setiap lapisan diambil secara acak. Dasar yang diambil untuk membagi sub populasi ke dalam lapisan beragam adalah luas kepemilikan lahan.

Sampel adalah petani padi sawah (petani kecil, petani menengah dan petani besar). Jumlah sampel petani padi sawah diambil secara proporsional sebanyak 22 % dari masing-masing lapisan, dari jumlah populasi 492 petani padi sawah di Desa Sereang dan 497 petani padi sawah di Desa Passeno. Di Desa Sereang; lapisan petani besar ( $> 1$  ha) = 97 orang, lapisan petani menengah (0,5 – 1 ha) = 127 orang dan lapisan petani kecil ( $< 0,5$  ha) = 268 orang. 22 % dari jumlah masing-masing lapisan; petani besar ( $> 1$  ha) = 21 orang, lapisan menengah (0,5–1 ha) = 28 orang dan petani kecil ( $< 0,5$  ha) = 59 orang. Jumlah keseluruhan sampel di Desa Sereang adalah 108 orang.

Di Desa Passeno; petani besar ( $> 1$  ha) = 89 orang, petani menengah (0,5 – 1 ha) = 148 orang dan petani kecil ( $< 0,5$  ha) = 260 orang. 22 % dari

jumlah petani padi sawah di masing-masing lapisan; petani besar ( $> 1$  ha) = 20 orang, petani menengah (0,5 – 1 ha) = 33 orang dan petani kecil ( $< 0,5$  ha) = 57 orang. Jumlah keseluruhan sampel di Desa Passeno adalah 110 .orang.

Sampel perempuan yang diawal penelitian ini menjadi pertimbangan peneliti untuk diambil pada kedua desa penelitian untuk melihat keterpinggiran perempuan, ternyata mendapat kendala untuk dilakukan karena perempuan (baik yang ada di Desa Sereang maupun yang ada di Desa Passeno) jumlahnya tidak mencukupi untuk dijadikan sampel, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil perempuan sebagai informan yang dipilih secara “purposive” sebanyak 5 orang untuk dua lokasi penelitian (3 orang di Desa Sereang dan 2 orang di Desa Passeno. Tiga orang informan di Desa Sereang, satu orang berstatus janda dan dua orang isteri petani kecil. Dua orang informan di Desa Passeno, berstatus sebagai isteri petani besar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer yang bersumber dari responden dan informan digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi terlibat (participant observation) dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Data sekunder yang

dikumpulkan meliputi gambaran umum mengenai desa penelitian seperti; keadaan geografi dan demografi, struktur pemilikan tanah, struktur okupasi, struktur pemerintahan dan semacamnya.

Data primer dikumpulkan untuk mencapai tujuan pemaknaan revolusi hijau, yakni mencari informasi dari masyarakat petani mengenai apa yang dilihat, dirasakan, didefinisikan, dan dipahami oleh masyarakat. Dalam menggali informasi, peneliti sudah melibatkan masyarakat petani, bahkan sesungguhnya peneliti berusaha belajar dan menjadi bagian dari masyarakat petani untuk menemukan pemaknaan revolusi hijau yang bersumber dari petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan dan pemaknaan revolusi hijau bagi petani yang diuntungkan oleh revolusi hijau.

Kegiatan observasi dan pengisian kuesioner dimulai dari Desa Sereang selama satu bulan yakni bulan Januari 2007. Selanjutnya, bulan Februari 2007 wawancara mendalam dengan responden dan informan dengan mengunjungi rumah dan sawah petani berulang kali selama satu bulan. Bersamaan dengan kegiatan wawancara mendalam dilakukan, peneliti tidak luput dengan pengamatan tentang fenomena yang ada disekeliling petani kecil dan perempuan. Bulan ketiga dan keempat, yakni Maret dan April 2007 peneliti pindah ke Desa Passeno, melakukan kegiatan yang sama dengan di Desa Sereang. Dalam kurun waktu empat bulan pelaksanaan penelitian, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai instansi terkait dengan penelitian, seperti; data monografi wilayah

dari kantor Desa Sereang, Desa Passeno dan BPS Kabupaten Sidrap, data mengenai pemanfaatan teknologi baru dan perubahan-perubahannya, serta produksi usahatani padi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap.

Data yang bersumber dari sampel rumah tangga petani padi sawah digunakan teknik pengisian kuesioner secara terstruktur berdasarkan variabel-variabel yang terdapat dalam setiap hipotesis, meliputi data: (1). Identitas responden, (2). luas lahan dan status kepemilikan lahan, (3). penggunaan sarana produksi (bibit, pupuk dan pestisida), (4). penggunaan mesin-mesin pertanian (5). jenis sarana dan prasarana, (6). mobilitas okupasi, (7). alokasi peran dan sebagainya.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan berdasarkan sifat dan fakta data yang diperoleh, yakni:

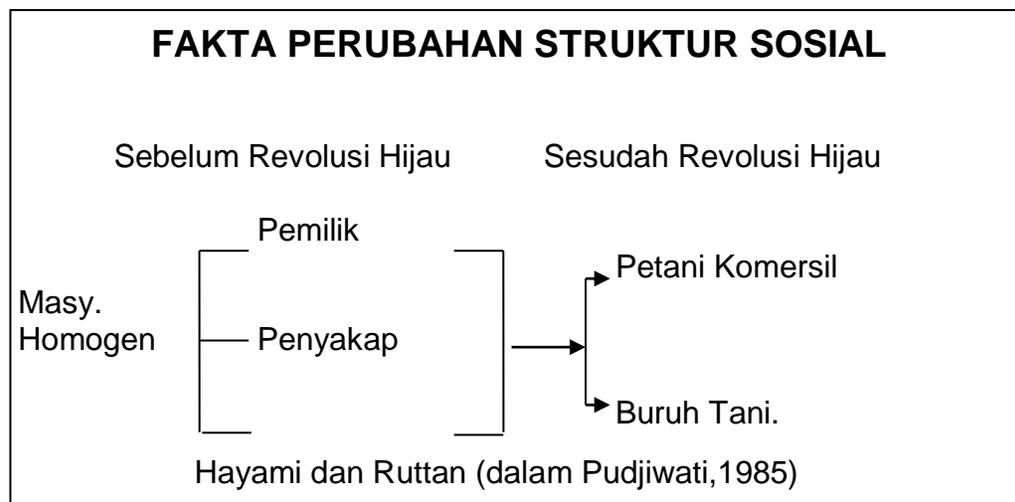
1. Fakta peminggiran petani kecil dan perempuan digunakan data time series berdasarkan mobilitas okupasi dan alokasi peran. Analisis dari data time series digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perubahan yang terjadi sebelum dan setelah revolusi hijau dalam kurun waktu lima tahun, meliputi; data perubahan kepemilikan lahan, data jumlah petani kecil dan perempuan yang telah meninggalkan pertanian dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia, data petani kecil dan

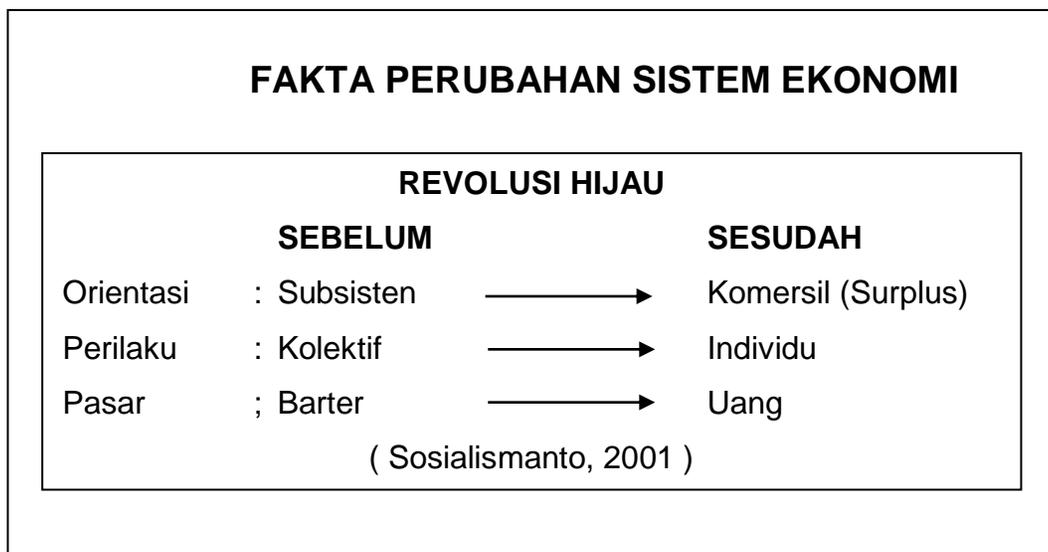
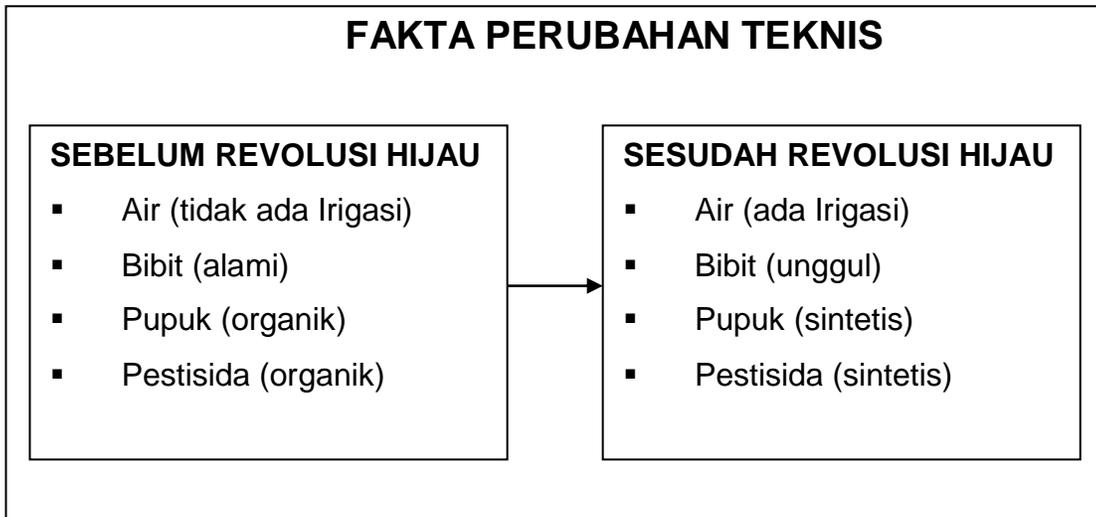
perempuan yang telah meninggalkan pertanian dan bekerja di sektor industri atau sektor informal lainnya, data petani kecil dan perempuan yang kembali bekerja di sektor pertanian.

### FAKTA PEMINGGIRAN BERDASARKAN DATA TIME SERIES

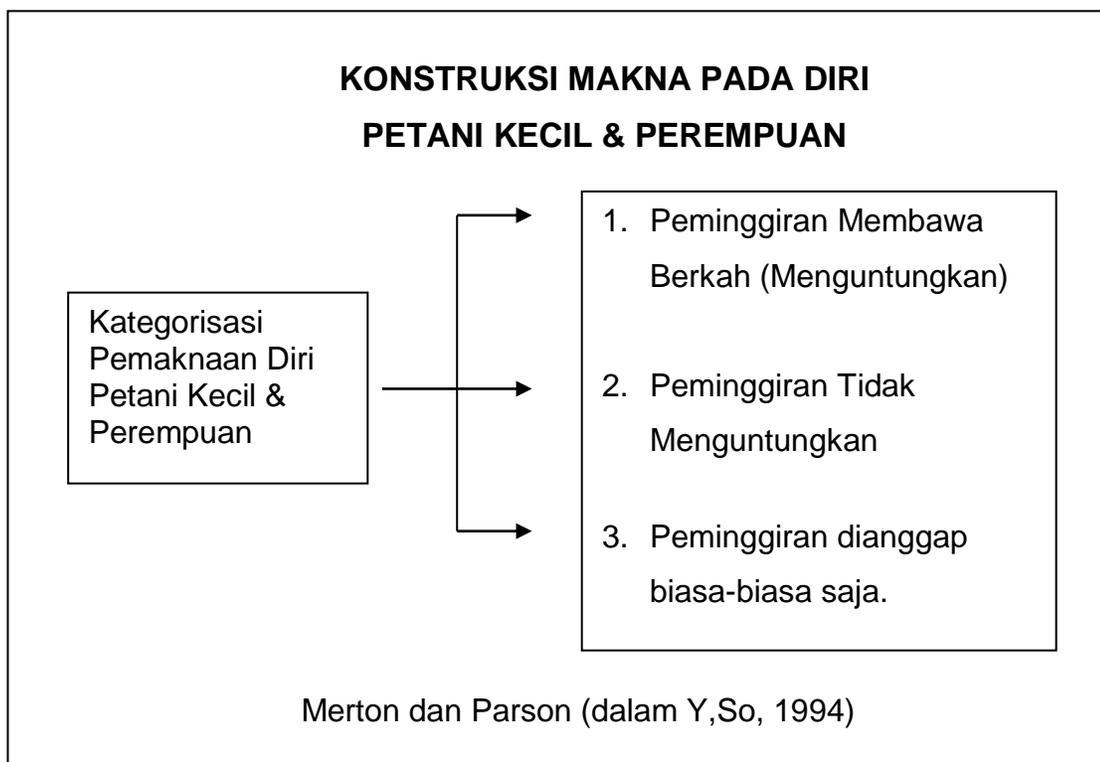
Waktu (5 Tahun)	Lahan (Ha)		Pekerjaan		
	Petani Kecil	Pemilik	Petani Kecil		
1967	0,50	1,00	Pertanian	Pertanian	Pertanian
1972	↓	↓	↓	↓	↓
1977					
1982					
1987					
1992					
1997	↓	↓	↓	↓	↓
2002					
2007					

2. Fakta perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial digunakan analisis eksploratif. Analisis ini menggambarkan bagaimana proses terjadinya perubahan teknis, perubahan sistem ekonomi dan perubahan struktur sosial sebelum dan sesudah revolusi hijau.

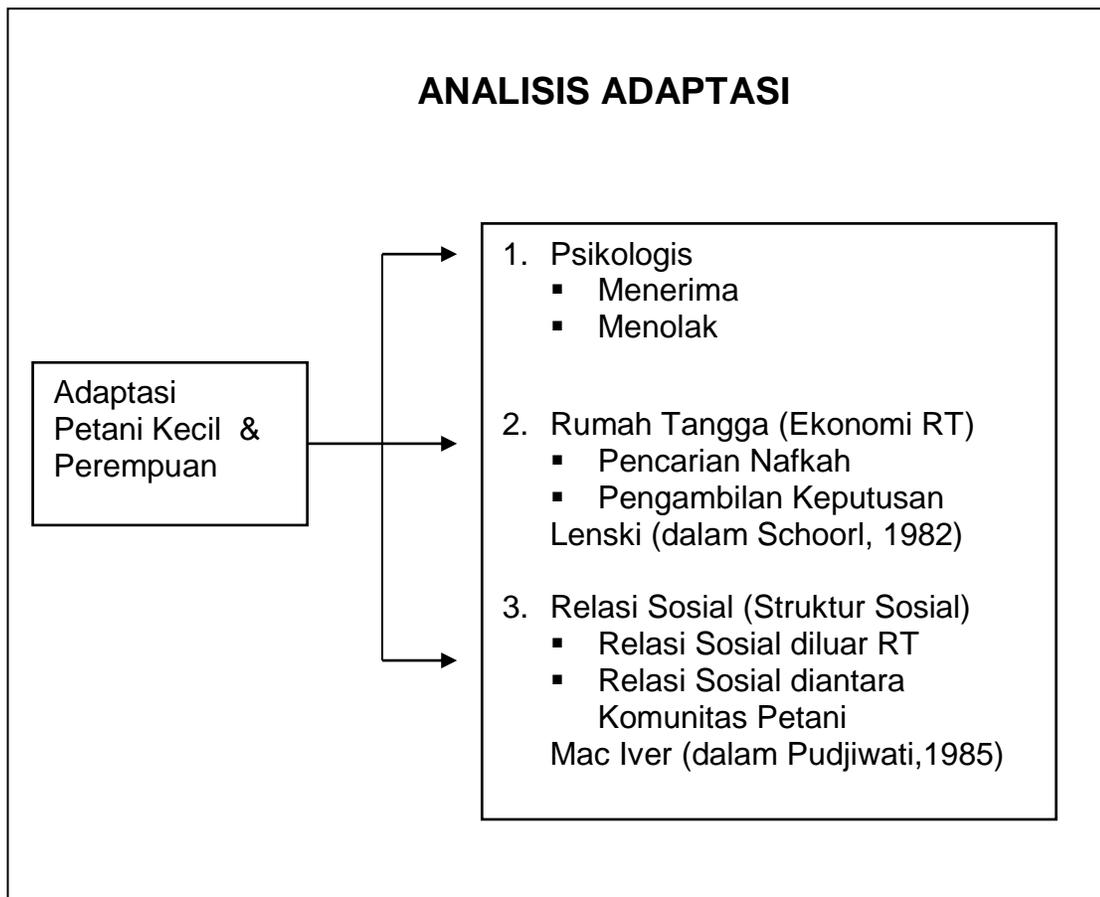




3. Konstruksi makna pada diri petani kecil dan perempuan digunakan model tipe ideal Weber. Analisis ini menggambarkan pengelompokan pemaknaan revolusi hijau yang berasal dari petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan karena revolusi hijau.



4. Adaptasi bagi petani kecil dan perempuan yang terpinggirkan digunakan analisis eksploratif. Analisis ini menggambarkan bagaimana penyesuaian diri dan strategi yang ditempuh petani kecil dan perempuan ketika menghadapi peminggiran karena revolusi hijau. Bentuk penyesuaian diri meliputi tiga aspek, yakni; psikologi (menerima atau menolak), rumah tangga (ekonomi rumah tangga) dan relasi sosial (struktur sosial).



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Pembentukan Wilayah**

Sejarah terbentuknya Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) berawal dari Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Di mana kedua kerajaan mengembangkan sistem pemerintahan yang berbeda. Kerajaan Sidenreng menganut sistem pemerintahan dari atas ke bawah (*top-down*) atau dalam Bahasa Bugis dikenal istilah "*Massorong Pawo*", sementara Kerajaan Rappang menganut sistem pemerintahan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau dengan istilah "*Mangelle Pasang*". Model pemerintahan seperti itu, oleh Weber (dalam Pranoto, 2001) berkaitan dengan adanya kekuasaan yang disandarkan atas 3 kategori otoritas yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik dan otoritas legal rasional. Namun, pemerintahan kerajaan biasanya mempunyai dua otoritas yaitu tradisional dan karismatik. Di pihak lain, pemegang pemerintahan modern bertumpu pada otoritas legal rasional.

Selanjutnya kondisi tersebut, prakteknya ada di mana-mana. Oleh Pranoto (2001), mengatakan sejak jaman pemerintah Mataram Islam pada abad ke 17, pada dasarnya birokrasi kerajaan Islam selalu berhubungan dengan pembagian teritorial, hirarki jabatan, tanah *apanage* dan aparatur pemerintahan. Setiap kekuasaan sentral selalu dibarengi dengan usaha memperkuat struktur feodalis. Orientasi kepada atasan makin kuat dan selalu

dibarengi dengan ketergantungan (*fully dependent*) yang mirip gaya renang katak, ke atas menyembah ke bawah menyepak, sehingga menghasilkan loyalitas bawahan tanpa reserve. Ini adalah sikap yang *submissive* ke atas dan otoriter ke bawah.

Pada sisi kerajaan bugis, agak berbeda dengan model yang diperagakan misalnya ditemui di sejumlah lontara di Sulawesi Selatan. Mata Silompoe yang memerintah di Kerajaan Bone di awal abad ke 13 selama 32 tahun telah mewariskan 3 hal dalam pemerintahannya yang sungguh-sungguh berorientasi kepada kepentingan rakyat yaitu;

1. *Mappolo leteng* (titian patah) yang dapat diartikan; Pertama, menjelaskan perihal ganti mengganti (*assisulureng*). Kedua, mengenai warisan (harta) yang boleh diwariskan.
2. *Rapang Bicara*, artinya pola dasar sesuatu keputusan, yakni penggarisan yang harus ditaati, keputusan yang sama harus dipersamakan dengan yang lain, yang serupa harus diserupakan.
3. *Ade*, artinya adat atau taatan. Artinya taatan hidup yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar ketertiban hidup tidak terganggu.

Elaborasi lebih jauh mengenai sistem, taktik dan strategi pemerintahan *Massorong Pawo* (*top-down*) dan *Mangelle Pasang* (*bottom-up*) merupakan tanda berkembangnya model pemerintahan kerajaan Sidenreng dan Rappang yang memiliki ciri khas tersendiri. Model ini tentunya bila dianalisis lebih jauh tergambar di dalam karakter masyarakatnya seperti persamaan

dan persaudaraan. Egalitarianisme masyarakat tentu banyak dilandasi oleh tata krama dan tata nilai pemerintahan kerajaan yang dalam "disebut otoriter" ternyata melahirkan sejumlah kearifan lokal dan tata aturan (*pangadereng*) yang sangat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Walau model Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang berbeda dalam gaya kepemimpinan, namun kemudian wilayah ini dapat dipersatukan dalam pemerintahan yaitu Sidenreng Rappang. Berbagai pandangan, harapan bahkan klaim bahwa Sidenreng dan Rappang berbeda namun dalam realitas hal ini tidak mengalami banyak masalah.

Barangkali ini merupakan untaian dan warisan demokrasi lokal yang terus ditanamkan sejak dini ketika terjadi kesepakatan pembentukan kerajaan lokal di Sulsel. Modal sosial pemerintah kerajaan ternyata telah merajut harmonisasi masyarakat dalam perspektif saling menghormati, bekerja sama serta bahu membahu membangun terciptanya kedamaian dan keamanan. Modal sosial tersebut bila ditelusuri dari berbagai sumber ternyata sangat kaya akan makna leksikalnya. Raja tidak akan sewenang-wenang melakukan penghakiman secara paksa kepada rakyat, akan tetapi didasarkan pada tata aturan yang telah diputuskan. Arung Bila (dalam Wanua Tanke, 2006) merumuskan ketetapan mengenai *pangadereng* (hal mengenai tata aturan) antara lain ada lima macam; Pertama, *Ade Maraja* (adat besar). Kedua, *Ade Pura Onro* (adat kekal). Ketiga, *Tuppu* (ketetapan). Keempat, *Wari* (tata cara). Kelima, *Rapang* (percontohan atau perumpamaan). Pada raja dikategorikan

sebagai *Ade Maraja* dan pada rakyat disebut *Ade Abiasang* (adat kebiasaan). Artinya raja dan rakyat telah berikrar bersama untuk meneguhkan relasi sosial dan relasi vertikal diantara mereka. Begitu dahsyatnya mengenai ikrar atau *janci* (bahasa bugis) tersebut seperti yang dapat kita lihat pada Ikrar Matajang (Bone, 1330) antara raja dengan rakyatnya yaitu:

Rakyat berkata: *"Angikko kiraukkaju, riao mammiri ria mutappalireng, elomu elokkeng, adammun kua, mattampaako kilao, mellauko kiabbere, molliko kisawe. Mauni anammeng napattarommeng muteai kiteya toi. Iyakiya amppirikeng temmakare, mudongirikkeng temmatippe, musalipurikkeng temmakecce"*.

Raja menjawab *"Uujung uparibotto ulu adammu tomaega, upate ripakka-pakka ulaweng alebbirena ada-adammu, riwettu mabbulo sipeppammu, rimaelomu pancajia arung"*

Terjemahannya : Ibarat Anda angin, maka kami daunnya: ke mana Anda berembus ke sanalah Anda membawa kami; kemauan Anda kemauan kami, kehendak Anda yang jadi, Anda mengundang kami datang, Anda meminta kami beri, Anda memanggil kami menyahut. Walaupun kami sudah memutuskan bersama tetapi Anda menolak akan kami tolak juga. Akan tetapi, lindungilah kami supaya tidak di makan tikus, jaga kami supaya tidak dimakan burung pipit, selimuti kami agar tidak kedinginan.

Kami junjung diatas batu kepala usul kalian, kami naikkan di atas usungan emas kemuliaan usul kalian, pada waktu kalian bersepakat seperti bulatnya bambu, pada waktu kalian mengusulkan kami menjadi raja.

Peristiwa seperti ini lazim dijumpai di beberapa cerita rakyat (foklore), misalnya peristiwa pengangkatan raja pertama di kerajaan Gowa yang

bergelar "*Tumanurunga*" seorang perempuan cantik yang turun dari Takkang Bassia Gowa. Di mana penduduk mengangkatnya menjadi raja setelah adanya ikrar bersama diantara mereka.

Relasi antara rakyat dan raja di dalam pemerintahan sangat personal, rakyat dapat secara langsung berkomunikasi dengan rajanya untuk kepentingan negerinya. Berbeda dengan kondisi masyarakat Jawa, lapisan atas masyarakat kerajaan tidak dapat langsung berhubungan dengan lapisan bawah, tetapi harus ada mediator yang menjembatani. Di tingkat bawah dibentuk penguasa desa yang berfungsi menjadi ujung tombak penguasa kerajaan. Distribusi kekuasaan berpusat pada raja dan keluarga raja. Para bangsawan kerajaan memencarkan diri untuk memperkuat posisi tradisional mereka dengan berekspansi pengaruh kepada masyarakat kecil. Itulah perspektif Weber mengenai otoritas tradisional, kharismatik dan legal sebagai prasyarat pembentukan sebuah kerajaan atau pemerintahan. Hal ini sangat sesuai dengan model dan karakteristik kerajaan yang ada di Jawa.

Kekuasaan raja-raja di Sulsel mulai mengalami disorientasi ketika kolonialisme Belanda merambah wilayah ini. Pada awal abad ke 19, pemerintah kolonial di Batavia telah mengklaim bahwa kerajaan bugis di Sulsel telah berada dibawah pengawasan Belanda. Akan tetapi secara *de facto*, kerajaan tersebut masih merdeka, raja-raja mereka masih memiliki pengaruh kuat di mata rakyatnya. Bendera serta pakaian kebesaran masih merupakan simbol dan sakramen tradisional mereka untuk menegakkan titah

raja. Walaupun pada masa itu berbagai intervensi dari Belanda telah dimulai, seperti pembukaan kantor dan pos perwakilan di sejumlah daerah. Kegiatan patroli serta pemungutan hasil bumi rakyat. Baru pada 1906, Belanda betul-betul menguasai jazirah Sulsel.

Hampir satu abad sebelumnya (Pelras, 2006), ketika Inggris menduduki Makassar pada 1810, sejumlah penguasa Bugis dipimpin Datu Tanete dan Datu Suppa menolak mengakui kekuasaan mereka. Alasannya dengan berakhirnya kekuasaan Belanda berarti mereka sudah bebas. Konflik sejenis terjadi di Bone, ketika penguasa Bone menolak menyerahkan pedang Sudanga (simbol kerajaan Gowa) yang jatuh ke tangan Bone pada 1785. Pemerintah Inggris menyerang Suppa, akan tetapi dipukul mundur oleh pasukan Bugis, sementara bala tentara Bone bahkan merebut kembali wilayah utara sekitar Maros, dan sebagian Bulukumba yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Selama pertikaian berlangsung, Gowa, Soppeng dan Sidenreng berpihak kepada Inggris.

Ketika Belanda kembali lagi, mulai terjadi politisasi raja-raja. Politik pecah belah "*divide at impera*". Pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan di Wajo yang akhirnya melahirkan migrasi besar-besaran. Bahkan para bangsawan Wajo turut di dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan di Sidenreng dan dimenangkan oleh La Panguriseng pada 1882. Dibawah kepemimpinannya, Sidenreng memperkuat kekuasaan dalam persekutuan "Ajatappareng" dan menolak kekuasaan Belanda. Karena

wilayah ini memiliki keunggulan komparatif seperti pelabuhan, hasil bumi dan sejumlah potensi sumber daya air seperti Sungai Saddang dan Sungai Bila, akhirnya wilayah ini berkembang dan mampu melakukan hubungan dagang dengan negeri tetangga seperti Singapura dan tanah Melayu. Parepare menjadi Kota Dagang berfungsi menyuplai berbagai kebutuhan seperti kopi ke daerah lainnya.

Akan tetapi pada 1906, kerajaan di Ajatappareng mengalami masa suram, kolonialisme Belanda menancapkan kukunya dan mulai menata sistem pemerintahan. Kerajaan Sidenreng dan Rappang berstatus distrik dalam wilayah Afdeling Parepare. Kemudian 1917, kedua wilayah tersebut menjadi satu bagian dari wilayah Pemerintah Afdeling Parepare meliputi; Pertama, Onder afdeling Sidenreng Rappang. Kedua, Onder Afdeling Pinrang. Ketiga, Onder Afdeling Parepare, Keempat, Onder Afdeling Enrekang, dan Kelima, Onder Afdeling Barru.

Onder Afdeling Sidenreng Rappang dibawah kendali Controleur yang berkedudukan di Rappang dengan membawahi wilayah adat (regen). Kondisi ini terus berlangsung hingga pendudukan tentara Jepang di bawah pengawasan Bun Ken Kanrikan. Pasca kemerdekaan 1945, mulai dilakukan penataan pemerintahan. Parepare yang sebelumnya membawahi beberapa onder afdeling. Statusnya ditingkatkan menjadi daerah otonom (kabupaten dati II). Sementara Parepare sendiri daerah otonom juga dalam bentuk kotamadya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 1952,

Parepare beralih menjadi daerah swatantra tingkat II. Sementara Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang di dalamnya terdapat daerah swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang sebagai lembaga pemerintahan adat berdasarkan Statblaad 1938 No 529.

Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Kewedanan Sidenreng Rappang yang meliputi swapraja Sidenreng dan swapraja Rappang dibentuk menjadi daerah tingkat II Sidenreng Rappang dengan ibu Kota di Pangkajene Sidrap.

### **B. Asas Usul Komunitas Petani**

Pelras (2006) telah membongkar episentrum perspektif mengenai kedigdayaan orang Bugis sebagai suku bangsa pelaut yang diyakini selama ini. Menurutnya pada periode awal Sulawesi Selatan telah dihuni sejak pertengahan atau penghujung Pleistosen Akhir, yakni sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun sebelum masehi. Berbagai bukti ditemukan seperti penelitian yang dilakukan dilembah Sungai WalanaE di Cabbenge Soppeng. Dimana ada bukti industri alat serpih (*flakes indutri*), adanya fosil hewan yang sudah lama punah. Sehingga Glover (dalam Pelras, 2006) lebih cenderung berpendapat bahwa aktivitas manusia mungkin telah ada di Sulawesi Selatan sejak kira-kira 40.000 tahun lalu. Dengan kata lain penghuni awal Sulawesi Selatan dianggap sesama dengan Manusia Wajak di Jawa Timur, Manusia

Gua Niah di Sarawak, Borneo Utara, dan temuan-temuan Gua Tabon di Palawan, Filipina Selatan.

Sementara dalam lontara Sulawesi Selatan menyebutkan proses lahirnya kerajaan-kerajaan seperti Luwu, Bone dan Gowa. Ditandai pada periode awal kedatangan *Tomanurung* (manusia langit) yang disebut Patotoe di puncak Gunung Lantimojong. Asal mula Patotoe tidak banyak dijelaskan hanya disebutkan berasal dari *Boting Langi* (Petala Langit). Selanjutnya putra Patotoe, Batara Guru datang kemudian dengan nama La Tonge Langi di Luwu. Proses kemunculannya diceritakan berasal dari sebatang buluh petung atau dalam bahasa Bugisnya *Ma' deppaE ri lappa tellang*. Batara Guru kemudian kawin dengan We Nyilittimo yang menurut riwayat datang dari laut dari jelmaan busa air atau *Toppoe Busa Empong*. Keturunannya kemudian menyebar dan menjadi cikal bakal raja-raja di Sulawesi Selatan termasuk di Sidenreng dan Rappang.

Kepercayaan tentang asal mula munculnya *Tomanurung* dalam komunitas bugis-makassar didasari atas berlangsung konflik berkepanjangan antara komunitas satu dengan lainnya. Masing-masing penguasa wilayah (*wanua*) berebut pengaruh untuk saling menguasai, *homo homini lupus bella omnis contra omnis*. Manusia menjadi serigala dengan manusia lainnya, siapa yang kuat dialah yang menang. Masa ini disebut dengan masa "*Sianre Bale*", tidak ada aturan serta tidak ada pemerintahan yang efektif untuk mencegah timbulnya eskalasi perselisihan. Saling membunuh dan menguasai

menjadi arena untuk mendominasi wilayah lain. Para *punggawa* kampung (*Matoa*) berfungsi sebagai perekat di dalam menangkal serangan punggawa dari kampung lain. Keadaan ini berlangsung cukup lama kira-kira di abad 12-13 masehi. Terjadilah *chaos* di masyarakat dan masyarakat rindu akan ketenteraman dan kedamaian. Karena perang ternyata melahirkan mala petaka, maka para punggawa kemudian sadar bahwa perang harus diakhiri. Terjadilah permufakatan antara para punggawa untuk mengakhiri peperangan.

Desa Sereang dan Desa Passeno merupakan dua buah desa yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Sidrap, yang dahulu menjadi sebuah kerajaan dan sumber penghidupan penduduknya adalah mengelola sawah dan kebun. Selain itu, terdapat juga sapi dan kerbau yang digunakan untuk membajak dan menjadi sumber penghasilan tambahan penduduk. Desa Sereang adalah desa tertua di daerah teritorial Sidrap dan Desa Passeno merupakan pemekaran Desa Duampanua di Rappang. Dahulu di Sidrap, diketahui hanya terdapat dua wilayah pemerintahan yaitu Sereang dan Rappang. Desa Sereang yang dekat dengan ibukota pangkajene telah ada, jauh sebelum terbentuknya pemerintah kabupaten di Sidrap yang sekarang ini dipimpin oleh seorang bupati. Petta Sereang adalah sosok penguasa yang memimpin Sereang sewaktu desa berstatus sebagai kerajaan dan Petta Rappang yang memimpin di wilayah Rappang, yang dikenal sebagai kerajaan Masepe' pada waktu itu.

Batas wilayah kedua daerah ini ditandai oleh jenis kayu dari pohon yang ditanam. Kayu alumpang merupakan identitas wilayah yang berada dibagian selatan dari pohon yang ditanam dan kayu cawa berada di bagian utaranya. Diyakini oleh penduduk Sidrap pada waktu itu, jika mereka melintasi wilayah Rappang maka akan menemui kayu alumpang dan jika melintasi kota pangkajene akan dijumpai kayu cawa. Dahulu, jika seseorang akan melintas dari jalur arah Pangkajene ke Rappang, maka akan melalui kerajaan Sidenreng. Penduduk Sidrap pada waktu itu, akan berjalan berjongkok bila melalui rumah raja, akan turun dari sepeda jika seseorang bersepeda dan akan membuka topi jika seseorang mengenakan topi.

Pada waktu Sidrap masih berbentuk kerajaaan, sebahagian tanah raja diberikan kepada penduduk untuk dijadikan sawah dan digarap oleh penduduk tanpa diupah. Hasil yang diperoleh dari menggarap sawah digunakan untuk konsumsi desa. Penduduk yang berkesempatan mengelola sawah raja merasa bangga, meskipun tanpa upah. Tetapi raja sangat memperhatikan penduduknya yang menggarap sawahnya. Bentuk kepedulian raja yakni memberi sepuluh are tanah, jika penduduk dapat mengelola lahan seluas satu hektar. Namun, belakangan pembagian tanah diubah dalam bentuk pembagian hasil produksi pertanian. Sepuluh persen merupakan bagian penggarap sawah dan sembilan puluh persen bagian raja (tawana arunge).

Isteri-isteri para pengelola sawah tidak terlepas dari pertalian ikatan patron-klien. Pekerjaan seperti memasak, menumbuk padi, dan memelihara anak-anak raja dilakukan oleh para isteri pengelola sawah. Tetapi, keperluan sehari-hari keluarga pengelola sawah sudah menjadi tanggungan pihak kerajaan. Relasi dalam hubungan patron-klien yang berlangsung dalam lingkungan kerajaan dan keluarga penggarap sawah akan menjadikan penggarap sawah dan keluarganya merasa aman bernaung dibawah patronnya (raja). Dari gambaran asal usul komunitas petani di Sidrap, diperoleh bahwa komunitas petani sangat berkaitan dengan rangkaian seremoni kehidupan pada pemerintahan yang berbentuk kerajaan pada saat itu. Jadi kurang jelas kapan tepatnya komunitas petani di Sidrap mulai mengenal bercocok tanam padi, tetapi dapat dilihat kira-kira bersamaan dengan dimulainya pemerintahan yang berbentuk kerajaan pada waktu itu. Pada masa berlakunya sistem kerajaan, maka di kedua lokasi penelitian yang tergolong etnis Bugis dikenal adanya pelapisan sosial menurut tingkatan status dalam masyarakat, yakni;

1. Arung (bangsawan) ; anggota masyarakat yang tergolong pada zaman kerajaan adalah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi dalam tingkatan pelapisan sosial. Namun pada tingkat kebangsawanan dapat pula dibedakan atas dua golongan, yakni golongan bangsawan yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pada masa itu, sedikit lebih tinggi derajatnya dibanding dengan seorang bangsawan yang tidak

mempunyai jabatan dalam pemerintahan pada masa kerajaan berlangsung.

2. Tumaradeka (masyarakat kebanyakan); merupakan lapisan sosial masyarakat yang berlaku pada khususnya di kalangan masyarakat yang tergolong etnis Bugis. Status tumaradeka dalam struktur sosial berada pada lapisan kedua setelah gelar bangsawan.
3. Ata' (budak); merupakan lapisan sosial yang berada pada tingkat paling bawah menurut susunan stratifikasi sosial. Anggota masyarakat yang tergolong dalam kelompok ata', adalah orang-orang yang merupakan pesuruh sang raja. Lebih dari itu, anggota masyarakat yang tergolong ata' dianggap pula sebagai belian atau tawanan perang.

Perkembangan akhir-akhir ini, lapisan sosial seperti ata' nampaknya sudah bergeser menurut tingkat derajat seseorang akibat perkembangan masyarakat. Akibatnya, terjadi perubahan pada masyarakat yakni munculnya pelapisan sosial baru pada masyarakat petani dimana dalam struktur terbagi pada tiga lapisan, yaitu; (1) petani pemilik lahan, (2) petani penyewa lahan dan (3) buruh tani. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan pada kedua lokasi penelitian.

### **C. Kondisi Geografis dan Administratif**

Sidrap merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3 43 – 4 09 Lintang Selatan dan 119 41 – 120 10 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Wajo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan Soppeng, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang. Secara administratif, luas wilayah Sidenreng Rappang 1.883,25 km yang terbagi kedalam 11 kecamatan dan 105 desa/kelurahan.

Kabupaten Sidrap pada umumnya adalah tanah daratan dan sangat sulit kita menemukan gunung di wilayah itu, hanya ada beberapa bukit-bukit kecil, karena itu daerah Sidrap memang sangat cocok untuk persawahan. Keadaan tanah tidak terlalu subur, meski curah hujan relative cukup stabil. Pada musim kemarau Sidrap termasuk kering, berdebu dan sangat panas . Begitupun dengan beberapa desa yang terdapat di Sidrap seperti Desa Passeno dan Desa Sereang yang memiliki keadaan geografis seperti itu. Daerah sedikit berbukit dan bergunung hanya bisa di Kecamatan Watang Pulu, Baranti, Panca Rijang, Maritengngae dan Dua Pitue. Kecamatan Pancalautang dan Tellulimpoe, selain sedikit berbukit dan bergunung, juga termasuk berawa.

Desa Passeno sebagai desa pemekaran dari Desa Duampanua pada tahun 1982 yang terletak di Kecamatan Baranti, mempunyai topografi wilayah datar dengan kemiringan 100 persen. Ketika masuk ke desa Passeno, terlihat kondisi jalan mulus beraspal, tidak berlubang terutama jalan poros. Ini karena wilayah Desa Passeno merupakan poros kendaraan yang memiliki jalur Sidrap – Pinrang. Jalan yang menghubungkan dengan desa-desa tetangga juga baik kondisinya hanya saja masih pengerasan belum beraspal. Jarak dari ibukota kecamatan adalah kurang lebih dua kilometer dan dapat ditempuh sekitar lima belas menit. Di sisi kiri kanan jalan nampak perkampungan penduduk dengan pekarangan cukup luas yang diantarai oleh tanaman padi. Selain itu, diantara perkampungan penduduk, juga terlihat beberapa pohon dan kebun yang ditanami bermacam-macam tanaman, diantaranya ada mangga, jambu, jeruk dan coklat. Dipekarangan rumah penduduk pun terlihat beberapa tanaman hias dengan beragam jenis yang dipelihara dan menambah keindahan Desa Passeno. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manisa, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tonrongnge, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Baranti dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duampanua.

Jenis tanah di Desa Passeno adalah *Alluvial Hidromorf* dengan warna coklat kelabu. Pola pemanfaatan areal tanah terdiri dari; sawah irigasi teknis 682,15 hektar, memberi peran bagi petani dalam mengusahakan padi dua kali dalam setahun. Tegalan/ladang 126,05 hektar, dengan berbagai jenis

tanaman yang diusahakan seperti; mangga, jambu, jeruk dan coklat. Pemukiman 47,80 hektar, yang umumnya terdiri dari rumah panggung dan sangat sedikit berdiri rumah permanen.

Desa Sereang adalah desa tertua di Sidrap, terletak di Kecamatan Maritenggae dan dapat ditempuh sekitar dua puluh menit dari ibukota kabupaten Pangkajene, dengan jarak tempuh kurang lebih tiga kilometer. Desa Sereang terletak memanjang dari ibukota pangkajene mengarah ke arah Rappang. Nampak persawahan yang cukup luas diantara perkampungan penduduk. Perkampungan penduduk tertata rapi disepanjang jalan dan dipenuhi dengan tanaman hias. Tanaman hias di wilayah ini menjadi primadona bagi setiap rumahtangga. Terkesan bahwa ada persaingan diantara rumahtangga untuk memelihara beragam jenis tanaman hias dan bagi penduduk yang berada pada golongan menengah ke atas tidak segan-segan membeli tanaman hias yang harganya cukup mahal. Dari segi akses transportasi, wilayah ini mudah dijangkau karena letaknya sangat dekat dengan ibukota kabupaten Pangkajene. Ketika masyarakat ingin bepergian dengan jarak dekat tersedia ojek dan bendi sebagai alat transportasi sederhana, dan malam hari sekalipun masih tetap dijumpai ojek yang beroperasi terutama bagi ojek yang mempunyai langganan tetap. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kanie, sebelah Timur dengan Kelurahan Wala, sebelah Selatan dengan Desa Carawali dan Sebelah Barat dengan Kelurahan Kanyuara.

Desa Sereang juga mempunyai topografi wilayah datar dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Pemanfaatan tanah terdiri dari sawah irigasi teknis 834,18 hektar, sawah setengah irigasi teknis 174,44 hektar, pekarangan 11,10 hektar dan perkebunan 66,61 hektar. Jenis tanah adalah Alluvial Kelabu. Jumlah kepemilikan lahan pertanian rumahtangga petani terdiri dari; memiliki lahan 356 RTP, tidak memiliki lahan 191 RTP, memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar 45 RTP, memiliki lahan antara 0,5 – 1,0 hektar 62 RTP, dan memiliki lahan lebih dari 1,0 hektar 45 RTP. Ketersediaan irigasi teknis dan setengah teknis, dikaitkan dengan luas kepemilikan lahan rumahtangga petani terutama bagi rumahtangga petani berlahan luas menunjukkan bahwa usahatani padi sawah telah dikelola secara intensif dan mempunyai peluang mengusahakan tanaman padi lebih dari sekali dalam setahun.

#### **D. Kondisi Demografis**

Secara demografis, Desa Passeno mempunyai penduduk sebanyak 2.920 orang, terdiri atas 1.291 orang laki-laki dan 1.629 orang perempuan, dengan jumlah KK 883. Kepadatan penduduk Desa Passeno 341 per km (luas wilayah 8,56 km). Di Desa Sereang, terdapat penduduk sebanyak 2.239 orang, terdiri dari 1.081 orang laki-laki dan 1.158 orang perempuan, dengan jumlah KK 469. Kepadatan penduduk Desa Sereang 206 Km (luas wilayah 10,85 km). Pertumbuhan penduduk Desa Passeno 11,32 persen dan Desa Sereang 5,58 persen. Desa Passeno kepadatan dan pertumbuhan

penduduk lebih tinggi jika dibandingkan Desa Sereang, padahal luas wilayah Desa Sereang lebih luas. Hal ini digambarkan dengan keberhasilan program keluarga berencana yang telah digalakkan pemerintah pada tahun 1980-an.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, Desa Sereang terdiri dari petani 59,11 persen, buruh tani 33,54 persen, buruh (swasta) 1,55 persen, pegawai negeri 2,38 persen, pengrajin 0,52 persen, pedagang 1,24 persen, peternak 1,55 persen dan montir 0,10 persen. Di Desa Passeno, sebaran mata pencaharian penduduk meliputi; petani 43,79 persen, buruh tani 48,02 persen, pedagang 2,43 persen, pengrajin 1,79 persen, peternak 3,59 persen dan montir 0,38 persen. Dari kedua desa komunitas petani terlihat bahwa persentase buruh tani Desa Passeno lebih besar jika dibandingkan Desa Sereang. Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan demografis wilayah dimana Desa Sereang lebih dekat dengan ibukota kabupaten, sehingga mobilitas penduduk sangat memungkinkan untuk akses keluar mencari pekerjaan dikota dibanding penduduk Desa Passeno. Di Desa Sereang juga terlihat sekitar 2,38 persen penduduknya adalah pegawai negeri yakni guru dan kepala sekolah, serta pegawai dinas pertanian. Pemilihan pekerjaan utama sebagai petani di kedua desa yang menempati persentase terbesar, dapat dimaklumi tidak saja karena kondisi geografi yang memungkinkan untuk itu, tetapi juga karena masyarakat desa pada umumnya cenderung

statis pola hidupnya, sehingga mereka memilih rasa aman dengan cara-cara yang telah turun temurun dilakukan.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Passeno, bervariasi diantaranya; TK 3,42 persen, SD 49,93 persen, SLTP 46,91 persen. Di Desa Sereang tingkat pendidikan penduduk TK 21,63 persen, SD 36,52 persen, SLTP 20,42 persen, SLTA 19,41 persen, D1 1,01 persen, D2 0,14 persen dan S1 0,88 persen. Desa Sereang relatif jauh lebih meningkat tingkat pendidikan jika dibandingkan Desa Passeno karena sudah ada penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tinggi (sarjana). Dikaitkan dengan mata pencaharian penduduk, diperoleh gambaran bahwa di Desa Sereang penduduk yang tingkat pendidikan relatif rendah lebih memilih keluar keibukota kecamatan atau ke ibukota kabupaten Pangkajene menjadi tukang kayu dan tukang batu ataukah menjadi buruh industri di kota, daripada menjadi buruh tani diwilayahnya. Di Desa Passeno, penduduk yang relatif rendah pendidikannya memilih masuk dalam kelompok power thresher sebagai buruh tani dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya padi.

Tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah di Desa Passeno menjadi kendala dalam proses pembangunan pertanian yang berlangsung dan menjadi relevan kalau pertumbuhan jumlah buruh tani semakin besar, jika dibandingkan jenis mata pencaharian lainnya. Perkembangan akhir-akhir ini penduduk Desa Passeno sudah mulai muncul kesadaran para orang tua

untuk menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat yang lebih tinggi bertujuan agar kehidupan anaknya dikemudian hari dapat lebih baik dari mereka. Bagi keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, maka ia akan memperoleh bantuan dari anggota komunitas lain yang keadaannya sedang lebih baik dari mereka, yang dalam hal ini dapat dianggapnya sebagai patron.

### **E. Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua desa komunitas petani, dapat dilihat dari penampakan rumah penduduk dan interaksi diantara anggota komunitas petani. Di Desa Passeno, rumah penduduk bervariasi antara rumah permanen dan rumah panggung, yang halamannya cukup luas dan umumnya ditanami tanaman hias yang beragam jenisnya. Interaksi kehidupan masyarakatnya berlangsung dalam suasana harmonis dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Di Desa Sereang, rumah penduduk umumnya terdiri dari rumah permanen, kecuali setelah masuk daerah pelosok desa baru ditemukan beberapa rumah panggung. Suasana kehidupan adalah mirip suasana kehidupan kota dan interaksi masyarakatnya berlangsung juga cukup harmonis dan saling menghargai dan masih menjunjung nilai-nilai kebersamaan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keseharian masyarakat petani. Aktifitas keseharian masyarakat juga berbeda. Desa Passeno relatif penduduk hidup dari kegiatan bercocok tanam yang bersentuhan langsung dengan bidang pertanian. Di Desa

sereang, aktifitas penduduk sudah bervariasi di bidang pertanian dan non pertanian. Masyarakat sudah tersentuh dengan kehidupan kota yang mengarah pada industri.

Komoditas utama tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat adalah komoditas tanaman padi sawah dengan produksi sebesar 2.655,5 ton per tahun (luas tanam 5.650 hektar). Komoditas pangan lainnya adalah jagung dengan produksi 5.250 ton, ubi jalar 50 ton, ubi kayu 225 ton, kacang tanah 37,6 ton dan kacang hijau 35 ton. Di Desa Sereang, produksi padi sawah 30.097 ton per tahun (luas tanam 5.788 hektar), jagung 2.064 ton, ubi jalar 200 ton, ubi kayu 97,5 ton, kacang tanah 92,3 ton dan kacang hijau 175 ton. Di kedua desa komunitas petani, terlihat selain padi terdapat banyak komoditas pangan yang diusahakan, sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan bagi rumahtangga petani.

Pada kedua komunitas petani, masyarakat tidak hanya mengusahakan tanaman pangan, sejak dulu mereka sudah mengenal dan mengusahakan jenis ternak dan unggas. Mereka memelihara ternak, terutama sapi dan kerbau digunakan untuk membajak sawah karena waktu itu belum dikenal mesin-mesin pertanian yang dapat membantu petani membajak sawahnya. Selain itu, hewan peliharaan tentunya digunakan untuk konsumsi keluarga petani. Di Desa Passeno, terdapat 75 ekor sapi, 49 ekor kambing, 27.000 ekor ayam buras, 32.000 ayam ras, 16.400 itik. Desa Sereang, juga terdapat 180 ekor sapi, 20 ekor kerbau, 20 ekor kuda, 50 ekor kambing, 28.375 ekor

ayam buras, 24.600 ekor ayam ras, dan 2.445 ekor itik. Ternak dan unggas peliharaan masyarakat petani menjadi bagian dari kegiatan usahatani yang dikelolanya dan menjadi sumber pendapatan tambahan rumahtangga, karena Kabupaten Sidenreng Rappang sejak dulu dikenal sebagai produsen ayam dan telur terbesar di Sulawesi Selatan.

Di sektor ekonomi, industri juga tak kalah pentingnya dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Di Desa Passeno terdapat industri rumahtangga sebanyak 41 buah dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 95 orang. Di Desa Sereang, terdapat industri rumahtangga 7 buah dan 75 tenaga kerja. Industri rumah tangga yang terdapat di Desa Passeno dan Desa Sereang, dapat memperkuat sektor ekonomi pedesaan dan telah memberi peluang kerja sebahagian masyarakat yang tidak terserap di sektor pertanian. Apalagi, dengan kehadiran teknologi pertanian telah memberi efek bagi petani kecil dan perempuan. Kehadiran industri rumahtangga di pedesaan juga memberi solusi terhadap pengurangan angka kemiskinan dan menjadi prioritas pembangunan yang akhir-akhir ini banyak diberi bantuan agar bisa eksis dan memberdayakan masyarakat lokal khususnya.

Fasilitas pendidikan yang dimiliki di Desa Sereang jauh lebih memadai, jika dibandingkan Desa Passeno. Di Desa Passeno gedung TK 1 buah, dengan murid 26 orang dan dibina 2 orang guru. SD 1 buah, murid 381 orang dan guru 29 orang dan SLTP 1 buah, murid 357 dan guru 33 orang. Desa Sereang, gedung TK 1 buah, murid 52 orang dan guru 3 orang. SD 2 buah,

murid 392 orang dan guru 26 orang , bahkan desa ini telah dilengkapi TPA (Taman Pendidikan Alqur'an) 2 buah. Berbeda dengan fasilitas mesjid, Desa Sereang terdapat 5 buah mesjid dan di Desa Sereang hanya 2 buah mesjid yang dapat melayani masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan.

Dua Desa komunitas petani telah menikmati fasilitas kesehatan yang cukup memadai dan dapat melayani masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Desa Passeno terdapat puskesmas 1 buah, posyandu 4 buah dan dilengkapi dokter 1 orang, paramedis 7 orang dan bidan 2 orang. Pompa air, sumur pompa dan MCK juga tersedia. Di Desa Sereang terdapat puskesmas 1 buah, posyandu 2 buah, paramedia 4 orang dan bidan 1 orang. Gambaran fasilitas ini menunjukkan bahwa di kedua komunitas tidak perlu lagi jauh-jauh keibukota kecamatan untuk mendapatkan pelayan kesehatan, kecuali ada penyakit yang agak parah baru dirujuk ke rumah sakit di ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Hanya saja, masih terlihat disekitar lokasi pemukiman penduduk masih banyak yang belum memanfaatkan prasarana kesehatan yang tersedia, misalnya dalam pemanfaatan MCK yang belum memadai.

Irigasi teknis yang tersedia dapat mengairi sawah yang terdapat di Desa Passeno dan Desa Sereang. Tadinya, sawah hanya dapat diusahakan sekali dalam setahun dan tahun 1982 setelah irigasi masuk di kedua desa ini, petani telah terbantu dan mengusahakan padi dua kali setahun. Fasilitas

irigasi yang dibangun oleh pemerintah atas pinjaman dari Pemerintah Jepang dalam mendukung swasembada pangan di Kabupaten Sidrap dan telah dicapai pada tahun 1984. Keberadaan fasilitas irigasi direspon oleh masyarakat, terlihat dengan dibentuknya P3A dan GP3A yaitu suatu organisasi kelompok masyarakat yang dibentuk dengan tujuan memelihara prasarana irigasi.

Sejak tahun 1980 penduduk di Desa Passeno dan Desa Sereang telah menikmati listrik dan bahkan sudah sampai di pelosok desa. Awalnya, listrik hanya beroperasi di malam hari dan 1985 hampir secara keseluruhan masyarakat telah dijangkau di pelosok desa sekalipun oleh fasilitas ini berkat kemajuan teknologi dan alat yang semakin canggih di bidang kelistrikan.

Di Desa Passeno dan Sereang, pasar sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli merupakan fasilitas yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari dan bagi petani yang akan menjual hasil-hasil pertanian tidak perlu jauh-jauh ke kota. KUD juga tersedia di dua desa itu, dapat melayani masyarakat dalam memperoleh kredit untuk mendukung kegiatan usahatani. Pasar di Desa Passeno hanya dua kali seminggu yaitu Selasa dan Jum'at dan Desa Sereang hari Senin dan Kamis. Ketika hari pasar, masyarakat telah memenuhi kebutuhannya untuk seminggu lamanya.

Fasilitas mesin-mesin pertanian dan industri, di Desa Passeno terdapat mesin penggilingan padi 4 unit dan traktor 17 unit. Di Desa Sereang, penggilingan padi 7 unit, traktor 53 unit dan mesin pengolahan hasil-hasil pertanian 4 unit. Dilihat dari gambaran ini, Desa Sereang fasilitas ini jauh lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan Desa Passeno. Desa Sereang, petani yang telah panen padinya langsung dibawa ke pabrik untuk dijual atau disimpan untuk konsumsi. Bagi petani-petani di Desa Sereang tidak ada lagi menyimpan gabah di rumahnya, tetapi sebagai tempat penyimpanan adalah pabrik penggilingan padi. Setelah ada kebutuhan petani, barulah petani itu datang ke pabrik untuk mengambil gabahnya. Setelah panen, terdapat petugas pembukuan di pabrik untuk mencatat jumlah gabah petani yang dititipkan di pabrik. Berbeda di Desa Passeno, masih ada petani yang menyimpan gabah di rumahnya setelah panen terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya.

Mesin pengolahan hasil pertanian (Power Thresher) di kedua lokasi ini, telah memberi kontribusi yang tidak sedikit bagi buruh panen. Keberadaan mesin pertanian dapat mengorganisir petani-petani kecil dan buruh panen dalam suatu organisasi kerja dalam bentuk kelompok yang dinamakan kelompok dross (pa'dross). Kelompok dross dapat bekerja berpindah-pindah dari satu lokasi panen ke lokasi panen berikutnya, yang tidak terbatas di Sidrap saja, tetapi kelompok ini bahkan sampai ke Palopo untuk melakukan

pekerjaan panen, tergantung dari order pekerjaan yang diterima oleh pengusaha dross.

Dalam melayani masyarakat Desa Passeno untuk melakukan perjalanan setiap harinya, baik antar desa maupun luar desa atau luar kabupaten adalah mobil angkutan 57 unit. Selain itu juga terdapat mobil pribadi 18 unit dan sepeda 197 unit. Sepeda ini sebagian disebut pa'taxi (sepeda yang berfungsi mengangkut gabah dari lokasi panen ke pabrik). Desa Sereang terdapat bus umum 10 unit, angkutan kota 10 unit, truk 9 unit dan bendi 1 unit. Dilihat dari fasilitas transportasi, Desa Sereang lebih lengkap karena sampai pada truk dimiliki yang berfungsi untuk mendistribusikan hasil-hasil pertanian ke wilayah lain dan truk ini ada yang ke wilayah Palu dan Manado membawa hasil-hasil pertanian. Bendi dan ojek digunakan masyarakat dalam menempuh perjalanan jarak dekat.

Fasilitas komunikasi yang tersedia di Desa Passeno yaitu televisi 720 unit dan parabola 39 unit. Desa Sereang terdapat televisi 322 unit, parabola 3 unit dan wartel 2 buah. Secara ekonomi, fasilitas di Desa Sereang jauh lebih maju karena wartel telah dijangkau oleh penduduk, dibandingkan Desa Passeno yang belum memiliki fasilitas ini. Tetapi di kedua desa ini, akses informasi cukup memadai karena hampir semua lapisan masyarakat telah menikmati televisi sebagai alat penerangan. Parabola hanya dimiliki oleh rumah tangga pada lapisan menengah ke atas.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perubahan-Perubahan Selama Revolusi Hijau**

Perubahan-perubahan selama revolusi hijau terkait dengan sejarah pemerintahan Kabupaten Sidrap yang mengantar sebagai lumbung pangan nasional. Bupati pertama periode 1960 -1966 merupakan sosok perintis dari sebuah ide besar terbentuknya Kabupaten Sidenreng Rappang. Kerja monumentalnya yang tak boleh dilupakan adalah membentuk dan menata organisasi pemerintahan yang solid dari ibukota kabupaten hingga kecamatan dan desa. Berpatokan pada keseimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sidrap dilebur menjadi 19 distrik menjadi 7 kecamatan dan 178 kampung menjadi 56 desa.

Selama enam tahun memegang tampuk pemerintahan, Sidrap mengalami perkembangan yang sangat berarti, terutama dalam membangun infrastruktur pertanian yang menjadi kultur masyarakat Sidrap. Dibuktikan dengan kemampuan menggerakkan rakyat bergotong royong membuat saluran irigasi sejauh 5000 meter yang melibatkan relawan sebanyak 1.200 orang setiap hari. Hasilnya, hanya dalam tempo lima hari saluran tersebut bisa selesai.

Selain itu, juga membentuk tim penerangan yang sekarang ini disebut sebagai penyuluh pertanian, membangun gudang beras, mendirikan koperasi,

maupun memfasilitasi pengusaha untuk pengadaan mesin penggilingan padi. Dalam tempo empat tahun tercatat delapan unit penggilingan padi berskala besar dan 146 skala kecil telah berdiri. Bidang transportasi tidak kurang dari 110 truk telah diadakan oleh beliau. Sementara Irigasi Saddang juga sudah bisa mengairi sekitar 3.000 hektar sawah dari 12.500 hektar yang direncanakan.

Bupati kedua periode 1966 – 1978, defenitif dilantik pada 23 Juni 1966, setelah tiga bulan sebelumnya menjadi pejabat sementara. Ketika Sidrap dibawah pemerintahannya, berbagai persoalan muncul akibat ulah gerombolan. Namun, ketegasan dan ketokohan Bupati pada periode ini sebagai seorang pejuang kemerdekaan, mampu menciutkan nyali gerombolan. Sementara riak-riak ketidakpuasan masyarakat Rappang ditanganinya dengan pendekatan dan diplomasi kekeluargaan.

Dalam usaha memajukan Sidrap, bupati periode ini juga amat memperhatikan infrastruktur pertanian. Program pembangunan bendung Bulu Cenrana yang pernah dirintis bupati sebelumnya kembali dilanjutkan. Program ini mengalami kemandekan karena terbentur persoalan dana. Ketika itu anggaran sangat minim. Akhirnya, bendungan tersebut berhasil diselesaikan berkat dorongan masyarakat yang bergotong royong. Sawah yang tadinya hanya ditanami sekali setahun dengan mengandalkan tadah hujan, bisa dipanen dua kali. Sejak itu, Sidrap mulai diperhitungkan sebagai daerah lumbung pangan.

Bupati pada periode ini juga telah berhasil menyatukan visi pallontara (tokoh masyarakat yang mampu meramal musim dengan melihat tanda-tanda alam) dengan para insinyur pertanian. Dua kelompok itu dikumpulkan dalam sebuah musyawarah yang dikenal dengan istilah *Tudang Sipulung*. Sejak itu pula pola bertanam padi dilakukan berdasarkan hasil tudang sipulung.

Bupati periode ini pun pernah mengikuti pendidikan sarana produksi pertanian di Bogor untuk lebih memahami pola pertanian modern yang hendak dikembangkan di Sidrap. Tak heran, ketika daerah lain masih bergulat dengan pola pertanian tradisional, Ia sudah membawa Sidrap kepada mekanisasi pertanian. Ia mendorong perbankan membantu petani melalui program Bimas. Sapi dan kerbau yang selama ini dipakai membajak sawah diganti dengan traktor. Hasil pertanian pun meningkat pesat sehingga Presiden Soeharto ketika itu berkenaan datang ke Bumi Nene' Mallomo melakukan panen raya.

Bupati periode 1978 – 1988 dikenal sebagai seorang pemimpin yang merakyat. Ia tak canggung berbaur dengan rakyat kebanyakan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti dua orang pendahulunya program pertanian tetap dilanjutkannya. *Tudang Sipulung* bagi petani dan pemerintah tak sekedar kesepakatan turun sawah, tapi menjadi ajang musyawarah untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Hasilnya kemudian dibawa ke Bappenas sebagai bentuk keinginan masyarakat melalui proses demokrasi rakyat ala *Tudang Sipulung*. Berdasarkan hasil *Tudang*

*Sipulung*, turunkah anggaran untuk irigasi, jalan perintis, jalan tani dan prasarana lainnya, termasuk irigasi Bila-Kalola yang pengerjaannya berlangsung setelah ia berhenti menjadi bupati.

Periode tahun 1988 – 1993, Sidrap dipimpin oleh figur bupati terakhir yang berasal dari militer. Perhatian pada pembangunan pertanian tetap dilanjutkannya. Selain itu, ia lebih dikenal membangun Sidrap dengan Budaya Religius. Budaya Religius yang dibangunnya kemudian berdampak pada kebersihan dan penataan lingkungan. Daerah yang dikenal sebagai Bumi Nene' Mallomo ini mendapat anugerah *Prasamya Purnakarya Nugraha*, sebuah penghargaan tertinggi bagi kabupaten terbersih se Indonesia.

Torehan prestasi tak hanya sampai disitu, menjelang akhir masa kepemimpinannya, Sidrap menyabet berbagai penghargaan, diantaranya mendapatkan penilaian terbaik pelaksanaan pengelolaan Luran Pengelolaan Irigasi (IPAIR) atau sering disebut *irrigation service fee* (ISF) adalah bentuk partisipasi petani dengan membayar sejumlah biaya yang dapat membantu pendanaan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Sidrap juga ditetapkan sebagai pemenang lomba penghijauan lingkungan, perumahan dan pemukiman.

Periode selanjutnya (1993 – 1998), Sidrap dipimpin oleh sosok bupati pertama yang tidak berasal dari militer. Pada masa pemerintahannya, ia telah membuka daerah terisolir di daerah perbatasan Sidrap – Wajo dan

perbatasan Sidrap – Barru. Ia yakin hanya dengan membuka isolasi daerah terpencil pemerataan pembangunan dapat terwujud.

Di era pemerintahannya, motto Sidrap sebagai Kota Beras pertama kali digunakan. Beras merupakan singkatan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sejuk. Beras juga menunjukkan jati diri Kabupaten Sidrap sebagai daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Motto itu masih dipakai hingga kini.

Berbagai karya monumental telah diukir bupati periode ini, diantaranya; pembuatan Taman Wisata DataE, memperbanyak jalan tani (*farm road*) yang dapat mempermudah akses bagi petani dalam meningkatkan kegiatan usaha tani serta mempercepat pengangkutan hasil produksi ketika panen berlangsung serta membebaskan tanah untuk lokasi terminal DataE.

Mengawali biduk reformasi, yakni periode 1998 - 2003 merupakan bupati keenam di Sidrap. Berbagai tantangan yang dihadapinya bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Persoalan yang muncul seperti; pertumbuhan ekonomi yang rendah, peningkatan angka kemiskinan penduduk, serta melambungnya harga beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dibarengi dengan sorotan berbagai elemen masyarakat, lemahnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang sarat dengan praktek KKN, sehingga terus-menerus mendesak dilakukannya reformasi di segala bidang.

Bupati periode ini juga masih tetap fokus pada pembangunan di sektor pertanian. Bentuk kepeduliannya, terlihat dari prestasi yang dicatat oleh

Kabupaten Sidrap dalam lomba penghijauan dan konservasi sumber daya alam. Pada sektor pengairan, ia mampu meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumberdaya air dan mendayagunakan potensi sumberdaya air dalam rangka mendukung produksi pertanian, konservasi dan pelestarian kondisi dan fungsi sumber-sumber air dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan pengendali banjir dan pembangunan irigasi desa.

Bupati periode 2003 – 2008 mengembangkan sayap ke arah pengembangan agribisnis. Ia menganggap bahwa bukan hanya padi yang perlu dikembangkan dan kurang puas Sidrap hanya penyandang lumbung pangan, lebih jauh ia ingin mengembangkan komoditi lain yang ada di Sidrap.

Olehnya itu, dibentuklah tim agribisnis bekerjasama dengan instansi lain merumuskan dan menindak lanjuti kebijakan-kebijakan bupati yang terkait dengan pengembangan agribisnis. Karya nyata yang diperlihatkan beliau adalah pola kemitraan antara petani dan bulog. Bulog melalui mitranya menyiapkan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya kepada petani. Kewajiban pembayaran dilakukan petani saat panen tiba, dengan menjual produksinya kepada mitra Bulog dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pola ini tak hanya membantu petani mengatasi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan, tapi juga telah mendongkrak harga gabah yang sebelumnya dibeli pedagang dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Efek lainnya

adalah meningkatnya jumlah produksi padi per areal tanam, karena pasokan pupuk cukup tersedia.

## **1. Perubahan Teknis**

### **a. Pemakaian Bibit**

Pemakaian bibit adalah salah satu item dari panca usahatani yang menjadi bagian yang mengalami perubahan dalam sistem pertanian padi sawah dan menentukan tingkat produksi padi yang dihasilkan. Perubahan pemakaian bibit lokal menjadi bibit unggul, berakibat berubahnya sistem lain dalam pertanian padi sawah. Produksi padi akan maksimal dicapai tergantung dari pemilihan varietas yang akan diusahakan oleh petani ketika akan memulai usahatannya.

Pemilihan varietas padi yang ditanam di Desa Sereang adalah jenis Ciliwung, IR 42, membramo dan IR 66 dan sekarang bertambah lagi jenis varietas yang diperkenalkan oleh PPL, yakni varietas Hibrida dan Cigeulis. Namun, jenis varietas Ciliwung masih lebih baik diusahakan menurut penuturan salah seorang informan di Sereang karena selain produksinya banyak, varietas ini juga mudah pemeliharaannya. Di Desa Passeno, jenis varietas yang diusahakan petani adalah jenis ciliwung, IR 42, IR 66, Membramo. Seperti halnya di Desa Sereang, petani pun sekarang diperkenalkan dengan varietas Hibrida dan Cigeulis, tapi petani masih memilih varietas yang sering mereka tanam, terutama jenis Ciliwung. Menurut H. BDL seorang informan di Passeno mengatakan bahwa

sebenarnya jenis Membramo juga baik, hanya saja harganya cukup mahal dibanding jenis varietas lainnya.

Varietas yang diusahakan petani di Desa Sereang diperoleh dengan cara membeli dari PT. Pertani atau dari pengusaha yang masuk ke desanya. Di Desa Passeno, benih diperoleh dengan cara membeli dari pengusaha yang telah bekerja sama dengan PT Pertani. Berbeda dengan petani di Desa Sereang, letak PT.Pertani juga di Desa Sereang, sehingga tidak ada kendala jarak untuk mendapatkan benih yang baik.

Secara umum pemilihan bibit unggul dikarenakan sifat-sifat yang dimiliki varietas tersebut, diantaranya; tegakan batang (rumpun) pendek (kurang dari 1 meter), bulir padi tak bermalai, butir-butir padi mudah rontok (gugur). Dibandingkan varietas lokal, sifat-sifatnya adalah; tegakan batang (rumpun) relatif tinggi (kurang lebih 1,5 - 1,7 meter), bulir padi bermalai relatif panjang (kurang lebih 5 – 10 centimeter) dan butir-butir padi tidak mudah rontok.

Berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki varietas lokal, maka panen dilakukan dengan menggunakan cara dan alat panen ani-ani, kemudian diikat atau dikebat dengan pengikat dari bahan rotan, kulit bambu muda, kulit pohon waru dan sebagainya. Begitu pun dengan varietas lokal, karena sifatnya maka cara dan alat panen yang digunakan adalah sabit yang menebas rumpun dan langsung digabungkan dengan alat power thresher (dross).

Pekerjaan panen dengan ani-ani dikualifikasikan sebagai pekerjaan yang relatif halus, karena tidak membutuhkan tenaga fisik yang besar, tetapi lebih membutuhkan kesabaran, ketekunan dan kecermatan sehingga di serahkan kepada perempuan. Halberg (1982) menyatakan bahwa, dari sudut pandang epistemologi feminis, perempuan memiliki posisi privilese secara kognitif dalam masyarakat, sehingga pengetahuan mereka melebihi pengetahuan laki-laki dan posisi privilese tersebut dianggap berakar didalam pengalaman perempuan.

Dengan demikian teori di atas memberi kekuatan bagi kaum perempuan untuk menempatkan dirinya sebagai kaum yang punya kelebihan secara kodrati, yang tidak dimiliki laki-laki. Namun, karena sistem pertanian padi sawah senantiasa berubah mengikuti irama pembangunan, maka kelebihan yang dimiliki kaum perempuan bergeser dengan sendirinya, seolah-olah mereka didorong untuk keluar ke arena publik bersaing dengan laki-laki untuk tercapainya kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

Berbeda pekerjaan panen dengan sabit, dikualifikasikan sebagai pekerjaan kasar yang pantas dilakukan oleh laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan, tenaga kerja perempuan juga bisa melakukan pekerjaan itu, hanya saja mereka kalah bersaing dengan laki-laki, khususnya dalam hal kecepatan kerja yang dimiliki laki-laki yang sesuai dengan setting teknologi yang serba cepat.

Pemakaian bibit unggul dibandingkan dengan bibit lokal dapat dilihat dari perubahan yang ditimbulkannya, meliputi; volume produksi, jangka waktu proses produksi dan bentuk produksi. (1). Volume produksi; produksi rata-rata bibit unggul 5 – 7 ton/ha dan bibit lokal 3 – 4 ton/ha. Artinya, bahwa produksi dan total produksi yang diperoleh petani lebih besar dari sebelumnya dan surplus produksi yang diperoleh petani dapat terakumulasi untuk perbaikan nasib petani. (2). Jangka waktu proses produksi; varietas lokal berlangsung singkat antara 3 – 4 bulan, dibanding varietas lokal yang membutuhkan waktu antara 7 – 9 bulan di pertanaman, mulai dari pesemaian sampai dengan panen. Artinya, dengan varietas unggul panen dapat dilakukan 4 – 5 bulan lebih awal dari sebelumnya, efeknya petani dapat terhindar dari ikatan ijon, Selain itu, frekuensi tanam per tahun dapat meningkat dua kali setahun dan tidak mustahil dapat dilakukan lima kali dalam dua tahun. (3). Bentuk produksi; varietas unggul dalam bentuk butiran gabah yang siap dirontokkan, dibanding varietas lokal yang bentuk produksinya bulir padi dalam ikatan (kebatan) yang dalam bahasa setempat disebut "*besse*".

Selain petani memperoleh varietas dengan cara membeli, ada pula segelintir petani kecil terutama perempuan yang kepemilikan lahannya di bawah 0,5 hektar, memperoleh benih dengan cara memilih gabah-gabah yang baik setiap selesai panen dan menyimpannya untuk selanjutnya

ditanam di lahan sawah mereka. Cara ini mereka tempuh karena tidak mampu membeli bibit unggul yang langsung bisa ditanam.

Pada tahun 1960-an petani di kedua lokasi penelitian mengenal berbagai macam padi yang enak dimakan seperti *Ase Banda*, *Ase Pulu* dan berbagai macam varietas lokal yang dimiliki oleh petani. Varietas yang dimiliki oleh petani pada umumnya dikategorikan dua jenis, yaitu *Asio* (beras yang non beras ketan) dan *Ase Pulu* (beras ketan). *Asio* dibagi menjadi dua kategori yaitu *Ase Lemma* (enak) dan *Ase Matojo* (keras). Kategori *Ase Lemma* seperti *Ase Banda*, *Ase Mandi* dan lain-lain. Kategori *Ase Matojo* dapat ditemui pada varietas *Ase Sawe* dan lain-lain. *Ase Pulu* ditemukan dua kategori yaitu *Ase Pulu Puteh* (putih) dan *Lotong* (hitam).

#### **b. Pemupukan**

Kelebihan utama varietas unggul karena sifatnya yang responsif terhadap pemupukan kimia, pupuk artifisial atau pupuk pabrik. Artinya, bila tanaman padi diberikan pupuk maka produksi padi akan naik sampai pada batasan tingkatan tertentu.

Target produksi padi yang maksimal dapat dicapai bila ditunjang penggunaan pupuk dalam jumlah besar, pada saat yang sama petani membutuhkan uang untuk memperolehnya. Pupuk merupakan komoditas perdagangan dunia, efeknya harga input tersebut senantiasa mengalami kenaikan yang tanpa disadari petani telah masuk ke dalam pola perdagangan dunia. Persoalan lebih jauh yang muncul adalah petani kecil tidak mampu

membeli pupuk tanpa kredit produksi, pada kondisi seperti ini diharapkan uluran tangan pemerintah untuk membantu petani di pedesaan.

Perkembangan pemupukan memperlihatkan perkembangan pemupukan yang digunakan para petani sebagai indikator dari penerapan teknologi baru di bidang pertanian. Bagaimana petani merespon pupuk sintetis, yang sebelumnya mereka tidak gunakan karena ketidaktahuan mereka ataukah karena ketidakmampuan membeli sarana produksi tersebut. Fenomena di lapangan telah ditemukan berdasarkan pengakuan dari beberapa informan, baik di Desa Sereang maupun Desa Passeno.

Pengakuan Informan di Desa Sereang misalnya mengatakan bahwa, dahulu lahan sawah belum ada yang dipupuk karena masih mengandalkan kesuburan tanah yang menjamin pertumbuhan produksi yang maksimal. Sekitar tahun 1968, pupuk baru dikenal di Desa Sereang bersamaan dengan diperkenalkannya paket Bimas di wilayah itu. Namun, di awal-awal diperkenalkannya pupuk banyak petani yang tidak merespon karena menganggap tanpa pupuk pun tanaman padi akan tumbuh subur, apalagi waktu itu pupuk susah dicari.

TSP dan Urea adalah jenis pupuk yang pertama kali dikenal petani di Desa Sereang melalui Bank Rakyat Indonesia dengan paket Bimas. Pupuk disalurkan lewat ketua-ketua kelompok tani, yang selanjutnya akan membagi-bagikan kepada anggota kelompoknya.

Pemupukan dilakukan tiga kali dalam satu musim tanam, yakni: pemupukan pertama pada umur padi 15 hari diberi pupuk TSP dan urea, pemupukan kedua umur padi 35 hari diberi urea dan pemupukan ketiga setelah padi berumur 50 hari diberi pupuk urea. Pada pemupukan kedua dan ketiga tidak diberi lagi urea, untuk menghindari daun padi menguning dan bulir yang kosong.

Tahun 1980-an, pupuk KCL dan Za mulai diperkenalkan oleh PPL yang bertugas di Desa Sereang. Namun, ada satu hal yang aneh dari informasi PPL karena setiap merekomendasikan penggunaan pupuk selalu mengatakan gunakan pupuk yang berimbang, tapi perimbangannya tidak pernah diberikan takaran atau dosisnya. Petani dalam melakukan pemupukan hanya mencoba-coba dosis yang diberikan dan melihat hasil produksi setelah diberikan pupuk. Awalnya, petani menggunakan pupuk dengan perbandingan 250 Urea, 100 TSP, dan 50 KCL, akan tetapi hasilnya daun padi menguning dan petani mengubah menjadi 200 urea, 200 TSP dan 50 KCL hasilnya satu minggu kemudian menggembirakan karena daunnya lebat, setelah panen ternyata banyak bulir padi yang kosong. Petani akhirnya mengubah lagi dosis yang diberikan menjadi 200 urea, 200 TSP dan 100 KCL, hasilnya sangat memuaskan bagi petani karena pertumbuhan tanaman padi menjadi lebih baik dan produksi meningkat, dosis inilah yang hingga sekarang digunakan petani. Pengalaman petani menjadi patokan bagi petani lainnya yang saling menginformasikan satu sama lain.

Di Desa Passeno, pengalaman petani dalam memupuk sawahnya melakukan dua proses tahapan. Tahapan pembibitan, pemupukan dilakukan pada usia benih 10 hari setelah ditabur, dengan dosis 10 kg urea dan 1 kg TSP. Usia 15 hari pemupukan kedua dilakukan dengan pupuk Urea 2 kg dan SP 26 2 kg. Pada usia benih 15 hari selain diberikan pupuk, juga diberikan racun furadan untuk mencegah bibit padi terserang hama dan penyakit. Usia 25 hari bibit dapat dicabut untuk selanjutnya siap di tanam pada lahan sawah yang telah dibajak sebelumnya.

Pada tahap penanaman bibit, pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu musim tanam. Pemupukan pertama, umur padi 25 hari setelah tanam diberikan pupuk urea 50 kg, SP 36 25 kg. Pemupukan kedua, dilakukan pada usia padi 30 hari setelah tanam, urea 200 kg. Usia padi 40 hari setelah penanaman dilakukan pemupukan ketiga dengan dosis 200 kg urea.

Untuk melihat perkembangan pemupukan pada setiap musim tanam di Desa Sereang dan Desa Passeno dapat di lihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Rata-rata Penggunaan Pupuk Petani Padi Sawah di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Urea	150,46	68,14	193,34	61,87
2	TSP/ SP-36	28,22	12,78	51,27	16,41
3	KCL	7,50	3,40	13,20	4,22
4	ZA	15,10	6,84	24,56	7,86
5	NPK	19,53	8,84	30,14	9,64
	Jumlah	220,81	100,00	312,51	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidrap, 2007.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa perkembangan pemupukan di Desa Sereang tahun 1997 yang terbanyak adalah pupuk urea yaitu rata-rata 150,46 Kg/ha (68,14 %) dan pupuk KCL yang paling sedikit digunakan yaitu rata-rata 7,50 Kg/ha (3,40 %). Tahun 2007, penggunaan pupuk urea masih terbanyak yakni rata-rata 193,34 Kg/ha (61,87 %) dan pupuk KCL penggunaannya paling sedikit yakni rata-rata 13,20 Kg/ha (4,22 %). Namun demikian perkembangan antara tahun 1997 – 2007, baik penggunaan urea maupun KCL mengalami perkembangan, untuk pupuk urea sebesar 42,88 Kg/ha dan pupuk KCL sebesar 5,7 Kg/ha. Besarnya dosis penggunaan pupuk urea dibandingkan dengan pupuk KCL dan pupuk lainnya, disebabkan karena kondisi tanah yang ada di Desa Sereang. Penggunaan pupuk urea karena mengandung N yang besar dan mudah hilang, sebagai penetralisir adalah pemberian KCL dalam jumlah yang kecil.

Tabel 2. Rata-rata Penggunaan Pupuk Petani Padi Sawah di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Luas	Persentase	Luas	Persentase
1	Urea	149,00	64,84	180,21	49,12
2	TSP/ SP-36	27,62	12,02	68,94	18,79
3	KCL	3,75	1,63	25,11	6,81
4	ZA	13,95	6,07	40,45	11,02
5	NPK	35,47	15,44	52,20	14,23
	Jumlah	229,79	100,00	366,91	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidrap, 2007.

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa di Desa Passeno, penggunaan pupuk urea masih yang terbesar yaitu rata-rata 149,00 Kg/ha (64,84 %) dan penggunaan terkecil adalah pupuk KCL yaitu 3,75 Kg/ha untuk tahun 1997 dan tahun 2007 pupuk urea adalah sebesar 180,21 (49,12 %) dan pupuk KCL adalah 25,11 Kg/ha (6,81 %). Artinya, ada perkembangan penggunaan pupuk urea sebanyak 31,21 Kg/ha dan pupuk KCL sebanyak 6,1 Kg/ha. Seperti halnya di Desa Sereang, Desa Passeno pun penggunaan urea antara tahun 1997 – 2007 penggunaan pupuk urea masih lebih besar jika dibandingkan dengan pupuk lainnya karena disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di Desa Passeno.

### c. Perbaikan Bercocok Tanam (Agronomis)

Perbaikan bercocok tanam meliputi; perbaikan pengolahan tanah, pengaturan jarak tanam dan penyiangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi pertanian padi sawah.

Perbaikan pengolahan tanah misalnya pengolahan tanah menggunakan kerbau dan sapi diganti dengan hand traktor, tidak hanya dapat memperbaiki kualitas pengolahan tanah, tetapi juga jangkauan pengolahan tanah dapat dilakukan lebih luas dari sebelumnya. Kondisi ini memungkinkan petani yang tadinya orientasi petani kecil (*peasant*) mengarah ke petani luas (*farmer*).

Pengaturan jarak tanam yang dilakukan petani di kedua lokasi penelitian adalah jarak tanam 25 X 25 cm. Pengaturan jarak tanam yang demikian dimaksudnya mempermudah tanaman untuk memperoleh unsur hara yang kurang lebih sama atau berimbang satu sama lain. Selain itu, perbaikan jarak tanam memungkinkan penggunaan alat penyang (landak) lebih mudah digunakan.

Penyiangan yang dilakukan petani di kedua lokasi penelitian dilakukan secara intensif setelah pemakaian varietas unggul, karena gulma (tanaman pengganggu) relatif lebih banyak tumbuh disela-sela tanaman padi yang diusahakan petani, dibanding ketika varietas lokal digunakan petani belum melakukan penyiangan seintensif sekarang.

Di Desa Sereang penyiapan lahan dilakukan oleh petani dengan cara membajak tanah dengan menggunakan kerbau atau sapi dan cangkul,

sebelum teknologi baru diadopsi. Katika teknologi baru diadopsi, pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan hand traktor. Sebelum dimulai penanaman, biasanya para petani mempertimbangkan tanda-tanda alam disekitarnya. Banyak sedikitnya hujan yang turun dianalisis berdasarkan sejumlah informasi yang diberikan alam, seperti letak bintang di langit, kesuburan pohon-pohon dan sejumlah tanda-tanda alam lainnya.

Umumnya petani sudah memiliki kalender musim, apakah turun sawah pada bulan Januari atau Februari. Kalender musim ini disusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki dari leluhurnya secara turun temurun. Bagi petani sehamparan (*lombo*) biasanya mereka memiliki kelembagaan lokal seperti *tudang sipulung* sebelum turun sawah. *Tudang sipulung* ini biasanya mendiskusikan kondisi hujan dan panjangnya hujan. Argumentasi dikumpulkan dari para petani, tetapi peran yang menonjol adalah *Mado* (Matoa Tani) dan *Pappananrang*. Peran *Mado* adalah memimpin acara *tudang sipulung* baik dengan sejumlah doa dan berbagai ritual lainnya. Sementara *Pappananrang* adalah meramal banyaknya hujan dan panjangnya hujan.

Setelah acara *tudang sipulung* selesai, maka para petani bersiap-siap turun ke sawah yaitu dengan mempersiapkan sejumlah peralatan bajak (*Rakkala*), penggaru (*Salaga*) dan pembersih (*Ese*). Kaum perempuan mempersiapkan sejumlah peralatan panen seperti ani-ani (*Rakkapeng*) dan persiapan dapur lainnya.

Kegiatan pertanian dimulai dengan dilaksanakan pemilihan bibit, sampai kepada persemaian (*Mappano bine*). Kegiatan petani seperti ini memang terasa panjang dan melibatkan banyak orang, baik didalam pengolahan tanah, penyiangan dan panen. Akan tetapi dinamika petani tersebut berlangsung dengan sangat harmonis, oleh karena hampir seluruh aktivitas petani dilakukan secara bersama di suatu hamparan. Kalau ada petani yang belum selesai pengolahan tanahnya maka ramai-ramai petani lainnya melakukan gotong royong (*Mappadakkala*), sehingga di dalam suatu hamparan jarang ditemukan ada petani yang sudah panen, sementara petani lainnya masih tanam atau menyiangi.

Dengan datangnya revolusi hijau di Sulawesi Selatan secara massal diperkenalkan melalui operasi Lappo Ase, dimana para petani dapat memproduksi secara massal, maka kegiatan pertanian perlahan-lahan menjadi sebuah investasi yang menguntungkan. Para petani telah menghitung untung rugi dalam usahatani padi. Penggunaan hewan untuk membajak mulai ditinggalkan. Para petani memilih hand traktor untuk mempercepat pengolahan tanah, begitu juga bibit (benih) dipilih yang paling menguntungkan. Selain itu, kegiatan panen telah diberikan kepada buruh tani dan menggunakan dross (power thresher) dalam perontokan padi.

Sekarang, kegiatan di sawah yang dilakukan petani adalah *ma'dompeng* yakni tanah dibajak dan digemburkan dengan menggunakan alat berupa hand traktor. Pembenuhan dilakukan dengan dua cara yakni; *Sistem tanam*

*jajar* dan *sistem tanam garis*. Sistem tanam *jajar (Tabela)* menggunakan alat semacam sisir yang terbuat dari besi yang ditarik memanjang ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Sistem tanam *garis (Pa'becci)* menggunakan penggaris dan tali dibentang lurus ke arah vertikal dan horizontal sebagai tanda benih akan ditabur.

Cara penaburan benih ada dua cara yaitu: Pertama, menabur langsung, yang diistilahkan sebagai “maggugu” dan kedua, menggunakan pipa paralon yang menyerupai ban sepeda yang berputar menabur benih. Di Desa Passeno, kegiatan pembibitan juga di lakukan oleh petani, yang bibitnya diperoleh dari pengusaha yang datang ke Desa Passeno. Bedanya, di Desa Passeno sistem tanam yang dikenal petani hanya sistem tanam *jajar (Tabela)*, yakni alat berupa sisir yang terbuat dari besi dan masyarakat menyebut alatnya dengan nama “*caplak*”.

#### **d. Pengaturan Air Irigasi**

Potensi sumber daya air di Kabupaten Sidrap yang dapat dimanfaatkan oleh petani yaitu air hujan, air permukaan, air tanah dan aliran sungai atau limpasan. Di Kabupaten Sidrap terdapat 23 sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar pada 11 Kecamatan, 5 diantaranya sub DAS Rappang, DAS Betoa, DAS Kalempang, DAS Bila/Tanru Tedong, serta DAS Saddang. Sumber air ini juga dimanfaatkan masyarakat petani untuk keperluan irigasi dalam mengairi sawah-sawah petani dan penyediaan air bersih lainnya bagi

masyarakat. Air sungai di wilayah ini merupakan salah satu cadangan air permukaan di samping mata air dari Danau Sidenreng. Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai debit air rata-rata 575.001,84 liter/detik atau cadangan 575.001,84 m<sup>3</sup> (potensial).

Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Sidrap sebanyak 38 buah yang tersebar di 9 Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada, yaitu : Sungai Bilokka, Sungai Lokabatu, Sungai Pape, Sungai Cakarella, Sungai Bingkulu, dan Sungai Sessanriu yang berada di Kecamatan Panca Lautang. Sungai Latoling, Sungai Pamantingan, Sungai Watang Lowa yang berada di Kecamatan Tellu LimpoE. Sungai Bangkai, Sungai Cakkalaoe, Sungai Alekkarajae, Sungai Lompengan, Sungai Datae, Sungai Pabbaresseng, Sungai Polo Jiwa, Sungai Batu Pute yang terdapat di Kecamatan Wattang Pulu. Sungai Rappang yang berada di Kecamatan Baranti dan Sungai Poka, Sungai Tellang, Sungai Taccipi terdapat di Kecamatan Panca Rijang.

Sebelum tahun 1960, irigasi sudah ada di Desa Sereang yang mengairi sawah seluas 280 hektar sawah. Irigasi teknis tersebut berasal dari saluran Induk Rappang Daerah Irigasi (DI) Saddang yang bendungnya terletak di Kabupaten Pinrang. Irigasi tersebut juga mengairi sawah-sawah petani di Desa Sereang. Dahulu, ketika irigasi ini belum dibangun, petani memanfaatkan air hujan untuk bercocok tanam. Petani hanya dapat mengolah sawah sekali setahun, selebihnya di tanam tanaman palawija, secara terbatas pada areal yang sedikit basah dan tahan dari kekeringan.

Bersamaan dengan diperkenalkannya teknologi baru, salah satu unsur di dalamnya adalah perbaikan irigasi, namun di awal pembangunannya, mendapat kendala dari masyarakat karena beberapa petani tidak rela sawahnya dilalui saluran, akibatnya di Desa Sereang masih ada sebahagian persawahan sekarang ini belum terjangkau air irigasi karena letak sangat jauh dari jaringan irigasi. Selain itu, saluran tersier yang dibangun kurang terpelihara secara rutin dan *lay out* saluran kurang sesuai dengan tata letak sawah-sawah di dalam petak tersebut atau saluran tersier dan kuarternya terlalu panjang, sehingga air irigasi mengalami peresapan dan penyumbatan ditengah jalan yang menyebabkan terjadinya sebagian areal persawahan tidak dapat terlayani dengan baik.

Paket Bimas sebagai salah satu program pemerintah yang tujuan utamanya adalah memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, yang diprakarsai oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), merupakan langkah awal mendorong perbaikan jaringan irigasi yang berada di Sereang. Tahun 1993, melalui program CIDA, masyarakat petani dibantu dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dalam pengelolaan irigasi, dimana sebelumnya sarana dan prasarana telah dibangun oleh pemerintah. Kelembagaan yang dibentuk dinamakan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang tujuan utamanya adalah memelihara sarana dan prasarana irigasi khususnya pada jaringan irigasi di tingkat usaha tani (JITUT) agar tetap terpelihara dan bermanfaat dalam meningkatkan produksi petani.

Kelembagaan P3A yang dibentuk petani diperkuat dengan struktur organisasi yang jelas, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Organisasi ini pun, melakukan musyawarah diantara anggota kelompok dan membuat aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang mengatur manajemen pengelolaan irigasi, seperti; pengaturan air, pemeliharaan saluran, pembersihan pintu tersier, iuran anggota dan lain-lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pengaturan pengelolaan irigasi.

Konflik pembagian air sering muncul, ketika ada beberapa petani yang sawahnya tidak mendapatkan air, terutama sawah yang letaknya agak jauh dari sumber air (*down stream*). Fenomena ini terjadi di Desa Sereang, petani yang tidak mendapatkan air sawahnya, akan melapor pada kepala desa dan OPR (Organisasi Pertahanan Rakyat) untuk selanjutnya menuju lokasi pintu tersier membuka pintu air yang telah ditutup petani lain. Bagi petani yang kebetulan sementara sawahnya diairi akan keberatan juga kalau pintu air dibuka pada saat itu. Setelah rombongan petani, kepala desa dan OPR, petani yang keberatan tadi akan menutup kembali pintu air yang telah dibuka sebelumnya oleh rombongan kepala desa.

Mengatasi konflik semacam ini, dibawa pada acara Tudang Sipulung pada tingkat kecamatan dan tingkat desa untuk membicarakan penyelesaian konflik, agar tidak ada lagi petani merasa dirugikan akibat pengaturan air yang kurang baik.

Organisasi P3A di Serang terdiri dari 34 unit dan 2 Gabungan P3A (GP3A), setiap kelompok beranggotakan 30 – 40 orang petani, sesuai dengan kedekatan hamparan sawah miliknya yang tergabung di dalam petak tersier. Pembentukan P3A diperkuat dengan adanya pengesahan AD/ART oleh kepala desa, camat dan Kaputusan Bupati.

Tudang sipulung pada tingkat kecamatan dan desa dilaksanakan dua kali setahun, yaitu satu kali menjelang turun sawah dan satu kali pada waktu selesai panen. Tudang Sipulung melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah, petani dan orang-orang yang punya kharisma dan mempunyai kelebihan dalam membaca situasi alam. Orang yang mempunyai kelebihan ini biasanya mengusulkan hari dan waktu yang baik untuk mulai menanam padi. Hasil rekomendasi Tudang Sipulung tingkat kecamatan, dibawa ke tingkat desa seperti; hasil panen yang baru saja dilaksanakan, waktu yang baik untuk memulai penanaman, varietas yang dianjurkan untuk ditanam dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan usahatani padi.

*Potongnge* (tanah yang beronggok) dan *Labattoa* (yang besar) adalah dua tempat ditentukan masyarakat petani sebagai tempat berlangsungnya Tudang Sipulung. Bagi petani yang berada di sebelah barat Desa Sereang, tempat tudang sipulung adalah di Labattoa, dan petani yang berada di sebelah timur Desa Sereang tempat berkumpulnya di Potongnge.

Di Desa Passeno, sumber irigasi yang ada adalah pompanisasi. Air ditampung sepanjang satu kilometer, lalu dibuatkan pintu-pintu air tersier

yang langsung ke sawah-sawah petani. Pompanisasi yang terdapat di Desa Passeno dapat mengairi sawah seluas 250 hektar. Organisasi yang mengatur tata kelola air dinamakan kelompok pompanisasi, anggotanya terdiri dari para petani yang sawahnya saling berdekatan. Kelompok pompanisasi di Desa Passeno ada dua yaitu kelompok mekar dan kelompok belawa yang mempunyai anggota 30 – 40 orang dalam satu kelompok. Anggota dalam kelompok kadang tidak beraturan karena seorang petani biasanya mempunyai lahan sawah sebagian termasuk pada kelompok mekar dan sebagian lagi masuk kelompok belawa. Sistem pengaturan dan pemeliharaan air diatur oleh para anggota kelompok, yang aturan utamanya tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi kelompok pompanisasi dilengkapi dengan ketua, sekretaris dan bendahara. Iuran anggota untuk pemeliharaan air dipungut dari hasil produksi berupa gabah, yakni 10 karung gabah keluar 1 karung untuk biaya pemeliharaan air. Pengaturan air ke sawah-sawah petani melibatkan dua orang tenaga penjaga pintu air, yang digaji sebesar 20 % dari penghasilan bersih pengelolaan air setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional pemeliharaan air.

Untuk melihat perkembangan irigasi pada kedua desa penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Perkembangan Irigasi Padi Sawah di Desa Sereang dan Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.

No	Uraian	Desa Sereang			Desa Passeno		
		Sawah	Pengairan	Persentase	Sawah	Pengairan	Persentase
1	1997	563,50	206,17	36,59	310,00	102,33	33,01
2	2007	997,62	691,45	69,31	682,15	479,82	70,34

Sumber : Kantor Statistik Kab. Sidrap, 2007.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa perkembangan irigasi di Desa Sereang pada tahun 1997 dapat mengairi sawah seluas 206,17 hektar (36,59 %) dan tahun 2007 sawah yang dapat diairi adalah seluas 691,45 hektar (69,31 %). Artinya, setelah sepuluh tahun kemudian perkembangan irigasi di Desa Sereang mengalami peningkatan sebesar 32,72 %.. Di Desa Passeno, sawah yang dapat diairi tahun 1997 adalah seluas 102,33 hektar (33,01 %) dan tahun 2007 sawah yang dapat diairi seluas 479,82 hektar (70,34 %). Perkembangan sawah beririgasi sepuluh tahun kemudian juga mengalami peningkatan sebesar 37,33 %. Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan semakin tersedianya fasilitas irigasi yang baik, maka sawah-sawah yang dapat diairi pun semakin luas dan diharapkan dengan perkembangan irigasi yang baik, produksi dapat meningkat sesuai yang diharapkan oleh para petani di kedua lokasi penelitian

### e. Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Pengendalian hama dilakukan dengan dua cara yakni secara alami dan secara kimiawi. Secara alami biasanya petani menggunakan musuh alami ataukah menggunakan daun-daunan yang dimaknai bahwa dengan menggunakan daun-daunan tersebut tidak pernah terserang hama. Hama yang kadang menyerang tanaman padi pada kedua lokasi penelitian adalah jenis tikus, penggerek batang, hama putih palsu, tungro, walang sangit (1997) dan tahun 2007 perkembangan juga mengalami perkembangan yakni munculnya jenis xantomonas, siput/keong mas dan kresek. Adapun perkembangan luas serangan hama di Desa Sereang dan Desa Passeno dapat di lihat pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Luas Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007

No.	Uraian	1997		2007	
		Luas	Persentase	Luas	Persentase
1	Tikus	136,00	24,13	340,00	34,08
2	Penggerak Batang	132,00	23,43	330,00	33,08
3	Hama Putih Palsu	221,00	39,22	82,00	8,22
4	Tungro	24,30	4,31	-	-
5	Walang Sangit	50,20	8,91	98,00	9,82
6	Xantomonas	-	-	23,00	2,31
7	Siput / Keong Mas	-	-	124,00	12,43
8	Kresek	-	-	53,00	5,31
	Jumlah	563,50	100,00	997,62	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidrap, 2007.

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa jenis hama putih palsu yang paling banyak menyerang tanaman padi pada tahun 1997 yakni luas serangannya adalah 221,00 hektar (39,22 %), dibanding dengan tungro yang luas serangannya hanya seluas 24,30 hektar (4,31 %). Tahun 2007, hama tikus yang paling banyak menyerang tanaman padi yakni seluas 340,00 hektar (34,08 %) dan Xantomonas yang paling sedikit menyerang tanaman padi, yakni luas serangan 23,00 hektar (2,31 %). Perkembangan serangan hama antara tahun 1997 dan 2007 selain mengalami peningkatan serangan, juga jenisnya semakin bertambah, yakni ada jenis Xantomonas, siput/keong mas dan kresek, yang sebelumnya belum ditemukan jenis ini.

Tabel 5. Luas Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Luas	Persentase	Luas	Persentase
1	Tikus	120,00	38,71	210,00	30,79
2	Penggerak Batang	40,00	12,90	110,00	16,13
3	Hama Putih Palsu	31,00	10,00	70,00	10,26
4	Tungro	52,00	16,77	-	-
5	Walang Sangit	67,00	21,61	93,15	13,66
6	Xantomonas	-	-	56,00	8,21
7	Siput / Keong Mas	-	-	103,00	15,10
8	Kresek	-	-	80,00	5,31
	Jumlah	310,00	100,00	682,15	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sidrap, 2007.

Dari Tabel 5 terlihat bahwa jenis hama tikus yang paling banyak menyerang tanaman padi di tahun 1997 yaitu seluas 120 hektar (38,71 %) dan hama putih palsu yang paling sedikit yakni seluas 31,00 hektar (10 %). Tahun 2007, hama tikus masih yang terbanyak menyerang yakni seluas 210 hektar (30,79 %) dan paling sedikit adalah jenis xantomonas yakni seluas 56,00 hektar (8,21 %). Jenis xantomonas, siput/keong dan kresek seperti halnya di Desa Sereang, jenis ini sebelumnya tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan hanya luas serangan yang bertambah, akan tetapi jenis hama pun bertambah banyak.

Dari penuturan beberapa informan pun menyebutkan bahwa Jenis hama yang umum menyerang tanaman padi adalah; tikus, penggerek batang, ulat grayak, walang sangit, tungro, wereng coklat keong mas. Di Desa Sereang adalah jenis kupu-kupu kuning, dan kupu-kupu putih dan walang sangit. Pengendalian hama yang dilakukan petani adalah dengan cara memberikan obat yang dinamakan klensek dan nurella. Walang sangit biasanya digunakan daun jambu, yang dipahami petani bahwa belum ada daun jambu yang terserang hama dan racun kimia berupa decis dan racun 05. Hama tikus sekarang ini sudah mulai berkurang akibat diberikannya obat yang menyerupai bubuk hitam yang diberikan disekeliling pematang sawah sebelum sawah ditanami padi.

#### **f. Panen dan Pasca Panen**

Perubahan sistem panen dan pasca panen yang berkembang di Desa Sereang dan Desa Passeno diawali dengan terjadinya pergantian bibit lokal menjadi bibit unggul, yang diikuti dengan perubahan alat panen dari ani-ani menjadi sabit. Perkembangan pemakaian bibit lokal menjadi bibit unggul, berefek pula terhadap berkembangnya proses pasca panen. Perkembangan alat perontok padi ( penggilingan padi ) misalnya, yang meningkat akhir-akhir ini berkaitan dengan semakin sedikit petani yang menyimpan gabah di rumahnya. Fenomena ini dimungkinkan karena pergeseran penggunaan alat pasca panen tradisional ke alat modern, yang disebut sebagai mesin power thresher, istilah setempat adalah mesin dross.

Mesin dross (alat perontok padi) untuk pertama kalinya di kenal di Desa Sereang sekitar tahun 1984. Penggunaan mesin perontok padi (dross) menuntut adanya pembagian tugas diantara tenaga kerja yang terlibat seperti; operator mesin, tenaga kerja yang bertugas menarik-narik padi agar letaknya tidak terlalu jauh dari mesin, tenaga kerja yang bertugas memasukkan padi ke mesin perontok, tenaga kerja yang bertugas memisahkan sisa-sisa jerami yang bercampur dengan gabah, dan tenaga kerja yang bertugas memasukkan gabah ke dalam karung.

1). Proses Perontokan dari Padi menjadi Gabah

(a). Pemotongan Padi

Proses pemotongan padi oleh masyarakat petani di Desa Sereang, yang istilah setempat disebut "*massangki*". Kegiatan penebasan rumpun padi dengan *massangki* menggunakan alat "sabit" atau "kandao". Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan ini tergantung dari luas areal persawahan yang dipanen. Artinya, semakin luas areal panen, semakin banyak pula tenaga kerja yang dilibatkan. Pemotongan padi merupakan kegiatan yang dilakukan lebih awal, jika persediaan padi sudah cukup untuk dirontokkan, maka kegiatan merontokkan sudah dapat dimulai, sambil diikuti terus dengan kegiatan pemotongan padi oleh tenaga kerja sabitan, agar kegiatan perontokan padi tidak terputus.

Selain melibatkan tenaga kerja pemotong padi, diperlukan pula tenaga kerja yang mengangkut padi ke tempat perontokan padi. Padi yang telah dipotong diangkut dengan menggunakan alat berupa sarung panjang atau karung plastik. Bila tenaga kerjanya laki-laki padi dipikul dan jika tenaga kerja perempuan dipasang pada punggungnya.

Kegiatan pemotongan padi sebelum dikenal revolusi hijau, yakni pada penggunaan alat panen ani-ani keterlibatan tenaga kerja perempuan lebih dominan, karena pekerjaan ini digolongkan sebagai pekerjaan halus dan tenaga kerja laki-laki hanya sebatas menerima hasil potongan padi yang dilakukan perempuan. Selain itu, tenaga kerja laki-laki diperlukan dalam

pengangkutan hasil panen ke tempat dimana padi akan dirontokkan. Selanjutnya, kegiatan perontokan akan dilakukan oleh perempuan. Berbeda ketika revolusi hijau telah diadopsi, alat panen yang sebelumnya ani-ani diganti menjadi sabit, berakibat pada perubahan dalam penggunaan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja laki-laki lebih dominan digunakan karena hadirnya mesin-mesin pertanian, khususnya dalam perontokan padi. Pekerjaan pada fase sesudah revolusi hijau digolongkan sebagai pekerjaan kasar, sehingga yang dibutuhkan tenaga kerja laki-laki. Tenaga kerja perempuan dilibatkan sebatas tenaga kerja sabitan, walau pun ada yang terlibat ketika mesin-mesin pertanian digunakan, hanya sebatas sekretaris kelompok dross misalnya, tidak lebih dari itu.

(b). Perontokan

Kegiatan perontokan melibatkan beberapa tenaga kerja, yang bertugas sebagai tenaga kerja operator mesin, tenaga kerja penarik padi agar selalu mendekat pada mesin perontok, tenaga kerja yang bertugas memasukkan padi ke mesin perontok, tenaga kerja yang bertugas memisahkan sisa-sisa jerami yang bercampur dengan gabah, dan tenaga kerja khusus memasukkan gabah ke dalam karung.

Tenaga kerja yang terlibat dalam perontokan padi saling memikul tugas secara bersama-sama untuk menghindari terputusnya proses perontokan. Peralatan kerja yang digunakan oleh tenaga kerja berbeda-beda, misalnya

tenaga kerja penarik padi yang dilibatkan dua orang dalam satu mesin perontok menggunakan alat cangkul. Tenaga kerja yang bertugas membersihkan jerami yang bercampur gabah, menggunakan sarung atau terpal plastik sebagai alat penadah yang umumnya dilakukan oleh perempuan. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengarungan gabah, umumnya dilakukan oleh laki-laki dengan menggunakan karung sebagai wadah penampungan, ember plastik sebagai alat untuk memasukkan gabah ke dalam karung, dan tali rafia dipakai sebagai bahan untuk menjahit karung yang telah terisi gabah. Tenaga kerja operator mempersiapkan bahan untuk keperluan operasional seperti; bahan bakar solar, oli, air dan sebagainya.

Setelah proses pengarungan selesai, gabah-gabah diangkut ke pinggiran sawah untuk selanjutnya dijual kepada pa'pete-pete (pedagang pengumpul yang datang ke lokasi panen) atau diangkut oleh pa'taksi (alat transportasi sepeda) ke pabrik penggilingan beras, yang sebelumnya telah dikeluarkan untuk bagian tenaga kerja yang terlibat pada proses panen dan perontokan padi.

Perkembangan pabrik penggilingan padi di Desa Sereang yang tadinya jumlahnya 5 buah, menjadi 15 buah dan di Desa Passeno dari 7 pabrik penggilingan padi bertambah menjadi 13 buah, hal ini dipicu oleh karena petani sudah kurang yang menyimpan gabahnya di rumah. Ketika petani membutuhkan beras untuk konsumsi atau ada kebutuhan yang mendesak, petani dapat mengambil dalam bentuk uang tunai, yang sebelumnya telah

dicatat dan diperhitungkan oleh pemilik pabrik penggilingan padi pada saat petani menyimpan gabahnya.

Selain itu, berkembangnya pabrik penggilingan padi pada kedua lokasi penelitian, telah berkembang pula penggilingan padi keliling dimana pabrik penggilingan padi yang dibawa keliling oleh sebuah mobil yang menawarkan jasanya menggiling gabah petani dan petani tidak perlu lagi repot-repot membawa gabahnya ke pabrik, cukup menunggu pabrik penggilingan padi yang lewat atau cukup dengan menelpon pabrik penggilingan padi yang berkeliling ke desa-desa. Konflik pernah juga muncul di awal-awal beroperasinya pabrik penggilingan padi keliling karena dianggap oleh pengusaha pabrik dapat mematikan usahanya, namun lambat laun konflik redam sendiri akibat kesadaran pengusaha untuk berinovasi.

Kondisi di atas adalah sebuah fenomena yang terjadi baik di Desa Sereang maupun di Desa Passeno seiring dengan berkembangnya proses pasca panen yang mengimbangi teknologi baru, khususnya pada berkembangnya modernisasi pertanian pada budidaya tanaman padi.

Kondisi sebelum berkembangnya modernisasi pertanian pada budidaya tanaman padi, proses perontokan padi masih menggunakan cara-cara tradisional seperti; *maddese* (menginjak-injak), *malludda* (menumbuk) dan *massampa* (menghempaskan).

(c). *Maddese* (menginjak-injak)

*Maddesse* (menginjak-injak) adalah kegiatan perontokan padi menjadi gabah dengan cara diinjak-injak, dengan menggunakan “*balulang*” yang artinya kulit sapi, fungsinya dapat digantikan dengan tikar yang terbuat dari daun lontar (*appe dauttaa*). Peralatan lain yang dibutuhkan pada kegiatan “*maddese*” adalah kayu balok atau bambu yang diikatkan diantara dua tiang rumah panggung, yang berfungsi sebagai pegangan bagi orang yang melakukan proses perontokan padi.

(d). *Malludda* (menumbuk)

*Malluda* adalah proses perontokan padi dengan cara menumbuk padi yang menggunakan alat lesung yang terbuat dari batang kayu besar menyerupai perahu. Alat penumbuknya terbuat dari bambu, dengan ukuran panjang rata-rata 1,5 meter. Kedua alat tersebut disebut sebagai “*palungeng aju*” (lesung kayu), sebagai tempat menumbuk padi dan “*alu awo*” sebagai alat penumbuknya.

(e). *Massampa* (menghempaskan/banting batang padi)

*Massampa* adalah proses perontokan padi dengan cara menghempaskan padi menjadi gabah. *Abbantingeng* artinya tempat menghempaskan, dalam hal ini menghempaskan padi menjadi gabah. Alat yang digunakan terbuat dari kayu dan bambu, bentuknya persegi panjang. Kayu berfungsi sebagai tempat melekatkan bambu yang telah dipilah-pilah

sehingga menyerupai lantai rumah yang terbuat dari bahan bambu. Bambu berfungsi sebagai tempat atau landasan saat melakukan kegiatan perontokan padi.

Kegiatan perontokan padi sebelum revolusi hijau, digunakan dengan cara-cara tradisional seperti; maddese (menginjak-injak), malluda (menumbuk) dan massampa (menghempaskan). Kegiatan ini dilakukan dengan sifat kegotong royongan dan solidaritas yang tinggi diantara tenaga kerja perempuan yang terlibat dalam pekerjaan perontokan padi. Berbeda, ketika penggunaan mesin dross (power thresher) digunakan sesudah revolusi hijau. Tenaga kerja yang terlibat, baik laki-laki maupun perempuan bersifat individual karena mengejar target pekerjaan. Kegotong royongan dan solidaritas yang terpelihara sebelumnya menjadi hilang. Lebih jauh, diantara tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan perontokan padi ada yang tidak saling mengenal satu sama lain.

## 2). Proses dari Gabah menjadi Beras

Proses pengolahan gabah menjadi beras dengan cara mekanis menggunakan mesin huller. Caranya adalah; mesin penggilingan padi dihidupkan, kemudian gabah dimasukkan ke dalam mesin untuk memperoleh hasil berupa pemecahan kulit gabah. Selanjutnya, proses pemisahan antara kulit padi (sekam) dengan beras yang merupakan tujuan utama dari proses penggilingan.

Mesin huller mempunyai tiga komponen utama; (1). Saluran pembuangan yang berada di bawah yang ditadah dengan alat semacam ember akan menghasilkan beras. (2). Saluran yang berada di samping kanan alat penadah beras dan langsung ditampung di lantai, hasilnya adalah dedak atau *nennee*. (3). Pipa selam adalah tempat keluarnya sekam padi atau *ampekka*.

Secara tradisional, pengolahan gabah menjadi beras dikenal dengan cara menumbuk (*mannampu*). Pengolahan ini menggunakan lesung yang dibuat dari bahan batu dan alu antan dibuat dari bahan kayu. Kedua alat ini merupakan alat yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Lesung atau *palungeng batu* adalah sebagai tempat menumbuk gabah, sedangkan *alu/antan* atau *alu aju* sebagai alat penumbuk gabah yang ada di dalam lesung tersebut.

*Tampi/pattapi* (penapis) adalah alat yang digunakan selain lesung dan alu. Alat ini digunakan untuk memisahkan antara kulit padi dan beras yang akan dihasilkan dari proses penumbukan gabah. Adapun perkembangan penggilingan padi di kedua lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 dan 7.

Tabel 6. Jumlah Penggilingan Padi di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Penggilingan Padi Besar (PPB)	3	37,5	5	3,33
2	Penggilingan Padi Kecil (PPK)	5	62,5	7	46,7
3	Rice Milling Unit (RMU)	-	-	3	20,0
	Jumlah	8	100,00	5	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2007.

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa jumlah penggilingan padi di Desa Sereang tahun 1997 terdiri dari penggilingan padi besar 3 unit (37,5 %) dan penggilingan padi kecil 5 unit (62,5 %). Tahun 2007, penggilingan padi besar bertambah menjadi 5 unit (3,33 %), penggilingan padi kecil 7 unit (46,7 %) dan ditambah dengan penggilingan Rice Milling Unit sebanyak 3 unit (20 %). Fenomena bertambahnya jumlah penggilingan padi di Desa Sereang menunjukkan bahwa petani mempunyai banyak pilihan dalam pengolahan gabah menjadi beras. Bagi petani yang akan menyimpan gabah dalam jangka waktu yang agak lama di pabrik, maka ia akan membawa gabahnya ke penggilingan padi dan bagi petani yang segera akan memperoleh dalam bentuk beras maka ia akan mendatangi pabrik penggilingan padi kecil atau menunggu pabrik penggilingan padi keliling yang menggunakan mobil yang menawarkan jasanya ke rumah-rumah petani.

Tabel 7. Jumlah Penggilingan Padi di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Penggilingan Padi Besar (PPB)	2		4	
2	Penggilingan Padi Kecil (PPK)	4		6	50
3	Rice Milling Unit (RMU)	-		2	
	Jumlah	6	100,00	12	100,00

Sumber : Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2007.

Dari Tabel 7 terlihat bahwa jumlah penggilingan padi yang ada di Desa Passeno tahun 1997 adalah 2 unit penggilingan padi besar, 4 unit penggilingan padi kecil. Tahun 2007, jumlah penggilingan padi bertambah menjadi 4 unit penggilingan padi besar, 6 unit penggilingan padi kecil dan 2 unit Rice Milling Unit. Terlihat pula bahwa terjadi peningkatan penggilingan padi antara tahun 1997 – 2007, karena perkembangan teknologi yang semakin maju ditunjang oleh keinginan petani untuk mengadopsi teknologi . Di Desa Sereang pun memperlihatkan bahwa hampir 80 % petani telah menyimpan gabahnya di pabrik, sudah jarang lagi ditemukan petani menyimpan gabah di rumahnya, terutama bagi petani besar. Ia akan ke pabrik dan mengambil dalam bentuk uang tunai jika mereka membutuhkannya. Sekitar 20 % petani masih membawa gabahnya ke penggilingan padi kecil atau menunggu pabrik penggilingan padi keliling yang

menawarkan jasanya ke rumah-rumah petani dan petani tidak perlu lagi repot-repot mendatangi pabrik penggilingan padi yang membutuhkan tenaga dan biaya transportasi untuk mengangkut gabahnya.

Kegiatan penggilingan gabah menjadi beras sebelum revolusi hijau, digunakan cara tradisional yang dikenal dengan alat lesung (menumbuk; mannampu). Kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kerja perempuan yang berlangsung harmonis diantara sesama pekerja, kebersamaan dan canda gurau diantara mereka terlihat dengan menekuni pekerjaannya sehari-hari hingga padi selesai ditumbuk. Setelah menjadi gabah lalu disimpan di rumah-rumah petani dan dibawa ke pabrik ketika petani telah membutuhkan untuk konsumsi atau kebutuhan sekunder lainnya. Sesudah revolusi hijau, karena berkembangnya pabrik penggilingan padi maka kebersamaan dan canda gurau telah hilang. Petani jarang yang menyimpan gabahnya di rumah, setelah panen dan dirontokkan, petani langsung membawa ke pabrik dan diambil ketika petani membutuhkannya. Ketika petani akan menjual hasil panennya secara langsung, pedagang pengumpul pun telah bersedia membelinya di sawah, pada saat itu transaksi dapat berlangsung. Bagi petani yang membawa hasil panennya ke rumah, mereka tidak perlu repot membawa ke pabrik karena pabrik penggilingan padi yang menggunakan mobil telah beroperasi menawarkan jasa ke rumah-rumah petani.

## **2. Perubahan Sistem Ekonomi**

### **a. Pergeseran Orientasi Produksi Petani : dari Subsisten ke Komersial hingga Kapitalisme**

Pergeseran orientasi produksi petani dipicu oleh berkembangnya sistem perekonomian masyarakat karena pengaruh modernisasi pertanian. Perkembangan sistem ekonomi adalah perubahan perilaku petani dalam merespon berkembangnya sistem pasar, berkembangnya organisasi dan semakin komersilnya masyarakat petani.

Penilaian ekonomi masyarakat petani didasarkan pada model individualistik dalam perilaku petani. Penilaian ekonomi tidak terlepas dari aspek penilaian budaya karena aspek tersebut diharapkan membahas manfaat-manfaat kolektif yang dapat memperbesar nilai budaya kepada individu-individu.

Budaya dapat dilihat sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, tradisi, adat-istiadat, dan lain-lain yang berfungsi mengidentifikasikan dan mengikat sebuah kelompok secara bersama-sama. Budaya dapat mempengaruhi hasil-hasil ekonomi untuk kelompok dalam tiga arah, yaitu; Pertama, budaya akan mempengaruhi efisiensi ekonomi, melalui promosi nilai-nilai bersama di dalam kelompok yang mengkondisikan bagaimana anggota-anggota kelompok dalam melaksanakan proses-proses produksi ekonomis. Kedua, budaya dapat mempengaruhi keadilan, misalnya dengan menanamkan prinsip-prinsip moral bersama mengenai perhatian untuk orang lain dalam

mendorong pembentukan mekanisme sistem ekonomi yang berlaku dalam proses produksi. Ketiga, budaya dapat dilihat dalam mempengaruhi atau bahkan menentukan sasaran-sasaran ekonomi dan sosial yang diputuskan untuk dicapai oleh kelompok.

Pengaruh budaya pada perilaku individu akan tercermin dalam hasil-hasil kolektif. Misalnya, pengaruh budaya pada hasil-hasil ekonomi yang berkenaan dengan indikator efisiensi pada laju perubahan teknologi, tingkat kesempatan kerja, laju dan arah perubahan struktural dan sebagainya. Secara spesifik, pandangan mengenai pengaruh budaya dapat dilihat aspek-aspek kultural yang mempengaruhi peningkatan standar hidup material per kepala.

Kondisi seperti ini, mengharuskan pemasukan modal manusia (*human capital*) sebagai variabel penjelas dalam model pertumbuhan ekonomi, memungkinkan perubahan teknologi akan diendogenkan, mungkin memadai untuk menunjukkan pengaruh budaya-budaya yang penting, karena pengaruh-pengaruh tersebut akan dimanifestasikan sebagai karakteristik individu yang membentuk angkatan kerja.

Alternatifnya, mengabaikan budaya dalam menjelaskan kinerja ekonomi mungkin hanya mencerminkan fakta bahwa variabel ekonomi adalah berarti; dengan kata lain gambaran penyebab dan hasil yang sangat konprehensif bisa diperoleh melalui pertimbangan fenomena seperti produktifitas, teknologi, transisi industri, tingkat investasi, aliran modal, dan lain-lain. Padahal,

sesungguhnya posisi ekosentris memandang perekonomian memiliki kehidupan sendiri yang hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi secara responsif.

Masuknya modernisasi pertanian dalam arti komersialisasi dan ekonomi uang (*monetisasi*) yang begitu menyeruak di Desa Sereang dan Desa Passeno bersamaan dengan upaya-upaya intensifikasi pertanian yang telah memberi implikasi luas bagi dunia pertanian di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidrap. Selain terjadi beberapa perubahan-perubahan diberbagai aspek kehidupan pertanian seperti; ketenagakerjaan, pola tanam sistem panen dan lainnya, juga terjadi perubahan dalam hubungan antara petani itu sendiri.

Sekitar tahun 1970-an, orientasi produksi petani baik di Desa Sereang maupun Desa Passeno mengalami pergeseran karena teknologi baru. Tadinya, orientasi produksi petani bersifat subsisten, yang hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya dalam satu kali musim tanam. Proses produksi yang dilakukan masih bersifat tradisional seperti; menggunakan bibit lokal, komoditi padi yang dikelola tanpa irigasi, belum ada pemupukan, pembasmian hama melakukan cara-cara alami, begitu pun dalam pelaksanaan panen menggunakan alat sederhana berupa ani-ani dan masih menggunakan tenaga kerja yang banyak, tanpa memperhitungkan untung rugi dan lebih banyak bersifat kekeluargaan dalam menjalin kerjasama antara petani dan buruh tani. Orientasi produksi petani seperti ini dilakoni khususnya

bagi petani kecil yang kepemilikan lahan lebih kecil dari 0,5 hektar. Bagi petani menengah dan petani besar, orientasi produksi sudah mengarah pada komersial, karena ditunjang dengan kepemilikan lahan yang cukup luas ditambah dengan modal yang memadai untuk berinvestasi.

Akibat dorongan modernisasi pertanian, semua perilaku petani yang tadinya subsisten telah mengarah pada komersialisasi dan bahkan mengarah pada kapitalisasi. Sumber-sumber penghidupan yang tadinya dikelola secara gotong royong berubah menjadi individualistik. Selain terjadi beberapa perubahan di berbagai aspek kehidupan pertanian seperti; ketenagakerjaan, pola tanam, sistem panen dan lainnya, juga terjadi perubahan dalam hubungan antara petani itu sendiri.

Pada kasus petani Desa Sereang dan Desa Passeno, hubungan antara petani yang berlangsung tidak sebatas dalam hubungan kerja, tetapi hubungan sosial telah berlangsung sedemikian rupa, terutama dalam kaitannya dengan sistem panen dan ketenagakerjaan. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, dalam hal sistem panen dan ketenagakerjaan misalnya, sebelum revolusi hijau melanda kedua desa tersebut, ketika panen tiba, petani dibantu oleh buruh panen ramai-ramai memanen padi dengan menggunakan alat panen ani-ani dengan upah panen dalam bentuk ikatan padi (bawon) yang melibatkan juga tenaga kerja dalam keluarga dan orang-orang desa dalam jumlah besar. Waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan itu berkisar antara 6 – 8 jam.

Akan tetapi, setelah revolusi hijau sistem lama yang digunakan mulai bergeser, alat panen sudah menggunakan sabit dan merontokkan padi menggunakan mesin dross (*power thresher*). Dengan sistem panen yang menggunakan sabit, tenaga kerja yang dibutuhkan pun tidak sebanyak tenaga kerja pada saat menggunakan ani-ani dan waktu yang dibutuhkan untuk memanen dengan luas satu hektar hanya dibutuhkan waktu sekitar 2 – 3 jam. Tenaga kerja yang terlibat tidak sebatas hanya pada kerabat atau tenaga kerja dalam keluarga, tetapi tenaga kerja panen sudah terbuka bagi orang-orang desa untuk memanen. Bentuk upah panen sudah dalam bentuk *cash* (uang tunai). Hubungan yang tercipta antara pemilik sawah dan tenaga kerja pemanen cenderung bersifat kontraktual dan impersonal.

Suharso (2002) mengemukakan bahwa, bagi komunitas petani bertanah sempit dan buruh tani, upaya pengelolaan tanah sebagai satu-satunya tumpuan mencari nafkah sudah dipandang tidak lagi memberikan keuntungan ekonomis yang berarti. Sebagai gantinya, mereka banyak beralih ke sektor non pertanian (*off – farm*) baik yang berada di desa maupun yang ada di kota.

Teori yang dikemukakan Suharso relevan dengan fenomena yang terjadi pada kedua lokasi penelitian, lahan sawah tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian petani kecil, tetapi pada umumnya petani kecil punya pekerjaan sampingan, terutama ketika pekerjaan di sawah telah selesai. Dilirikinya sektor non pertanian (*off – farm*)

bukan berarti mereka beralih pekerjaan, namun pekerjaan ini dilakoninya ketika pekerjaan di sawah tidak ada dan untuk menyambung hidup anggota keluarganya. Mereka akan kembali lagi ke sawah, ketika musim tanam tiba atau padi telah siap untuk dipanen. Strategi pekerjaan non pertanian yang ditempuh petani kecil adalah sebuah strategi dalam mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga. Tidak ada korelasi antara pekerjaan sektor non pertanian dengan pendapatan yang diperoleh petani kecil, tapi paling tidak mereka merasa aman dengan terpenuhinya kebutuhan pokok keluarganya.

Ketika masyarakat petani mulai mengenal uang, saat itu pula petani mengenal pasar, yakni terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli di lokasi panen. Petani pemilik atau buruh panen yang akan menjual gabahnya tidak perlu repot-repot mencari pembeli karena pedagang pengumpul (*pa'pete-pete*) telah menunggu di pinggir sawah petani. Fenomena ini sejalan dengan Kautsky dalam Susialismanto (2001), bahwa perubahan dari sistem subsisten kepada produksi komoditi, masuknya pembayaran secara tunai (*cash*) menyebabkan pembayaran dalam bentuk barang diganti oleh pembayaran dalam bentuk uang dan terakhir adalah penggantian tenaga kerja keluarga menjadi tenaga kerja sewa atau bayaran.

Lebih lanjut Kautsky mengatakan bahwa penyingkiran industri di pedesaan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan uang tunai bagi para petani. Dalam kondisi yang demikian petani bukan hanya membeli barang-barang konsumsi dasar. Bersamaan dengan itu meningkat pula pembayaran

tunai dari tuan tanah kepada petani penggarap, yang menyebabkan pergantian pembayaran dalam bentuk barang (*payment in kind*) kepada pembayaran tunai (*payment in cash*) dan dengan demikian meningkatkan tingkat pembayaran secara umum. Sementara petani hanya sanggup membayar secara tunai dengan hanya menjual hasil produksinya, yang bukan berasal dari produksi rumah tangga yang terbelakang (pertanian, kerajinan) melainkan dari hasil produksi yang tidak diproduksi oleh industri kapitalis perkotaan. Dengan demikian petani lama kelamaan didorong untuk hanya menjadi petani murni (*pure agriculturist*). Perbedaan antara desa dengan kota semakin melebar. Semakin kuat watak komoditi dalam pertanian, semakin besar jarak yang memisahkan petani dengan pasar dan semakin besar pula ketergantungan petani pada pedagang yang berfungsi sebagai perantara. Pedagang yang menemukan tempatnya diantara produsen dan konsumen menghasilkan modal dagang (*merchant capital*).

Berkaitan hubungan petani dengan petani lainnya, atau antara petani dengan berbagai lapisan masyarakat desa lainnya lebih banyak diwarnai dengan hubungan kekerabatan. Sifat kegotong royongan dalam segala aspek kehidupan masih sangat akrab. Hubungan antara petani dengan petani lainnya lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai sosial yang telah lama dibina. Fenomena di atas semakin berubah karena modernisasi pertanian. Tjondronegoro (1990) mengemukakan bahwa, dengan berkembangnya

komersialisasi dan monetisasi telah mengakibatkan hubungan sosial antara petani menjadi lebih lugas.

Sifat hubungan lugas petani di Desa Sereang dan Desa Passeno tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang dalam banyak hal mempertimbangkan untung rugi. Dahulu, bila ada petani yang kekurangan salah satu sarana produksi dan tidak dalam jumlah besar, petani dapat memperolehnya dari petani lain secara cuma-cuma. Berbeda, kondisinya ketika petani telah mengenal sarana produksi yang bersifat kimiawi, bila ada petani yang kekurangan sarana produksi, petani yang memberi bantuan dihitung sebagai pinjaman sementara dan harus dikembalikan setelah petani tersebut punya uang untuk menebus pinjamannya.

Sajogyo (dalam Salman, 2004) mengemukakan bahwa, setelah revolusi hijau melanda pedesaan, strategi internal masyarakat petani untuk memelihara hegemonitas ternyata tidak mempan lagi. Cikal bakal diferensiasi sosial yang sudah mulai terlihat pada akhir fase involusi pertanian semakin nyata penampakannya pada fase revolusi hijau. Pendekatan ekonomi pedesaan yang selama ini diterapkan tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat miskin di pedesaan, dan strategi yang memfokuskan pada pertanian sendiri hanya menambah kekayaan bagi petani yang telah kaya karena hanya petani kaya yang mampu membeli input pertanian dan merekalah yang menikmati program revolusi hijau. Hasil green revolution justru makin melebarkan jurang yang memang sudah lebar antara

petani kaya dengan petani miskin (Waterson dalam Fakhri, 2000). Ketika itulah terlihat adanya signifikansi dengan diferensiasi sosial yang terjadi di pedesaan, yakni semakin terpinggirkannya petani kecil karena terbatasnya akses modal yang dimiliki.

Analisis teori Sajojo menguatkan fenomena yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno, karena sistem tradisional yang telah berubah ke sistem pertanian modern dalam pertanian padi sawah berakibat pada semakin kerdilnya peluang ekonomi bagi petani kecil dalam meningkatkan pendapatan mereka. Petani kecil telah kehilangan lahan sempit yang satu-satunya menjadi penopang hidup, terpaksa dijual kepada petani kaya atau migran yang ada di kota Pangkajene dan Kota Makassar karena tidak sanggup mengikuti biaya input produksi yang kian hari kian mahal, ditambah lagi peluang ekonomi di luar sektor pertanian padi sawah sangat terbatas karena rendahnya pendidikan mereka dan tanpa skill.

Orientasi corak produksi bagi petani pada kedua lokasi penelitian tergantung pada struktur sosial masyarakatnya. Lapisan atas (petani pemilik) dengan kepemilikan lahan di atas 1 ha corak produksinya adalah komersial (keuntungan). Petani dalam kegiatan usahatani berusaha memperoleh keuntungan besar, sebagai modal usahatani musim berikutnya dan berinvestasi dengan cara menambah luas lahan miliknya. Lapisan tengah (penyakap), orientasi produksi masih bersifat subsisten dan sudah melirik ke arah komersil. Selain pemenuhan kebutuhan konsumsi, petani penyakap juga

berusaha menambah lahan garapannya atau membeli lahan baru untuk dikelola. Lapisan bawah (buruh tani), corak produksi adalah subsisten yakni semata-mata berusahatani untuk pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarganya, belum memperhitungkan berinvestasi seperti pada petani penyakap dan petani pemilik.

Tania Li (2002) mengemukakan bahwa model ekonomi moral pada hakikatnya bersifat dualistik, dan bahkan dikatakan sebagai kutub yang berlawanan. Moralitas dianggap sebagai alami, sehingga tidak pernah diselidiki sebagai suatu “tradisi yang diciptakan” yang bisa dipengaruhi oleh manipulasi ideologis di dalam hubungan kekuasaan dan kelas para kapitalis pedesaan. Ekonomi moral yang secara ekonomi diperlukan dalam memberi jaminan faktor-faktor produksi kepada petani marginal (Parry dan Bloch dalam Tania Li, 2002).

Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan di Desa Sereang, dimana 95 % petani menyimpan gabahnya pada pabrik penggilingan padi (pabrik beras), jika ada kebutuhan petani untuk makan dan kebutuhan sekunder lainnya, mereka tinggal mendatangi pengusaha pabrik penggilingan padi untuk mendapatkan uang tunai sesuai kebutuhan dan diperhitungkan sebelumnya dari hasil panen yang telah diperoleh. Pabrik penggilingan padi dilengkapi seorang petugas yang khusus mencatat gabah petani yang dititip di pabrik. Di Desa Passeno, 40 % petani yang menyimpan gabahnya di pabrik, 60 % lainnya masih menyimpan gabah di rumahnya setelah panen

khususnya yang akan di konsumsi pada satu musim tanam, kecuali gabah yang mau dijual setelah dikeringkan petani tinggal membawa ke pabrik penggilingan padi atau menunggu pabrik keliling masuk ke desanya.

#### **b. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian**

Perkembangan pekerjaan di luar pertanian diiringi pengenalan teknologi modern sebagai faktor yang kerap kali mengurangi lowongan kerja dan pendapatan petani kecil dan perempuan, yang memaksa mereka untuk bersaing pada tingkatan yang lebih tinggi padahal kemampuan mereka tidak memadai baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi keterampilan. Contoh semacam itu penggunaan traktor tangan mengurangi kesempatan kerja buruh pertanian dalam penggarapan lahan, meskipun ini berarti penurunan biaya produksi bagi pemilik tanah.

Kecenderungan pemilik tanah dalam menghemat biaya produksi dengan membayar upah buruh berupa uang tanpa makan, dari pada menganut cara tradisional dimana upah lebih rendah, namun pekerja panen diberi dua kali makan yaitu makan siang dan kue-kue di pagi dan sore hari, dan ini lebih disukai oleh buruh pertanian padi sawah. Perubahan cara panen, dimana sistem panen terbuka cenderung digantikan oleh sistem yang lebih komersial; sistem baru tersebut membatasi keikutsertaan petani kecil dan perempuan setempat karena pedagang, pihak yang membeli hasil panen, mendatangkan buruh panen dari wilayah lain.

Petani padi yang tidak mampu dan tergolong petani kecil di Desa Sereang mengungkapkan bahwa hasil produksi padi yang diterimanya tidak memadai untuk menutupi kehidupan sehari-hari. Menurut mereka solusinya adalah seharusnya pemerintah menaikkan harga dasar gabah yang mereka terima. Akan tetapi harga dasar gabah hanyalah satu faktor dalam persoalan kompleks yang menyulitkan banyak petani kecil dalam menjalani hidup yang layak. Menurut kebijakan yang berlaku saat ini dan dirasakan bagi petani, khususnya petani kecil adalah banyak uang yang dikeluarkan petani kecil untuk pupuk dan bahan-bahan lain hampir sama dengan nilai hasil panen.

Pengakuan petani kecil dan buruh pertanian di Desa Passeno, bahwa dalam kurun waktu 4 – 5 tahun terakhir ini biaya pemakaian bahan-bahan pertanian telah meningkat secara drastis, sementara pendapatan dari penjualan hasil panen menurun. Petani penggarap dan petani kecil mengamati bahwa pendapatan mereka kini sama dengan pekerja buruh tani upahan. Mereka merasa bahwa pemasangan harga pemakaian bahan-bahan untuk produksi padi dan harga penjualan hasil produksi petani tidak masuk akal. Mereka tidak memahami mengapa harga pupuk tiba-tiba begitu melonjak (subsidi pemerintah tiba-tiba dicabut karena krisis ekonomi pada tahun 1997), sementara harga jual gabah tetap saja sama.

Dari temuan hasil penelitian pada kedua desa ditemukan bahwa jasa penyuluh (PPL) tidak banyak memberi kontribusi pemikiran bagi petani dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, PPL sekedar memperkenalkan dan

memberi gambaran tentang teknologi atau inovasi yang dibawa, lebih dari itu apa yang diharapkan dalam membantu petani mengatasi masalahnya tidak pernah terealisasi.

Sebetulnya, KUD yang terdapat pada kedua lokasi penelitian dapat membantu petani khususnya dalam penyediaan kredit ringan dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian. Namun, kenyataannya KUD tidak sanggup membeli hasil produksi padi di saat petani siap menjual hasil produksinya, dan pembayaran seringkali tertunda jika KUD membeli hasil produksi petani. Tidak ada jalan lain, petani akhirnya menjual produksi mereka pada pedagang swasta yang datang ke desa, namun pedagang tidak membayar mereka dengan harga resmi yang ditetapkan.

Petani kecil dan petani penggarap merasa bahwa pekerjaan tradisional mereka, menanam tanaman pangan, dengan cepat menjadi semakin tidak layak secara ekonomi dan tidak dapat menopang mata pencaharian mereka. Alternatifnya, petani akan pindah ke kota dan melirik pekerjaan di sektor luar pertanian.

Pengakuan petani di lokasi penelitian beralasan jika mereka mengemukakan bahwa sangat tidak etis dan bijaksana untuk memutar balik waktu untuk menghentikan kemajuan teknologi yang sudah ada. Masalahnya, sebetulnya bukan pada teknologi itu sendiri kata mereka tetapi keterbatasan mereka terhadap akses untuk menjangkau dalam konteks daya saing dan

eksploitasi serta penyalahgunaannya. Kebijakan yang diharapkan adalah perencanaan yang hati-hati sangat dibutuhkan untuk membuat inovasi teknologi menguntungkan bagi petani kecil dan petani penggarap serta buruh tani, bukan semakin memperburuk pola ketidakadilan.

Fenomena di atas yang dialami petani kecil adalah menyikapi perkembangan akhir-akhir ini pada perkembangan pekerjaan di sektor pertanian padi sawah, yang semakin hari semakin menggeser mata pencaharian utama bagi petani kecil di pedesaan. Melirik perkembangan pekerjaan di luar pertanian yang tersedia di desa sangat terbatas dan tidak menjanjikan pendapatan yang layak bagi petani kecil. Kasus di Desa Sereang, pekerjaan luar pertanian yang tersedia adalah menjadi buruh di luar pertanian dan sektor jasa berupa; tukang kayu, tukang batu, pedagang, dan tukang ojek. Kegiatan tukang ojek banyak dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani ketika tidak ada pekerjaan di usahatani padi. Pekerjaan tukang ojek merupakan pekerjaan sampingan bagi mereka, ditunjang dengan mobilitas penduduk Desa Sereang yang setiap harinya ke kota Pangkajene. Selain itu, jarak tempuh dari Desa Sereang hanya dua kilometer ke kota Pankajene ibukota Kabupaten Sidrap.

Berbeda kasusnya di Desa Passeno, pekerjaan di luar pertanian kurang berkembang hanya sebatas pengrajin, pedagang, pengangkutan dan pertukangan. Jelasnya sebaran pekerjaan luar pertanian pada kedua desa penelitian dapat dilihat pada Tabel 8 dan 9.

Tabel 8. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Industri Kerajinan	2	9,09	4	10,81
2	Industri Pakaian	1	4,55	5	13,51
3	Industri Alat Pertanian	-	-	3	8,11
4	Toko/Swalayan	-	-	-	-
5	Warung Kelontong	-	-	-	-
6	Pengangkutan	19	86,36	24	64,86
7	Simpan Pinjam	-	-	1	2,71
	Jumlah	22	100,00	37	100,00

Sumber : Kantor Desa Sereang, 2007.

Berdasarkan Tabel 8 di atas, perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Sereang terbesar tahun 1997 adalah pengangkutan yaitu 19 Unit (86,36 %), industri kerajinan 2 unit (9,09 %) dan industri pakaian 1 unit (4,55 %). Tahun 2007, perkembangan pekerjaan luar pertanian semakin meningkat yakni pengangkutan 24 unit (64,86 %), industri pakaian 5 unit (13,51 %), industri kerajinan 4 unit (10,81 %), industri alat pertanian 3 unit (8,11 %) dan usaha simpan pinjam 1 unit (2,71 %). Fenomena ini terlihat bahwa terjadinya peningkatan perkembangan pekerjaan luar pertanian telah menyerap sebagian tenaga kerja yang ada di Desa Sereang, namun belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya.

Tabel 9. Perkembangan Pekerjaan Luar Pertanian di Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007.

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Industri Kerajinan	4	13,79	7	10,93
2	Industri Pakaian	-	-	1	11,54
3	Industri Alat Pertanian	1	3,45	2	3,12
4	Toko/Swalayan	16	55,17	28	43,74
5	Warung Kelontong	3	10,34	7	10,93
6	Pengangkutan	5	17,24	17	26,55
7	Simpain Pinjam	-	-	2	3,12
	Jumlah	29	100,00	64	100,00

Sumber : Kantor Desa Passeno, 2007.

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Passeno tahun 1997 yang terbanyak adalah toko/swalayan yaitu 16 unit (55,17 %) dan paling sedikit adalah industri alat pertanian yaitu 1 unit (3,45 %). Perkembangan yang terjadi tahun 2007, toko/swalayan meningkat menjadi 28 unit dan industri alat pertanian menjadi 2 unit. Usaha simpan pinjam pun tadinya tidak ada, sekarang ada 2 unit, pengangkutan dari 5 unit menjadi 17 unit, warung kelontong dari 3 unit menjadi 7 unit, industri kerajinan dari 4 unit menjadi 7 unit dan industri pakaian yang tadinya tidak ada sekarang ada 1 unit.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa perkembangan pekerjaan luar pertanian di Desa Passeno cukup menggembirakan, namun perkembangan

itu belum bisa menampung luapan tenaga kerja setiap tahun yang meningkat cukup pesat dan hampir setiap rumah tangga petani yang mempunyai anak lulusan SLTA, tidak ada lagi yang mau tinggal di desanya, tapi ia langsung mendapatkan diri menjadi TKI. Anggapan bagi mereka menjadi TKI masih lebih baik dibandingkan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi bagi yang mampu, karena setelah selesai di perguruan tinggi pun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang memadai. Padahal dengan menjadi TKI pendapatan yang diperoleh cukup lumayan untuk menghidupi keluarga di kampung halamannya.

### **c. Migrasi**

Menurunnya akses terhadap sumberdaya alam, meningkatnya penggunaan teknologi baru yang menyingkirkan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, serta tidak memadainya tingkat pendidikan dan skill bagi petani kecil dan perempuan, membuat meningkatnya persaingan antara petani besar dan petani kecil dalam mencari sumber penghidupan.

Pertumbuhan populasi jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin banyak orang yang mencari sumber penghidupan dari sumber yang sama seperti; menjadi petani dan buruh tani di lahan pertanian dan sektor jasa di luar pertanian (tukang ojek, tukang kayu, tukang batu dan perdagangan). Perpindahan penduduk ke kota-kota besar mengurangi

tekanan di daerah pedesaan tapi meningkatkan tekanan di kota yang menimbulkan masalah baru di perkotaan.

Persaingan di daerah urban terjadi akibat rendahnya daya beli masyarakat sehubungan dengan kondisi ekonomi yang telah mengakibatkan banyak PHK seperti pekerja pabrik. Perantau yang tergantung pada sektor informal (perdagangan misalnya) bersaing tidak hanya sesamanya akan tetapi mereka bersaing dengan pedagang yang mengelola secara modern usahanya, seperti supermarket yang menarik pelanggan dari semua lapisan masyarakat.

Kasus yang terjadi di Desa Sereang 80 % warganya tergantung pada pertanian padi sawah, hanya 20 % yang punya lahan sendiri untuk dikelola, 60 % dari lahan pertanian di komunitas petani milik orang luar desa yang merupakan turunan dari keluarga asli yang orang tuanya dahulu berdomisili di Desa Sereang dan sekarang bermukim di Kota Pangkajene dan Kota Makassar. Sebenarnya, lahan ini dahulu dimiliki oleh petani setempat, mereka telah menjual lahannya kepada sejumlah perantau yang menganggap pertanian sebagai investasi yang menguntungkan. Pemilik lahan menyewakan lahannya pada para penggarap lokal. Penggarap kemudian memikul semua beban penggarapan dan menyerahkan kepada pemilik lahan bagian tetap dari hasil panennya. Sejak tahun 1997, biaya input pertanian padi sawah meningkat mengakibatkan para penggarap

mengurangi biaya produksi dengan cara menjual padi secara ijon kepada tengkulak dari luar desa dan menyewa traktor untuk membajak sawah.

Kedua tindakan ini menghilangkan kesempatan kerja bagi petani kecil dan buruh tani serta perempuan menjadi buruh upahan saat musim tanam, sehingga memaksa mereka untuk mencari alternatif pekerjaan. Tidak ada kesempatan untuk berdagang atau membangun industri kecil karena petani kecil tidak punya akses ke sumber kredit di desa untuk menyediakan modalnya dan tidak ada sumberdaya alam yang bisa digunakan untuk sebuah industri kecil. Lembaga kredit pertanian hanya disediakan bagi petani kaya yang memiliki lahan sendiri dengan luas areal diatas 1 hektar, padahal banyak petani kecil kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar.

Oleh karena kurangnya kesempatan kerja di Desa Sereang, 40 % dari penduduk laki-laki menempuh strategi bertahan hidup dengan menjadi tukang ojek di Kota Pangkajene yang memulai kegiatannya setiap pukul 9 pagi dan kembali pukul 5 sore. Setelah kembali dari kota, mereka akan membawa sejumlah uang yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kegiatan ini dilakukan oleh mereka jika pekerjaan di pertanian tidak ada atau kurang memberi kontribusi terhadap pendapatan rumah tangganya. Lain halnya bagi perempuan, 25 % dari penduduk tetap berada di sektor pertanian, dan berusaha menjalin hubungan dengan pengusaha power thresher untuk menjadi buruh panen dan mengikuti alat itu kemana saja akan beroperasi, kadang sampai ke Kota Palopo untuk melakukan kegiatan panen. Selebihnya,

75 % perempuan tetap berada di Desa Sereang dan ketika tidak ada pekerjaan di pertanian maka ia kembali mengurus rumah tangganya.

Kasus petani kecil di Desa Passeno lain lagi, hampir 50 % kepemilikan lahan di kuasai oleh orang-orang luar desa yang telah menyewakan lahannya kepada petani penggarap. Sama halnya di Desa Sereang, pemilik lahan tinggal menunggu pembagian hasil panen pada setiap musim tanam. Penggunaan input pertanian semuanya menjadi tanggung jawab penggarap, yang sebelumnya akan diperhitungkan setelah selesai kegiatan panen. 50 % lainnya lahan pertanian dimiliki oleh petani kecil dengan luas rata-rata dibawah 0,5 hektar. 25 % dari populasi petani kecil dan buruh tani menambah penghasilan mereka dengan cara merantau ke negara tujuan seperti Korea, Jepang, Malaysia dan Singapura menjadi TKI. Mereka berdiam di negara itu biasanya satu sampai dua tahun lamanya. Setelah kembali ke desanya ia akan membawa sejumlah uang yang lumayan besar jumlahnya dan dapat membeli sawah sebagai modal untuk berusahatani kembali dan membangun rumah permanen. Melihat perkembangan ekonomi bagi perantau TKI, memberi efek kepada petani kecil lain untuk menempuh strategi ini, sehingga di Desa Passeno terjadi perubahan kehidupan petani yang cukup lumayan kehidupannya diwakili oleh orang-orang migran TKI. Sebahagian dari petani kecil juga ada yang merantau ke Kota Manado pada pekerjaan menambang emas, biasanya mereka berangkat selama 3 – 6 bulan lamanya. Setelah kembali, juga membawa sejumlah uang bagi keluarganya, hanya saja

jumlahnya tidak sebanyak jika dibanding dengan menjadi TKI dan resikonya pun cukup berat. Fenomena besarnya jumlah perantau dan bekas perantau dari pekerjaan sebagai TKI, sehingga Desa Passeno dijuluki sebagai “desa *passompe* (perantau)”.

Petani kecil dan perempuan Desa Passeno, sangat kurang dan bahkan tidak ada yang melakukan migrasi setiap harinya karena jarak tempuh dari desa Passeno ke Kota Pangkajene cukup jauh jaraknya yakni kurang lebih 40 kilometer, rata-rata mereka keluar dari desanya langsung melintas ke negara tujuan sebagai TKI. Hanya di bawah 5 % perempuan desa yang melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan dengan membuka warung di bawah rumahnya, untuk menyambung biaya hidup ketika pekerjaan di pertanian padi sawah tidak ada. Besarnya jumlah penduduk desa yang merantau karena berbagai alasan yakni; karena pekerjaan di luar pertanian menjanjikan pendapatan tinggi, faktor gengsi dan faktor peluang dan kesempatan kerja di desa tidak ada. Peluang dan kesempatan kerja di Desa Passeno hanya ada pada saat penanaman dan saat panen, selebihnya lebih banyak tenaga kerja yang menganggur.

Trend yang terjadi di masyarakat, rata-rata penduduk setelah tamat SLTA berlomba-lomba menghubungi calo TKI untuk bergabung menjadi TKI, mereka beranggapan bahwa dengan menjadi TKI lebih cepat memperoleh pekerjaan dibandingkan harus sekolah tinggi-tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan secepatnya, belum lagi harus menjual sawah untuk biaya sekolah.

Lulusan SLTA yang menjadi TKI, rata-rata mereka punya saudara atau kerabat sebelumnya yang merantau. Menjadi TKI, penduduk cukup siap dana sebedar 3 – 4 juta rupiah untuk pengurusan dokumen keberangkatan ke negara tujuan. Kalau calon TKI tidak punya uang untuk pengurusan dokumen, maka ia akan pinjam pada petani lain atau pada kerabat mereka, setelah tiga bulan bekerja mereka akan mengirimkan uang kepada kerabatnya untuk menebus utang tadi. Adapun perkembangan migrasi penduduk pada kedua lokasi penelitian dapat di lihat pada Tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Perkembangan Migrasi Penduduk Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Tenaga Kerja Musiman (TKM)	191	80,93	356	85,17
2	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	45	19,07	62	14,83
	Jumlah	236	100,00	418	100,00

Sumber : Kantor Desa Sereang, 2007.

Dari Tabel 10 terlihat bahwa di desa Sereang Tenaga Kerja Musiman jumlahnya naik dari 191 orang menjadi 356 orang di tahun 2007. Begitu pun dengan Tenaga Kerja Indonesia dari 45 orang menjadi 62 orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat tenaga kerja desa Sereang untuk keluar bermigrasi cukup tinggi. Perkembangan Tenaga Kerja Musiman jauh lebih

tinggi dibandingkan TKI karena penduduk desa Sereang lebih banyak ke Kota Pangkajene mencari penghidupan di pagi hingga sore hari dan tidak perlu meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu cukup lama. Hal ini memungkinkan karena letak geografis wilayahnya yang dekat dengan ibukota kabupaten. Pekerjaan penduduk yang melakukan migrasi setiap harinya adalah; tukang ojek, buruh bangunan dan jualan kecil-kecilan di pasar.

Tabel 11. Perkembangan Migrasi Penduduk Desa Passeno, Tahun 1997 dan 2007

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Tenaga Kerja Musiman (TKM)	83	41,29	130	35,14
2	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	177	58,71	240	64,86
	Jumlah	201	100,00	370	100,00

Sumber : Kantor Desa Passeno, 2007.

Dari Tabel 11 terlihat bahwa perkembangan tenaga kerja musiman di desa Passeno dari 83 orang di tahun 1997, meningkat menjadi 130 orang di tahun 2007. Begitu pun dengan Tenaga Kerja Indonesia dari 177 orang menjadi 240 orang. Jumlah penduduk yang melakukan migrasi menjadi Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Tenaga Kerja Musiman. Fenomena ini telah memperlihatkan minat masyarakat untuk menjadi TKI cukup besar, dibandingkan ke ibukota kabupaten mencari

pekerjaan tambahan. Hal ini karena beberapa penduduk sebelumnya telah ada yang menjadi TKI dan penghidupan mereka sekarang cukup lumayan, dibandingkan mereka harus capek-capek pergi ke kota mencari pekerjaan dan belum tentu memperoleh pendapatan yang memadai menurut ukuran mereka.

#### d. Pendapatan dan Alokasi Pendapatan

Peningkatan pendapatan petani diperlihatkan dari nilai produksi petani yang diperoleh dari hasil usahatani padi beberapa tahun terakhir ini karena pemakaian input teknologi pertanian. Alokasi pendapatan dilihat besarnya pendapatan petani yang dialokasikan untuk konsumsi, proses produksi, kebutuhan sekunder dan investasi. Adapun rata-rata jumlah pendapatan petani pada kedua lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12. Rata-rata Jumlah Pendapatan di Desa Sereang, tahun 1997 dan 2007

No.	Jenis Pendapatan	1997		2007	
		Jumlah (Rp/Thn)	Persentase	Jumlah (Rp/Thn)	Persentase
1	Usaha Tani Padi	1.270.000	30,35	5.720.000	42,94
2	Luar Usaha Tani Padi	2.914.000	69,65	7.600.000	57,06
	Jumlah	4.184.000	100,00	13.320.000	100,00

Sumber : Kantor Desa Sereang, 2007.

Berdasarkan Tabel 12 di atas terlihat bahwa rata-rata pendapatan petani di desa Sereang pertahunnya dari usahatani padi dari Rp 1.270.000,-/thn naik

menjadi Rp 5.720.000,-/thn. Pendapatan dari luar usahatani padi dari Rp 2.914.000-/thn naik menjadi Rp 7.600.000,-/thn. Pendapatan ini menunjukkan bahwa pendapatan petani dari luar usahatani padi jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan petani dari usahatani padi. Artinya, rata-rata petani di Desa Sereang tidak hanya mengelola padi akan tetapi mereka mengusahakan jenis tanaman lainnya atau mempunyai pekerjaan sampingan. Fenomena di lokasi penelitian menunjukkan bahwa beberapa diantara petani, selain berusahatani padi ada juga sebagai kepala sekolah, pegawai dinas pertanian (PPL) dan bekerja sebagai pedagang.

Tabel 13. Rata-rata Jumlah Pendapatan Petani di Desa Passeno, tahun 1997 dan 2007

No.	Jenis Pendapatan	1997		2007	
		Jumlah (Rp/Thn)	Persentase	Jumlah (Rp/Thn)	Persentase
1	Usaha Tani Padi	1.150.000	26,30	5.500.000	40,19
2	Luar Usaha Tani Padi	3.222.264	73,70	8.184.842	59,81
	Jumlah	4.372.264	100,00	13.684.842	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2007.

Dari Tabel 13 di atas terlihat bahwa rata-rata pendapatan petani di desa Passeno dari usahatani padi dari Rp 1.150.000,-/thn (1997) naik menjadi Rp 5.500.000,-/thn (2007). Rata-rata pendapatan dari luar usahatani padi adalah Rp 3.222.264,-/thn naik menjadi Rp 8.184.842,-. Fenomena di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani per tahun dari luar

usahatani padi lebih besar dibandingkan rata-rata pendapatan dari usahatani padi. Pendapatan dari luar usahatani padi meliputi pendapatan; usahatani Palawija, berjualan, pengangkutan dan yang terbesar kontribusinya adalah pendapatan sebagai TKI.

Tabel 14. Rata-rata Alokasi Pendapatan Petani di Desa Sereang, Tahun 1997 dan 2007.

No	Uraian	1997		2007	
		Jumlah (Rp/Thn)	Persentase	Jumlah (Rp/Thn)	Persentase
1	Konsumsi	978.900	23,40	2.997.000	22,50
2	Proses Produksi UT	1.308.650	31,28	4 399.000	33.03
3	Kebutuhan Sekunder	821.450	19,63	4.560.000	26.73
4	Investasi	1.075.000	25,69	1.364.000	17,75
	Jumlah	4.184.000	100,00	13.320.000	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2007.

Dari Tabel 14 terlihat bahwa rata-rata alokasi pendapatan petani di Desa Sereang untuk proses produksi usahatani jauh lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi pendapatan untuk konsumsi dan kebutuhan sekunder (perabot rumah tangga, sepeda, motor, dll). Alokasi pendapatan untuk proses produksi usahatani dari Rp 1.308.650,-/thn naik menjadi Rp 4.399.000,-/thn. Sedangkan untuk investasi malah menurun dari Rp 1.075.000,-/thn menjadi Rp 1.364.000,-. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pendapatan untuk proses produksi usahatani karena tuntutan teknologi yang diterapkan pada usahatani padi dan semakin

menurunnya investasi petani karena tuntutan gaya hidup masyarakat dengan berbagai macam kebutuhan sekunder untuk melengkapi kebutuhan hidup petani sehari-hari.

Tabel 15. Rata-rata Alokasi Pendapatan Petani di Desa Passeno, tahun 1997 dan 2007

No.	Uraian	1997		2007	
		Jumlah (Rp/Thn)	Persentase	Jumlah (Rp/Thn)	Persentase
1	Konsumsi	1.036.800	23,71	3.597.000	26,28
2	Proses Produksi UT	1.533.600	35,08	4.660.000	34,05
3	Kebutuhan Sekunder	646.664	14,79	4.344.000	24,44
4	Investasi	1.155.200	26,42	1.083.842	15,23
	Jumlah	4.372.264	100,00	13.684.842	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2007

Dari Tabel 15 terlihat bahwa rata-rata alokasi pendapatan petani di desa Passeno untuk proses produksi usahatani jauh lebih besar jika dibandingkan dengan distribusi untuk konsumsi, kebutuhan sekunder dan investasi. Alokasi pendapatan untuk proses produksi usahatani dari Rp 1.533.600,-/thn naik menjadi Rp 3.597.000,-/thn (2007). Seperti halnya di desa Sereang, kebutuhan untuk sarana produksi yang besar karena perkembangan teknologi pada usahatani padi semakin maju yang menuntut penggunaan input produksi yang besar dengan biaya proses produksi usahatani semakin mahal dan luas areal semakin bertambah. Alokasi pendapatan untuk investasi semakin kecil dari Rp 1.155.200,- turun menjadi Rp 1.083.842,-,

menunjukkan bahwa semakin konsumtifnya masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan lain selain untuk makan, pakaian dan perumahan. Gaya hidup dan pola masyarakat juga mempengaruhi masyarakat untuk mengesampingkan investasi, seperti; menjual sawah kemudian membeli motor, menjual sawah untuk bekal menjadi TKI dan sebagainya.

### **3. Perubahan Struktur Sosial**

#### **a. Pergeseran Sistem Status ; Dari Basis Keturunan ke Basis Pencapaian**

Pergeseran sistem status pada masyarakat di kedua lokasi penelitian terjadi karena dimensi perubahan struktur sosial yang memperlihatkan terjadinya perubahan tatanan sosial atau pola-pola sosial yang berlaku dimasa lalu. Pada masa berlakunya sistem kerajaan di Desa Sereang dan Desa Passeno yang tergolong etnis Bugis dikenal adanya pelapisan sosial menurut tingkatan status dalam masyarakat yakni:

- *Arung* (bangsawan) ; anggota masyarakat yang tergolong pada zaman kerajaan adalah orang-orang yang mempunyai derajat tertinggi dalam tingkatan pelapisan sosial. Namun pada tingkat kebangsawanan dapat pula dibedakan atas dua golongan, yakni golongan bangsawan yang memiliki jabatan dalam pemerintahan pada masa itu, sedikit lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seorang bangsawan yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan pada masa kerajaan berlangsung.

- *Tumaradeka* (masyarakat kebanyakan); merupakan lapisan sosial masyarakat yang berlaku pada khususnya di kalangan masyarakat yang tergolong etnis bugis. Status tumaradeka dalam struktur sosial berada pada lapisan kedua setelah gelar kebangsawanan.
- *Ata'* (budak); merupakan lapisan sosial yang berada pada tingkat paling bawah menurut susunan stratifikasi sosial. Anggota masyarakat yang tergolong dalam kelompok *Ata'*, adalah orang-orang yang merupakan pesuruh sang raja. Lebih dari itu, anggota masyarakat yang tergolong *Ata'* dianggap pula sebagai belian atau tawanan perang.

Perbedaan-perbedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada di dalam struktur klas yang sama, yang bisa ditentukan berdasarkan jumlah kapital yang mereka miliki. Diantara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama adalah pengelompokan berbasis klas. *Pertama*, klas-klas dapat tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar yaitu langsung berasal dari relasi manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-relasi lainnya. *Kedua*, klas merupakan pengelompokan masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangan mereka sangat mempengaruhi seluruh sejarah, kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sereang, pergeseran status yang tadinya berdasarkan keturunan (kerajaan) karena perkembangan kepemilikan

alat-alat produksi dan relasi-relasi yang terjadi diantara komunitas petani, maka pelapisan sosial pun telah terbentuk dengan sendirinya. Misalnya, munculnya pelapisan sosial masyarakat petani dimana dalam struktur sosial terbagi pada tiga lapisan yaitu; (1). Petani pemilik; anggota masyarakat yang menguasai sejumlah lahan pertanian, (2). Petani penggarap; anggota masyarakat yang menggarap atau menyewa lahan orang lain dan (3). Buruh tani; anggota masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pada lahan orang lain. Perbedaan ketiga status dalam lapisan sosial masyarakat, selain dapat dilihat dari kepemilikan harta benda masing-masing kelompok masyarakat, juga ditemukan adanya perbedaan nilai penghormatan kepada mereka yang mempunyai status sosial tinggi. Perbedaan ini terlihat sangat jelas apabila terdapat upacara-upacara adat dan acara seremonial lainnya yang dilaksanakan di Desa Sereang.

Perkembangan selanjutnya, pelapisan sosial yang ada baik di Desa Sereang maupun di Desa Passeno mengalami pergeseran seirama dengan berkembangnya sistem pertanian modern. Penerapan sistem pertanian modern menuntut diterapkannya mesin-mesin pertanian, maka di Desa Sereang dan Desa Passeno khususnya pelapisan sosial telah berubah pula menjadi; (1). Lapisan atas; anggota masyarakat yang berstatus sebagai petani pemilik dan pengusaha dross, (2). Lapisan tengah; anggota masyarakat yang berstatus sebagai petani penggarap dan mandor dross dan (3) lapisan bawah; anggota masyarakat yang berstatus sebagai buruh tani/buruh sabitan.

Lenin dalam Sajogyo (2006) mengatakan bahwa, kriteria-kriteria fundamental yang menggolongkan orang ke dalam klas-klas adalah posisi yang mereka tempati dalam produksi sosial, dan juga relasi mereka terhadap alat-alat produksi.

Pergeseran pelapisan sosial yang diungkapkan oleh BSR salah satu informan yang berfungsi sebagai responden yang diwawancarai adalah:

#### *Kasus 1*

*“A. END misalnya, dahulu ia adalah orang paling disegani di Sereang karena selain keturunan bangsawan juga memiliki lahan di atas 70 hektar, hingga ia dijuluki sebagai tuan tanah dan kehidupannya mapan. Akan tetapi, lahan seluas itu akhirnya habis terjual satu persatu karena ulah empat orang anaknya yang menghambur-hamburkan uang dan sekolah anaknya pun tidak ada yang selesai. Sekarang, justru yang tersisa hanya sebuah sepeda dan ia pun menjadi buruh di PT. Pertani.(Wawancara: 16 Februari 2007).*

Kasus selanjutnya diperlihatkan oleh BSR adalah seorang anggota masyarakat yang bernama DMG, yang mengalami perubahan status karena kepemilikan alat-alat produksi.

#### *Kasus 2*

*“.....Dahulu DMG hanya mempunyai lahan 2 hektar, karena keuletan dalam berusaha kini ia telah memiliki lahan seluas 80 hektar dengan cara membeli dari petani lain yang menjual lahannya. Padahal, ia hanyalah anak seorang petani kecil di Sereang. Selain ia bertani, ia berjualan bahan campuran di pasar. Sekarang pun ia telah memiliki tiga lods/kios di pasar Pangkajene dan usaha peternakan ayam di Sereang”. (Wawancara: 21 Februari 2007).*

Dari kedua kasus di atas memperlihatkan terjadinya pergeseran status karena modernisasi pertanian telah melanda desanya. Disatu sisi, DMG merespon ke arah positif dan disisi lain A.END karena berangkat dari keberadaan dan fasilitas yang dimilikinya dahulu, maka ketika modernisasi melanda desanya ia belum siap menghadapinya, karena keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sebagai bangsawan dan lahan yang cukup luas. Doug Lorimer (dalam Ufford, 2004) mengemukakan, bahwa terbaginya masyarakat ke dalam klas disebabkan oleh faktor ekonomi.

Fenomena pembagian kerja di dalam masyarakat mengasumsikan adanya pemisahan para produsen yang terlibat di dalam berbagai bentuk aktifitas produksi dan adanya pertukaran antara produksi yang dihasilkan oleh kerja mereka. Pertama-tama, terjadinya pemisahan antara bekerja bertani dan beternak, kemudian pekerjaan pertanian dan usaha jasa yang dipisahkan dari kerja manual. Pembagian kerja secara sosial dan pertukaran antar surplus hasil produksi inilah yang menyebabkan terjadinya pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi, dan menggantikan pemilikan alat-alat produksi secara komunal dan memunculkan pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak setara dalam proses produksi sosial yaitu klas. Masyarakat kemudian terbagi menjadi golongan kaya dan golongan miskin. Klas-klas dalam masyarakat selalu merupakan produk dari corak produksi dan pertukaran, yaitu produk dari kondisi ekonomi pada jamannya (Engels dan Doug Lerimer dalam Ufford, 2005).

### **b. Dari Homogenitas ke Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial**

Perubahan pelapisan sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno, telah memberi gambaran bahwa perubahan pelapisan sosial (stratifikasi sosial) bukan karena kemauan mereka, tetapi kondisi yang mengharuskan pergeseran itu terjadi. Kondisi yang terjadi kemudian selama orde baru bukannya asset tanah yang bisa meratakan antara kelas dan masyarakat bawah dapat memperoleh keadilan, akan tetapi yang ditekankan justru peningkatan produksi. Menggenjot produksi dengan revolusi hijau tekanannya pada penerapan teknologi yang didukung paket kebijakan agraria secara makro. Hal ini dapat dilihat dalam program Bimas yang diantarkan ke daerah pedesaan, justru yang dapat mengakses teknologi itu bukannya petani-petani gurem atau petani kecil yang miskin, tetapi jatuhnya pada petani kelas menengah dan atas.

Tak dapat dipungkiri bahwa, revolusi hijau terlalu menekankan teknologi tetapi melupakan struktur sosialnya. Akibatnya, petani gurem dan petani kecil yang miskin bertambah miskin dan petani besar yang kaya dapat mengakumulasi tanah, karena itu perbedaan kekayaan dan kemiskinan serta kesenjangannya semakin melebar, berakibat terjadinya polarisasi sosial yang tak terhindarkan.

Fenomena petani kecil (37 %) yang terjadi di Desa Sereang yakni dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar telah menjual lahannya kepada petani petani kaya karena tidak mampu membiayai sarana produksi yang

semakin hari semakin mahal. Informan MUN misalnya seorang petani kecil mengemukakan dari hasil wawancara dengan peneliti :

#### *Kasus 3*

*“.....lahan saya yang sempit sekitar 20 are habis saya jual karena biaya pupuk dan pestisida semakin mahal dan saya tidak punya lagi biaya untuk itu, sekarang saya tinggal menggarap lahan orang lain dan kalau panen saya jadi buruh tani untuk nambah-nambah penghasilan.” (Wawancara: 22 Januari 2007).*

#### *Kasus 4*

*“.....bagaimana sawah tidak dijual, biaya membajak saja sudah Rp 600.000 – Rp 700.000,- belum lagi biaya pupuk dan pestisida. Apa boleh buat sawah satu-satunya sebagai sandaran hidup saya harus dilepaskan”. (wawancara: 10 Januari 2007).*

Kedua kasus di atas memperlihatkan bahwa bagaimana pun baiknya teknologi baru yang diterapkan pemerintah dalam rangka menggenjot produksi, namun disisi lain petani kecil tetap dirugikan karena akses mereka terhadap teknologi tidak ada. Ketika pemerintah menyediakan fasilitas kredit untuk membantu petani, lagi-lagi yang dapat mengakses adalah petani kaya karena pada level petani ini yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani, dimana kepemilikan lahan minimal satu hektar. Pihak pemberi kredit pun akan menyalurkan kreditnya kalau kelompok tani ada. Fenomena-fenomena seperti inilah yang meminggirkan petani kecil dari keberadaannya di tengah-tengah komunitas petani pada umumnya.

Selain petani kecil, petani besar seperti La HUS dan MUS yang diuntungkan oleh teknologi pertanian mengungkapkan kepada peneliti:

### Kasus 5

*“.....Dulu sawah saya hanya 2 hektar dan sekarang sudah ada 40 hektar karena saya beli dari petani yang tidak sanggup lagi kelola sawahnya karena biaya pupuk dan obat-obatan mahal” (Wawancara: 2 Maret 2007).*

### Kasus 6

*“.....sejak ada teknologi baru di bidang pertanian, semuanya serba mudah dan cepat tidak perlu lagi capek-capek urus sawah. Saya kasi orang dua buah dross untuk dioperasikan dengan sistem pembagian hasil yang disepakati sebelumnya. Sekarang saya lebih banyak di rumah dan sekali-sekali saja turun sawah mengecek orang kerja”. (Wawancara: 14 Maret 2007).*

Fenomena dari kedua kasus petani besar memperlihatkan bahwa penerapan teknologi pertanian membawa keberuntungan bagi mereka, karena akses meraih peluang itu terbuka lebar di depannya, berbeda dengan petani kecil yang semakin hari semakin dimiskinkan oleh situasi disekitarnya. Oleh karena itu, keseimbangan tidak akan pernah tercapai jika petani kaya tidak punya kepedulian terhadap petani kecil, bahkan kesenjangan itu semakin tajam keberadaannya, ditambah lagi dengan tidak adanya kebijakan pemerintah dalam melindungi petani kecil.

Akumulasi penguasaan tanah oleh petani kaya karena mempunyai modal yang kuat dengan kepandaian mereka menjalin hubungan dengan pihak luar desanya. Sementara petani kecil semakin tidak berdaya dan ada kecenderungan bersifat apatis, menerima keadaan itu dengan pasrah. Membangun relasi dengan pihak luar pun tidak punya kemampuan karena selama ini mereka tidak diperhitungkan oleh publik. Efeknya adalah terjadinya lonjakan penawaran tenaga kerja pedesaan dengan bayaran murah.

Petani besar di Desa Sereang dan Desa Passeno, dengan kondisi yang menguntungkan karena adanya teknologi berusaha menginvestasikan kembali keuntungan-keuntungan mereka dalam bentuk memperluas usahatani padi, baik dengan cara mengelola lahan sendiri atau dengan memberikan kepada petani lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Selain itu, sebahagian petani kaya juga menginvestasikan modal untuk usaha penggilingan padi, perontokan padi, pengangkutan dan membuka toko berdagang barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kedua lokasi penelitian telah menunjukkan bahwa revolusi hijau telah mempersempit ruang gerak petani kecil yang berlahan sempit dan jenis usahatani yang berskala kecil. Adopsi teknologi baru akan selalu diikuti dengan pemakaian input pertanian modern, sementara kelompok petani kecil hampir dipastikan tidak akan mampu mengikutinya karena biayanya mahal. Akibatnya, kondisi ini akan menjadikan petani kecil menempuh jalan pintas untuk melepas lahan yang sempit itu kepada petani kaya atau para migran yang berada di kota karena tidak punya alternatif lain untuk mengimbangi teknologi.

Geertz dalam Suharso (2002) mengemukakan bahwa, munculnya fenomena modernisasi menjadikan masyarakat terbelah. Modernisasi telah mendorong transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda yakni, kelas petani kapitalis dan kelas proletariat pedesaan. Transformasi masyarakat desa ke dalam dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya

mendorong terciptanya polarisasi ekonomi maupun sosial di pedesaan (Hotman Siahaan dalam Suharso,2002). Selain itu, menurut Amaluddin (1987) modernisasi pertanian telah mendorong adanya stratifikasi sosial. Polarisasi ekonomi sosial dan stratifikasi masyarakat desa akan terjadi karena menyeruaknya proses modernisasi pertanian dan berdampak pada terciptanya diferensiasi sosial di pedesaan (White dalam Suharso, 2002).

### **c. Eksistensi Petani Kecil dan Perempuan**

Eksistensi petani kecil dan perempuan dapat dikaji dari kehidupan petani kecil dan perempuan ditengah-tengah berkembangnya hiruk pikuk teknologi pertanian di pedesaan. Keberadaan mereka membawa paradoks tersendiri, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota komunitas dan masyarakat, dan sebagai angkatan kerja.

Petani kecil di Sereang dan Passeno karena berangkat dari kepemilikan lahan yang sempit (lebih kecil dari 0,5 hektar), maka ruang gerak menjadi terbatas. Mengikuti perkembangan teknologi baru di pertanian, membuat ia menjadi apatis tidak bersemangat karena teknologi rupanya hanya memihak kepada petani besar. Akibatnya, untuk merespon teknologi baru maka tidak ada jalan lain ia menjadi petani penggarap dan buruh tani di lahan petani lain, bahkan lahan satu-satunya yang menjadi sandaran hidup mereka terpaksa di lepas kepada petani kaya.

Bekerja sebagai penggarap dan buruh tani pun, tidak terlalu memberi kontribusi ekonomi bagi keluarganya, tapi minimal ia bisa hidup pada level subsistensi. Akhirnya, petani kecil ketergantungannya pada pemilik modal semakin besar, yang jika diukur dengan besarnya tenaga yang dikeluarkan dan penghasilan yang mereka peroleh tidak seimbang. Tapi, pertukaran itu dianggap biasa-biasa saja oleh petani kecil. Edwards, Reich dan Weiskoph dalam Nope (2005) berpendapat bahwa kapitalisme melahirkan eksploitasi karena transaksi dasar antara kapitalis dan pekerja, pada permukaannya nampak seperti suatu kontrak pertukaran sukarela antara dua pihak yang setara. Padahal, sesungguhnya hal ini adalah merupakan suatu bentuk pertukaran yang dipaksakan antara pihak-pihak yang tidak setara. Tidak ada kewajiban bagi pekerja untuk menjual jasa-jasa mereka pada kapitalis, akan tetapi mereka harus bekerja untuk memperoleh pendapatan demi menghidupi diri dan keluarga mereka.

Perjuangan petani kecil seperti SBH, LBD dan CLG misalnya untuk meraih kehidupan yang lebih baik penuh tantangan. Strategi hidup yang mereka tempuh ketika revolusi hijau melanda desanya adalah menjadi buruh tani, tukang ojek, berdagang dan bahkan diantara mereka pernah menjadi TKI. Selain peluang kerja di sektor pertanian (panen dan pasca panen), para petani kecil yang terpinggirkan dari pertanian terpaksa memasuki sektor jasa dengan pendapatan kecil. Artinya, peningkatan pendapatan yang diperoleh

tidak sebanding dengan biaya proses produksi yang harus mereka dikeluarkan.

Bagi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno, pada sistem pertanian tradisional pekerjaan di pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi mereka. Perempuan yang bekerja di pertanian padi sawah, awalnya dengan sistem pertanian tradisional hanyalah bekerja secara sukarela dan pengabdian, akan tetapi perkembangan modernisasi pertanian, pekerjaan tradisional perempuan dipindahkan kedalam arena publik. Kapitalisme memindahkan ranah privat ke dalam ranah publik. Artinya, kapitalisme telah mengubah lingkup domestik menjadi lingkup publik..

Keadaan ini membuat perempuan ditarik keluar dari kehidupan keluarga dan dialihkan ke dalam lingkup yang lebih luas. MNI misalnya, sosok janda yang mengharuskan dirinya ke luar dari pekerjaan domestik yang dilakoni sebelumnya karena tuntutan ekonomi keluarga. Dahulu, ia hanya sekedar membantu suaminya di sawah bukan pekerjaan pokoknya, namun sekarang ia menjadi penopang hidup anggota keluarganya.

#### *Kasus 7*

*Nama saya MNI, seorang janda dengan dua orang anak. Pendidikan saya tidak tamat SD. Suamiku meninggal tahun 2001. Sejak itu kendali ekonomi rumah tangga diambil alih oleh saya. Dahulu, luas lahan yang saya miliki 2 hektar dan sekarang tinggal 7 are habis terjual untuk kebutuhan keluargaku. Keterlibatanku dalam usahatani hanya pada saat panen tiba dan membawa bekal ke sawah untuk suamiku.*

*Tahun 1986, saya sudah mengenal pekerjaan sebagai buruh panen, bersamaan dengan hadirnya dross (power thresher) di Desa Passeno. Tugasku, selain memanen juga dipercaya mencatat jumlah anggota*

*dros yang terlibat panen dan hasil yang diperolehnya. Dari tugas itu, saya mendapatkan tambahan upah sebesar Rp 3000,- dibandingkan upah buruh panen lainnya. Jumlah anggota dros yang terlibat minimal 10 orang dan maksimal 60 orang. Sistem bagi hasil yang disepakati antara pengusaha dross dan dengan buruh panen adalah 8 : 1 (8 karung gabah keluar 1 karung untuk buruh panen).*

*Sebelum dikenal teknologi baru seperti; bibit unggul, pupuk, obat-obatan, pestisida dan sebagainya, waktu untuk bekerja di sawah lebih banyak seperti pada kegiatan menanam dan panen, kita sering berkumpul dengan kerabat sambil bercanda. Pekerjaan berat sekali pun terasa ringan. Sekarang, kondisinya jadi lain, semua menjadi cepat, dan banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam sehari. Memperoleh sarana produksi butuh modal besar. Pertemuan dengan kerabat atau tetangga desa yang biasanya terjalin sudah jarang dilakukan karena semua pada sibuk mengurus sawahnya. Kepemilikan lahan pun berubah, banyak petani tadinya luas lahannya sempit, menjadi luas ataukah sebaliknya petani yang mempunyai lahan sempit bertambah sempit karena dijual, tidak mampu mengimbangi harga sarana produksi yang semakin meningkat.*

*Irigasi, bibit unggul, pupuk dan obat-obatan mula-mula diperkenalkan oleh PPL {Penyuluh Pekerja Lapangan}. Petani memperoleh sarana produksi melalui pengusaha yang bertindak sebagai penyalur saprodi. Sistem penyalurannya lewat kelompok tani dan ketua kelompok tani diberikan fee sebagai imbalan jasa. Dengan teknologi baru yang diadopsi, peluang-peluang usaha juga terbuka lebar bagi petani yang hendak menjadikan tambahan penghasilan dari pekerjaan itu..*

*Berkaitan dengan pemasaran hasil produksi (gabah), tidak masalah bagi petani karena pedagang yang datang ke lokasi panen, sehingga jarang ada gabah yang tersimpan lama. Pembagian upah panen sudah dalam bentuk uang tunai dan pembagiannya lebih adil karena diperhitungkan berapa banyak hasil panen yang diperoleh seorang buruh panen. Berbeda dahulu, sistem upah panen dalam bentuk gabah (natura). Upah panen kadang tidak adil karena besarnya peran keluarga dalam kegiatan panen dan seringkali seorang buruh panen telah mengkapling areal panennya dan membatasi buruh tani lain masuk dalam wilayah pekerjaan panen. (Wawancara: 13 Januari 2007).*

Berbeda dengan Indo ISN, pekerjaan di pertanian tidak terlalu menjadi beban baginya ketika kapitalisme melanda Desa Sereang. Ia hanya bisa pasrah menghadapi efek pergeseran tenaga kerja perempuan akibat teknologi pertanian. Berikut penuturan Informan Indo ISN':

### Kasus 8

*“.....Sejak ada dross saya tidak pernah lagi keluar rumah, saya pasrah dengan keadaan sekarang. Mengurus anak dan rumah bagiku lebih baik, sekali-kali saya jalan-jalan ke sawah membawa makanan untuk suamiku”.(Wawancara: 19 Maret 2007).*

Dari kasus di atas terlihat bahwa hadirnya dross menggeser perempuan dari pertanian, pada hal perempuan dengan pekerjaan di pertanian selain memberi kontribusi ekonomi, peran sosial perempuan yang hidup dalam masyarakat kapitalis dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme yang memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan, sebagai kelompok jenis kelamin, untuk berpartisipasi dalam masyarakat kapitalis dan untuk mengembangkan diri secara penuh demi memenuhi tuntutan kapitalis.

Nope (2005) mengemukakan bahwa, kondisi ini memarjinalkan perempuan karena kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi perempuan untuk memasuki persaingan dalam sistem kapitalisme mengalami pengerdilan. Berbeda dengan Informan MNI, ia menuturkan bahwa :

### Kasus 9

*“.....Pekerjaan massangki dan sekretaris dross membuat tambah-tambah penghasilanku, karena dari hasil sawahku sekarang tidak seberapa ji hasilnya”.(Wawancara: 26 Februari 2007).*

Kasus di atas memberi gambaran bahwa informan MNI diuntungkan dengan kehadiran dross karena teknologi telah memberinya peluang untuk tambahan pendapatan keluarganya. Partisipasi informan MNI sejalan dengan ungkapan Nope (2005) bahwa, seorang perempuan mempunyai

kemampuan untuk memasuki dunia kerja karena pertimbangan ekonomi. Perempuan seperti MNI misalnya, memiliki kesetaraan alamiah dengan laki-laki, yaitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berjuang untuk mempertahankan keberadaannya dan untuk bertahan hidup.

Kemandirian ekonomi bagi perempuan, telah memberikan inspirasi untuk memasuki dunia kerja. Disamping, adanya kebutuhan untuk bertahan hidup, perempuan dituntut untuk memberikan performa yang sama persis dengan laki-laki. Jika tidak, maka perempuan tidak akan memperoleh pendapatan yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, nyata bahwa kapitalisme yang melanda pedesaan telah mengecilkan keberadaan perempuan sebagai suatu kelompok gender.

Seorang perempuan seperti SMI dan CNB, misalnya tidak dapat berperforma secara konstan pada level yang sama karna adanya berbagai halangan biologis, sebagai konsekuensi atas keperempuanannya. Olehnya itu, pemahaman kapitalis bagi mereka adalah sesuatu hal yang “wajar” dan “rasional” apabila perempuan tidak memperoleh pendapatan yang sama dengan yang diperoleh laki-laki”.

Dalam kasus MNI, SMI dan CNB memaknai sistem kapitalisme sebagai suatu kewajiban yang berlangsung. Dengan demikian dalam sistem kapitalisme baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peluang untuk terturunkan nilainya dan terpinggirkan, karena kapitalisme telah mengabaikan faktor gender. Bagi laki-laki dan perempuan yang sanggup

mengumpulkan laba dan keuntungan yang lebih besar, maka ia akan diakui dan dihargai (Nope, 2005). Dengan demikian, norma, nilai dan peran ditentukan secara kultural dan disampaikan secara sosial. Peran gender adalah sebuah produk budaya dari pada produk biologi. Pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin didukung dan dibenarkan oleh sistem kepercayaan dan nilai yang menyatakan bahwa peran gender adalah normal, alami, benar dan layak.

#### 4. Rangkuman : Analisis Perbandingan Desa Sereang dan Desa Passeno

**Tabel 16. Perubahan Teknis Usahatani Padi Sawah Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau, serta Dampak Revolusi Hijau**

No	Proses Produksi Usahatani Padi Sawah	Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau	Dampak Revolusi Hijau
1.	Pemakaian Bibit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit lokal</li> <li>- Sifat ; tegakan batang (rumpun) relatif tinggi, malai panjang, tidak mudah rontok dan umur relatif panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit unggul</li> <li>- Sifat ; tegakan batang (rumpun) relatif rendah, malai pendek, mudah rontok dan umur relatif pendek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi tinggi dan biaya mahal</li> <li>- Panen dari ani-ani berubah menjadi sabit.</li> <li>- Perontokan padi dari alat lesung berubah menjadi power thresher (dross)</li> </ul>
2.	Pemupukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan pengumpulan kimiawi (sintesis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produksi tinggi dan biaya mahal.</li> </ul>
3.	Perbaikan Bercocok Tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan dengan memadai, dengan perbaikan pengelolaan tanah, pengaturan jarak tanam dan penyiangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan akan unsur hara terpenuhi dan produksi tinggi</li> </ul>
4.	Pengaturan Air Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada irigasi teknis</li> <li>- Pengaturan air secara tradisional</li> <li>- Kepadatan tersier (jaringan tersier), saluran dan jalan tani rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada irigasi teknis</li> <li>- Pengaturan air memadai</li> <li>- Kepadatan tersier (jaringan tersier) saluran dan jalan tani memadai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sawah yang dapat diairi lebih luas.</li> <li>- Produksi tinggi</li> <li>- Distribusi air lebih lancar</li> </ul>

		- Petani tidak menguasai air dalam mobilitas keluar masuk petak tersier.	- Petani relatif menguasai air dalam mobilitas keluar masuk petak tersier	
5.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	- Dilakukan dengan cara persuasif, ritual, mitologis oleh para petani	- Dilakukan dengan menggunakan insektisida/pestisida dan obat-obatan lainnya.	- Hama dan penyakit tanaman dapat di kendalikan / diminimalkan.

**Tabel 17. Perubahan Teknis Usahatani Padi Sawah di Desa Sereang dan Desa Passeno Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau**

No.	Proses Produksi Usahatani Tani Padi	Desa Sereang		Desa Passeno	
		Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau	Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau
1.	Pemakaian Bibit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit lokal</li> <li>- Diperoleh dengan cara memilih bibit yang bagus setelah selesai panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit unggul</li> <li>- Diperoleh dengan cara membeli dari PT. Pertani dan pengusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit lokal</li> <li>- Diperoleh dengan cara memilih bibit yang bagus setelah selesai panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibit unggul</li> <li>- Diperoleh dengan cara membeli dari PT. Pertani dan pengusaha.</li> </ul>
2.	Pemupukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukan pemupukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukan pemupukan dengan Urea, TSP, KCL/ZA</li> <li>- Pembenihan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umur 10 hr : 10 kg Urea dan 1 kg TSP.</li> <li>* Umur 15 hr : 15 kg Urea dan 2 kg TSP</li> </ul> </li> <li>- Penanaman :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umur 15 hr : TSP dan Urea</li> <li>* Umur 35 hr : urea</li> <li>* Umur 50 hr : urea</li> <li>* Dosis Pupuk : 200 : 200 :100</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dilakukan Pemupukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan pemupukan dengan Urea, TSP dan SP 36</li> <li>- Pembenihan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* umur 10 hr: 10 kg Urea dan 1 kg SP 36</li> <li>* Umur 15 hr : 15 kg Urea dan 2 kg SP 36</li> </ul> </li> <li>- Penanaman :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umur 25 hr : 50 kg urea dan 25 kg SP 36</li> <li>* umur 30 hr : 200 kg urea</li> <li>* umur 40 hr : 200 kg urea</li> </ul> </li> </ul>

3.	Perbaikan Bercocok Tanam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan tanah, hewan dan cangkul untuk membajak</li> <li>- Dibutuhkan TK banyak</li> <li>- Dikerjakan secara gotong royong</li> <li>- Pengaturan jarak tanam belum dilakukan</li> <li>- Penyiangan belum intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan tanah : hand traktor</li> <li>- Dibutuhkan TK sedikit</li> <li>- Dikerjakan secara individu</li> <li>- Pengaturan jarak tanam sudah dilakukan</li> <li>- Penyiangan intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan tanah, hewan dan cangkul untuk membajak</li> <li>- Dibutuhkan TK banyak</li> <li>- Dikerjakan secara gotong royong</li> <li>- Pengaturan jarak tanam belum dilakukan</li> <li>- Penyiangan belum intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan tanah : hand traktor</li> <li>- Dibutuhkan TK sedikit</li> <li>- Dikerjakan secara individu</li> <li>- Pengaturan jarak tanam sudah dilakukan</li> <li>- Penyiangan intensif</li> </ul>
4.	Pengaturan Air Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada irigasi teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada irigasi teknis</li> <li>- Terdapat organisasi P3A</li> <li>- Jumlah kelompok P3A dan GP3A</li> <li>- Jumlah anggota 30 – 40 orang</li> <li>- AD/ART yang mengatur : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pengaturan air</li> <li>* Pemeliharaan saluran</li> <li>* Pembersihan pintu tersier</li> <li>* Iuran anggota</li> </ul> </li> <li>- Pengaturan air dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada irigasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada pompanisasi</li> <li>- Terdapat kelompok mawar dan kelompok belawa</li> <li>- Jumlah anggota 20-30 orang</li> <li>- AD/ART</li> <li>- Iuran anggota di pungut dari hasil produksi (gabah) 10 : 1</li> <li>- Pengaturan air</li> </ul>

			masalah-masalah pembagian air di bahas dalam kegiatan “tudang sipulung:		melibatkan tenaga kerja 2 orang, digaji 20% dari penghasilan bersih pengelolaan air (setelah dikurangi biaya operasional)
5.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	- Dilakukan secara alami	- Dilakukan dengan menggunakan insektisida/pestisida dan obat-obatan lainnya, seperti : klensek dan nurella.	- Dilakukan secara alami	- Dilakukan dengan menggunakan insektisida/pestisida dan obat-obatan lainnya, seperti decis dan racun O5
6.	Panen dan Pasca panen	- Alat panen : ani-ani - TK banyak, terutama perempuan - TK tertutup : kerabat-kerabat tetangga - Alat perontok padi : lesung  - TK perempuan banyak - Produksi : 3-4 ton/Ha - Gabah disimpan dirumah, dibawah kepabrik jika ada kebutuhan petani	- Alat panen : sabit - TK sedikit, terutama perempuan - TK terbuka diluar kerabat dan tetangga - Alat perontok padi power thresher (dross)  - TK perempuan sedikit - Produksi 6-7 ton/Ha - Gabah disimpan dipabrik atau langsung dijual ditempat panen	- Alat panen : ani-ani - TK banyak, terutama perempuan - TK tertutup : kerabat-kerabat tetangga - Alat perontok padi : lesung  - TK perempuan banyak - Produksi : 3-4 ton/Ha - Gabah disimpan dirumah, dibawah	- Alat panen : sabit - TK sedikit, terutama perempuan - TK terbuka diluar kerabat dan tetangga - Alat perontok padi power thresher (dross)  - TK perempuan sedikit - Produksi 6-7 ton/Ha - Gabah disimpan dipabrik atau langsung dijual

		- Belum ada kelompok	- Terdapat kelompok power thersher (dross) yang beranggotakan 30-60 orang dalam satu kelompok	<p>kepabrik jika ada kebutuhan petani</p> <p>- Belum ada kelompok</p>	<p>ditempat panen</p> <p>- Terdapat kelompok power thersher (dross) yang beranggotakan 30-50 orang dalam satu kelompok</p>
--	--	----------------------	---	---	--

**Tabel 18. Perubahan Sistem Ekonomi di Desa Sereang dan Desa Passeno Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau**

No.	Sistem Ekonomi	Desa Sereang		Desa Passeno	
		Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau	Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau
1.	Orientasi Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsisten</li> <li>- Upah panen : bawon (ikatan padi)</li> <li>- Sistem upah panen 8:1 dan 9:1</li> <li>- Upah panen tidak merata, tergantung kemampuan pemanen dalam mengumpulkan hasil panen</li>   <li>- Transaksi penjualan gabah belum dapat berlangsung sesaat setelah panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komersil</li> <li>- Upah panen : uang tunai</li> <li>- Sistem upah panen : 7:1</li> <li>- Upah panen merata, kecuali yang mendapat tambahan tugas pada bagian mesin mendapatkan 3 – 5 % lebih besar dari rata-rata pemanen</li> <li>- Transaksi penjualan gabah dapat berlangsung sesaat setelah panen, sehingga petani atau pemanen bisa mendapatkan uang tunai saat itu juga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subsisten</li> <li>- Upah panen : bawon (ikatan padi)</li> <li>- Sistem upah panen 9:1 dan 10:1</li> <li>- Upah panen tidak merata, tergantung kemampuan pemanen dalam mengumpulkan hasil panen</li>   <li>- Transaksi penjualan gabah belum dapat berlangsung sesaat setelah panen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komersil</li> <li>- Upah panen : uang tunai</li> <li>- Sistem upah panen : 7:1</li> <li>- Upah panen merata, kecuali yang mendapat tambahan tugas pada bagian mesin mendapatkan 3 – 5 % lebih besar dari rata-rata pemanen</li> <li>- Transaksi penjualan gabah dapat berlangsung sesaat setelah panen, sehingga petani atau pemanen bisa mendapatkan uang tunai saat itu juga.</li> </ul>

2.	Pekerjaan Luar Pertanian	- Belum berkembang	- Sudah berkembang, terlihat adanya industri kerajinan, pakaian, pengangkutan, industri alat pertanian dan pengangkutan	- Belum berkembang	Sudah berkembang, terlihat adanya industri kerajinan, pakaian, alat pertanian, toko/swalayan, warung klontong, pengangkutan dan simpan pinjam
3.	Migrasi	- Belum terjadi migrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrasi sudah terjadi</li> <li>- TK musiman : 85,17% <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tukang Ojek pedangan</li> <li>* Tukang Batu dan tukang kayu</li> <li>* Buruh panen yang menyertai mesin dross ke luar dari kab. Sidrap.</li> </ul> </li> <li>- TKI : 14,83 % <ul style="list-style-type: none"> <li>* Malaysia</li> <li>* Singapura</li> <li>* Arab Saudi</li> </ul> </li> </ul>	- Belum terjadi migrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrasi sudah terjadi</li> <li>- TK musiman : 35,14% <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tukang Batu dan tukang kayu</li> <li>* Buruh panen yang ke luar dari kab. Sidrap. Untuk memanen mengikuti dross</li> <li>* Pedagang</li> <li>* Penambang Emas</li> </ul> </li> <li>- TKI : 64,86 % <ul style="list-style-type: none"> <li>* Jepang</li> <li>* Korea</li> <li>* Malaysia</li> <li>* Singapura</li> </ul> </li> </ul>

4.	Pendapatan dan Alokasi Pendapatan	- Umumnya pendapatan diperoleh dari pertanian padi sawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan padi sawah</li> <li>- Pertanian : 42,94%</li> <li>- Pendapatan luar pertanian : 57,06% padi sawah</li> <li>- Distribusi pendapatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>* konsumsi :22,50%</li> <li>* proses produksi UT : 33,03%</li> <li>* kebutuhan sekunder : 26,75%</li> <li>* Investasi : 17,75%</li> </ul> </li> </ul>	- Umumnya pendapatan diperoleh dari pertanian padi sawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan padi sawah</li> <li>- Pertanian : 40,19%</li> <li>- Pendapatan luar pertanian : 59,81% padi sawah</li> <li>- Distribusi pendapatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>* konsumsi : 26,28%</li> <li>* proses produksi UT : 34,05%</li> <li>* kebutuhan sekunder : 24,44%</li> <li>* Investasi : 15,23%</li> </ul> </li> </ul>
----	-----------------------------------	--	---	--	--

**Tabel 19. Perubahan Struktur Sosial di Desa Sereang dan Desa Passeno Sebelum dan Sesudah Revolusi Hijau**

No.	Struktur Sosial	Desa Sereang		Desa Passeno	
		Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau	Sebelum Revolusi Hijau	Sesudah Revolusi Hijau
1.	Pergeseran Status	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem kerajaan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Arung (bangsawan)</li> <li>* Tumaradeka (masyarakat kebanyakan)</li> <li>* Ata (budak)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan alat-alat produksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* petani pemilik</li> <li>* petani penggarap</li> <li>* buruh tani</li> </ul> </li> <li>- Sistem pertanian modern                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* petani pemilik dan pengusaha dross</li> <li>* petani penggarap dan mandor dross</li> <li>* buruh tani / buruh sabitan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem kerajaan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Arung (bangsawan)</li> <li>* Tumaradeka (masyarakat kebanyakan)</li> <li>* Ata (budak)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepemilikan alat-alat produksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* petani pemilik</li> <li>* petani penggarap</li> <li>* buruh tani</li> </ul> </li> <li>- Sistem pertanian modern dan bekas TKI                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* petani pemilik dan pengusaha dross dan migran TKI</li> <li>* petani penggarap dan mandor dross</li> <li>* buruh tani / buruh sabitan</li> </ul> </li> </ul>
2.	Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terjadi penajaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada penajaman statifikasi yang mengarah pada polarisasi sosial</li> <li>- Akumulasi kepemilikan lahan terjadi pada kelompok petani besar.</li> <li>- Petani kecil (37%) telah menjual lahannya kepada petani besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terjadi penajaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada penajaman statifikasi yang mengarah pada polarisasi sosial</li> <li>- Akumulasi kepemilikan lahan terjadi pada kelompok petani besar.</li> <li>- Petani kecil (50%) telah menjual</li> </ul>

			karena tidak mampu membiayai proses produksi usaha padi		lahannya kepada petani besar dan para migran yang ada dikota - Petani besar dan para migran berinvestasi pada usaha tani padi, pengusaha dross, pengangkutan dan membuka toko/swalayan - Petani kecil kembali menjadi penggarap dan buruh tani pada lahan petani lain
3.	Eksistensi Petani Kecil dan Perempuan	- Petani kecil dan perempuan sangat bergantung pada pemilik modal (hubungan patron-klien sangat kuat)	- Petani kecil dan perempuan tidak terlalu bergantung pada pemilik modal (patron) - Petani kecil dan perempuan lebih luwes dalam memilih patron	- Petani kecil dan perempuan sangat terikat pada pemilik modal - Petani kecil dan perempuan tidak bebas menentukan jalan hidupnya untuk menambah pendapatan	- Petani kecil dan perempuan tidak terikat dengan pemilik modal (patron) - Petani kecil dan perempuan bebas menentukan jalan hidup untuk menambah pendapatan

**Tabel 20. Perubahan Teknis dan Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.**

No	Uraian	Sebelum Revolusi Hijau		Setelah Revolusi Hijau	
		Petani Kecil	Perempuan	Petani Kecil	Perempuan
1.	Pengolahan Tanah	☞ Melibatkan hanya tenaga kerja laki-laki karena pengolahan tanah dengan cangkul dan hewan untuk membajak	☞ Tidak melibatkan tenaga kerja perempuan dalam pengolahan tanah	☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki karena pengolahan tanah sudah menggunakan hand traktor	☞ Tidak melibatkan tenaga kerja perempuan dalam pengolahan tanah.
2.	Penyemaian Bibit	☞ Melibatkan tenaga kerja laki-laki dalam penyemaian bibit (bibit lokal)	☞ Melibatkan tenaga kerja perempuan dalam penyemaian bibit (bibit lokal)	☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki karena bibit dapat langsung dihamburkan (bibit unggul)	☞ Tidak melibatkan tenaga kerja perempuan karena bibit dapat langsung dihamburkan (bibit unggul)
3.	Penanaman dan pemeliharaan	☞ Melibatkan banyak tenaga kerja laki-laki dalam penanaman dan pemeliharaan  ☞ Tenaga kerja laki-laki dalam keluarga pun ikut membantu dalam penanaman dan pemeliharaan.	☞ melibatkan banyak tenaga kerja perempuan dalam penanaman dan pemeliharaan  ☞ Tenaga kerja perempuan dalam keluarga pun ikut membantu dalam penanaman dan	☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki karena bibit dapat langsung ditanam  ☞ Tidak dibutuhkan lagi keterlibatan tenaga kerja laki-laki dalam keluarga pada	☞ Kurang melibatkan tenaga kerja perempuan karena bibit dapat langsung ditanam (sistem tabela dan tapin).  ☞ Tidak dibutuhkan lagi keterlibatan tenaga kerja perempuan dalam keluarga pada

		<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tenaga kerja laki-laki luar keluargapun ikut membantu dalam penanaman dan pemeliharaan</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotong royongan berlangsung harmonis diantara sesama petani (tenaga kerja laki-laki)</li> </ul>	<p>pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tenaga kerja perempuan luar keluargapun ikut membantu dalam penanaman dan pemeliharaan</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan keotong royongan diantara sesama tenaga kerja perempuan berlangsung harmonis.</li> </ul>	<p>penanaman dan pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tidak dibutuhkan lagi keterlibatan tenaga kerja luar keluarga dalam penanaman dan pemeliharaan</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotong royongan diantara sesama tenaga kerja laki-laki memudar</li> </ul>	<p>penanaman dan pemeliharaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tidak dibutuhkan lagi keterlibatan tenaga kerja perempuan luar keluarga dalam penanaman dan pemeliharaan</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotong royongan diantara sesama tenaga kerja perempuan memudar.</li> </ul>
4.	Pemupukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja laki-laki dalam pemupukan yang dilakukan secara alami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja perempuan dalam pemupukan yang dilakukan secara alami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki karena pemupukan telah dilakukan secara kimiawi (sintesis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tidak melibatkan tenaga kerja perempuan karena pemupukan telah dilakukan secara kimiawi (sintesis)</li> </ul>
5.	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja laki-laki dalam pengendalian hama dan penyakit yang dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja perempuan dalam pengendalian hama dan penyakit yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki dalam pengendalian hama dan penyakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Tidak melibatkan tenaga kerja perempuan dalam pengendalian hama dan</li> </ul>

		secara alami	dilakukan secara alami	karena penggunaan insektisida dan obat-obatan secara kimiawi	penyakit karena penggunaan insektisida/obat-obatan secara kimiawi.
6.	Panen dan Pasca Panen		<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan panen karena penggunaan alat panen ani-ani.</li> <li>☞ Melibatkan tenaga kerja perempuan, baik dari dalam keluarga maupun luar keluarga (sifatnya masih tertutup, hubungan kerabat).</li> <li>☞ Persaingan antara tenaga kerja perempuan belum ketat</li> <li>☞ Melibatkan banyak tenaga kerja perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kurang melibatkan tenaga kerja laki-laki dalam kegiatan panen karena penggantian alat panen ani-ani menjadi sabit.</li> <li>☞ Tenaga kerja laki-laki sudah terbuka diluar kerabat.</li> <li>☞ Persaingan tenaga kerja laki-laki semakin ketat</li> <li>☞ Tenaga kerja laki-laki yang dibutuhkan semakin berkurang karena penggunaan mesin dross (power thresher) dalam perontokan padi. Tenaga kerja laki-laki sebatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kurang melibatkan tenaga kerja perempuan dalam kegiatan panen karena penggantian alat panen ani-ani menjadi sabit.</li> <li>☞ Tenaga kerja perempuan sudah terbuka diluar kerabat</li> <li>☞ Persaingan tenaga kerja perempuan semakin ketat</li> <li>☞ Tenaga kerja perempuan yang dibutuhkan semakin sedikit karena penggunaan mesin dross (Power thresher) dalam perontokan padi. tenaga kerja</li> </ul>

			<p>dalam proses pasca panen, terutama dalam perontokan padi kerana penggunaan alat lesung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kegiatan perontokan padi berlangsung harmonis diantara sesama tenaga kerja desa perempuan.</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotong royongan tinggi.</li> </ul>	<p>operator mesin dross dan buruh tani /sabitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Hubungan harmonis dalam kegiatan perontokan padi sudah memudar diantara tenaga kerja laki-laki.</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotongroyongan rendah</li> </ul>	<p>perempuan sebatas sekertaris Dross dan buruh tani/sabitan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Hubungan harmonis dalam kegiatan perontokan padi sudah memudar diantara tenaga kerja perempuan.</li> <li>☞ Ikatan solidaritas dan kegotong royongan rendah.</li> </ul>
--	--	--	---	---	--

**Tabel 21. Perubahan Sistem Ekonomi dan Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.**

No.	Sistem Ekonomi	Sebelum Revolusi Hijau		Sesudah Revolusi Hijau	
		Petani Kecil	Perempuan	Petani Kecil	Perempuan
1.	Orientasi Produksi	- Keterlibatan petani kecil cukup tinggi karena orientasi subsisten	- Keterlibatan petani cukup tinggi karena orientasi subsisten	- Keterlibatan petani kecil berkurang, tergantung dari kemampuan dalam bekerja (komersil)	- Keterlibatan perempuan berkurang tergantung dari kemampuan fisik (komersil)
2.	Pekerjaan Luar Pertanian	- Peluang kerja petani kecil terbatas	- Peluang kerja perempuan terbatas	- Peluang kerja petani kecil sudah mulai terbuka, tapi dibatasi oleh pendidikan, skill dan modal	- Peluang kerja perempuan sudah mulai terbuka, tapi dibatasi oleh pendidikan, skill dan modal
3.	Migrasi	- Petani kecil belum mengenal migrasi	- Perempuan belum mengenal migrasi	- Petani kecil sudah mengenal migrasi	- Perempuan sudah mengenal migrasi
4.	Pendapatan dan Alokasi Pendapatan	- Petani kecil berperan utama dalam memperoleh pendapatan  Petani kecil kurang berperan dalam menentukan alokasi pendapatan	- Perempuan berperan dalam memperoleh pendapatan  - Perempuan berperan dalam menentukan alokasi pendapatan	- Petani kecil berperan dalam memperoleh pendapatan karena kebutuhan hidup semakin meningkat  - Petani kecil berperan dalam menentukan alokasi pendapatan	- Perempuan kurang berperan dalam memperoleh pendapatan karena peran di pertanian tergeser  - Perempuan kurang berperan dalam menentukan alokasi pendapatan

**Tabel 22. Perubahan Struktur Sosial dan Keterpinggiran Petani Kecil dan Perempuan.**

No.	Struktur Sosial	Sebelum Revolusi Hijau		Setelah Revolusi Hijau	
		Petani Kecil	Perempuan	Petani Kecil	Perempuan
1.	Pergeseran Status	- Belum terlihat adanya pergeseran status pada petani kecil	- Belum terlihat adanya pergeseran status pada perempuan	- Pergeseran status terjadi pada petani kecil jika mampu meraih peluang ekonomi	Pergeseran status terjadi jika perempuan mampu meraih peluang ekonomi
2	Stratifikasi Sosial dan Polarisasi Sosial	- Status petani kecil berada pada lapisan bawah dan polarisasi sosial belum terjadi	- Status perempuan sebagai buruh tani berada pada lapisan bawah dan polarisasi sosial belum terjadi	- Status petani kecil tetap berada pada lapisan bawah dan polarisasi sosial sudah terjadi	- Status perempuan sebagai buruh sabitan tetap berada pada lapisan bawah dan polarisasi sosial sudah terjadi
3.	Eksistensi Petani Kecil dan Perempuan	- Petani kecil sangat tergantung pada pemilik modal (patron)	- Perempuan sangat tergantung pada pemilik modal	- Petani kecil tidak terlalu terikat dengan pemilik modal (patron)	- Perempuan tidak terlalu terikat dengan pemilik modal (patron)

## **2. Proses dan Makna Keterpinggiran Perempuan**

Keterpinggiran perempuan dapat diamati pada aspek relasi gender, yang berlangsung dalam komunitas petani di pedesaan. Misalnya semakin berkurangnya peran perempuan dalam bidang pertanian padi sawah. Pada masa sebelum revolusi hijau, perempuan banyak terlibat dalam kegiatan pertanian padi sawah, diantaranya menyemai padi, menanam padi, pemupukan, penyiangan, panen dan pasca panen. Akan tetapi sesudah revolusi hijau perubahan sistem dalam proses produksi usahatani padi menyebabkan peran tersebut semakin berkurang atau memudar karena tergantikan oleh penggunaan alat-alat mekanisasi pertanian, sebagai produk turunan atau ikutan dari penerapan program yang dikenal sebagai “revolusi hijau”.

Boserup dalam Shiva (2005) mengemukakan, bahwa pemiskinan pada perempuan semakin meningkat karena diterapkannya peraturan kolonial, dimana pembuat aturan telah sekian ratus tahun menaklukan dan menempatkan kaum perempuan ke dalam posisi tidak punya skill, tidak terdidik, mendiskriminasi akses perempuan terhadap tanah, teknologi dan lapangan kerja. Proses-proses ekonomi dan politik terhadap keterbelakangan penduduk, baik laki-laki dan perempuan merupakan manifestasi yang jelas dari patriarki modern, maka perempuanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan, mencabut hak-hak tradisional perempuan untuk mengolah tanah. Ketika laki-laki dipaksakan untuk

bermigrasi menjadi tenaga buruh di perkotaan, seringkali perempuan ditinggalkan dengan nafkah yang terbatas untuk menghidupi dan merawat keluarga mereka.

Peran perempuan yang tergeser di pertanian padi sawah, menjadikan perempuan mencari strategi hidup baru dalam mempertahankan ekonomi rumah tangga mereka. Pola keluarga patriarkhi menempatkan isteri sebagai orang yang mengurus pekerjaan domestik, terutama dalam mengasuh dan merawat anak. Peran perempuan seringkali berperan ganda akibat tuntutan hidup. Ken Suratiyah (1991) mengemukakan bahwa perubahan yang terjadi pada perempuan akibat teknologi pertanian adakalanya menggeser peran perempuan atau melibatkan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja perempuan. Penerapan teknologi pertanian dampaknya pada perempuan di pedesaan haruslah dilihat dan diperhitungkan dari aspek kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Kondisi yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno memberi dukungan kuat terhadap teori yang dikemukakan Ken Suratiyah, bergesernya peran perempuan dalam pekerjaan pertanian padi sawah karena teknologi baru, seperti pada kegiatan panen. Digunakannya sabit, sebagai pengganti alat panen ani-ani, telah menggeser peran perempuan dari pekerjaan panen, dengan sabit tenaga kerja yang dibutuhkan makin sedikit, karena penggunaan sabit dengan sistem tebas. Jiggins (dalam Fahmid, 2004), mengemukakan bahwa perubahan teknologi dapat meningkatkan

keuntungan sosial bagi laki-laki, pada saat yang sama perempuan kehilangan fungsi sosial yang cukup signifikan. Akibatnya, perempuan dalam kasus di kedua desa penelitian terpinggirkan dibandingkan laki-laki.

Analisis ini menggambarkan bahwa peran perempuan yang tergeser dari pertanian padi sawah karena setting pembangunan yang berkiblat dari barat adalah setting laki-laki yang lebih banyak memberikan keuntungan bagi laki-laki. Bagi perempuan fungsi sosial sebetulnya lebih dari sekedar orientasi ekonomi, dengan berlangsungnya pekerjaan panen yang melibatkan banyak tenaga kerja perempuan, suasana harmonisasi yang berlangsung sesungguhnya memberi makna tersendiri bagi perempuan, perempuan kadang menemukan jodohnya dari pertemuan mereka pada saat pekerjaan panen berlangsung. Pada sistem panen ani-ani, perempuan yang memanen dan laki-laki akan berdiri dibelakang perempuan untuk menadah hasil panen yang dikerjakan perempuan. Tanpa disadari sebetulnya moment-moment seperti ini yang hilang ketika alat panen sabit digunakan.

Pergeseran tenaga kerja perempuan dari pertanian padi sawah yang terjadi di Desa Passeno dan Desa Sereang, tidak terlalu mempengaruhi pasar tenaga kerja di bidang pertanian padi sawah, karena mereka akan kembali ke pertanian padi sawah dengan pekerjaan pada proses panen dan pasca panen yakni menjadi buruh tani/sabitani yang berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya mengikuti dross dan tergantung permintaan pasar. Wilayah panen yang dituju para perempuan di pedesaan pun semakin

luas, tidak terbatas pada wilayahnya sendiri. Di Desa Sereang 92,5 %, pekerjaan panen dilakukan oleh perempuan, begitu pun yang terjadi di Desa Passeno, 90 % pekerjaan buruh tani dilakukan oleh perempuan. Alasan yang dikemukakan oleh responden di Desa Sereang, perempuan yang kembali bekerja di bidang pertanian padi sawah, selain karena tidak ada alternatif pekerjaan lain, pekerjaan di pertanian padi sawah memberi rasa aman dan kurang beresiko. Alasan yang dikemukakan oleh responden di Desa Passeno, memilih kembali bekerja di bidang pertanian padi sawah, karena tidak ada alternatif pekerjaan lain, pekerjaan di pertanian padi sawah masih lebih menguntungkan, memberi rasa aman dalam mempertahankan subsistensi ekonomi rumah tangga.

#### *Kasus 15*

*Saya adalah SMI sebagai sosok petani berusia 56 tahun, pendidikan saya hanya sampai tingkat SR (setingkat SD). Saya dapat dikatakan sebagai orang tidak beruntung hidupku, usia 8 tahun kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Saat itu saya dipelihara oleh saudara ibuku yang juga seorang petani. Memasuki usia 12 tahun, saya diajak oleh saudara ibuku turun ke sawah membantu dalam pekerjaan menyemai padi, menyangi tanaman, memupuk dan memanen. Saya mengingat dahulu sebelum ada teknologi baru, padi tidak ada yang hancur karena dikerjakan sendiri oleh pemilik atau penggarap, belum ada orang masuk ke daerah ini selain kerabat sendiri yang membantu, sehingga pekerjaan panen sangat hati-hati dilakukan. Dahulu, kalau padi sudah berwarna kuning dan siap di panen, semua orang dalam satu rumah turun ke sawah, baik itu anak-anak, orang tua dan siapa pun yang bisa ma'sangkih (istilah setempat sebelum ada mesin dross). Sekarang, sejak ada dross (power thresher), pemilik tinggal terima beres, tidak keluar rumah dan tinggal menunggu hasilnya. Namun, banyak padi yang rusak karena dikerjakan oleh mesin. Mesin memang cepat, hanya saja kita sudah jarang bertemu dengan kerabat. Dulu, kalau panen secara tradisional semua orang yang datang ambil bagian (gabah) 2 – 3 timba untuk dijual. Keluarga dari luar daerah pun datang membantu memanen dan*

*diiberikan gabah sebagai balas jasa untuk pekerjaan itu. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong. Kerabat yang membantu dalam pekerjaan panen diberikan gabah 1 – 2 ember, dan anak-anak yang bekerja juga diberi gabah, walaupun pekerjaannya hanya sebatas memegang karung ketika gabah akan dimasukkan ke dalam karung. (Wawancara: 15 Maret 2007).*

#### Kasus 16

*Namaku CNB, adalah buruh tani berusia 60 tahun, sudah bekerja sejak usia 15 tahun. Saya tidak sempat melanjutkan pendidikanku hingga tamat SD karena tidak punya biaya. Saat itu, saya sudah menekuni pekerjaanku sebagai buruh tani. Sebelum saya bergabung dalam kelompok dross (kelompok pemanen power thresher), saya pernah menjadi buruh tani alat tradisional. Upah panen yang saya peroleh sekarang jauh lebih kecil dibanding dengan upah panen yang saya terima sebelum ada dross. Dulu, saya biasa memperoleh upah panen dalam bentuk gabah rata-rata 30 kg/hari, sekarang yang saya peroleh sebagai upah panen dalam bentuk uang tunai rata-rata Rp 35.000,-/hari. (Wawancara: 23 Maret 2007).*

Dalam perspektif kasus SMI dan CNB menunjukkan bahwa relasi sosial yang terjalin sebelum revolusi hijau sangat baik dan manusiawi. Proses bagi hasil dan pengupahan sangat memperhatikan aspek kekerabatan dan kebersamaan. Kerabat dan orang sekampung menjadi inti dalam proses kegiatan usaha tani padi sawah. Tidak ada batasan kaku dalam proses pengolahan sampai produksi. Semua mengambil bagian secara proporsional. Petani pemilik tidak terpisah dengan komunitas sekeliling dan kerabatnya. Akibatnya harmoni sosial terjaga dengan sendirinya. Dampaknya, bencana sosial seperti kelaparan, konflik atau perselisihan dapat teratasi. Mobilitas vertikal memang lambat, namun harmoni sosial tercipta dengan menguatnya mobilitas horisontal. *Up-ward mobility* terjaga dengan sendirinya. Relasi sosial dibangun melalui *shared poverty*. Umumnya mereka malu jika ada

kerabat (dekat & jauh) yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sementara hasil padinya berlimpah. Bahkan tidak jarang mereka datang tanpa dipanggil.

Berbeda dengan pasca revolusi hijau, peran dan relasi yang terbangun khususnya dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga, dimana strategi bertahan hidup (seperti SMI dan CNB) yang ditempuh yaitu ketika musim panen tiba, maka ia akan menjadi pa'dross untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak mencukupi dari hasil menggarap lahan yang luasnya sangat minim. Arief Budiman (dalam Mustafainah, 2004) mengemukakan bahwa, perempuan sebagai penunjang ekonomi rumah tangga bertambah penting dengan bertambah miskinnya keluarga. Tetapi tragisnya, dari data sejarah didapatkan bahwa pekerjaan perempuan makin lama makin berkurang kemungkinan besar disebabkan oleh terjadinya modernisasi pedesaan. Nope (2005) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi yang terejawantah dalam perkembangan industri telah menciptakan pergeseran peran perempuan.

Modernisasi pertanian yang diperkenalkan lewat teknologi barunya, tidak sedikit memberi dampak pada perempuan. Ruang gerak yang terbuka lebar bagi laki-laki berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, baik berkaitan pekerjaan di bidang pertanian padi sawah maupun yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perempuan seringkali hanya mengikuti keputusan yang telah diambil oleh laki-laki sebagai kepala keluarga.

Nope (2005) mengemukakan bahwa karena status laki-laki sebagai kepala keluarga sejalan dan punya kontribusi ekonomi cukup tinggi maka laki-laki berpotensi untuk menjungkirbalikkan peran konvensional masing-masing anggota keluarga.

Teori yang dikemukakan oleh Nope di atas sejalan dengan fenomena yang terjadi bagi perempuan yang berstatus sebagai isteri petani di Desa Sereang dan Desa Passeno, karena budaya patriarki membuat perempuan tidak punya ruang gerak untuk beraktifitas dalam kegiatan memperoleh pendapatan. Pada kasus yang diamati, perempuan bugis mempunyai jiwa yang besar menghadapi keterpinggiran karena perubahan sistem dalam usahatani padi sawah, sedikit pun tidak terlintas dari wajah mereka suatu keputusasaan karena mereka telah kembali ke arena domestik, justeru yang terlihat adalah suatu keluguan perempuan yang tanpa beban menghadapi hidup yang serba sulit. Barret (dalam Shiva, 2005) berpendapat bahwa, istilah "*patriarki*" telah kehilangan semua kekuatan analitik dan penjelasannya dan sekarang digunakan sinonim "*dominasi pria*".

Berbeda dengan kasus SMI dan CNB, mereka bebas dalam pengambilan keputusan, baik menyangkut kegiatan usahatani padi sawah maupun urusan rumah tangga, karena keduanya adalah janda yang ditinggalkan suaminya. Pekerjaan menjadi buruh hanya dilakukan pada musim panen (*ma'dross*) tiba. Nope (2005) mengemukakan bahwa, kapitalisme telah membuka pintu kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri dan

mengembangkan diri, serta dijamin kebebasannya untuk berpartisipasi dalam persaingan untuk mengakumulasi laba dengan menggunakan segala modal yang dimilikinya.

Informan SMI dan CNB bekerja sebagai pa'dross merupakan sandaran hidup bagi keluarganya. Fenomena ini yang membuat keduanya sangat aktif mencari informasi dimana panen akan dilaksanakan, bahkan keduanya selalu keluar dari desanya mengikuti kelompoknya untuk ma'dross. Pekerjaan ma'dross oleh perempuan dilakukan dengan cara; (a). Dihubungi oleh pemilik dross dan diberitahukan jadwal panen. (b). Menghubungi pemilik/pengusaha dross untuk diikutsertakan menjadi buruh tani. Jadwal ma'dross ditentukan oleh pimpinan kelompok (mandor). Pimpinan kelompok (mandor) adalah orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik dross dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan panen. Selain itu, mandor bertugas mengawasi pa'dross dalam satu kelompok, membuat absen dan menghitung hari/jam yang dialokasikan buruh tani dalam melakukan pekerjaan panen, serta menghitung dan membagikan upah panen yang seharusnya diterima oleh buruh tani. Mandor akan menerima upah panen lebih besar dibandingkan dengan upah buruh tani lainnya.

Fenomena di Sereang dan Passeno menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan sebagai buruh sabitan tidak terlepas dari mesin dross (*power thresher*) yang digunakan petani di pedesaan. Ketika teknologi pertanian dimanfaatkan oleh petani, maka pada saat itu telah diperlihatkan suatu

fenomena keterpinggiran perempuan, karena permintaan akan buruh perempuan semakin besar, akibatnya buruh perempuan akan dibayar murah. Tetapi buruh perempuan tetap puas dengan upah yang rendah, karena selama ini ia bergelut pada kegiatan dalam rumah tangga yang tak pernah dinilai dengan uang. Cecile (dalam Mustafainah, 2004), menyimpulkan bahwa peningkatan intensitas pertanian setara dengan peningkatan pekerja rumah tangga yang tak dibayar. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara laki-laki dan perempuan miskin dalam angkatan kerja.

Fenomena di atas sangat jelas terlihat bahwa dengan sistem pengupahan dan pembagian kerja yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, menyebabkan peningkatan permintaan pada buruh perempuan hanyalah menguntungkan teknologi yang digunakan dalam pertanian padi sawah.

Setting pembangunan yang ada sekarang telah nyata menghilangkan faktor manusia dan dimensi sosial, padahal kedua aspek ini dalam realita di masyarakat mempunyai peran penting dalam kehidupan komunitas petani. Dimensi sosial dan faktor manusia dapat dipandang sebagai seperangkat batasan sosial dan kultural yang dapat diatasi melalui penyebaran teknologi pertanian di pedesaan, ditambah suntikan modal tambahan ke dalam bentuk produksi non kapitalis dan non komersial. Perekonomian uang misalnya berkembang dengan pesatnya, pasar sebagai tempat transaksi jual beli

secara tunai. Tetapi, faktor manusia masih dianggap sebagai penerima pembangunan yang pasif.

Olehnya itu, setting pembangunan yang berbau kapitalis dalam analisisnya dipandang sebagai rekayasa laki-laki. Pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dianggap merugikan baik bagi perempuan maupun lingkungan karena telah mengabaikan alternatif pengetahuan lokal dan pengetahuan perempuan khususnya. Menurut Mies dan Shiva (2005), pembangunan ekonomi semacam ini serupa dan sejalan dengan subordinasi sosial perempuan.

Proses-proses keterpinggiran perempuan sebetulnya adalah bentuk dari subordinasi perempuan. Penyebabnya adalah pembangunan pertanian (teknologi baru) yang telah dikembangkan yang berefek pada hilangnya pekerjaan perempuan dalam berbagai aktivitas pertanian padi sawah yang sebelumnya mereka lakukan. Begitu pun dengan perubahan relasi gender, bertambahnya beban kerja perempuan dan terampasnya kreativitas perempuan.

Keterpinggiran perempuan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya secara adil kepada masyarakat (Hermanto, 1992). Perempuan sebagai kelompok masyarakat yang menerima ketidakadilan tersebut. Beberapa temuan di lapangan menyebutkan bahwa teknologi pertanian telah membawa efek pada

hilangnya pekerjaan perempuan, perubahan pola kerja, dan peminggiran pekerjaan perempuan dari pertanian padi sawah.

Adopsi teknologi juga telah membuat penguasaan pekerjaan beralih ke tangan laki-laki, karena perempuan tidak dibekali keterampilan sebagai bagian dari teknologi. Akibatnya, perempuan akan mengeluarkan sejumlah biaya produksi yang besar karena perempuan misalnya harus mengupah laki-laki untuk pekerjaan membajak, menabur pupuk, dan menyemprot pestisida. Aktivitas SMI misalnya dalam menyewa tenaga kerja laki-laki dapat dilihat dari penuturan beliau :

#### *Kasus 17*

*“ Kegiatan pengolahan tanah yang dulu saya lakukan dengan menggunakan hewan dan cangkul untuk membajak, bukan saya yang mengerjakan, tapi saya dibantu oleh adikku yang kebetulan sawahnya berdekatan dengan sawahku dan juga kadang dibantu oleh petani lain. Sekarang, saya harus mengeluarkan biaya untuk pekerjaan itu karena semua orang sudah pake traktor yang kita sewa Rp 600.000,- perhektar”. (Wawancara: 10 Maret 2007).*

Fenomena di atas menunjukkan terjadinya perubahan dari pertanian tradisional ke pertanian modern akan menambah beban perempuan yang bertani. Lebih lanjut dikemukakan SMI bahwa dahulu ketika lahan akan dibajak, masyarakat petani bersama-sama mengerjakan sawah secara bergilir. Sekarang fenomenanya menjadi lain, semuanya serba ongkos, untuk membajak sawah saja SMI harus mengeluarkan uang minimal Rp 600.000,- per hektar.

Pada kegiatan pemberantasan hama/penyakit, CNB juga menggambarkan bahwa dahulu masyarakat bergotong royong dalam memberantas hama tikus dan kegotong royongan diikuti dengan kebijakan penguasa desa yang mengharuskan seluruh masyarakat ikut berpartisipasi memberantas tikus, karena ketika ada sawah petani terserang tikus, mereka menganggap bahwa itu bagian dari masalahnya dan mereka punya kewajiban untuk memberantasnya.

Berdasarkan kedua informan di atas telah menggambarkan bahwa dengan penerapan teknologi pertanian, ada kebersamaan yang hilang yang selama ini menjadi pengikat solidaritas masyarakat. Ternyata, teknologi pertanian yang diagung-agungkan lewat program revolusi hijau telah mampu mengubah nilai kebersamaan menjadi nilai individu. Ketika akses dan kontrol dimiliki oleh individu-individu maka perempuan menjadi individu yang tidak memiliki akses dan kontrol atas tanah, aktivitas pertanian, dan fasilitas-fasilitas yang ada dalam masyarakat.

Bergesernya nilai-nilai tradisional dalam sistem pertanian tradisional akan berefek pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan akan mengalami efek yang lebih parah. Kebersamaan yang hilang pada pertanian tradisional membuat perempuan mengeluarkan dana dan tenaga lebih besar karena mereka tidak memperoleh fasilitas dalam kelompok tani. Sebaliknya, bagi laki-laki, bergesernya pertanian tradisional tidak terlalu berefek buruk karena mereka punya akses dan kontrol terhadap pasar dan input teknologi.

Pergeseran pekerjaan perempuan dari pertanian padi sawah merupakan bukti keterpinggiran perempuan. Penggunaan mesin huller misalnya, telah menggantikan tenaga perempuan dalam menumbuk gabah menjadi beras. Fungsi alat lesung untuk merontokkan gabah lewat upacara *ma'dandang* telah hilang, akibatnya perempuan telah kehilangan pekerjaan dan materi yang selama ini mereka peroleh.

Selain itu, penerapan teknologi baru di Desa Sereang dan Desa Passeno juga berpengaruh pada dimensi ekologi. Teknologi telah menyingkirkan bibit lokal karena petani harus bergantung pada bibit unggul yang dikomersialkan. Begitu pun dengan pupuk dan pestisida yang menyebabkan bergantungnya petani pada input luar semakin tinggi. Kalau pun ada petani yang mengumpulkan bibit dan menanam bibit hasil yang dikumpulkan sesudah panen, maka ia menjadi kelompok marjinal dan kelompok yang tidak diperhitungkan di masyarakat Sereang dan Passeno.

Fenomena di masyarakat petani pada kedua lokasi penelitian, ada kecenderungan memilih bibit yang mudah diperoleh dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, karena dengan membeli bibit dapat langsung ditanam. Tetapi bagi informan Indo ISN di Desa Passeno, fenomena ini tidak berlaku baginya karena ia masih menggunakan bibit lokal yang dikumpulkannya sesudah selesai panen. Ia telah memilah bibit yang bagus untuk persiapan tanam pada musim tanam berikutnya. Informan Indo ISN

adalah segelintir petani perempuan yang ada di Passeno. Berikut adalah penuturan informan Indo ISN seputar pengalamannya dalam memilih bibit :

*Kasus 18*

*“ Sejak saya kelola sawah tahun 1974 sampai sekarang, tidak pernah membeli bibit. Kalau sudah selesai panen, saya sudah pilih-pilih dan pisahkan bibit yang bagus lalu saya simpan baik-baik untuk kegunaan pada musim tanam berikutnya. Jadi tidak perlu lagi saya beli bibit, kalau beli bibit berarti butuh uang lagi nah saya ini tidak punya uang dan saya juga tidak mendapat pinjaman dari kelompok tani karena tidak dikasi masuk ka' sebagai anggota kelompok tani karena sawahku cuma 25 are ji saja. (Wawancara: 25 Maret 2007).*

Fenomena di atas ditempuh informan Indo ISN karena tidak punya modal dan akses kredit pada kelompok tani. Tindakan Indo ISN bukan tindakan konservasi. Meski pun informan ISN tidak bergantung pada bibit unggul komersial, tapi ia tetap bergantung pada pupuk dan pestisida sintetis karena ia percaya dengan pupuk maka produksi padi dapat meningkat dan dengan pestisida maka hama dan penyakit tanaman dapat teratasi. Mies (2005) mengemukakan bahwa, gerakan ekologi menjadi bagian terbesar dari gerakan perempuan. Kesadaran tentang munculnya persoalan-persoalan sosial (patriarkal, ketidakseimbangan, alienasi, kemiskinan), harus dipecahkan bersama-sama dengan problem ekologi. Keterkaitan dari seluruh kehidupan di muka bumi, problem dan solusinya merupakan unsur utama ekofeminisme.

Teori di atas kontradiksi dengan fenomena yang ada di Desa Passeno, perempuan yang mempertahankan pemakaian bibit lokal bukan alasan

menyelamatkan lingkungan, tetapi semata-mata tidak lebih karena faktor pertimbangan ekonomi, tidak punya uang untuk membeli bibit unggul. Sekiranya, Indo ISN punya uang maka ia juga akan menggunakannya untuk membeli bibit unggul.

Pergeseran sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern yang terjadi di Desa Passeno, menyebabkan perempuan secara fisik terisolir dari pertanian padi sawah dan efeknya perempuan akan memilih aktivitas di lahan domestik. Arief Budiman (1992) mengemukakan bahwa salah satu akibat dari penyempitan lapangan kerja perempuan di desa adalah terdesaknya kembali perempuan ke sektor domestik. Artinya, kemandirian perempuan secara ekonomis berkurang. Keadaan ekonomi kaum perempuan yang buruk bukan disebabkan karena “partisipasi” kaum perempuan dalam “pembangunan” tidak memadai dan tidak cukup banyak. Keadaan ekonomi mereka terbelakang justru karena partisipasi mereka dipaksakan dan tidak seimbang dalam pembangunan, tetapi manfaat pembangunan sedikit pun tidak ada yang mereka peroleh (Shiva, 1997).

Teori tersebut di atas tidak berlaku bagi perempuan di Desa Passeno, mereka kembali ke pekerjaan domestik rumah tangga dengan pertimbangan bagaimana pun teknologi pertanian harus diadopsi, dengan penuh kesadaran mereka menerima keterpinggiran itu sebagai suatu hal yang berlangsung secara alamiah ketika alat modern pada kegiatan panen dan pasca panen digunakan. Selain itu, budaya patriarki yang mempengaruhi perempuan

bugis yang menyadari posisinya sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak dan mengurus suami mereka.

Berkurangnya kemandirian ekonomis perempuan, tergesernya mereka ke pekerjaan domestik yang menyebabkan kurangnya perempuan menjadi petani, mereka tidak dapat mengakses fasilitas dalam kelompok tani, padahal menjadi petani adalah strategi mereka untuk bertahan hidup. Proses-proses inilah yang peneliti sebut sebagai proses keterpinggiran perempuan. Keterpinggiran perempuan terjadi karena gagalnya sistem dalam masyarakat menggerakkan dan mengalokasikan sumberdaya dan dana yang ada di desa seperti pemberian fasilitas kredit dan dilibatkan dalam pendidikan keterampilan pertanian desa.

Masyarakat tidak mampu mengalokasikan daya dan dana kepada perempuan di Desa Passeno karena mereka telah terampas daya kemampuannya akibat penerapan teknologi pertanian padi sawah. Perampasan daya kemampuan terlihat ketika produksi pertanian padi sawah berkurang. Selain itu, terlihat ketika perempuan kehilangan kekuatan dalam mengadopsi teknologi, terjadi ketergantungan cukup tinggi pada laki-laki dan perempuan menjadi terisolasi. Menurut Mies (2005), perempuan dapat dilihat sebagai variabel penting dalam proses pembangunan. Bagi kaum perempuan yang hidup dalam negara-negara maju, mengejar pembangunan berarti berharap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang patriarkal,

akan dihapuskan dan digantikan dengan sebuah kebijakan kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan.

Teori yang dikemukakan Mies tidak dapat dikondisikan dengan situasi yang berlangsung di kedua lokasi penelitian, ternyata budaya patriarkal masih sangat kuat bagi rumah tangga petani. Perempuan bugis yang menjadi kasus telah memperlihatkan kepatuhan kepada suami ketika diperhadapkan pada suatu dilema antara rumah tangga dan pencaharian nafkah. Perempuan bugis akan tetap memilih kembali ke rumah tangga, karena mereka menganggap urusan nafkah adalah tanggung jawab suami. Ketika alat panen menggeser mereka dari kegiatan pertanian padi sawah, mereka pun dapat menerima dengan pasrah.

Konstruksi pemaknaan revolusi hijau bagi perempuan adalah sebuah kategorisasi pemaknaan dari perempuan yang dapat dilihat dari efek peminggiran yang bermakna peminggiran itu membawa berkah (menguntungkan), peminggiran tidak menguntungkan dan peminggiran dianggap biasa-biasa saja. Bagi perempuan, memaknai revolusi hijau sebagai hal yang menguntungkan bagi perempuan yang dapat mengakses teknologi baru, khususnya bagi mereka yang bergabung dengan kelompok dross yang memiliki tugas lebih bervariasi, selain buruh sabitan.

Informan MNI contohnya, memaknai revolusi hijau sebagai hal yang menguntungkan baginya karena selain ia bertani, juga sebagai buruh tani dan sekretaris mandor yang berfungsi mencatat hasil panen yang diperoleh buruh

sabitan yang terlibat pada kelompok drossnya, dari tugasnya itu maka ia memperoleh tambahan upah lebih dibandingkan dengan upah buruh sabitan lainnya. Akan tetapi, bagi buruh tani perempuan (buruh sabitan) dengan revolusi hijau mereka menganggap suatu hal yang tidak menguntungkan baginya. Akses terhadap pekerjaan lain terbatas, kalau dahulu upah panen diperoleh dalam bentuk gabah yang jika dinilai dengan uang tunai maka hasilnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan upah panen yang diterima saat alat mekanis difungsikan.

Perubahan kelembagaan yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno terjadi karena adanya perubahan struktur pada masyarakat yang menyertainya. Ketika perempuan tidak mempunyai akses dalam teknologi yang dikembangkan, maka ia menjadi termarjinalkan. Afshar dalam Mustafainah (2004) mengemukakan bahwa posisi perempuan dalam struktur masyarakat menjadi faktor yang lahir dari gender dan relasi yang diperoleh dari organisasi ekonomi masyarakat. Dinamika kapitalisme dan imperialisme menambah jurang perbedaan dalam struktur masyarakat yang membentuk subordinasi perempuan.

Pekerjaan buruh sabitan bagi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno, dilakukan pada musim panen tiba, kecuali bagi buruh sabitan yang menjadikan pegangan hidup dari pekerjaan sebagai buruh sabitan, maka ia akan mengikuti kelompoknya (kelompok dross) sampai keluar daerah dimana dross dioperasikan. Periode pasca revolusi hijau, perempuan tidak pernah

lagi melakukan kegiatan dalam proses produksi pertanian, seperti; kegiatan menanam, memupuk dan menyemprot tanaman dengan pestisida dan lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Kegiatan proses produksi pertanian dilakukan oleh laki-laki yang menjadi buruh tani, seperti pekerjaan membajak sawah dengan menggunakan traktor, karena keterampilan menggunakan traktor hanya dimiliki oleh laki-laki yang punya akses untuk itu.

Dengan demikian pekerjaan buruh sabitan pada mesin dross menjadi pendapatan musiman bagi perempuan seperti CNB. Peran ganda yang dimainkan oleh CNB dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga karena pendapatan yang diperoleh suaminya tidak mencukupi bagi keluarganya. Tetapi bagi buruh sabitan seperti MNI yang menjadi tenaga tetap di kelompok drossnya, maka ia akan mengikuti mesin dross dimana dross dioperasikan sampai ke luar daerah sekali pun. Peran dalam rumah tangganya diambil alih oleh anaknya yang mulai dewasa, ketika ia tidak berada di tempat. Pengambilan keputusan yang berkenaan dengan keputusan dalam rumah tangga dan pencaharian nafkah diputuskan oleh MNI. Berbeda dengan CNB, pengambilan keputusan kadang oleh CNB dan kadang suaminya, tergantung dari hal yang akan diputuskan, kadang juga pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama.

Kehadiran dross di Desa Sereang dan Desa Passeno, membuat pembagian kerja berubah. Pekerjaan menyabit lebih banyak dilakukan oleh

buruh perempuan, sedangkan buruh laki-laki lebih banyak di bagian mesin dan mengawasi pelaksanaan panen. Dengan demikian sudah nyata terlihat betapa berat beban yang ditanggung perempuan karena harus melakukan pekerjaan menyabit dengan areal yang cukup luas, namun sesudah pembagian upah panen laki-laki yang punya tugas di bagian mesin memperoleh upah 5 % lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menyabit.

Dengan demikian laki-laki mendapatkan nilai upah lebih besar dibandingkan perempuan. Upah yang diterima pada bagian mesin dan pengawas pa'droz berkisar antara Rp 20.000 – Rp 25.000. Akan tetapi pembagian kerja ini dimaklumi oleh pa'dross dan mereka menganggap pekerjaan laki-laki berat sehingga pantas mendapatkan upah yang lebih besar. Berkaitan dengan pekerjaan menjadi buruh panen dalam pertanian sistem modern dapat terlihat adanya korelasi penggunaan mesin thresher dengan tingginya permintaan buruh perempuan. Selama ini teknologi pertanian telah menyingkirkan perempuan dari dunia publik. Perempuan cenderung puas dengan dunia domestik. Pada saat tingginya permintaan buruh karena mesin power thresher, perempuan diserap dengan bayaran murah. Tetapi mereka puas karena selama ini mereka bergelut dengan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang tak terupah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa bagaimana pun wujudnya, keseimbangan antara laki-laki dan perempuan tidak akan pernah tercapai

karena setting teknologi baru yang diadopsi dari barat tidak pernah mempertimbangkan perempuan, sehingga apa pun bentuknya jika teknologi baru diterapkan perempuanlah yang paling merasakan ketimpangan itu. Fenomena ini sejalan yang dikemukakan oleh Momsen (dalam Mustafainah, 2004) bahwa modernisasi pertanian mengubah pembagian kerja berdasarkan seks.

Pekerjaan menjadi buruh tani (buruh sabitan) pasca revolusi hijau, khususnya pada penggunaan dross, telah membawa efek pada tingginya permintaan buruh perempuan. Bersamaan dengan itu, teknologi baru telah memarjinalkan perempuan dan ketika permintaan buruh perempuan cukup tinggi, perempuan mau mau saja menerima pekerjaan itu, walaupun jika dinilai dengan rupiah yang diperoleh tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi perempuan tetap saja mau menerima pekerjaan itu, karena selama ini juga dia melakukan pekerjaan domestik dalam rumah tangga tidak pernah diukur dengan rupiah.

Modernisasi pertanian yang berlangsung di Desa Sereang dan Desa Passeno, serta merta telah menyebabkan perempuan tersubordinasi. Perempuan yang tidak dilibatkan dalam kelompok dross (kelompok inti), menjadikan perempuan tersubordinasi, karena mereka tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kelompok dross menjadi sebuah organisasi ekonomi yang terbentuk sesudah revolusi hijau diadopsi,

membuat terjadinya ketimpangan gender dan ketimpangan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.

Adopsi teknologi baru yang dikembangkan di Desa Sereang dan Desa Passeno tidak hanya berdampak pada perempuan, dibalik itu perubahan kelembagaan yang mengikuti adopsi teknologi membuat pola-pola kebiasaan dari masyarakat petani yang selama ini menjadi pengikat hubungan komunal masyarakat menjadi terabaikan. Sifat kerjasama dan kegotong royongan sebagai ciri khas masyarakat petani di pedesaan menjadi pudar, ikatan solidaritas diantara sesama petani menjadi renggang.

Perempuan dengan status sebagai buruh tani akan mengalami proses marginalisasi karena akses mereka dalam kelompok dross hanya sebagai buruh sabitan, tidak lebih dari itu, sehingga seberapa besar hasil kerja yang diperoleh maka ia akan memperoleh pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, yang berfungsi ganda dalam kelompok dross.

Hilangnya kebersamaan dan kegotong royongan yang semula ada sebelum revolusi hijau, berdampak besar pada perempuan karena perempuan mempunyai akses terbatas dalam meraih peluang ekonomi yang ada di desa, akibatnya perempuan yang paling merasakan kerugian dengan masuknya revolusi hijau, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Hulls (dalam Pudjiwati, 1985) yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses berkelompok karena menduduki struktur sosial paling bawah.

Perubahan struktur sosial yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno, akibat benturan teknologi baru khususnya pada pekerjaan panen telah membuat ketergantungan buruh tani perempuan kepada mesin. Perempuan pada kedua lokasi penelitian serta merta telah dibuat menjadi tergantung pada teknologi dan tidak punya inisiatif untuk bertindak, khususnya dalam pengambilan keputusan dalam strategi bertahan hidup anggota keluarganya.

Kondisi seperti di atas membuat perempuan mengalami proses marginalisasi karena perempuan telah terampas kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar lebih dari sekedar bertahan hidup. Menurut Kabeer (dalam Mustafainah, 2004), manusia akan terpenuhi kebutuhan dasarnya apabila ia tidak tergantung, tidak terisolir, dan tidak kehilangan kekuatan, dapat berpartisipasi dalam keluarga.

Selain itu, proses perubahan kelembagaan di lokasi penelitian karena teknologi pertanian tidak hanya terjadi dan berdampak pada perempuan tetapi juga pada kebiasaan dan pola kelompok masyarakat juga tersingkir. Misalnya, kebiasaan bekerjasama bagi petani di Sereang dan Passeno yang merupakan moment baik dalam menjalin hubungan antara sesama anggota masyarakat menjadi pudar, yang muncul kemudian sifat individualistik. *Tudang sipulung* yang tadinya sebagai ajang pencarian solusi masalah, yang keanggotaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan masyarakat yang mempunyai persoalan dalam proses pertanian padi sawah datang untuk

bercerita dan mendapat jalan keluar, kini menjadi ajang promosi program pemerintah dan bahkan promosi kandidat kepala daerah. Proses kehadiran anggota bukan lagi berdasarkan kebutuhan mereka. Kehadiran anggota kelompok tani dalam tudang sipulung ini terkesan sangat elitis. Anggota yang diundang hanyalah ketua kelompok. Anggota yang punya masalah dengan pertanian padi sawah tidak mampu mengakses apabila mereka tidak menjadi ketua kelompok. Apalagi perempuan yang secara fisik memang tidak dilibatkan dalam keanggotaan kelompok tani.

Perempuan dalam kelompok masyarakat ini akan mengalami proses marginalisasi yang berlipat. Pertama, karena mereka tidak dilibatkan dalam kelompok tani sehingga tidak dapat mengakses kredit pertanian dan keterampilan bertani. Kedua, seluruh kegiatan pertanian dalam masyarakat Sereang dan Passeno yang terhitung dengan nilai ekonomis menjadi hilang karena kebersaman dan kegotong royongan dan berdampak besar pada perempuan karena akses perempuan terhadap ekonomi pasar terbatas. Akibatnya, perempuan dimiskinkan oleh situasi disekelilingnya dan dalam proses berkelompok ia menduduki struktur sosial paling bawah.

Perempuan di Passeno misalnya, tidak memiliki kelompok yang dapat menyuarakan kebutuhan mereka. Kalau pun ada kelompok ibu-ibu, hanyalah kelompok pengajian dan kelompok arisan, itu pun baru terbentuk. Pada hal begitu banyak kebutuhan beberapa petani dan buruh tani yang perlu disuarakan. Misalnya mereka butuh upah yang lebih tinggi dalam ma'dross,

tetapi mereka tidak bisa meminta kepada pengusaha dross karena sistem pengupahannya telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik dross. Akhirnya, perempuan dapat menerima dengan pasrah karena tidak ada alternatif lain dan kalau mereka tidak mau mengikuti sistem pengupahan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pengusaha dross akan mencari buruh tani lain yang memang jumlahnya di Sereang dan Passeno cukup besar.

### **3. Rangkuman**

Keterpinggiran petani kecil karena revolusi hijau dilihat dari dua indikator yaitu perubahan status kepemilikan lahan dan perubahan status pekerjaan. Petani kecil dengan kepemilikan lahan < 0,5 Ha, baik di Desa Sereang maupun di Desa Passeno memaknai revolusi hijau sebagai hal yang tidak menguntungkan. Bukti keterpinggiran petani kecil dapat dilihat dengan menurunnya/hilangnya lahan petani kecil sesudah revolusi hijau karena tidak mampu membeli sarana produksi yang semakin hari semakin mahal, terutama sesudah teknologi baru diadopsi dan munculnya ketergantungan petani kepada pabrik yang memproduksi sarana produksi, yang terjadi kemudian petani kecil menjual lahannya kepada petani besar, dan petani kecil sendiri berubah status pekerjaan menjadi petani penggarap, buruh tani/sabitan, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan menjadi tukang ojek. Berbeda fenomenanya dengan petani besar, baik yang ada di Sereang maupun di Passeno, karena berangkat dengan modal yang kuat ditambah dengan kepandaiannya menjalin hubungan dengan pihak luar, mereka

mempunyai peluang dan kesempatan untuk menginvestasikan kembali modalnya pada usahatani padi, serta memperluas kepemilikan lahannya dengan cara membeli lahan dari petani kecil.

Di Desa Sereang dan Desa Passeno, memperlihatkan perubahan persentase yang semakin menurun pada status petani pemilik dan penggarap dan terjadi peningkatan pada status buruh tani/sabitan. Namun demikian, perubahan status pekerjaan responden masih dominan pada pertanian padi sawah, dengan beberapa alasan; (1). Pekerjaan di pertanian padi sawah memberi rasa aman, (2). Pekerjaan di pertanian padi sawah kurang beresiko dan (3). Tidak ada atau kurang alternatif pekerjaan di luar pertanian padi sawah.

Meskipun petani kecil menyadari bahwa dengan revolusi hijau, sebetulnya petani kecil (petani yang berlahan sempit dan buruh tani yang sama sekali tidak memiliki lahan) tidak diuntungkan karena ternyata revolusi hijau hanya memihak pada petani besar, yang cukup akses dalam mengadopsinya. Tetapi, disisi lain pengakuan responden mengemukakan bahwa dengan revolusi hijau petani kecil juga merasakan adanya keuntungan yang diperoleh karena terbukanya akses pekerjaan lain, seperti menjadi buruh tani di lahan petani lain.

Di Desa Sereang, pemaknaan keterpinggiran perempuan karena revolusi hijau diperlihatkan adanya perubahan peran perempuan dalam pertanian padi sawah sebelum dan setelah revolusi hijau. Bukti ketepinggiran

perempuan diperlihatkan pada tiga kasus rumah tangga Ma'ni, SMI dan CNB. Ketiga kasus ini pemaknaan terhadap keterpinggiran adalah menguntungkan karena mereka dapat mengadopsi teknologi baru (mesin dross) dalam pekerjaan panen dan pasca panen. Ma'ni, SMI dan CNB akan mengikuti kelompok dross dalam kegiatan panen, baik yang berlangsung di desanya maupun di luar desanya. Bekerja sebagai buruh sabitan (pa'dross) merupakan sandaran hidup keluarganya, dengan alasan ini membuat ketiga kasus rumah tangga sangat aktif mencari informasi dimana panen akan dilaksanakan. Berbeda pada dua kasus rumah tangga (Indo ISN dan Indo RAP) yang ada di Desa Passeno. Peran Indo ISN dan Indo RAP dalam pertanian padi sawah sebelum revolusi hijau menjadi hilang sesudah revolusi hijau. Dengan demikian pemaknaannya terhadap keterpinggiran tidak menguntungkan bagi keduanya, karena dengan revolusi hijau menjadikan keduanya mencari strategi baru dalam mempertahankan strategi bertahan hidup "survival" seperti Indo ISN terpaksa membuka warung di depan rumahnya dan Indo RAP sendiri memilih mengurus anak-anak dan suaminya (domestik rumah tangga).

## **C. Adaptasi Petani Kecil dan Perempuan**

### **1. Adaptasi Petani Kecil**

Bentuk dan proses adaptasi petani kecil adalah suatu strategi yang ditempuh petani kecil yang terpinggirkan dari sektor pertanian padi sawah. Salah satu unsur yang menjadi perhatian utama dalam setting penelitian ini adalah bagaimana strategi petani kecil menghadapi keterpinggiran karena revolusi hijau.

Di Desa Sereang, terdapat tiga kasus rumah tangga petani kecil yang melakukan strategi adaptasi dalam bentuk; (1). Petani penggarap dan buruh tani/sabitan (55,55 %), (2). Perdagangan dan pertukangan (26,85 %), (3). Tenaga Kerja Indonesia (5,56 %). (4). Tukang Ojek (12,04). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh ketika tergeser dari pertanian padi sawah. LGL misalnya, yang menempuh strategi sebagai tukang ojek. Mata pencaharian sebagai tukang ojek memungkinkan bagi mereka karena jarak tempuh ke ibukota Pangkajene sejauh dua kilometer dapat ditempuh kurang lebih lima belas menit. Ditunjang oleh penduduk Sereang, yang lebih menggemari menumpang ojek daripada harus menunggu angkutan umum (pete-pete) dan saling berdesakan. Dari segi pendapatan, dapat secara langsung membantu mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga.

Dari sampel rumah tangga petani kecil di Desa Sereang telah memperlihatkan strategi penghidupan petani kecil yang ditempuh mengarah

pada strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*". Strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*" dapat dilihat dari beberapa strategi yang ditempuh petani kecil, meliputi: (1). Strategi penghidupan sebagai petani penggarap dan buruh tani, karena petani kecil masih mempunyai lahan sempit mereka akan menambah penghasilannya dengan cara menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil, maka kehidupan pada level subsistensi masih dapat dipertahankan. Waktu yang dibutuhkan tiga sampai dengan empat bulan. Pekerjaan sebagai buruh sabitan pun mempunyai peluang yang besar karena telah beroperasinya mesin dross (perontokan padi) di desanya. Waktu yang dibutuhkan untuk strategi adaptasi dua sampai dengan tiga minggu. (2). Strategi penghidupan sebagai pedagang dan tukang (kayu dan batu), karena pekerjaan padi sawah mempunyai waktu tertentu dimana petani tidak dituntut harus berada di sawah secara terus-menerus, sehingga peluang untuk berdagang dan menjadi tukang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menambah pendapatan rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi ini dua sampai tiga bulan. (3). Strategi tukang ojek, ditempuh petani kecil karena pekerjaan alternatif ini memberikan secara langsung tambahan pendapatan bagi mereka, yang dimungkinkan karena mobilitas penduduk sehari-hari ke ibukota kabupaten Pangkajene. Strategi ini dilakukan setiap hari disela-sela kegiatan di sawah. (4). Strategi penghidupan sebagai TKI ditempuh oleh mereka karena bekerja sebagai TKI jika pertimbangan pendapatan yang diperoleh diusahatani padi sawah

dianggap tidak memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup anggota keluarganya. Mereka akan meninggalkan keluarganya selama satu hingga dua tahun lamanya.

Menurut Ellis (dalam Manule, 2008), petani melakukan diversifikasi penghidupan disebabkan oleh adanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Terdapat indikasi rumah tangga petani yang berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif untuk memperoleh pendapatan yang layak dan cenderung menjadi kebutuhan sebagai bagian dari strategi mempertahankan penghidupan (*livelihoods strategies*). Hardono dan Salim (dalam Manule, 2008).

Indaryati (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, strategi penghidupan bertahan hidup (*survival*) yang dilakukan oleh petani, hanya nampak ditemukan pada aktivitas penghidupan petani yang melakukan diversifikasi penghidupan pada konsentrasi usaha di luar usahatani (*off-farm*) dan aktivitas bukan usahatani (*non-farm*). Pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan rumah tangga petani menurutnya selain usahatani dengan cara menyakap lahan petani lain, juga dilakukan dengan bekerja sebagai buruh bangunan misalnya dan mengandalkan usaha dengan bekerja sebagai migran di perantauan (migrasi).

Di Desa Passeno, strategi adaptasi petani kecil adalah; (1) Petani penggarap dan buruh tani /sabitani (50,00 %). (2). Perdagangan dan

pertukangan (12,73 %), (3). Tukang ojek (28,18 %), (4). Tenaga Kerja Indonesia (6,36 %) dan (5). Penambang emas (2,73 %). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh untuk mempertahankan keberlanjutan hidup anggota keluarganya. Strategi yang ditempuh BDL dan SBH misalnya, ketika ia menjadi TKI karena memang kegiatan di sawah waktu itu tidak memberikan jaminan untuk penghidupan yang layak, ditambah lagi waktu itu banyak padi yang rusak karena terserang hama tikus. Berangkat dari keputusasaan, terpaksa keduanya menempuh strategi sebagai TKI, walaupun keduanya hanya sempat bertahan dua tahun lamanya, karena menjadi TKI merasa tidak aman dari pengejaran petugas imigrasi. Strategi sebagai penambang emas yang ditempuh informan CLC misalnya, dilakukannya ketika lahannya baru saja dijual karena tidak mampu mengikuti biaya produksi yang semakin mahal. Strategi ini ditempuh selama enam bulan, setelah itu ia kembali ke desanya sebagai penggarap dan buruh sabitan.

Strategi penghidupan rumah tangga petani kecil, seperti halnya di Desa Sereang kecenderungannya mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*". Pola aktivitas petani kecil sebagai strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*" diperlihatkan ketika mereka menempuh strategi seperti; (1). Petani penggarap dan buruh tani, adalah pilihan penghidupan yang memanfaatkan asset lahan yang dimiliki (walaupun sempit) minimal masih dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga,

ditambah dengan pekerjaan menggarap lahan petani lain dengan sistem bagi hasil harus dilakoninya untuk bertahan pada level subsistensi dan terbukanya pekerjaan sebagai buruh sabitan, dimana mesin dross telah dioperasikan dalam kegiatan perontokan padi. (2). Strategi kedua, sebagai pedagang dan tukang dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah penghasilan karena usahatani padi sawah tidak lagi dapat diandalkan sebagai penopang hidup satu-satunya. (3). Strategi ketiga, sebagai tukang ojek adalah pilihan alternatif yang dapat memberikan jaminan pendapatan per hari di sela-sela pekerjaan di sawah. (4). Strategi sebagai TKI ditempuh oleh mereka karena melihat para migran yang bekerja di Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura telah memperlihatkan hasil yang memuaskan bagi mereka dan dari sisi ekonomi telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya di Desa Passeno. (5). Strategi sebagai penambang emas, dilakukan secara musiman yakni setiap enam bulan, hanya saja strategi penghidupan petani seperti ini memberi resiko cukup tinggi bagi petani, sehingga alternatif ini menjadi pertimbangan besar ketika petani akan melakukannya.

Menurut penuturan informan H. BDL yang berfungsi sebagai responden mengatakan bahwa, trend yang terjadi di Desa Passeno adalah pemuda-pemuda Desa Passeno sangat jarang menempuh pendidikan tinggi, rata-rata mereka hanya menempuh pendidikan hingga SLTA lalu ia mendaftar menjadi TKI. Lebih lanjut Informan H. BDL mengatakan bahwa,

calon TKI beranggapan bahwa sekolah tinggi belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak, lebih baik selesai SLTA menjadi TKI langsung dapat uang banyak, fenomena inilah yang terjadi di Desa Passeno.

Berbeda dengan lapisan petani besar pada kedua lokasi penelitian. Di Desa Sereang, terdapat empat kasus rumah tangga petani besar dan di Desa Passeno terdapat dua kasus petani besar, yang memperlihatkan kecenderungan yang mengarah pada strategi penghidupan "*akumulasi*". Strategi penghidupan akumulasi diperlihatkan oleh kasus dari aktivitas mereka seperti; (1). Menambah luas kepemilikan lahan, (2). Berinvestasi pada usahatani padi dan pengusaha mesin dross (power thresher), serta pabrik penggilingan padi. (3). Membuka toko/swalayan yang menjual barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Strategi pertama dengan menambah luas kepemilikan lahan ditempuh karena peluang yang ada di desa dimana petani kecil yang tidak mampu membiayai usahatani padi karena input produksi yang mahal, akan melepas lahan mereka satu-satunya kepada petani besar. Strategi kedua, berinvestasi pada usahatani padi karena mereka menganggap pekerjaan di sawah jika dikelola secara besart-besaran memberi keuntungan yang besar, ditambah dengan peluang tenaga kerja yang ada di desa semakin banyak. Strategi ketiga, membuka swalayan/toko karena alternatif mata pencaharian ini tidak terlalu banyak menyita waktu dan tenaga kerja keluarga dapat dimanfaatkan, seperti isteri dan anak-anak mereka.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengemukakan bahwa, dalam pemanfaatan modal alami berupa lahan yang dimiliki oleh petani, maka diidentifikasi terdapat dua bentuk strategi petani dalam menggarap dan mengolah lahannya, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi. Petani besar dengan lahan luas berusaha berinvestasi pada usahatani padi sawah dengan cara mengintensifkan pengelolaan usahatannya dan memperluas lahan sawah miliknya, serta berinvestasi pada pabrik penggilingan padi. Dengan demikian, berarti aktivitas petani besar cenderung ke arah *akumulasi eksternal*. Hal ini nampak dari adanya aktivitas penghidupan petani yang masih mempertahankan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melibatkan anggota keluarga dan luar keluarga untuk ikut bekerja membantu aktivitas usahatani dan melakukan aktivitas di luar usahatani (*off-farm*). Aktivitas penghidupan yang dilakukan oleh kasus petani besar di kedua lokasi penelitian untuk memantapkan dan mempertahankan kondisi kehidupan rumah tangga yang dikelola secara komersial, dengan orientasi profit (keuntungan).

Kondisi yang lebih parah, menyangkut lemahnya arus penyerapan lapangan kerja pada sektor luar pertanian padi sawah, menyebabkan tenaga kerja pedesaan untuk secara sengaja terus bertahan di sektor pertanian padi sawah. Berlimpahnya tenaga kerja yang menjadi TKI misalnya di Desa Passeno menunjukkan suatu fenomena bahwa tersumbatnya berbagai arus penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor luar pertanian. Kondisi struktural ini,

didukung oleh pertumbuhan lapangan kerja yang terbatas di Desa Passeno. Kondisi di Desa Sereang masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Desa Passeno karena lapangan kerja luar pertanian masih memungkinkan bagi mereka untuk migrasi ke ibukota kabupaten Pangkajene.

Menurut Ellis (dalam Manule, 2008), migrasi merupakan salah satu ciri khas strategi penghidupan yang lazim dilakukan oleh petani. Secara empiris, teori Ellis relevan untuk dikaji lebih jauh karena pada kasus petani kecil ditemukan bahwa strategi penghidupan yang bekerja sebagai migran dan dilakoni petani kecil di Desa Passeno sebahagian besar dilakukan oleh petani kecil dan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Strategi penghidupan sebagai migran TKI ditempuh sebagai strategi bertahan hidup (*survival*) anggota rumah tangganya. Meskipun petani kecil dalam kesehariannya telah menempuh strategi dengan bekerja di luar poertania (*off farm*), namun usaha tersebut hanya dilakukan secara tentatif yang bertujuan mencukupi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangganya, tidak lebih dari itu dan secara substantif tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan petani kecil secara keseluruhan.

Teori ini memberi dukungan pada perkembangan masyarakat di Desa Passeno. Masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan di pertanian padi sawah semakin kecil dan pekerjaan luar pertanian tidak memberi jaminan bagi keberlangsungan kehidupan mereka, sejak dini telah menentukan sikap untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), ditunjang oleh lingkungan

dimana mereka berada selama ini dilingkungan migran TKI, yang mewakili lapisan atas dari stratifikasi sosial masyarakat Desa Passeno.

Berlimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian padi sawah adalah resiko yang ditanggung bersama, yakni semakin rendahnya penghasilan yang diperoleh petani kecil dan buruh tani di pedesaan. Ketika kelembagaan panen tradisional misalnya berubah menjadi kelembagaan panen modern membuat daya tampung tenaga kerja berlebih, disatu sisi kelebihan tenaga kerja tidak membawa efek peningkatan pendapatan petani dan buruh tani. Di Desa Sereang dan Desa Passeno, pemilik sawah dan penguasa lahan tetap saja mentoleransi menampung tenaga buruh di sawah mereka. Menurut Geertz (1986), ekologi sawah mampu menyerap banyak tenaga kerja tanpa menurunkan produktivitas padi sawah.

Teori Geertz tidak sepenuhnya dapat mendukung fenomena di Desa Sereang dan Desa Passeno, karena pembatasan terhadap penyerapan tenaga kerja buruh tani akan terjadi juga, tetapi bukan dilakukan oleh para pemilik dan penguasa lahan sepenuhnya. Persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan di pertanian juga tumbuh pesat, akibatnya mau tidak mau buruh tani harus menunjukkan kemampuan kerja yang semakin bermutu dimata pemilik lahan dan pengusaha dross.

Dari fenomena peluang kerja di Desa Sereang dan Desa Passeno, khususnya terjadi situasi tawar menawar dari pihak pemilik dan pengusaha power thresher (dross) meningkat lebih besar, sementara situasi ini

menguntungkan pemilik lahan dan pengusaha dross, tetapi bagi buruh tani situasi ini tidak menguntungkan karena terjadi persaingan diantara buruh tani dalam memperoleh lapangan pekerjaan di pertanian padi sawah karena ia harus menunjukkan kemampuan bekerja yang semakin bermutu dimata pemilik dan pengusaha dross. Sebagian para buruh yang kalah bersaing, akhirnya terpaksa menganggur karena pekerjaan di sawah semakin terbatas karena pekerjaan menanam dan panen yang tadinya membutuhkan tenaga lebih besar, sekarang telah digantikan oleh alat-alat mekanis. Ada satu hal yang dimiliki petani pemilik dan pengusaha dross dalam membatasi tenaga pemanen pada kedua lokasi penelitian, mereka tidak menolak secara langsung tenaga pemanen, tetapi pemanen sendiri yang melihat batas dari jumlah yang diperkenankan, yakni tingkat kejenuhan areal sawah untuk menampung tenaga kerja. Dasar batasannya secara kultural, dimana seseorang yang datang belakangan akan menyadari takaran kemampuan daya tampung areal sawah, dan akan mencari areal sawah yang lainnya.

Menurut Ali (dalam Manule, 2008), tingkat pengembangan sistem teknologi pertanian ditentukan oleh derajat pengetahuan dan pengalaman lokal petani. Semakin tinggi keragaman pengetahuan (aktivitas) petani dalam berusahatani, maka (secara potensial) semakin harmonis keseimbangan dinamis antara sistem lingkungan dan sistem sosial.

Teori tersebut di atas relevan untuk dikaji lebih jauh dalam memberikan interpretasi secara mendalam mengenai keseimbangan dinamis antara

sistem lingkungan dan sistem sosial. Dalam sistem lingkungan, petani kecil yang tergeser dari pertanian padi sawah akan kembali bekerja ke pertanian dengan terbukanya peluang pekerjaan sebagai buruh sabitan pada mesin dross (power thresher). Sistem sosial berperan dalam relasi yang terjadi antara pemilik lahan atau pemilik dross yang tidak pernah membatasi tenaga kerja yang akan ikut memanen, akan tetapi pemanen sendiri yang melihat kapasitas daya tampung sawah dengan kebutuhan tenaga kerja. Artinya, konflik kepentingan antara pemilik – pekerja dapat dihindari, pemanen pun akan mencari kelompok dross lain yang pemanennya masih kurang.

Fenomena ini terjadi di Desa Passeno seperti yang diutarakan oleh Wa LAM salah seorang informan dan tokoh masyarakat di Desa Passeno, karena banyak tenaga kerja yang menganggur tidak terserap di sektor pertanian padi sawah, maka selepas anak mereka dari SLTA atas inisiatif anak itu langsung mencari calo TKI untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon TKI. Berbeda yang terjadi di Desa Sereang, tenaga kerja yang kalah bersaing di pertanian padi sawah pelariannya di sektor jasa ramai-ramai mereka membeli motor untuk dijadikan mata pencaharian sebagai tukang ojek, seperti yang dituturkan BSR dan SBH sebagai responden yang banyak memberikan informasi seputar dinamika perubahan kehidupan petani di Desa Sereang.

Kondisi yang terjadi pada kedua lokasi penelitian, berefek bagi kalangan masyarakat petani dan secara kumulatif terhadap dua desa penelitian yakni

kualitas hidup petani yang disebabkan oleh tidak meningkatnya kekuatan tawar menawar pemilik lahan dan buruh tani. Situasi yang berkembang di Desa Sereang dan Desa Passeno lama kelamaan akan terjadi suatu proses yang disebut Gertz (1986) sebagai involusi pertanian karena adanya mekanisme yang tidak menguntungkan secara terus menerus pada diri petani, menyebabkan petani kecil dan buruh tani akan menciptakan kemiskinannya sendiri yang semakin mendalam karena tidak terpenuhinya secara simultan syarat-syarat pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah masyarakat petani. Selain itu, efek dari situasi yang terjadi akan berdampak bukan saja kualitas hidup secara ekonomi, tetapi juga kualitas moral akan muncul yakni penyimpangan-penyimpangan sosial yang semakin meluas.

Pada aspek perubahan pola konsumsi dan gaya hidup petani kecil pada kedua desa penelitian adalah berbeda. Di Desa Passeno, karena didominasi mayoritas penduduknya adalah migran TKI terlihat dari bangunan rumah yang permanen dengan perabot dilengkapi satu sampai dua pasang kursi, ada bufet di atasnya terpajang televisi dengan merk yang mutakhir, dan barang elektronik lainnya. Pendapatan selama menjadi TKI diinvestasikan untuk membangun rumah permanen, membeli sawah atau modal dagang keluarganya. Ketika mereka telah memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga sehari-hari dan cukup untuk berinvestasi di desanya, maka ia akan pulang ke desa meneruskan membangun usaha yang dirintis keluarganya di desa. Umumnya situasi rumah yang tergolong mewah di Desa Passeno

diwakili oleh migran TKI. Petani pemilik yang berada di luar Desa Passeno, jumlahnya pun cukup banyak akan tetapi mereka tidak menunjukkan suatu hal yang berlebih jika dibandingkan penduduk migran TKI. Pemilik lahan yang berinvestasi pada pertanian padi sawah beranggapan bahwa dengan usahatani padi sawah jika dikelola dengan baik pasti menghasilkan, paling tidak untuk dikonsumsi.

Menurut Sajogyo (2006), corak kajian pembangunan pedesaan telah memberi kesan yaitu “pemerataan berusaha” dan “bekerja upah” telah terjadi, asalkan lebih banyak orang desa mau menjangkaunya di luar desa. Artinya, mau bermigran jika sektor formal, jelas syaratnya pendidikan (ongkos lebih besar). Peluang di bidang jasa, mereka yang keterampilan rendah di luar desa juga akan mulai dari bawah. Mereka yang sempat masuk jalur TKI, pasti memerlukan syarat berbekal dana yang tidak kecil untuk ukuran rata-rata orang desa. Peluang-peluang lebih baik itu berada di luar desa.

Teori yang dikemukakan Sajogyo di atas dapat mendukung perilaku petani kecil di Desa Passeno. Petani kecil yang tergeser peran dari pertanian padi sawah dan masyarakat pada umumnya di Desa Passeno yang akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terlebih dahulu menjual dan menggadaikan lahannya atau meminjam uang kepada kerabat dekat untuk bekal menjadi TKI. Mereka akan menebus kembali pinjamannya, sesudah bekerja 3 – 6 bulan kemudian dengan mengirimkan sejumlah dana sesuai kesepakatan diantara mereka sebelumnya.

Berbeda dengan Desa Sereang, komunitas pegawai negeri dan pedagang campuran, serta pengusaha dross dan penggilingan padi mendominasi gaya hidup penduduk Desa Sereang. Rumah permanen yang nampak cukup mewah di wakili oleh komunitas itu. Pola konsumsi mereka pun jauh berbeda dibanding dulu, misalnya petani pemilik sesudah musim panen dan mendapatkan penghasilan yang memadai, mereka tabung selama beberapa tahun, untuk selanjutnya membeli lahan petani yang akan menjual lahannya. Mereka berusaha memperluas areal sawahnya atau membeli mesin dross dan penggilingan padi yang menggunakan mobil, keliling ke rumah-rumah penduduk untuk menawarkan jasanya. Investasi ini dilakukan sesudah pemenuhan konsumsi anggota keluarga berupa; makan, pakaian dan kebutuhan sekunder lainnya seperti; motor dan mobil terpenuhi.

Sajogyo (2006) mengemukakan bahwa, di pedesaan Jawa tak ada kecenderungan orang kaya di lapisan atas memperluas milik tanah secara menyolok, mungkin karena memang investasi dalam pertanian dinilai kurang menarik di banding sektor lain, atau cukup dilakukan diatas lahan sewaan. Dilain pihak rumah tangga lapisan bawah terdorong mempertahankan secara gigih milik tanah yang sempit.

Teori yang dikemukakan Sajogyo, tidak relevan dengan fenomena yang terjadi pada kedua lokasi penelitian, karena ternyata petani kaya di lapisan atas, kecenderungannya memperluas lahan sawah miliknya dan berinvestasi pada usahatani padi sawah. Hal ini disebabkan karena alasan padi sawah

jika dikelola dalam jumlah besar pasti menguntungkan. Pada aspek budaya, bagaimana pun kita hidup pasti butuh makan, jadi paling tidak petani akan berusahatani padi sawah, minimal ada untuk konsumsi keluarga. Bagi petani lapisan bawah, kecenderungan melepas lahan yang sempit karena tidak dapat mengimbangi input teknologi baru yang mahal, lalu ia sendiri akan menjadi penggarap dan buruh tani di lahan petani lain. Dengan menjadi penggarap dan buruh tani, minimal mereka punya jaminan keamanan pangan dari pemilik modal (patron).

Proses bertahan hidup bagi petani kecil dan perempuan cikal bakalnya berawal ketika teknologi baru dikembangkan pada kedua desa penelitian dan berefek pada dimensi ekologi petani. Teknologi baru telah menyingkirkan bibit lokal karena harus digantikan dengan bibit unggul, pupuk dan pestisida yang sifatnya alami telah digantikan dengan pupuk dan pestisida sintetis, menjadikan petani semakin besar ketergantungannya pada input dari luar.

Dalam kondisi demikian, tentunya petani akan memilih input-input produksi yang mudah diperoleh, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Bibit yang dibeli juga dapat langsung ditanam, begitu pun dengan pupuk dan pestisida lainnya lebih praktis dan lebih mudah digunakan. Tetapi petani lupa kalau pengambilan keputusan dan tindakannya akan berefek pada lingkungan hidup dimana ia berada. Penggunaan input kimiawi secara terus menerus, mengakibatkan ketersediaan unsur hara pada tanaman berkurang dan struktur tanah menjadi rusak. Kebijakan pemerintah pun di awal

perkembangan teknologi tidak mempertimbangkan dampak ekologi seperti ini, pertimbangan pemerintah semata-mata karena faktor dimensi ekonomi

Berdasarkan dimensi ekonomi yang menjadi orientasi profit, membuat perilaku petani besar saat itu mempunyai pikiran bagaimana penerapan teknologi baru (revolusi hijau) mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Fenomena tersebut hanya direspon oleh petani berdasi (petani kaya) karena pada level petani tersebut yang mempunyai akses modal dalam berusahatani.

Dimensi sosial dan aspek manusia dipandang sebagai seperangkat batasan sosial dan kultural yang dapat diatasi melalui penyebaran teknologi pertanian di wilayah pedesaan, ditambah dengan suntikan modal ke dalam bentuk produksi non kapitalis dan non komersial. Misalnya, perekonomian uang (monetisasi) maju dan pesat, serta pasar dimana barang dapat dijual dengan tunai. Namun, upaya memasukkan faktor manusia tetap melihat manusia sebagai penerima pasif pembangunan, dimana manusia adalah perempuan dan laki-laki yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.

Model pembangunan dominan dipandang sebagai rekayasa laki-laki. Pembangunan ekonomi dianggap merugikan baik bagi perempuan maupun lingkungan karena mengabaikan pengetahuan lokal, khususnya pengetahuan perempuan. Menurut Mies dan Shiva (2005), pembangunan ekonomi semacam ini serupa dan sejalan dengan subordinasi sosial perempuan.

Subordinasi sosial perempuan inilah yang menjadi bentuk dari proses-proses termarginalkannya perempuan. Pembangunan pertanian sebagai penyebabnya, dapat dilihat pada hilangnya aktivitas perempuan dalam pekerjaan pertanian padi sawah. Terdapat perubahan relasi gender, bertambahnya beban kerja perempuan dan terampasnya kreativitas mereka dapat dilihat sebagai proses keterpinggiran (marginalisasi).

Keterpinggiran mencerminkan kegagalan suatu sistem dalam masyarakat dalam mengalokasikan sumberdaya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Hermanto, 1992). Perempuan adalah kelompok masyarakat yang menerima ketidakadilan. Fenomena di lapangan telah menunjukkan bahwa, teknologi pertanian membawa dampak pada penghilangan kerja, perubahan pola kerja dan peminggiran pekerjaan perempuan.

Adopsi teknologi baru dalam bidang pertanian juga telah membuat penguasaan pekerjaan beralih ke tangan laki-laki, karena perempuan tidak dibekali keterampilan sebagai bagian dari teknologi. Akibatnya, perempuan akan mengeluarkan biaya produksi yang besar karena harus mengupah laki-laki untuk membajak (menyewa traktor), melakukan pemupukan, dan menyemprot pestisida.

## 2. Adaptasi Perempuan

Strategi adaptasi perempuan disesuaikan dengan peluang yang tersedia di desa dan aspek budaya. Bagi perempuan di Desa Sereang, strategi adaptasi yang dilakukannya adalah; (1). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi sebagai buruh sabitan. (2). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi buruh sabitan dan berdagang kecil-kecilan di pasar. (3). Satu kasus rumah tangga menempuh buruh sabitan dan membuka warung di depan rumahnya. Informan MNI misalnya, strategi yang ditempuh menjadi buruh sabitan tidak lain karena untuk menambah penghasilan dari usahatani padi yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. MNI mengikuti kelompok dross dimana dross dioperasikan, ia kadang keluar ke Kabupaten Wajo dan Palopo melakukan kegiatan panen. Begitu pun dengan SMI dan CNB, keduanya bekerja sebagai buruh sabitan sejak dross ada di Sidrap. Strategi ini ditempuh untuk mempertahankan kelangsungan hidup anggota keluarganya. Bagi SMI dan CNB, kegiatan panen yang dilakukannya juga mengikuti kelompok dross, hanya saja SMI dan CNB sering berpindah-pindah kelompok dross mencari kelompok dross yang bisa memberikan upah yang layak menurut mereka karena tidak terikat pada satu kelompok dross. Ketika keduanya tidak bekerja sebagai buruh sabitan, ia akan berdagang dan membuka warung di depan rumahnya. Berbeda dengan Ma'ni, ia tidak pernah berpindah-pindah kelompok dross karena sejak awal sudah terikat dengan adanya tambahan pekerjaan sebagai sekretaris dross,

yang memberikan tambahan upah lebih besar dibandingkan upah butuh sabitan lainnya.

Desa Passeno, adaptasi yang dilakukan perempuan; (1). Satu kasus membuka warung di depan rumahnya dan (2). Satu kasus kembali ke rumah tangga mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya (domestik rumah tangga). Informan Indo SNI misalnya, sejak ada revolusi hijau yang menjadikan posisinya menjadi lemah karena tidak mampu mengimbangi biaya produksi yang mahal, sejak itu ia membuka warung di depan rumahnya, yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti; gula, teh, kopi, indomie dan air kemasan dan lain-lain. Bagi informan Indo RAP, lain lagi sejak ada revolusi hijau ia tidak pernah lagi ke sawah, ia lebih memilih kembali mengurus anak dan suaminya. Akan tetapi, pilihan Indo RAP bisa seperti ini karena ia masih ditunjang penghidupannya oleh suaminya yang dianggapnya sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pencarian nafkah keluarga.

Strategi penghidupan perempuan seperti nampak pada aktivitas yang dilakukan pada kasus perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno mempunyai kecenderungan mengarah pada penghidupan bertahan hidup "*survival*". Tidak dijumpai adanya aktivitas penghidupan yang mengarah pada aktivitas memperkuat ekonomi rumah tangga secara komersil, tetapi aktivitas yang dilakukannya hanya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga yang mengutamakan pola aktivitas penghidupan yang subsisten.

Ellis (dalam Manule, 2008) mengatakan bahwa, dalam konteks rumah tangga dan komunitas, strategi penghidupan yang dilakukan adalah strategi bertahan hidup (survival strategies), mempertahankan kondisi mata pencaharian yang dimiliki dengan derajat hidup yang sangat adaptif.

Teori Ellis di atas relevan untuk disimak dalam situasi komunitas perempuan pada kedua lokasi penelitian. Perempuan yang tergeser dan termarginalkan dari peran di pertanian padi sawah, mencermati perkembangan sistem pertanian padi sawah, perempuan telah menyadari keberadaannya yang secara kodrati berbeda dengan laki-laki, ditambah dengan aspek budaya, ketika mereka terpinggirkan mereka secara naluri mengambil sikap arif untuk menerima keterpinggiran yang dipahami sebagai suatu perubahan yang terjadi secara alamiah, dan menempuh strategi penghidupan yang tidak keluar dari sektor pertanian padi sawah. Selain itu, pilihan pekerjaan sebagai pedagang kecil-kecilan hanya sebagai suatu aktivitas yang tidak lebih membantu ekonomi rumah tangga dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan domestik rumah tangga.

Fenomena di atas berkaitan dengan aspek budaya di Sidrap yang tergolong "etnik bugis". Bagi perempuan bagaimana pun adanya, maka ia akan kembali ke rumah tangga mengerjakan pekerjaan domestik seperti; mengasuh anak, mencuci, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya yang tak pernah ternilai dengan uang.

Menurut Cohen (dalam Manule, 2008), manusia dengan kesadaran (*cognitive*) dan daya pikirnya (*mind set*) merupakan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sepanjang manusia memiliki “*kebebasan berpikir*” dan “*otonomi tindakan*”, maka strategi merupakan wujud nyata tindakan manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Teori ini mendukung fenomena perempuan, yang kebetulan berada pada garis keturunan patrilineal. Pengaruh garis keturunan tidak sedikit membentuk perempuan mengambil keputusan yang bijak kembali ke pekerjaan domestik, dari pada mereka harus keluar dari desanya dan meninggalkan keluarga dalam jangka waktu yang lama. Bentuk tindakan perempuan ditempuh karena interaksi secara sadar dengan sistem lingkungan dan sistem sosial,

Pengakuan informan perempuan seperti SMI dan CNB, bahwa dengan revolusi hijau mau tidak mau harus diterima karena program pemerintah, kalau tidak diikuti mereka akan menjadi kelompok termarjinalkan. Termarjinalkannya perempuan sesungguhnya dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukannya berkaitan dengan pengelolaan usahatani, yang ditunjukkan dari relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan di pertanian padi sawah dan peluang-peluang ekonomi yang tersedia berkaitan dengan kegiatan itu.

Nilai-nilai tradisional yang runtuh pada sistem pertanian tradisional karena revolusi hijau akan berdampak pada laki-laki dan perempuan, tetapi perempuan akan merasakan dampak yang lebih dalam. Laki-laki tidak terlalu

merasakan efek revolusi hijau karena mempunyai akses pasar dan teknologi. Akibatnya, kebersamaan dan canda gurau yang sering terjadi pada saat pekerjaan panen dilakukan, seperti menumbuk padi dengan alat lesung menjadi hilang, karena alat lesung telah digantikan oleh mesin dross. Efek lebih jauh, perempuan akan mengeluarkan sejumlah tenaga dan materi yang lebih besar karena perempuan tidak mendapatkan tempat dan fasilitas pada kelompok tani.

Perubahan cara-cara pengelolaan dalam usahatani padi dari sistem tradisional ke sistem modern, yang berefek pada hilangnya kebersamaan petani, khususnya bagi perempuan membuat perempuan mempunyai akses pekerjaan terbatas, mau tidak mau perempuan lebih memilih untuk kembali melakukan aktivitas di lahan domestik dalam rumah tangganya.

Olehnya itu, perempuan yang tadinya bekerja sebagai buruh tani dalam proses produksi seperti; menanam, memberi pupuk tanaman dan melakukan penyemprotan terhadap hama dan penyakit akhirnya akan menggeser perempuan dari pekerjaan itu, sehingga peluang ekonomi bagi perempuan menjadi berkurang dan bahkan tertutup.

Adaptasi yang dilakukan perempuan ketika tergeser dari pekerjaan pada proses produksi usahatani padi sawah akan melakukan adaptasi dengan bekerja sebagai buruh tani dan mengambil keputusan kembali pada sektor pertanian padi sawah. Tetapi, bagi laki-laki bentuk adaptasinya menjadi

bervariasi karena akses mereka terhadap pasar dan teknologi masih lebih baik dibandingkan perempuan.

Momsen (dalam Mustafainah, 2004), perubahan teknologi dalam proses-proses pasca panen mungkin menghilangkan pendapatan perempuan dari tugas yang dulunya mendapatkan bayaran. Meskipun hubungan itu tidak sederhana tetapi dapat dilihat di banyak tempat teknologi dan hasil pertanian lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Berikut ini penuturan dari informan Indo. RAP.

#### Kasus 19

*“Sejak ada dross, saya tidak pernah lagi keluar bekerja cuma bapak saja yang pergi jadi sudahmi saya pasrah saja. Dulu, penghasilan yang saya peroleh banyak, dan banyak kerabat yang bantu. Misalnya, tiba waktu menanam yang dilibatkan adalah mereka dan kalau berhasil setelah panen kita beri dia gabah 1 – 2 ember gabah. Kita gembira, kita kasi gabah bukan sebagai upah tapi sekedar balas jasa. Lain lagi, kalau dia bantu massangkih kita ditambah lagi gabahnya, jadi banyak hasil yang mereka peroleh.” (Wawancara: 13 Maret 2007).*

Dari kasus di atas nyata terlihat bahwa teknologi telah menggeser aktivitas perempuan yang telah menjadi manajer dalam usahatannya, khususnya dalam kegiatan pembagian hasil panen. Akhirnya, mereka tidak lagi ke sawah dan tergeser ke ranah domestik. Sebelum masuknya dross, ia masih memiliki aktivitas di sawah. Sesudah dross masuk di wilayahnya, pekerjaannya digantikan oleh pemilik dan pengusaha dross.

Akhirnya, Indo RAP tidak memiliki lagi aktivitas di sawah. Ia sepenuhnya beralih mengerjakan pekerjaan domestik tanpa diupah. Bahkan lebih jauh, ia

harus mencari strategi hidup agar kebutuhan keluarganya tercukupi sampai panen berikutnya. Oleh karena itu, ia membuka warung dibawah kolong rumahnya untuk membantu suami dalam memperoleh nafkah menghidupi ke tiga orang anaknya.

Meningkatnya perempuan yang kembali mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga yang tanpa lahan sebagai penopang hidup dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, menemukan dirinya sebagai barisan pekerja perempuan terpukul, yang bekerja apa saja untuk mendapatkan upah. Dalam kerja mereka sebagai buruh tani sekali pun, perempuan merasakan sulitnya mendapatkan penghasilan yang memadai. Akibatnya, perempuan akan menjadi buruh keluarga yang tidak dibayar dan beban yang dipikul oleh perempuan semakin kompleks, karena selain bertanggung jawab atas konsumsi keluarga, uang belanja keluarga dan menjadi buruh keluarga. Hal ini jika diukur dari keberadaan perempuan dalam rumah tangga, tetapi perempuan di Desa Sereang dan Desa Passeno rela menerima keadaan ini karena adanya institusi perkawinan.

Kembalinya perempuan ke ranah domestik, membuat perempuan menjadi tinggi ketergantungannya pada laki-laki dan kehilangan kekuatan. karena terampas kebutuhan dasarnya. Kabeer (dalam Mustafainah, 2004) menyebutnya sebagai proses pemiskinan. Terpenuhinya kebutuhan dasar lebih dari sekedar bertahan hidup. Manusia akan terpenuhi kebutuhan dasarnya apabila ia tidak bergantung, tidak terisolir, dan tidak kehilangan

kekuatan, dapat berpartisipasi dalam keluarga dan masyarakat. Hilangnya kebutuhan dasar perempuan berarti terjadi proses pemiskinan pada perempuan.

Adaptasi perempuan yang terjadi di Sereang dan Passeno, telah membuktikan bahwa perempuan di kedua desa penelitian tidak melakukan adaptasi keluar wilayahnya, akan tetapi mereka beradaptasi dengan lingkungan pertanian padi sawah yang ada di sekitarnya, apakah ia sebagai buruh sabitan yang mengikuti kelompok dross, seperti informan SMI dan CNB ataukah mereka akan kembali ke rumah tangga bekerja sebagai buruh keluarga yang tidak dibayarkan, seperti Indo RAP.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ada sebuah ciri khas bagi perempuan di Sereang dan Passeno, ketika mereka tergeser dari aktivitas pertanian padi sawah seperti menanam, memupuk dan menyang, bahkan sebagai manajer dalam usahatani, mereka akan beradaptasi kembali dalam bidang pertanian padi sawah, yakni sebagai buruh tani ketika pekerjaan panen sudah tiba. Tidak ditemukan adanya strategi adaptasi perempuan yang keluar dari wilayahnya untuk bermigrasi, baik di Sereang mau pun di Passeno. Mereka umumnya tidak meninggalkan wilayahnya, paling jauh mereka menyeberang kabupaten mengikuti dross, ketika ada pekerjaan panen di luar desanya. Ciri ini memberi makna bagi peneliti bahwa ciri khas yang terjadi di lokasi penelitian berkaitan dengan faktor budaya, sebagai etnis bugis mereka mempunyai harga diri yang dijunjung tinggi oleh mereka.

Blumer (dalam Ufford, 2004)) menyatakan bahwa, pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain. Gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu. Manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang menyatakan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses '*self-indication*'. *Self-indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberi makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

Peneliti mencoba menganalisis, apakah menetapnya perempuan di desanya karena peluang diluar desanya tidak ada, seperti misalnya perempuan di Jawa ketika tergeser dari pertanian padi sawah, ia lari ke sektor jasa dengan menjadi tukang batu dan sebagainya. Pengakuan salah seorang informan mengatakan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki dan keadaan ini diterima sebagai sebuah kepasrahan. Fenomena ini diperkuat oleh Pelras (2004) bahwa, orang bugis dikenal sebagai orang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila perlu, demi mempertahankan kehormatan, mereka bersedia melakukan tindak kekerasan. Namun demikian, dibalik sifat keras itu, orang bugis juga

dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menjunjung tinggi rasa kesetiakawanan.

Dalam kehidupan masyarakat bugis sendiri, interaksi sehari-hari pada umumnya berdasarkan sistem patro-klien, sistem kelompok kesetiakawanan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya yang saling kait mengait dan bersifat menyeluruh. Namun demikian, mereka tetap memiliki rasa kepribadian yang kuat. Meskipun orang bugis memiliki sistem hierarkis paling rumit dan tampak kaku, akan tetapi pada sisi lain prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial tinggi, merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial kemasyarakatan mereka. Ciri khas yang saling berlawanan inilah yang membuat orang Bugis memiliki mobilitas tinggi. Tidak pelak lagi, kemampuan mereka untuk berubah dan menyesuaikan diri merupakan modal terbesar yang memungkinkan mereka dapat bertahan dimana-mana. Walaupun mereka terus menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, orang bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitas "*kebugisan*" mereka.

Bagi perempuan yang menggantungkan hidup sebagai buruh tani, interaksi yang terjadi antara buruh tani dengan pemilik lahan adalah ikatan patron-klien, dimana pemilik lahan akan memberikan bantuan secara ekonomi kepada buruh tani, jika mereka mendapatkan kesulitan ekonomi seperti; kebutuhan untuk biaya sekolah anak-anaknya dan biaya hajatan yang tidak bisa terelakkan dalam kehidupan komunitas mereka. Pinjaman ini

akan dibayar kemudian sesudah pekerjaan panen pada musim tanam berikutnya. Posisi pemilik lahan sebagai patron telah digantikan posisinya oleh pengusaha dross sesudah alat panen modern digunakan.

Dalam hal konsumsi dan gaya hidup perempuan di Desa Passeno, karena posisi mereka sebagai buruh sabitan tidak memungkinkan untuk hidup konsumtif, maka gaya hidup mereka pun tidak banyak berubah dari sebelumnya. Rumah mereka hanya terdiri dari rumah panggung yang nampak dari luar sangat sederhana, terbuat dari kayu dan kadang dengan dinding yang dilapisi tripleks. Kondisi ini pun terjadi di Desa Sereang, tidak jauh berbeda dengan Desa Paseno. Satu hal yang diakui perempuan di kedua lokasi penelitian, bahwa kalau sudah cukup untuk makan mereka sudah bersyukur, seperti yang dikemukakan CNB berikut ini:

#### *Kasus 20*

*“.....Saya tidak pernah berpikir untuk kebutuhan yang lain-lain, cukup untuk makan saja sudah bersyukur karena kehidupan sekarang sangat susah. Selain itu, ada yang kasi kerja kita saja sekarang ini sudah bersyukur, karena sudah banyak tenaga kerja dari luar, jadi kita bersaing juga dengan mereka untuk bekerja” (Wawancara: 3 Maret 2007)..*

Fenomena diatas memperlihatkan kepasrahan mereka dalam mengarungi kehidupan ditengah-tengah maraknya globalisasi yang mengharuskan mereka masuk dalam arena itu, yang sesungguhnya mereka sendiri belum siap untuk itu.

Bagi perempuan yang berada pada level menengah ke atas, pola konsumtif dan prestise sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Indo RAP

misalnya, dahulu kalau sudah panen maka ia akan ke makassar membeli televisi, kulkas dan alat-alat rumah tangga yang dapat dipajang di rumahnya. Anak-anaknya yang berjumlah tiga orang pun, diantaranya dibelikan motor karena di sekitar desanya sekarang anak-anak sudah banyak yang punya motor. Indo RAP dan suaminya pun telah menunaikan ibadah haji. Berikut penuturan Indo RAP kepada peneliti :

*Kasus 21*

*“Dulu memang saya berusaha menabung untuk pergi haji, karena di Sidrap ini kalau kita tidak haji tidak dihormati ki orang, tapi kalau kita sudah haji merupakan kebanggaan dan ada pesta misalnya, kita dikasi tempat duduk di depan” (Wawancara: 19 Maret 2007).*

Fenomena di atas menggambarkan bahwa pengakuan atau prestise dari masyarakat sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Pengamatan peneliti pun sekilas melihat bahwa dikebanyakan masyarakat di kedua lokasi penelitian, jika dilihat dari penampakan rumahnya terdiri dari rumah panggung dengan perabot yang sederhana, tapi pemiliknya rata-rata sudah bergelar haji. Indikator sosial seperti ini memberi pemahaman kepada peneliti bahwa sesungguhnya prestise itu penting dan membawa makna tentang keberadaan mereka ditengah-tengah komunitasnya.

### **3. Rangkuman**

Strategi adaptasi petani kecil di Desa Sereang adalah; (1). Petani penggarap dan buruh tani/sabitan (55,55 %), (2). Perdagangan dan

pertukangan (26,85 %), (3). Tenaga Kerja Indonesia (5,56 %). (4). Tukang Ojek (12,04).

Dari sampel rumah tangga petani kecil di Desa Sereang telah memperlihatkan strategi penghidupan petani kecil yang ditempuh mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*". Strategi penghidupan bertahan hidup "*survival*" dapat dilihat dari beberapa strategi yang ditempuh petani kecil, meliputi: (1). Strategi penghidupan sebagai petani penggarap dan buruh tani, karena lahan sempit mereka akan menambah penghasilannya dengan cara menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil, maka kehidupan pada level subsistensi masih dapat dipertahankan (2). Strategi penghidupan sebagai pedagang dan tukang (kayu dan batu) memungkinkan karena pekerjaan di sawah tidak menuntut waktu terlalu banyak. (3). Strategi tukang ojek, ditempuh petani kecil karena secara langsung dapat menambah pendapatan rumah tangga. (4). Strategi penghidupan sebagai TKI ditempuh dengan pertimbangan pendapatan usahatani padi sawah tidak mencukupi kebutuhan anggota rumah tangganya.

Di Desa Passeno, strategi adaptasi petani kecil adalah; (1) Petani penggarap dan buruh tani /sabitani (50,00 %). (2). Perdagangan dan pertukangan (12,73 %), (3). Tukang ojek (28,18 %), (4). Tenaga Kerja Indonesia (6,36 %) dan (5). Penambang emas (2,73 %). Strategi penghidupan petani kecil ditempuh untuk mempertahankan keberlanjutan hidup anggota keluarganya.

Strategi penghidupan rumah tangga petani kecil di Desa Passeno kecenderungannya mengarah pada strategi penghidupan bertahan hidup “*survival*”. Pola aktivitas petani kecil sebagai strategi penghidupan bertahan hidup “*survival*” diperlihatkan ketika mereka menempuh strategi seperti; (1). Petani penggarap dan buruh tani, adalah pilihan penghidupan yang memanfaatkan asset lahan yang dimiliki (walaupun sempit) minimal masih dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. (2). Strategi kedua, sebagai pedagang dan tukang dimanfaatkan oleh mereka untuk menambah penghasilan karena usahatani padi sawah tidak lagi dapat diandalkan sebagai penopang hidup satu-satunya. (3). Strategi ketiga, sebagai tukang ojek dapat memberikan jaminan pendapatan per hari di sela-sela pekerjaan di sawah. (4). Strategi sebagai TKI ditempuh karena melihat para migran yang telah berhasil bekerja di Jepang, Korea, Malaysia dan Singapura. (5). Strategi sebagai penambang emas, dilakukan secara musiman yakni setiap enam bulan sekali.

Berbeda dengan lapisan petani besar pada kedua lokasi penelitian. Di Desa Sereang, terdapat empat kasus rumah tangga petani besar dan di Desa Passeno terdapat dua kasus petani besar, yang memperlihatkan kecenderungan yang mengarah pada strategi penghidupan “*akumulasi*”. Strategi penghidupan akumulasi diperlihatkan oleh kasus dari aktivitas mereka seperti; (1). Menambah luas kepemilikan lahan, (2). Berinvestasi pada usahatani padi dan pengusaha mesin dross (power thresher), serta

pabrik penggilingan padi. (3). Membuka toko/swalayan yang menjual barang campuran untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagi perempuan di Desa Sereang, strategi adaptasi yang dilakukannya adalah; (1). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi sebagai buruh sabitan. (2). Satu kasus rumah tangga menempuh strategi buruh sabitan dan berdagang kecil-kecilan di pasar. (3). Satu kasus rumah tangga menempuh buruh sabitan dan membuka warung di depan rumahnya.

Di Desa Passeno, strategi adaptasi yang dilakukan perempuan; (1). Satu kasus membuka warung di depan rumahnya dan (2). Satu kasus kembali ke rumah tangga mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya (domestik rumah tangga).

Strategi penghidupan perempuan seperti nampak pada aktivitas yang dilakukan pada kasus perempuan di Desa sereang dan Desa Passeno mempunyai kecenderungan mengarah pada penghidupan bertahan hidup "*survival*". Tidak dijumpai adanya aktivitas penghidupan yang mengarah pada aktivitas memperkuat ekonomi rumah tangga secara komersil, tetapi aktivitas yang dilakukannya hanya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga yang mengutamakan pola aktivitas penghidupan yang subsisten.

Tabel 27. Bentuk, Proses, Lama dan Hasil/Dampak Adaptasi Petani Kecil

No.	Bentuk Adaptasi	Proses Adaptasi	Lama Adaptasi	Hasil/Dampak Adaptasi
1.	Menjadi Petani Penggarap dan Buruh Tani/sabitan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karena lahan petani kecil sempit, maka ia menyakap lahan petani lain dengan sistem bagi hasil</li> <li>- Karena pendapatan dari menggarap lahan tidak mencukupi kebutuhan anggota rumah tangga, maka ia bekerja sebagai buruh tani/sabitan pada kelompok dross (power thesher)</li> </ul>	<p>3-4 bulan</p> <p>2-4 minggu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan strategi bertahan hidup “suvival” pada level subsistensi.</li> <li>- Mempertahankan strategi bertahan hidup “survival” pada level substansi.</li> </ul>
2.	Menjadi Pedagang dan Tukang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketika pekerjaan di sawah telah selesai untuk strategi bertahan hidup “survival” ekonomi rumah tangga.</li> </ul>	2-3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat dan mempertahankan ekonomi rumah tangga, karena terpenuhinya kebutuhan konsumsi anggota rumahtangganya</li> </ul>
3.	Menjadi Tukang Ojek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani kecil yang tidak mampu membiayai usahatani padi, akhirnya</li> </ul>	Setiap hari, disela-sela kegiatan disawah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi anggota rmh tangganya dapat terpenuhi</li> </ul>

		menjual lahannya. Hasil penjualan lahan digunakan untuk membeli motor dan dijadikan mata pencaharian sebagai tukang ojek. Ketika pekerjaan disawah telah dimulai, maka ia akan kembali bekerja disawah sebagai penggarap dan buruh tani/sabitan.		
4.	Menjadi Tenaga kerja indonesia (TKI)	- Petani kecil yang tidak mampu membiayai usahatani padi, menjual lahannya dan dari hasil penjualan lahan dijadikan modal untuk menjadi TKI - Petani Kecil meminjam uang kepada kerabatnya untuk biaya (modal) menjadi TKI	1 -2 Tahun	- Memperkuat dan memantapkan ekonomi rumahtangga, karena kebutuhan primer (konsumsi) dan kebutuhan sekedar (perabot rumahtangga dan membangun rumah) dapat terpenuhi.
5.	Menjadi Penambang	- Petani kecil melakukan	6 bulan	- Petani kecil dapat bertahan

	Emas	adaptasi ini ketika pekerjaan disawah telah selesai, ia akan kembali ke desanya ketika pekerjaan disawah dimulai lagi.		hidup minimal pada level substansi
--	------	--	--	------------------------------------

Tabel 28. Bentuk, Proses, Lama dan Hasil/Dampak Adaptasi Perempuan

No	Bentuk Adaptasi	Proses Adaptasi	Lama Adaptasi	Hasil/Dampak Adaptasi
1	Menjadi Buruh Tani/sabitan	☞ Bergabung pada kelompok dross untuk melakukan pekerjaan panen, baik didesanya maupun diluar desa (menikuti kelompok dross ke daerah tujuan seperti pinrang, wajo dan palopo	1 – 4 minggu, tergantung kontak antara pengusaha dross dengan pemilik sawah	☞ Mempertahankan dan memantapkan ekonomi rumah tangga, dengan terpenuhinya kebutuhan pokok anggota keluarga
2	Menjadi Pedagang dan domestik rumah tangga (RMT)	☞ Ketika perempuan tidak berperan dalam pertanian padi sawah, maka strategi adaptasi yang dilakukan perempuan membuka warung didepan rumahnya. Strategi adaptasi ini ditempuh karena perempuan tidak perlu meninggalkan rumahnya	Setiap hari	☞ Membantu dalam memperkuat ekonomi rumah tangga
		☞ Hilangnya peran perempuan dalam kegiatan pertanian padi sawah, maka perempuan memilih kembali kerumah tangga mengurus anak dan suami.		☞ Dampak sosial, terciptanya hubungan harmonisasi dalam rumah tangga ☞ Memantapkan peran ibu rumah tangga

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

- (1). Proses perubahan teknis yang berlangsung selama revolusi hijau telah meminggirkan petani kecil dan perempuan karena; (1) Pemakaian input modern biaya produksinya mahal; (2) Penggantian alat panen ani-ani menjadi sabit mengurangi tenaga kerja laki-laki dan perempuan; (3) Penggunaan mesin dross pada perontokan padi mengurangi tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, proses perubahan sistem ekonomi meminggirkan petani kecil dan perempuan karena; (1) Orientasi produksi dari subsisten menjadi komersil; (2) Pendapatan dari pertanian padi sawah makin kecil; (3) Pekerjaan luar pertanian membutuhkan pendidikan dan skill. Sedangkan proses perubahan struktur sosial meminggirkan petani kecil dan perempuan karena; (1) Memudarnya hegemonisasi diantara petani; (2) Terjadinya penajaman stratifikasi sosial dan polarisasi sosial (3) Ketergantungan pada pemilik modal tinggi.
- (2). Revolusi hijau dimaknai oleh petani kecil dan perempuan sebagai hal yang tidak menguntungkan karena revolusi hijau telah menggeser petani kecil dan perempuan dari perannya pada pertanian padi sawah (aspek ekonomi). Selain itu, revolusi hijau telah memudahkan dan

menghilangkan nilai-nilai sosial ikatan solidaritas dan kegotong royongan (aspek sosial).

- (3). Bentuk dan proses adaptasi yang ditempuh petani kecil dalam menghadapi keterpinggiran adalah strategi survival melalui; bekerja sebagai pa'dross, pedagang, tukang (kayu/batu), tukang ojek, TKI dan penambang emas. Sedangkan strategi adaptasi yang ditempuh perempuan adalah strategi survival melalui; bekerja sebagai pa'dross, membuka warung di depan rumahnya dan kembali pada domestik rumah tangga.

### **B. Implikasi**

- (1). Ketergeseran dan keterpinggiran petani kecil dan perempuan memberi efek pada meluapnya tenaga kerja yang tidak berpenghasilan di pedesaan. Akibatnya, beban pembangunan bertambah karena beban hidup per keluarga petani semakin berat, di satu sisi pembangunan ekonomi secara keseluruhan tercapai, namun efek pada pembangunan manusia dan ekologi terabaikan.
- (2). Polarisasi sosial yang terjadi di Desa Sereang dan Desa Passeno yang timbul karena ketimpangan kepemilikan lahan yakni terakumulasinya kepemilikan lahan pada petani besar, membuat petani kecil dan perempuan semakin tidak punya akses terhadap lahan. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh semakin kecil, hanya sebatas pemenuhan

konsumsi anggota rumah tangga pada level subsistensi (bertahan hidup).

- (3). Terbatasnya pekerjaan luar pertanian yang ada di desa, maka adaptasi petani kecil dan perempuan menyesuaikan diri dengan jenis mata pencaharian alternatif yang tersedia di desa, seperti; petani penggarap dan buruh tani/sabitan, perdagangan dan pertukangan, tukang ojek, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan penambang emas. Akibatnya, kesejahteraan bagi mereka tidak akan tercapai karena adaptasi mereka sebatas peluang yang ada di desa dan paling jauh mereka bermigrasi sebagai penambang mas dan TKI. Oleh karena itu, *setting* pembangunan di pedesaan tidak berorientasi fisik semata, tetapi juga berorientasi pada pengembangan infrastruktur, kelembagaan dan teknologi yang berbasis pada kearifan lokal dan karakteristik ekologi setempat. Selain itu, membangun dan memperjuangkan sistem perdagangan yang adil yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga dan komunitas lokal atau pasar lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Publikasi :*

- Anonymous, 2007. *Produksi Padi Sawah di Sulawesi Selatan*. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Ambler S. John. 1992. *Irigasi di Indonesia; Dinamika Kelembagaan Petani*. LP3ES. Jakarta.
- AR, Hanani, dkk. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Pemikiran Baru*. Laperia, Yogyakarta.
- Arivia Gadis. 2006. *Feminisme; Sebuah Kata Hati*. Kompas. Jakarta.
- Brooks, Ann. 1997. *Posfeminisme dan Cultural Studies*. Jalasutra, Yogyakarta.
- Brewer Anthony. 2000. *Kajian Kritis; Das Kapital Karl Marx*. Teplok Press. Yogyakarta.
- Carriere Elizabeth, Hardjono Joan dan Mukherjee Nilanjana. 2002. *Masyarakat, Kemiskinan dan Mata Pencaharian : Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*. DFID. The World Bank. Jakarta.
- Chambers Robert. 1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal) ; Memahami Desa Secara Partisipatif*. Oxfam. Jakarta.
- Cernea, M. Michael. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan*. Publikasi Bank Dunia. UI – Press, Jakarta.
- Chaniago A. Abdrinof. 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Collier, William, L. Dkk. 1974. *Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa*. Prisma No. 3. LP3ES. Jakarta.
- Connell, R.W. 1987. *Gender and Power: Society, The Person and Sexual Politics*. Polity Press.
- Dasgupta, Partha dan Serageldin, Ismail. 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank, Washington, D.C.

- Esman, J. Milton and Uphoff, T. Norman. 1988. *Local Organization: Intermediaries in Rural Development*. Cornell University Press, London.
- Fahmid, I.M. 2004. *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru*. Sandi – Kota, Jakarta.
- Fakih, Mansour. 2001. *Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Insist Press, Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Qalam, Yogyakarta.
- .2002. *Trust : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Qalam, Yogyakarta
- Geertz Glifford. 1986. *Mojokuto ; Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta.
- Goddman, David and Watts, J. Michael. 1997. *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*. The British Library, London.
- Grijus Mies, Thamrin Jim dan Gunawan Rinto. 1995. *Dilema Petani Plasma*. Akatiga Bandung.
- Grootaert, Christiaan and Bastelaer, Van, Thierry. 2002. *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. The World Bank, Washington, D.C.
- Guevara, Cha. 2000. *Revolusi Rakyat*. Teplok Press, Yogyakarta.
- .2005. *Sang Revolusioner*. Resist Book, Yogyakarta.
- Hayami dan Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hadimulyo dan Maryono .1989. *Pengalaman Riset Aksi di Indonesia*. Tarsar Jaya, Jakarta.
- Hamid Pananrangi. 1985. *Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan. Makassar.

- Hart, Gillian. 1986. *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*. University of California Press, Los Angeles London.
- Hefner, W. Robert. 1990. *The Political of Mountain Java: An Interpretive History*. University of California Press, Los Angeles London.
- Hudayana, 2005. *Negara Ada Karena Ada Desa*. Bulletin Mudik. Edisi 4 Juli.
- Istiadi Agung. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Yappika. Jakarta.
- Triyono, Lambang dan Nasikun. 1992. *Proses Perubahan Sosial Di Desa Jawa; Teknologi, Surplus Produksi, dan Pergeseran Okupasi*. Universitas Gadjah Mada dan Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Li Guoging. 2004. *Transformation of Chinese Rural Society in The 1990's Resurgence and Overall Privatization reform of The Village Collective Enterprises*. Institut of Sociology, Chinese Academy of Social Science (CASS).
- Margareth. 1960. *Cultural Patterns and Technical Change*. The New American Library, New York.
- Mahardika Timur. 2001. *Strategi Tiga Kaki; Dari Pintu Otonomi Daerah; Mencapai Keadilan Sosial*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Pelras Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Nalar Bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris. Jakarta.
- Perdue D. William. 1965. *Sociological Theory; Explanation, Parad and Ideology*. Palo Alto. California.
- Pelluso Lee Nancy. 2006. *Hutan Kayu, Rakyat Melarat*. Konphalindo. Jakarta.
- Poensioen, J.A. 1969. *The Analysis of Social Change Reconsidered*. The Hague, Mouton Paris.
- Poloma, M. Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational Peasant ; The Political Economy Of Rural Society In Vietnam*. University of California.
- Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerjasama dengan BKKBN Jakarta.
- Pranoto, W. Suhartono. 2001. *Serpihan Budaya Feodal*. Philosopy Press, Yogyakarta.
- Prasetyo YT. 2007. *Bertanam Padi Gogo Tanpa Olah Tanah*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Priyono Herry B. 2002. Anthony Giddens; Suatu Pengantar. Grafika Mardi Yuana. Bogor.
- Ufford van Q.P.dan Giri A.K. 2004. *Kritik Moral Pembangunan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Rahardjo, Judy. 2001. *Revolusi Hijau Musuh Rakyat*. Lephass, Makassar.
- Rahman, Abd. 2002. *Perubahan Sosial Ekonomi Petani Pedesaan di Kawasan Usaha Pabrik Gula Takalar*. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahman, Mappangaja, A. 1993. *Studi Pemanfaatan lahan Sawah pada Sentra Produksi Padi*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Bogor, Makassar.
- Rauf, La Ode Abdul. 1988. *Peranan Elit dalam Proses Modernisasi suatu Studi Kasus di Muna*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Riza .2005. *Jalan Berliku Perencanaan Partisipatif*. Bulletin Lesung. Edisi 3 Februari.
- Ritzer, George. 2003. *Teori Sosial Post – Modern*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- . 2006. *The Globalization of Nothing*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rigg, Jonathan. 2001. *More Than The Soil: Rural Change in Southeast Asia*. Essex Pearson Education and Prentice Hall, Singapore.

- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial*. Tiara Wacana, Jogjakarta
- Sajogyo. 1982. *Ekologi Pedesaan ; Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesi dan Institut Pertanian Bogor. Jakarta.
- 2006. *Ekososiologi; Deideologisasi Teori Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan sebagai Kasus Uji)*. Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Jogjakarta.
- Salman, Darmawan. 1995. *Arah Perubahan Sosial di Pedesaan Pasca Revolusi Hijau*. Analisis CSIS. Edisi Januari – Februari.
- Scott, J.C. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. LP3ES. Jakarta.
- 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Soekartawi. 2005. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. UI – Press. Jakarta.
- Sunarto Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. FE – UI. Jakarta.
- Suratiyah, Ken. 1991. *Pembangunan Pertanian dan Peranan Wanita di Pedesaan Jogjakarta dan Bali*. PPK UGM. Jogjakarta.
- Syamsuddin. 1994. *Pola Penguasaan Tanah, Hubungan Kerja pertanian Sawah dan Pengaruhnya Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Shiva, Vandana dan Mies, Maria. 2005. *Ecofeminism : Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. IRE Press, Jogjakarta.
- Shiva, Vandana. 1997. *Bebas Dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Yayasan Obor Indonesia dan Konphalindo, Jakarta.
- Schoorl. J.W. 1982. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suwarsono dan Y. So. Alvin .1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Subaedah, ST. 2003. *Penerapan Teknologi Pertanian Baru*. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar.

- Sosialismanto, Duto. 2001. *Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Laper Pustaka Utama, Jogjakarta.
- Sujito Arie. 2008. *Ironi Eksploitasi Atas Perempuan; Perempuan Desa Bangkit dan Berkiprah*. Bulletin Mudik. Edisi 8, Januari. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Jogjakarta.
- Suseno . 2000. *Pemikiran Karl Marx*. Sun., Jakarta.
- Smelser, T. Neil and Haferkamp, Hans. 1992. *Social Change and Modernity*. University of California Press, Los Angeles.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada, Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1990. *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa*. Prisma Nomor 2. LP3ES. Jakarta.
- Mikkelsen Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Murray Li, Tania .2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nope Marselin C.Y. 2005. *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Resist Book. Jogjakarta.
- Tiryakian, E.A. 1992. "Dialectics of Modernity : Reenchantment and Dedifferentiation as Counterprocesses", in H. Hafercamp and N.J. Smelser (Eds), *Social Change and Modernity*. University California Press, California.
- Tolentino, L. Lutgarda. 1998. *Modernity and Its Representation in Rural Sociology*. Queensland University of Technology, Brisbane Australia,
- Throsby, David . 2001. *Economics and Culture*. Cambridge. University Press, Amsterdam.
- Tanter, Richard dan Young, Kenneth. 1996. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Jellinek, Lea. 1995. *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. LP3ES, Jakarta.

- Jumin Basri Hasan. 1988. *Dasar-Dasar Agronomi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wibowo I. 2000. *Negara dan Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Stusi Cina. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan. 2001. *Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*. Jogjakarta.
- , 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma agraria*. Laperia Pustaka Utama. Jogjakarta. Perjuangan Warga Desa Memenuhi Kebutuhan
- Witoro. 2006; *Kedaulatan Pangan dalam Pembaharuan Desa*. Bulletin Mudik. Edisi 6, April. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Jogjakarta.
- Yin K. Robert. 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Young Kenneth, Tanter Richard. 1989. *Politik Kelas Menengah Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Yunus Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin; Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. PT. Cipta Lintas Wacana. Jakarta.
- Kitahara, Atsushi. 2000. *Theory And Reality of Asian Rural Change and Diversity*. Nagoya University, Japan.
- Kusumandaru . 2004. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme*. Jogjakarta: Resist Book, Jogjakarta.